



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.217, 2017

BKPM. Renstra Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan visi, misi dan agenda Presiden Republik Indonesia di bidang penanaman modal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan penganggaran yang berbasis pada program prioritas nasional, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 560), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN
2015-2019

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini membahas kondisi umum serta potensi dan permasalahan penanaman modal. Bagian Kondisi Umum akan membahas karakteristik perkembangan penanaman modal selama 5 (lima) tahun terakhir. Bagian Potensi dan Permasalahan membahas perkembangan domestik dan eksternal yang akan mempengaruhi kinerja penanaman modal serta permasalahan yang harus dihadapi.

1.1 Kondisi Umum Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi domestik dan eksternal. Perekonomian Indonesia keseluruhan periode 2010-2014 tumbuh cukup tinggi (rata-rata 5,8% atau lebih tinggi dari periode 2005-2009 yaitu 5,6%) namun dengan kecenderungan melambat sejak triwulan II/2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal periode (tahun 2010-2011) didorong oleh tingginya harga-harga komoditi (*commodities super cycle*) utamanya akibat meningkatnya permintaan komoditi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia khususnya Tiongkok (rata-rata 9,8%). Pada periode tersebut, perekonomian dunia tumbuh rata-rata 4,75% didorong oleh kebijakan *quantitative easing* Amerika.

Selanjutnya, normalisasi kebijakan moneter Amerika (*tapering off*), lambatnya pemulihan ekonomi kawasan Euro, melemahnya perekonomian Jepang dan melambatnya perekonomian Tiongkok mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013-2014. Melambatnya ekonomi dunia khususnya Tiongkok berdampak pada melemahnya harga-harga komoditi yang selanjutnya mengakibatkan turunnya ekspor Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2014 terutama didorong oleh pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yaitu rata-rata 6,8% dan ekspor barang dan jasa (periode 2010-2011). Peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar yang tercermin dari terus meningkatnya kontribusi PMTB dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu

dari 21,0% pada tahun 2004, 31,0% pada tahun 2010, menjadi 32,6% pada tahun 2014.

Perkembangan investasi yang dicatat BKPM secara berkala dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Proyek penanaman modal dikategorikan PMA jika terdapat saham warga negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah asing walaupun hanya 1 (satu) lembar saham. Pada periode 2010-2014, kinerja penanaman modal (PMDN dan PMA) sangat baik, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 28,7% atau lebih tinggi dari periode 2004-2009 yaitu 19,0%. Realisasi penanaman modal tumbuh dari Rp 56,9 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 136,0 triliun pada tahun 2009 dan mencapai Rp 463,1 triliun pada tahun 2014 (meningkat 3,4 kali lipat dibanding tahun 2009).

Perkembangan positif lainnya adalah semakin meningkatnya peran PMDN. Peran PMDN meningkat dari 27,2% (Rp 15,5 triliun) pada tahun 2004 menjadi 28,4% (Rp 38,6 triliun) pada tahun 2009 dan 33,7% (Rp 156,1 triliun) pada tahun 2014. Meningkatnya peran PMDN didorong oleh pertumbuhan PMDN yang lebih tinggi (rata-rata 32,9%) dibandingkan PMA (rata-rata 26,5%).

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA

Jenis Penanaman Modal	2004	Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I					Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Realisasi PMDN dan PMA (Rp triliun)	56,9	111,2	74,9	129,7	154,6	136,0	208,5	251,3	313,2	398,6	463,1
PMDN (Rp triliun)	15,5	30,7	20,8	36,2	20,4	38,6	60,5	76,0	92,2	128,2	156,1
% terhadap Total	27,2	27,6	27,6	27,9	13,2	28,4	29,0	30,2	29,4	32,2	33,7
PMA (Rp triliun)	41,4	80,5	54,1	93,5	134,2	97,4	148,0	175,3	221,0	270,4	307,0
Dalam US\$ miliar	4,6	8,9	6,0	10,4	14,9	10,8	16,2	19,5	24,6	28,6	29,2
% terhadap Total	72,8	72,4	72,4	72,1	86,8	71,6	71,0	69,8	70,6	67,8	66,3
Total Realisasi PMDN dan PMA per sektor (Rp triliun)	56,9	111,2	74,9	129,7	154,6	136,0	208,5	251,3	313,2	398,6	463,1
Primer (Rp triliun)	3,8	9,3	8,4	11,1	4,8	8,8	41,0	60,5	73,7	86,8	91,7
% terhadap Total	6,7	8,4	11,2	8,6	3,1	6,5	19,7	24,1	23,5	21,8	19,8
Sekunder (Rp triliun)	36,1	52,6	45,8	68,7	56,9	54,6	54,8	99,6	155,8	201,0	199,1
% terhadap Total	63,4	47,3	61,1	53,0	36,8	40,1	26,3	39,6	49,7	50,4	43,0
Tersier (Rp triliun)	17,0	49,3	20,7	49,9	92,9	72,6	112,7	91,2	83,7	110,8	172,3
% terhadap Total	29,9	44,3	27,6	38,5	60,1	53,4	54,1	36,3	26,7	27,8	37,2
Total Realisasi PMDN dan PMA per wilayah (Rp triliun)	56,9	111,2	74,9	129,7	154,6	136,0	208,5	251,3	313,2	398,6	463,1
Luar Jawa (Rp triliun)	20,4	31,1	21,9	33,9	20,3	25,1	68,5	103,2	137,6	168,4	199,8
% terhadap Total	35,9	28,0	29,2	26,1	13,1	18,5	32,9	41,1	43,9	42,2	43,1
Jawa (Rp triliun)	36,5	80,1	53,0	95,8	134,3	110,9	140,0	148,1	175,6	230,2	263,3
% terhadap Total	64,1	72,0	70,8	73,9	86,9	81,5	67,1	58,9	56,1	57,8	56,9

Keterangan: Kurs Rata-Rata 2004-2012 US\$ 1 : Rp 9.000,00
Kurs Tahun 2013 (Triwulan I dan Triwulan II) US\$ 1 : Rp 9.300,00
Kurs Tahun 2013 (Triwulan III dan Triwulan IV) US\$ 1 : Rp 9.600,00
Kurs Tahun 2014 (Triwulan I-II) US\$ 1 : Rp 10.500,00
Kurs Tahun 2014 (Triwulan IV) US\$ 1 : Rp 11.600,00

Kinerja penanaman modal dari sisi sektoral belum mendukung terjadinya transformasi ekonomi menuju industrialisasi, yang ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi sektor primer dari rata-rata 7,5% pada periode tahun 2005-2009 menjadi 21,8% periode tahun 2010-2014. Pertumbuhan penanaman modal yang tinggi pada sektor primer didorong oleh meningkatnya

harga komoditi dunia. Adapun, kontribusi sektor sekunder dan tersier masing-masing turun dari rata-rata 47,7% dan 44,8% pada periode 2005-2009 menjadi 41,8% dan 36,4% pada periode 2010-2014.

Sementara itu, kinerja penanaman modal dari sisi kewilayahan menunjukkan terjadinya perbaikan sebaran yang sangat signifikan. Kontribusi penanaman modal di luar Pulau Jawa meningkat dari rata-rata 23,0% pada periode 2005-2009 menjadi 40,6% pada periode 2010-2014. Peningkatan sebaran penanaman modal hampir terjadi di seluruh wilayah di luar Pulau Jawa. Peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan yaitu dari rata-rata 4,4% pada periode 2005-2009 menjadi 14,4% pada periode 2010-2014, disusul oleh Sulawesi dari 1,7% menjadi 5,6%, Papua dari 0,2% menjadi 4,0%, Bali dan Nusa Tenggara dari 1,0% menjadi 3,3%, Maluku dari 0,1% menjadi 0,7%. Penurunan kontribusi penanaman modal hanya terjadi di wilayah Sumatera yaitu dari 15,6% pada periode 2005-2009 menjadi 12,7% pada periode 2010-2014. Meskipun terjadi penurunan kontribusi penanaman modal di wilayah Sumatera, namun nilai penanaman modal di wilayah tersebut meningkat cukup tinggi (lebih dari 2 kali lipat). Meningkatnya sebaran penanaman modal di luar Pulau Jawa didorong oleh meningkatnya kegiatan penanaman modal di sektor primer.

Berdasarkan data realisasi penanaman modal periode 2010-2014, sekitar 42% dari total realisasi penanaman modal adalah perluasan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menanamkan modalnya dapat mengembangkan usahanya. Selanjutnya, Singapura (USD 26,0 miliar), Jepang (USD 12,1 miliar), Amerika Serikat (USD 7,4 miliar), Korea Selatan (USD 6,8 miliar) dan Belanda (USD 5,6 miliar) merupakan 5 (lima) negara asal penanaman modal terbesar pada periode 2010-2014.

Meningkatnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan penanam modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain ditopang dengan meningkatnya peringkat utang Indonesia oleh lembaga-lembaga pemeringkat utang, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Perkembangan Peringkat Utang Indonesia

Lembaga Pemeringkat Utang	2004	2005-2009	2010-2014
Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR)	B+	BB+	BBB-
Fitch Rating	B+	BB+	BBB-
R&I	B	BB+	BBB-
Standar and Poor (S&P)	B+	BB-	BB+
Moody's Investor Service	B3	Ba2	Baa3

Sumber: Bank Indonesia, 2014

Keterangan:

- B : Rentan terhadap bisnis yang merugikan
- BB, Ba : Kurang rentan dalam jangka pendek, namun menghadapi ketidakpastian
- BBB, Baa: *Investment grade*

Perbaikan peringkat utang Indonesia merupakan hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah, antara lain: (a) perbaikan iklim penanaman modal, (b) pengelolaan kebijakan makro ekonomi yang *prudent*, dan (c) penciptaan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.

Terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas politik dan keamanan, masuknya Indonesia dalam peringkat *investment grade*, dan berbagai upaya memberi citra positif kepada *opinion makers* telah mendorong peningkatan daya saing investasi Indonesia. Beberapa hasil survei lembaga pemeringkat internasional telah menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi, antara lain:

1. Survei yang dilakukan oleh *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) sejak tahun 2012, menempatkan Indonesia menjadi tiga besar negara tujuan investasi perusahaan manufaktur Jepang, bahkan pada tahun 2013 Indonesia menempati peringkat pertama.
2. *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) menempatkan Indonesia peringkat pertama dari negara-negara APEC sebagai tujuan investasi utama 3-5 tahun kedepan pada survei tahun 2013.
3. AmCham (*American Chamber for Commerce*) menempatkan Indonesia menjadi peringkat pertama tujuan investasi kawasan ASEAN.
4. UNCTAD menempatkan Indonesia pada peringkat 4 (empat) sebagai *top prospective host economic* tahun 2013-2015.
5. Survei *The Foreign Direct Investment Confidence Index* pada tahun 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat 9 sebagai negara tujuan FDI.
6. *World Economic Forum* menempatkan Indonesia pada peringkat 34 dari 144 negara dalam *Global Competitiveness Index* (GCI) tahun 2014-2015.

Meskipun Pemerintah telah melakukan berbagai rencana aksi untuk meningkatkan iklim usaha namun belum terjadi perbaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang signifikan. Survei *Ease of Doing Business* (EODB) 2015 yang dilakukan *World Bank-International Finance Corporation* (*World Bank-IFC*) masih menempatkan Indonesia pada peringkat 114. Meskipun telah terjadi perbaikan 3 (tiga) peringkat dibandingkan tahun sebelumnya namun peringkat tersebut masih tergolong buruk. Peringkat tersebut menempatkan Indonesia jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (peringkat 18), Filipina (peringkat 95), bahkan rata-rata kemudahan berusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik (peringkat 92). Selanjutnya, peringkat Indonesia dalam hal kemudahan memulai usaha (*starting a Business*) jauh lebih buruk yaitu peringkat 155 pada tahun 2015 meskipun telah terjadi sedikit peningkatan yaitu dari 158 di tahun 2014.

Untuk memperbaiki peringkat EODB, Pemerintah telah menerbitkan berbagai paket kebijakan. Paket kebijakan terakhir diumumkan pada bulan Oktober 2013 berupa 17 Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha. Rencana aksi tersebut mencakup 5 (lima) rencana aksi perbaikan memulai usaha, 2 (dua) rencana aksi kemudahan memperoleh akses listrik, 2 (dua) rencana aksi kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi, 2 (dua) rencana aksi percepatan penyelesaian perkara perdata perjanjian, 1 (satu) rencana aksi percepatan penyelesaian perkara kepailitan, 1 (satu) rencana aksi kemudahan pencatatan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, 3 (tiga) rencana aksi kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan, serta 1 (satu) rencana aksi mempermudah perolehan kredit.

Rencana aksi terkait memberikan kemudahan untuk memulai usaha (*starting business*) adalah:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial yang memuat penyederhanaan proses menjadi secara simultan 1 (satu) hari kerja dari semula pendaftaran ini selama 14 hari dan pendaftaran kepesertaan Jamsostek selama 7 (tujuh) hari (simultan);
2. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga proses dapat dilakukan 3 (tiga) hari secara simultan dari semula selama 15 hari;
3. Penerbitan Perda tentang PTSP dan pelimpahan kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP;
4. Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan modal dasar dan modal disetor, dan
5. Penyusunan naskah akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha diluar Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi oleh Kemenkumham.

Upaya yang dilakukan BKPM dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal antara lain:

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan *online tracking system*. Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku. Hingga akhir tahun 2014, jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah menyelenggarakan PTSP sebanyak 493 PTSP dan 343 PTSP diantaranya telah menerapkan SPIPISE. Tabel 1.3 menunjukkan Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan SPIPISE. Implementasi SPIPISE masih terkonsentrasi di KBI (Kawasan Barat Indonesia), yakni Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Tabel 1.3 Perkembangan Penyelenggaraan PTSP

No.	Daerah	Jumlah	Penyelenggaraan PTSP		Nomenklatur BPM-PTSP		Implementasi SPIPISE		Pendelegasian bagi yang sudah terbentuk		Urusan penanaman modal bagi PTSP yang telah terbentuk	
			Terbentuk	Belum	Sudah	Belum	Ada	Belum	Sudah	Belum	Gabung	Pisah
1	Provinsi	34	34	0	4	30	33	1	34	0	27	7
2	Kabupaten	416	364	52	4	412	236	180	356	8	227	137
3	Kota	98	97	1	1	97	69	29	96	1	53	44
4	KPBPB	5	4	1	0	5	4	1	4	0	3	1
5	KEK	8	2	6	0	8	1	7	2	0	1	1
Total		561	501	60	9	552	343	218	492	9	311	190

SPIPISE terdiri atas tiga sub sistem informasi utama, yaitu sub sistem informasi penanaman modal, sub sistem pelayanan penanaman modal, dan sub sistem pendukung pelayanan perizinan. Sub sistem informasi penanaman modal memberikan layanan mengenai peluang investasi, peraturan perundang-undangan, dan tata cara pengajuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Sementara itu, sub sistem utama yaitu pelayanan penanaman modal menyediakan layanan pengajuan aplikasi dan pemrosesan aplikasi secara elektronik dan *online*. Sistem ini dapat digunakan oleh penanam modal untuk mengajukan aplikasi perizinan dan nonperizinan secara *online*. Sub sistem ini menyediakan aplikasi elektronik yang dapat digunakan dari *front office*, *back office*, hingga tata usaha dalam memproses perizinan penanaman modal di PTSP Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Selain itu, untuk menciptakan transparansi dalam proses perizinan, SPIPISE menyediakan *tracking system* yang memungkinkan penanam modal memantau proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, SPIPISE menyediakan sub sistem layanan pendukung berupa master data untuk mendukung proses pertukaran data antara SPIPISE dengan sistem yang dibangun K/L, *Online Business Intelligence (BI)* untuk mendukung proses perencanaan dan pemantauan penanaman modal, *Electronic Data File (EDF)*, dan *Help Desk*.

Berdasarkan kajian yang dilakukan BKPM, jumlah perizinan dan nonperizinan yang harus dimiliki untuk melakukan usaha hampir di semua sektor masih banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperolehnya. BKPM mengelompokkan perizinan dan nonperizinan menjadi:

1. Perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha antara lain: izin prinsip penanaman modal, badan hukum, NPWP/PPPKP, dan TDP.
2. Perizinan dan nonperizinan terkait tahap konstruksi/realisasi antara lain: ketetapan rencana kota, Izin Lokasi/Situ, Izin Lingkungan dan AMDAL, AMDAL LALIN, IMB, HGB, Ketenagakerjaan, Utilitas, BPJS, Fasilitas (API, *Masterlist*, *Tax Allowance*, *Tax Holiday*), dan Izin Usaha.
3. Perizinan dan nonperizinan terkait perlindungan konsumen antara lain Pendaftaran Produk, Izin Edar, dan SNI.

Berdasarkan kajian tersebut, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha dan tahap konstruksi berdasarkan *Standard Operation Procedure (SOP)* untuk sektor industri manufaktur adalah 793 hari, sektor pertanian (perkebunan) 939 hari, dan bidang perhubungan 743 hari. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan atau dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasarkan kajian, temuan, dan usulan penanam modal. Peraturan Presiden terbaru untuk DNI adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Peraturan Presiden ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community* (AEC).

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Pada periode 2015-2019, kinerja penanaman modal di Indonesia diharapkan tumbuh tinggi namun terdapat *down risk* (risiko perlambatan) akibat keringnya likuiditas dunia, menurunnya harga komoditas dunia, tekanan neraca pembayaran, hambatan perizinan dan nonperizinan serta makin restriktifnya ketentuan investasi di sektor hulu sumber daya alam. Beberapa faktor yang diperkirakan akan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia pada periode 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Pertama, masih tingginya kepercayaan dan minat penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia yang tercermin dari survei-survei yang telah disebutkan di atas. Salah satu komponen penting untuk menjaga kepercayaan penanam modal adalah kebijakan fiskal dan moneter yang *prudent* (berhati-hati). Sempat terjadi penurunan kepercayaan terhadap ketahanan fiskal Indonesia namun telah terkoreksi dengan keputusan Pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, kecenderungan rendahnya harga minyak dunia dalam jangka menengah akan memberikan dampak positif terhadap ruang fiskal dan posisi neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, besarnya pasar domestik menjadi daya tarik penanaman modal sebagaimana telah ditunjukkan oleh survei yang dilakukan JBIC. Jumlah penduduk yang besar yaitu sekitar 255,5 juta (proyeksi tahun 2015) dengan struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta) menjadikan Indonesia sebagai pasar paling menarik di Asia. Sementara itu, pasar Tiongkok diproyeksikan mengalami penurunan sejalan dengan struktur demografi yang menua akibat kebijakan satu anak. Berbagai survei dan data penanaman modal menunjukkan telah terjadi pergeseran paradigma investasi di Indonesia dari *resource base* ke *market base* khususnya substitusi impor. Untuk itu, arah kebijakan penanaman modal harus mendorong berkembangnya sektor yang memproduksi barang konsumsi (*market base*) didukung oleh sektor yang mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).

Ketiga, dikeluarkannya berbagai kebijakan hilirisasi komoditi primer pertambangan, pertanian dan perikanan akan mendorong penanaman modal jika dilaksanakan secara konsisten dan didukung kebijakan lintas sektoral. Program hilirisasi akan memperkokoh struktur ekonomi sekaligus menghapus *missing middle* dan menjaga ketahanan neraca pembayaran. Pengembangan industri hilir akan mengurangi impor bahan baku dan penolong yang saat ini mencapai 93% total impor (BPS, 2015). Komitmen Pemerintah yang tinggi untuk mengeksplorasi kekayaan laut Indonesia yang sangat besar dan pembatasan kapal berbendera asing akan mendorong penanaman modal di sektor kelautan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahan ikan.

Keempat, kondisi lingkungan eksternal positif terhadap investasi di Indonesia lima tahun mendatang antara lain: (a) komitmen dari negara-negara maju dan berkembang untuk memajukan perekonomian dunia; (b) perekonomian Asia yang diperkirakan menjadi kawasan ekonomi dinamis baru yang dimotori perekonomian Tiongkok dan negara-negara industri baru di Asia (Korea Selatan, India, dan ASEAN); (c) terbentuknya pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi ASEAN pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; serta (d) Indonesia menjadi Ketua *Indian Ocean Rim Association (IORA)* periode tahun 2015-2017 yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan sentra ekonomi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera, serta peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hayati laut di kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera.

Dalam pertemuan G-20 di Australia pada bulan November 2014, negara-negara G-20 sepakat mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga 2,1 persen lebih tinggi pada 2018. Tambahan pertumbuhan ekonomi global tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi global hingga USD 2.000 triliun. G-20 juga sepakat meningkatkan investasi, perdagangan, mendorong terciptanya kompetisi bisnis yang adil dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendorong perdagangan global, G-20 sepakat untuk mengurangi tarif ekspor impor, menyederhanakan prosedur kepabeanan, serta mengurangi hambatan dagang. Dalam forum tersebut telah dikeluarkan juga 21 *communiqué* atau keputusan bersama, yang mana dari jumlah tersebut tiga diantaranya terkait dengan infrastruktur. Negara-negara G-20 sepakat untuk membantu dan mendorong investasi pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia diperkirakan menjadi daya tarik aliran modal asing yang jenuh di pasar negara maju. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah potensi pasar yang besar, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang tinggi, melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju (AS dan Uni Eropa), tersedianya sumber daya alam sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dapat mempengaruhi investasi di Indonesia karena akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN untuk menarik FDI. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN terbesar

diharapkan mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan investasi yang lebih besar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya karena Indonesia akan menjadi bagian dari *regional hub-production*. Penanam modal dapat memanfaatkan Indonesia sebagai tujuan investasi untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar negara anggota ASEAN lainnya. Namun demikian Pemerintah harus melakukan perbaikan daya saing perekonomian nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan manfaat kerjasama IORA bagi kepentingan nasional, Indonesia akan menerapkan strategi *multiplication of authority*, yaitu tindakan bersama dari berbagai lapisan untuk menuju tujuan bersama. IORA merupakan forum kerjasama regional negara-negara di kawasan Samudera Hindia yang didirikan pada tahun 1997, beranggotakan 20 negara, yaitu: Australia, Banglades, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Comoros, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab dan Yaman. Terdapat 6 (enam) fokus kerjasama IORA, yaitu: (a) keselamatan dan keamanan maritim; (b) fasilitasi perdagangan dan investasi; (c) manajemen perikanan; (d) manajemen risiko bencana alam; (e) kerjasama di bidang akademik, sains, dan teknologi; serta (f) pertukaran kebudayaan dan pariwisata.

Kerjasama IORA berperan penting untuk: (a) memastikan wilayah perairan di sekitar Indonesia akan tetap menjadi sumber kerjasama bagi semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan perdagangan, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, keselamatan dan keamanan maritim terkait dengan Samudera Hindia; (b) mendukung hubungan dan kerjasama bilateral dengan negara-negara di lingkaran Samudera Hindia; serta (c) konektivitas antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia khususnya anggota IORA, bukan hanya pada sektor infrastruktur, namun juga pada tataran *people-to-people connectivity*. BKPM akan secara aktif mendukung pengembangan wilayah barat Pulau Sumatera, khususnya untuk pengembangan pariwisata, perikanan dan logistik sesuai dengan rencana Pemerintah.

1.2.2 Tantangan dan Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan ekonomi; (c) percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta (d) percepatan pembangunan kelautan.

Merujuk kepada RPJMN tersebut maka tantangan **pertama** dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal

adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan *Total Factor Productivity* (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-8 persen per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tetap didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*).

Langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dapat dilakukan antara lain dengan kebijakan: (a) mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia usaha; (b) perbaikan tata kelola yang antara lain dengan melakukan *right government policy*; dan (c) memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan domestik.

Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya kebijakan insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Upaya lain yang akan dilakukan untuk mengoreksi disharmonis peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah adalah memberikan fasilitasi penyelesaian masalah (*debottlenecking*) kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketiga, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah terus mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal. Penanaman modal yang berbasis pengolahan sumber daya alam didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan gas) serta logistik.

Ketersediaan infrastruktur saat ini masih sangat terbatas. Rata-rata rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2014 sekitar 81,5%. Di kawasan timur Indonesia rasio elektrifikasinya jauh lebih rendah dari rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Selain masih rendahnya rasio elektrifikasi, kualitas listrik (*service level*) masih buruk. Sementara itu, pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, khususnya *smelter*, membutuhkan listrik yang sangat besar dan stabil.

Untuk mendorong penanaman modal yang lebih merata, pada tahun 2015-2019 Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun infrastruktur tenaga listrik sebesar 35,9 GW. Selain itu, akan dibangun 172 pelabuhan baru, 65 dermaga penyeberangan baru, 15 bandara baru, 3.258 km jalur kereta, 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, serta pengembangan 14 Kawasan Industri (KI) dan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Pulau Jawa.

Untuk mencapai target tersebut, dalam lima tahun kedepan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia adalah Rp 5.519,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pendanaan Pemerintah hanya berkisar 40,14% atau sekitar Rp 2.215,6 triliun selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga terdapat selisih pendanaan sekitar Rp 3.303,8 triliun (Bappenas, 2014). Pemerintah akan melakukan kaji ulang struktur APBN antara lain dengan mengurangi subsidi BBM dan mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur. Tantangan ke depan adalah mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun non KPS (*Business to Business*). Selain itu, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk bergabung dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang diinisiasi oleh Pemerintah Tiongkok. Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah pemanfaatan kesepakatan G-20 maupun AIIB untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Keempat, terdapat empat risiko tekanan perekonomian global yang dapat mempengaruhi penanaman modal di Indonesia, yaitu:

1. Melambatnya perekonomian dunia. Skenario pesimis terus berlangsung. Pada bulan Januari 2015, IMF dalam laporannya di *World Economic Outlook* (WEO) merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi dunia. Penurunan harga minyak yang sangat besar (55%) belum dapat mengimbangi faktor negatif antara lain melemahnya investasi dunia akibat memburuknya ekspektasi terhadap pertumbuhan perekonomian jangka menengah di negara maju dan negara berkembang. Semua negara utama dunia terkoreksi pertumbuhannya kecuali Amerika. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Jepang, kawasan Euro, Rusia dan negara-negara eksportir minyak terkoreksi.
2. Rendahnya harga komoditi dunia atau berakhirnya era *commodities super cycle* (peningkatan permintaan komoditi dunia).
3. Terjadinya kekeringan likuiditas dunia akibat kebijakan “normalisasi” moneter atau penghentian stimulus moneter (*tapering off quantitative easing*) pada akhir tahun 2014. Kebijakan tersebut akan diikuti dengan kenaikan suku bunga dunia.

4. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik penanaman modal khususnya pasca diberlakukannya MEA. Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja Indonesia tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah. Faktor lain yang kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur, *techno readiness* dan *financial market development*.

Kelima, Sejak awal tahun 2012 terjadi depresiasi/pelemahan nilai tukar rupiah yang didorong oleh:

- 1. **Faktor Eksternal**: apresiasi nilai tukar dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang akibat rencana kenaikan FFR (*Federal Fund Rate*) dan kebijakan *Quantitative Easing* ECB (*European Central Bank*) dan BOJ (*Bank of Japan*) yang diikuti oleh sejumlah negara.
- 2. **Faktor Internal**: defisit transaksi berjalan (*current account*). Terdapat risiko *misssmatch* utang luar negeri swasta dan hanya 13,6% melakukan lindung tunai (*forex hedging*).

Tren perkembangan kurs rupiah terhadap USD sejak tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Bank Indonesia, 2015

Penurunan nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan negara lain, namun masih terdapat masalah struktural yaitu defisit neraca berjalan sebesar USD 26 miliar (2,95% PDB) pada tahun 2014. Untuk menjaga ketahanan neraca pembayaran, Bank Indonesia menargetkan defisit neraca pembayaran tahun 2015 pada kisaran 2,5-3,0% dari PDB. Sumber-sumber defisit transaksi berjalan (*current account*) utamanya adalah:

- 1. Defisit neraca perdagangan akibat menurunnya harga komoditi.
- 2. Defisit neraca jasa yang sangat besar diakibatkan tingginya ketergantungan kepada jasa angkutan luar negeri (*freight*) sehingga perlu dilakukan upaya mendorong transaksi perdagangan ekspor dari *free on board* (fob) menjadi *cost, insurance and freight* (cif) dengan mengembangkan jasa pelayaran, logistik dan asuransi.

3. Besarnya repatriasi modal. Hampir semua negara ASEAN memberikan insentif untuk *reinvestment*.

Untuk memperbaiki kinerja neraca pembayaran melalui peningkatan ekspor dan penurunan impor, dibutuhkan kebijakan yang cukup kuat untuk mendorong reformasi struktural. Dalam bidang penanaman modal, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kepercayaan penanaman modal, mendorong reinvestasi (mengurangi remiten) dan mendorong investasi sektor-sektor prioritas, memperkuat neraca perdagangan seperti sektor industri substitusi impor bahan baku, orientasi ekspor dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya, matrik neraca pembayaran Indonesia sejak tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Neraca Pembayaran Indonesia 2010-2014 (Juta USD)

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014				Total 2014
					Q1	Q2	Q3	Q4	
I. Transaksi Berjalan	5,144	1,685	-24,418	-29,115	-4,149	-8,939	-6,963	-6,181	-26,233
A. Barang	31,003	33,825	8,680	5,833	3,350	-375	1,560	2,368	6,902
- Ekspor, fob	149,966	191,109	187,346	182,089	43,937	44,505	43,606	43,242	175,290
- Impor, fob	-118,963	-157,284	-178,667	-176,256	-40,588	-44,880	-42,046	-40,874	-168,387
1. Barang Dagangan Umum	29,983	32,215	6,711	4,069	2,832	-703	1,192	2,072	5,393
- Ekspor	148,866	189,432	185,337	180,294	43,414	44,171	43,232	42,941	173,757
- Impor	-118,884	-157,217	-178,626	-176,225	-40,581	-44,874	-42,039	-40,868	-168,363
2. Barang Lainnya	1,020	1,610	1,969	1,765	518	328	368	295	1,509
B. Jasa-jasa	-9,791	-9,803	-10,564	-12,072	-2,230	-2,920	-2,595	-2,788	-10,532
C. Pendapatan Primer	-20,698	-26,547	-26,628	-27,055	-6,354	-7,178	-7,133	-7,157	-27,822
D. Pendapatan Sekunder	4,630	4,211	4,094	4,178	1,085	1,534	1,204	1,396	5,220
II. Transaksi Modal	-50	33	51	-45	1	7	3	15	27
III. Transaksi Finansial	26,476	13,603	24,858	21,964	7,189	13,864	14,728	7,779	43,559
- Aset	-7,294	-16,453	-17,971	-13,467	-6,245	-2,907	-3,917	1,031	-12,039
- Kewajiban	33,770	30,057	42,829	37,431	13,434	16,771	18,645	6,748	55,598
1. Investasi Langsung	11,106	11,528	13,716	12,295	3,288	3,439	5,945	2,574	15,266
2. Investasi Portofolio	13,202	3,806	9,206	10,875	8,703	8,046	7,441	1,611	25,802
3. Derivatif Finansial	-94	69	13	-334	-140	45	-57	-61	-213
4. Investasi Lainnya	2,262	-1,801	1,922	-871	-4,662	2,314	1,399	3,655	2,705
IV. Total (I + II + III)	31,670	15,321	491	-7,105	3,040	4,932	7,768	1,613	17,353
V. Selisih Perhitungan Bersih	-1,327	-3,465	-275	-220	-974	-636	-1,292	797	-2,105
VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)	30,343	11,857	215	-7,325	2,066	4,297	6,475	2,410	15,249
VII. Cadangan Devisa dan yang terkait	-30,343	-11,857	-215	7,325	-2,066	-4,297	-6,475	-2,410	-15,249
Memorandum:									
- Posisi Cadangan Devisa Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	96,207	110,123	112,781	99,387	102,592	107,678	111,164	111,862	111,862
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0.72	0.20	-2.78	-3.18	-1.97	-3.97	-2.99	-2.81	-2.93

Sumber : Bank Indonesia, 2015
Catatan : 1) Berdasarkan BPM6, namun penggunaan tanda "+" dan "-" mengikuti BPM6
2) Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait
3) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

Dengan berlakunya MEA 2015, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan besarnya potensi pasar domestik untuk menarik penanam modal. Untuk itu, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang lebih berdaya saing yang mencakup perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan, stabilitas politik, perbaikan kondisi infrastruktur, serta kemudahan dalam mendapatkan fasilitas. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa beberapa negara ASEAN memiliki iklim penanaman modal, infrastruktur dan fasilitas fiskal yang lebih

menarik, khususnya untuk pendirian kantor pusat, jasa perdagangan global dan *reinvestment*.

Tabel 1.5 Perbandingan Faktor Penentu Penanaman Modal Negara-Negara ASEAN

Faktor Penentu	Singapura	Malaysia**	Thailand	Indonesia	Vietnam	Filipina
A. Ekonomi*						
Pertumbuhan ekonomi (%) 2013	3,8	4,7	1,7	5,7	5,4	7,1
GDP PPP (USD bn), 2014	445,2	746,8	990,0	2.354,3	309,3	664,6
GDP PPP per capita (USD/than), 2014	81.245,6	24.520,0	14.136,3	10.156,0	3.621,4	6.985,0
Tingkat suku bunga (%) 2015	3,2	4,6	4,1	7,0	3,4	3,7
Inflasi (%) 2014	1,3	2,9	2,0	5,9	3,2	4,6
Current account balance (%/GDP), 2014	17,3	4,3	2,8	-3,2	4,1	3,2
Public debt /GDP (%), 2011	118,2	53,3	40,50	24,30	37,3	49,4
B. Iklim Usaha						
Peringkat Ease of Doing Business, 2014	1	18	26	114	78	95
Peringkat kemudahan memulai usaha , 2014	6	13	75	155	123	161
Peringkat Logistic Performance Index, 2014	3	25	35	33	48	57
Peringkat Corruption Perception Index, 2014	7	50	85	104	119	85
C. Perpajakan						
Tarif pajak, 2014	17%	23%	20%	23%	22%	30%
Tax holiday	3-30 tahun	5-10 tahun (Malaysia Super Corridor - KEC, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur Financial District)	3-8 tahun	5-10 tahun	4 tahun sejak menerima keuntungan	6+2 tahun perusahaan pioneer 4+3 tahun non-pioneer
	Perusahaan pioneer untuk manufaktur, jasa keuangan, dan pariwisata	Industri pioneer di sektor manufaktur (world class, teknologi tinggi), R&D, perusahaan perangkat lunak, dan jasa keuangan	Pertanian, R&D, pengembangan SDM, infrastruktur, green investment, industri-industri farmasi, energi terbarukan, dan pesawat	Logam dasar, kaleng minyak dan kimia organik dari minyak dan gas, mesin, energi terbarukan dan peralatan komunikasi	Penelitian sains dan pengembangan teknologi, infrastruktur, Produk software Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan olahraga	Industri pioneer: manufaktur, agrikultur, kesehatan, pertambangan dan energi yang menggunakan teknologi baru
Tax allowance	Tarif pajak sebesar 5-15% selama 3-30 tahun	Pengurangan PKP sebesar 70% selama 5 tahun (kondisi tertentu)	50% pengurangan PKP setelah tax holiday berakhir; pengurangan deviden; pengurangan untuk pengeluaran tertentu (bisnis, srt, konstruksi)	Pengurangan PKP sebesar 30% dari nilai investasi, dibebaskan depresiasi pajak; pengurangan fase carry forward; pengurangan pajak dividen untuk WP LN	Tarif 10% selama 15 tahun atau 20% selama 10 tahun	Pengurangan PKP sebesar 50% dari biaya untuk gaji selama 5 tahun
	Kantor pusat, perdagangan global, manufaktur, jasa keuangan, dan sewa pesawat	Industri pioneer, jasa keuangan, dan perdagangan global, industri berorientasi ekspor, perusahaan riset, kantor pusat (RQ)	Sektor dan lokasi tertentu	Sektor dan lokasi tertentu	Sektor dan lokasi tertentu	Industri padat karya
Inentif non pajak	Subsidi untuk pengembangan SDM dan R&D	Kemudahan memulai usaha	Kemudahan memulai usaha	Kemudahan memulai usaha	Tanah dari pemerintah (balak)	Kemudahan memulai usaha

Sumber: PricewaterhouseCooper, 2013
*) World Bank, 2014
**) Malaysian Investment Development Authority (MIDA), 2015

- 16 -

Memperhatikan perkembangan dan tantangan di atas, BKPM sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya mendorong peningkatan penanaman modal harus lebih responsif, pro-aktif, ramah, dan customer oriented dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholders penanaman modal. Hal tersebut harus tercermin dalam penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien, dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Selain itu, BKPM akan secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan insentif terkait penanaman modal.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Bab ini berisikan: (i) Visi; (ii) Misi; (iii) Tujuan BKPM; serta (iv) Sasaran Strategis BKPM, yang akan digunakan sebagai panduan untuk menyusun kerangka kelembagaan BKPM, kerangka regulasi penanaman modal dan program kegiatan BKPM.

2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama Kementerian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan Indonesia. Berbagai kesepakatan internasional khususnya *Bilateral Investment Agreement*/BIT (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian internasional meskipun ditujukan untuk mendorong penanaman modal namun tidak boleh mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi untuk kepentingan nasional.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

UU Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha (misalnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKMK dengan Usaha Besar baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman modal di beberapa bidang bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKMK sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut lebih efektif, BKPM akan lebih intensif menginventarisasi UMKMK yang potensial, memfasilitasi promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar potensial.

Selain itu, semangat gotong royong dapat juga diwujudkan dalam bentuk upaya pemerataan sebaran kegiatan penanaman modal berdasarkan wilayah. Saat ini, sebaran kegiatan ekonomi termasuk penanaman modal masih terpusat di Pulau Jawa. Berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan penanaman modal di luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat.

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dari sisi ekonomi tercermin antara lain dari pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan yang lebih merata. RPJMN 2015-2019 menargetkan pendapat per kapita tumbuh dari Rp 43,4 juta tahun 2014 menjadi Rp 72,2 juta pada tahun 2019; tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,94% menjadi 4,0-5,0%; tingkat kemiskinan turun dari 10,96% menjadi 7,0-8,0%; serta Indeks Gini turun dari 0,41 menjadi 0,36.

Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan internasional. Dari salah satu sisi, persaingan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, di sisi yang lain, tanpa persiapan untuk meningkatkan kapasitas yang baik persaingan dapat menghancurkan perekonomian. Kerjasama ekonomi internasional yang dihasilkan pemerintah harus berkualitas yaitu dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya.

Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi *market*, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan dan insentif.

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut, membangun konektivitas maritim melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut. Untuk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peran ekonomi maritim dalam struktur perekonomian Indonesia belum berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan Indonesia. Pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan dukungan kebijakan melalui peraturan yang mendorong para pelaku bisnis tertarik melakukan penanaman modal pada bidang ekonomi yang berbasiskan maritim. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional sehingga penanaman modal dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang kemaritiman.

2.3 Tujuan BKPM

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-2019. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM sebagaimana disebutkan pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

“Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dalam rangka Mendorong Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (*debottlenecking*). Selain itu, tujuan ini juga disusun dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, peningkatan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), peningkatan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta

peningkatan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

2.4 Sasaran Strategis BKPM

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2015-2019, adalah:

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM.

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi penanaman modal

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal adalah:

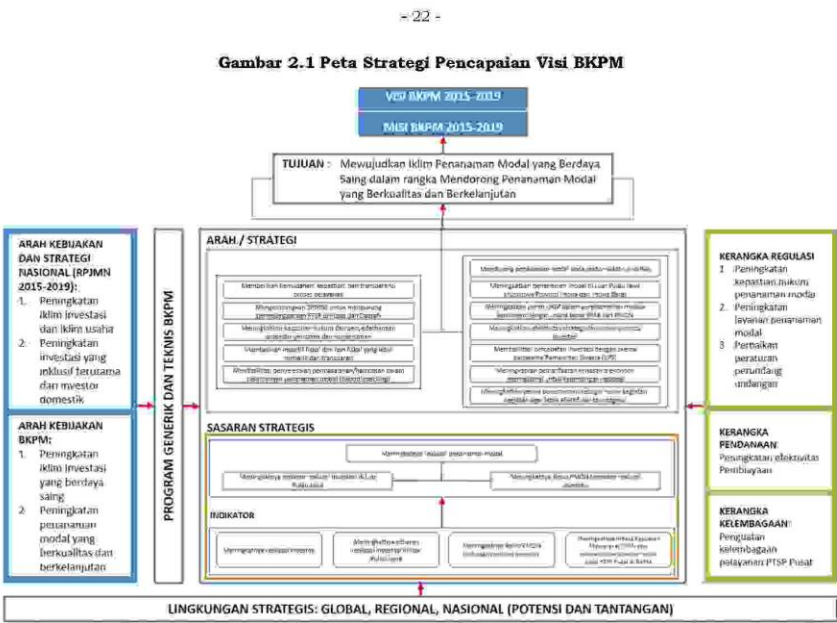
- a. Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal
- b. Meningkatnya rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa
- c. Meningkatnya rasio realisasi PMDN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis diatas, BKPM menetapkan target dari masing-masing indikator kinerja sebagai ikhtisar dari hasil capaian berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan. Keterkaitan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target per tahun dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dalam rangka mendorong penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM	3,10 dari skala 4	3,15 dari skala 4	3,20 dari skala 4	3,25 dari skala 4	3,30 dari skala 4
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp 519,5T	Rp 594,8T	Rp 678,8T	Rp 792,5T	Rp 933,0T
		Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa	45,60%	49,10%	52,80%	57,40%	62,00%
		Rasio Realisasi PMDN	33,80%	35,00%	36,30%	37,60%	38,90%

Gambaran peta strategi dalam upaya mencapai Visi BKPM 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN,
DAN KERANGKA REGULASI,

Bab ini akan membahas mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi BKPM, program dan kegiatan BKPM, kerangka kelembagaan BKPM, serta kerangka regulasi penanaman modal.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada agenda pembangunan nasional nomor 6 (enam), “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”, dengan sub agenda prioritas “Penguatan Investasi”. Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka “Penguatan Investasi” untuk lima tahun ke depan adalah:

- 1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.
- 2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business* (EoDB).
- 3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2019.
- 4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

Tabel 3.1 Proyeksi Realisasi Investasi dan Rasio PMDN terhadap Realisasi Investasi

Perkembangan Investasi	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0
Rasio PMDN (%)	33,8	35,0	36,3	37,6	38,9

Asumsi Nilai Tukar: Rp. 12.000/USD

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu **pertama** adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan **kedua** adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

A. Peningkatan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui:
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi.
 - b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha.
 - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan, baik di pusat maupun di daerah.
 - d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi.
2. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.
3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
 - a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan.
 - b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat), untuk menyatukan perizinan tingkat pusat pada satu tempat layanan perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
 - 1) Pengembangan kelembagaan PTSP Pusat.
 - 2) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perizinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinan.
 - 3) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.
 - 4) Pengembangan *tracking system* perizinan di PTSP Pusat.
4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:
 - a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
 - b. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.
 - c. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana.
 - d. Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri.
 - e. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan

aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.

5. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.
6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui:
 - a. Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.
 - b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan lingkungan domestik dan internasional.
 - c. Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi serta *collective bargaining*.
7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:
 - a. Reposisi dan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
 - b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar.
 - c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik.
 - d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
 - e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro.

B. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Terutama Dari Investor Domestik

Kebijakan ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama PMDN, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:
 - a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan.
 - b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.
 - c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri.

- d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis sumber daya alam.
 - e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (*Global Production Network*), baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun *independent supplier*.
 - f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen.
2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang:
 - a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
 - b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness*, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
 - c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM.
 - d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM).
 3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:
 - a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
 - b. Penguatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.
 4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:
 - a. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade, and Investment* (TTI), pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di luar negeri (IIPC: *Indonesian Investment Promotion Center*).
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang dapat:
 - (i) Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
 - (ii) Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah.
 - c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
 5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.

6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.
7. Pengembangan investasi keluar (*outward investment*), diutamakan pada ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian nasional.
8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu:
 - a. Alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal.
 - b. Alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik.
 - c. Alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/*ASEAN Economic Community* (AEC) 2015.

Daya saing ini diperlukan mengingat Indonesia harus berkompetisi dengan sesama anggota ASEAN. AEC akan mendorong terbentuknya kawasan bebas di ASEAN dimana barang, jasa, investasi, tenaga kerja berpendidikan, dan modal akan bebas keluar-masuk. Terdapat empat pilar kebijakan dalam kawasan ASEAN ini, yaitu: (a) pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi regional; (b) ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi; (c) ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang merata; dan (d) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian dunia.

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang terkait penanaman modal diharapkan sejalan dengan beberapa rekomendasi yang telah ditetapkan dalam AEC, antara lain: (a) meningkatkan konektivitas infrastruktur dan komunikasi; (b) mengintegrasikan sektor industri di ASEAN; dan (c) peningkatan peran swasta dalam membangun AEC.

Beberapa kebijakan dan strategi yang tercantum dalam agenda prioritas lain terkait penanaman modal adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui peningkatan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi.
2. Pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk menciptakan kepastian investasi.
3. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif melalui promosi investasi agroindustri.
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*).

5. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani/tenaga kerja muda melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam industrialisasi dan mekanisasi pertanian.
6. Penerapan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan.
7. Peningkatan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang sudah ada serta pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru dan penyusunan kerangka regulasi terkait.
8. Penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi melalui pinjaman dan kredit, pengembangan lembaga yang sudah ada, pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru serta penyusunan kerangka regulasi terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah.
9. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan berisiko tinggi.
10. Sinkronisasi pemanfaatan tata ruang sebagai dasar/landasan perizinan investasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKPM

Peran BKPM dalam melaksanakan agenda prioritas “Penguatan Investasi” disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat memberikan rekomendasi agar selaras dengan kebijakan umum penanaman modal yang ditetapkan dalam UU Nomor 25 tahun 2007. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan, BKPM mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal.
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
9. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BKPM bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal menjadi Rp 933 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%. Untuk sasaran yang lain akan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, posisi BKPM menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Penanaman modal memberikan efek pengganda terhadap perekonomian yang cukup besar dengan mendorong sektor riil melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Dokumen RUPM merupakan perencanaan yang bersifat jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait. Sejalan dengan dokumen tersebut, BKPM perlu mempertimbangkan arah kebijakan sebagai berikut: (i) perbaikan iklim penanaman modal; (ii) persebaran penanaman modal; (iii) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; (iv) penanaman modal yang berwawasan lingkungan; (v) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); (vi) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; serta (vii) promosi penanaman modal.



RUPM berisikan rencana aksi yang terbagi menjadi 4 (empat) fase implementasi (Gambar 3.1), dan saat ini merupakan fase transformasi dari percepatan pembangunan infrastruktur dan energi menuju pengembangan industri skala besar. Hal ini juga telah sejalan dengan arahan perekonomian Indonesia yang mengalami transformasi menuju industrialisasi.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, BKPM menerjemahkan dua pilar kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM, yaitu: **pertama** adalah menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan **kedua** adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

A. Peningkatan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing

Kebijakan-kebijakan dalam pilar pertama ini ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui percepatan realisasi penanaman modal dari proyek "*on the pipeline*" melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum. Upaya untuk meningkatkan penanaman modal secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini diharapkan dapat membalikkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal yang saat ini terjadi. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, melalui:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di BKPM yang dilakukan melalui:
 - 1) Penguatan kelembagaan PTSP Pusat melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Kementerian/Lembaga kepada BKPM atau menempatkan pejabat penghubung (*Liaison Officer/LO*) Kementerian/Lembaga di BKPM.
 - 2) Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.
 - 3) Penguatan *Investment Relation Unit* dalam rangka meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan.
 - 4) Peningkatan kapasitas aparatur PTSP.
 - 5) Perubahan *mindset* aparatur menjadi *problem solver* dan lebih tanggap.
 - 6) Pemanfaatan SPIPISE untuk melayani penanam modal dan mendorong penanam modal mengajukan aplikasi perizinan secara *online* dan memanfaatkan fasilitas *tracking system*.
 - b. Mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia PTSP di daerah, antara lain melalui:
 - 1) Penilaian kualifikasi PTSP di daerah.
 - 2) Sosialisasi dan pelatihan aparat PTSP terkait peraturan dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan PTSP di Daerah.

Pelaksanaan perizinan penanaman modal secara utuh melalui PTSP Pusat beserta proses penyederhanaan perizinan dilakukan secara bertahap mulai dari sektor prioritas. Demikian pula, penguatan kelembagaan PTSP di daerah dimulai dari wilayah yang sangat potensial dan strategis.
2. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan, melalui:
 - a. Mengembangkan aplikasi elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada PTSP Pusat dan Daerah.
 - b. Mengembangkan sistem pertukaran data untuk mengintegrasikan sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan

Kementerian/Lembaga dengan SPIPISE.

- c. Mengembangkan dan memanfaatkan *online tracking system* dalam proses perizinan dan nonperizinan untuk PTSP Pusat dan Daerah, serta *dashboard* informasi kinerja PTSP yang dapat diakses Menteri/Pimpinan Lembaga dan Presiden.
 - d. Melakukan validasi dan pengolahan data untuk meningkatkan akurasi dan pemanfaatan data penanaman modal untuk perencanaan, *monitoring*, perumusan kebijakan dan pelayanan penanaman modal.
3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas:
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait penanaman modal.
 - b. Menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah yang menghambat penanaman modal.
 4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta mendukung kebijakan tertentu antara lain *green investment* dan transfer teknologi, melalui kegiatan:
 - a. Melakukan analisa sektoral, perbandingan kebijakan pemberian fasilitas antar negara ASEAN dan daya saing serta dampak analisa perbaikan prosedur.
 - b. Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur, kewajiban dan *monitoring*.
 - c. Melakukan evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan kewajiban penanam modal dalam memanfaatkan fasilitas.
 5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (*debottlenecking*), melalui strategi:
 - a. Inventarisasi proyek penanaman modal strategis/prioritas yang mengalami hambatan.
 - b. Identifikasi masalah dan penanggungjawab teknis.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pembina teknis untuk mencari solusi dan menyusun *timeline* penyelesaian masalah.
 - d. Mengusulkan perubahan regulasi jika diperlukan.
 - e. *Monitoring* dan menyusun laporan perkembangan penyelesaian masalah kepada Menteri/Kepala Lembaga serta Presiden dan Wakil Presiden.

B. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Arah kebijakan pilar kedua meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan

berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas:

- a. Ketenagalistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi.
- b. Industri padat karya.
- c. Industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekspor.
- d. Industri kemaritiman.
- e. Industri substitusi impor bahan baku dan konsumsi untuk dalam negeri.
- f. Industri pengolahan produk pertambangan untuk memberikan nilai tambah ekspor.
- g. Industri pariwisata.

Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal pada sektor tersebut dilakukan melalui strategi:

- a. Penyusunan rencana penanaman modal antara lain peta peluang penanaman modal di sektor tersebut yang telah memperhatikan kesesuaian dan ketersediaan lahan, potensi dan prioritas daerah, jaminan bahan baku, serta arah kebijakan kementerian teknis terkait.
- b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai prioritas tahap pertama penyelenggaraan PTSP.
- c. Perbaikan iklim penanaman modal melalui harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sektor-sektor tersebut.
- d. *Monitoring, debottlenecking* dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis, antara lain:
 - 1) Menginventarisasi proyek PMA/PMDN strategis yang sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah (*on the pipeline*) yang perlu difasilitasi.
 - 2) Penyusunan inventarisasi masalah masing-masing proyek.
 - 3) Fasilitasi penyelesaian masalah perizinan dan nonperizinan dengan kementerian/lembaga dan daerah.
 - 4) Penyusunan rencana aksi bersama pemilik proyek untuk menyusun *timeline* penyelesaian permasalahan (oleh PTSP Pusat).
 - 5) Pelaksanaan rencana aksi serta *monitoring* dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
- e. Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal kepada Pemerintah antara lain:
 - 1) Kebijakan pemberian fasilitas fiskal berupa *tax allowance*, *tax holiday*, serta pembebasan bea masuk atas barang impor barang modal dan bahan baku/penolong.
 - 2) Peraturan perundangan terkait Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

- 3) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang khususnya untuk sektor prioritas terkait penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dan menarik bagi penanam modal.
- f. Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas tersebut.

Khusus sektor ketenagalistrikan, percepatan realisasi kegiatan penanaman modal dilakukan melalui antara lain:

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor ketenagalistrikan melalui PTSP sebagai prioritas tahap pertama.
 - b. Penyederhanaan waktu dan prosedur perizinan terkait dengan sektor ketenagalistrikan (saat ini masih diperlukan 52 izin / rekomendasi / pertimbangan teknis).
 - c. Percepatan pemberian izin, antara lain:
 - 1) Pemberian dispensasi izin kehutanan (memberikan izin bekerja di hutan sambil menyelesaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).
 - 2) Penerbitan izin *jetty* secara otomatis apabila Pemda sudah menerbitkan izin lokasi/izin penetapan lokasi.
 - 3) Penetapan Perhutani sebagai penerima kuasa dari pengguna hutan untuk membeli lahan pengganti hutan dan menghutankannya.
 - 4) Kemudahan pemberian izin terhadap rencana pengembangan sektor ketenagalistrikan tanpa perlu menunggu perubahan RTRW.
 - 5) Pembentukan Tim Pengadaan Tanah khusus program 35 GW.
 - d. Percepatan proses pengadaan melalui persetujuan proyek ketenagalistrikan tahun jamak (*multi year*).
 - e. Jaminan pasokan gas antara lain:
 - 1) Persetujuan tambahan alokasi gas dan LNG untuk PLN.
 - 2) Persetujuan mekanisme bisnis BBG antara PLN dengan penyedia gas tanpa melalui *trader*.
 - f. Pemberian insentif tarif berupa *feed-in tariff* untuk pengembangan EBT, khususnya berdaya kecil.
 - g. Pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik serta memasok industri misalnya melalui skema *power wheeling* agar PLN tidak menjadi satu-satunya *off-taker*.
 - h. Promosi secara terfokus dan efektif untuk menarik minat penanam modal di sektor ketenagalistrikan baik di dalam maupun di luar negeri.
- Rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPM untuk mendorong penanaman modal di sektor-sektor prioritas secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran I.
2. Peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan melalui:
 - a. Pemetaan potensi sektor-sektor prioritas di wilayah-wilayah Luar Pulau Jawa, kebutuhan infrastruktur dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b. Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi menarik.
 - c. Koordinasi dan fasilitasi percepatan realisasi penanaman modal di Provinsi Papua dan Papua Barat. BKPM akan menyusun rencana aksi,

fasilitasi dan monitoring secara berkala pelaksanaan rencana aksi tersebut.

- d. Mendorong percepatan pengusulan, penetapan dan pengembangan 7 (tujuh) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 14 Kawasan Industri (KI) beserta dukungan infrastruktur dan regulasinya khususnya yang berada di Luar Pulau Jawa.
- e. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi kebijakan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta pemberian kemudahan ekspor impor di kawasan pengembangan ekonomi, antara lain Kawasan ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) khususnya yang berada di Luar Pulau Jawa.
- f. Penyelesaian peraturan mengenai pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan Pusat dan Daerah kepada administrator KEK.
- g. Fasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kawasan pengembangan ekonomi khususnya di Papua dan Papua Barat.
- h. Meningkatkan kapasitas daerah khususnya di Luar Pulau Jawa dalam mempromosikan potensi wilayahnya dan mempersiapkan daerahnya menerima dan melayani penanam modal.

Rincian rencana aksi terkait pengembangan wilayah tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

3. Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, BKPM akan melakukan kegiatan:
 - a. Penyediaan kajian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diwajibkan untuk bermitra dan bentuk kemitraan.
 - b. Penyediaan daftar UKM yang potensial dan perusahaan skala besar yang wajib bermitra sesuai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
 - c. Pelaksanaan *matchmaking* UKM dengan perusahaan skala besar yang wajib bermitra dan melakukan *monitoring*.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi.
4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:
 - a. Pengembangan dan pendayagunaan peran Kantor Investasi Luar Negeri (*Indonesian Investment Promotion Center/IIPC*).
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang dapat dilakukan melalui:
 - 1) *Market intelligence*.
 - 2) Pengembangan bahan promosi dalam berbagai media.
 - 3) Mengundang perusahaan yang berhasil mengembangkan usahanya di Indonesia untuk menyampaikan *success story* dalam kegiatan promosi BKPM di negaranya.
 - 4) Mempromosikan peluang kegiatan penanaman modal yang lebih konkret tidak hanya potensi penanaman modal.
 - c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
 - d. Perubahan *mindset* dari promosi menjadi *marketing*.

- e. Peningkatan promosi ke dalam negeri khususnya kepada perusahaan yang telah menanamkan modalnya untuk mengembangkan usahanya.
 - f. Fasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi.
 - g. Fasilitasi penanaman modal keluar (*outward investment*) dalam rangka mendukung ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) serta mewujudkan Indonesia menjadi *regional player* khususnya di ASEAN.
5. Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor infrastruktur, BKPM sesuai dengan perannya sebagai *front office* dan *clearing house agent* akan secara aktif memfasilitasi percepatan investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga *financial closing*. Daftar pengembangan infrastruktur prioritas tahun 2015-2019 secara lengkap baik yang akan didanai melalui APBN/APBD maupun yang akan ditawarkan kepada swasta dapat dilihat dalam Anak Lampiran III.
6. Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional yaitu meningkatkan PMA sektor prioritas, kerja sama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama, serta melindungi dan mendorong penanaman modal Indonesia keluar (*outward investment*). Kebijakan ini akan dilakukan melalui:
- a. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar dunia usaha.
 - b. Mengembangkan kerangka kerjasama penanaman modal dalam rangka meningkatkan daya saing bersama di pasar global.
 - c. Menyusun *template Bilateral Investment Agreement*/BIT dan *Concession Treaty* berdasarkan hasil *review* perjanjian BIT agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kerjasama internasional kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.
 - e. Menyiapkan posisi Pemerintah Indonesia dalam fora internasional.
7. Meningkatkan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan unit-unit kerja agar lebih efektif dan terintegrasi, melalui:
- a. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal.
 - b. Menyiapkan rencana penanaman modal yang terintegrasi antara sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur.
 - c. Menyiapkan dan mengemas informasi usulan proyek-proyek prioritas, pengembangan kawasan, infrastruktur prioritas.
 - d. Melakukan *market sounding* dan *policy dialogue* proyek prioritas.
 - e. Menyiapkan usulan fasilitas dan regulasi untuk mendorong percepatan realisasi penanaman modal proyek prioritas.
 - f. Melakukan evaluasi dan penyusunan rencana strategis BKPM.

3.3 Program dan Kegiatan BKPM

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BKPM, Program dan Kegiatan BKPM Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPM, antara lain penyelenggaraan PTSP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya akuntabilitas kelembagaan, dengan indikator adalah sebagai berikut :

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- b. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal.
- c. Pengembangan sumber daya manusia.
- d. Peningkatan pelayanan hukum penanaman modal.
- e. Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM.
- f. Penyempurnaan produk hukum penanaman modal serta peningkatan pelayanan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan.
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM.
- h. Pengawasan/pemeriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPM melalui penyediaan sarana dan prasana aparatur yang memadai. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM dengan indikator indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan / pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana BKPM yang didalamnya termasuk penyediaan bantuan pengadaan alat pengolahan data (*Personal Computer/PC*) di PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan salah satu sub agenda prioritas nasional "Penguatan Investasi". Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi, dengan rincian sasaran program sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

- b. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- c. Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
- d. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- f. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

Indikator Sasaran Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- a. Perbaikan kemudahan memulai berusaha.
- b. Rencana investasi.
- c. Persentase kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan.
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM.
- e. Realisasi penanaman modal.
- f. Peta potensi sektor prioritas.

Program Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dilaksanakan melalui kegiatan:

Bidang Perencanaan Penanaman Modal

- a. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
- b. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur.
- c. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
- d. Perencanaan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- e. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
- f. Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Deregulasi kebijakan penanaman modal.
- b. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat (BKPM).
- c. Pengembangan potensi penanaman modal daerah.
- d. Pemberdayaan usaha nasional.

Bidang Promosi Penanaman Modal

- a. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal.
- b. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam dan luar negeri.
- c. Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal.
- d. Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan di luar negeri.

Bidang Kerjasama Penanaman Modal

- a. Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.
- b. Kerjasama regional di bidang penanaman modal.
- c. Kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal

- a. Peningkatan kualitas pelayanan persetujuan penanaman modal.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).
- c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
- e. Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal di daerah.

3.4 Kerangka Kelembagaan BKPM

Dalam RPJMN 2015-2019, dalam rangka mengoptimalkan dan mempercepat upaya pencapaian sasaran pembangunan terdapat 3 (tiga) mekanisme pelaksanaan kebijakan (*delivery mechanism*) yaitu kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 adalah perangkat Kementerian/Lembaga struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Bagian kerangka kelembagaan ini akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Penyusunan kerangka kelembagaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip:

1. Keterkaitan, kontribusi dan peran K/L dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang di dalam RPJPN, prioritas pembangunan di dalam RPJMN, dan visi misi Presiden.
2. Penataan kelembagaan yang mengacu kepada kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dan memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.
3. Terbentuknya struktur organisasi untuk mewujudkan rencana kerja yang:
 - a. sejalan dengan upaya pencapaian visi misi Presiden.
 - b. sesuai dengan kapasitas pengelolaan sumber daya K/L yang bersangkutan.
 - c. sesuai dengan ketersediaan anggaran.
4. Merupakan proses evaluasi (audit) terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada.

RPJMN 2015-2019 menetapkan "Penguatan kelembagaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu tingkat pusat (PTSP Pusat) yang dilengkapi dengan *online tracking system* dan transparansi informasi tahapan proses, lama waktu guna meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif" sebagai prioritas penguatan kerangka kelembagaan dan menjadi tugas BKPM.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Perpres tersebut merupakan pengganti Perpres Nomor 27 Tahun 2009. Peraturan Presiden yang baru tersebut utamanya bertujuan untuk menghilangkan dualisme kelembagaan antara Perangkat Daerah di bidang Pelayanan Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi dan Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal.

Dalam Perpres yang baru selain pelimpahan atau pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala BKPM, semua K/L menempatkan pejabat penghubung pada PTSP Pusat di BKPM untuk memproses perizinan dan memberikan pelayanan informasi. Dengan demikian, BKPM menangani izin prinsip, Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), Angka Pengenal Importir-Umum (API-U), fasilitas bea masuk, dan fasilitas perpajakan serta izin usaha yang baru dilimpahkan atau didelegasikan oleh K/L sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.

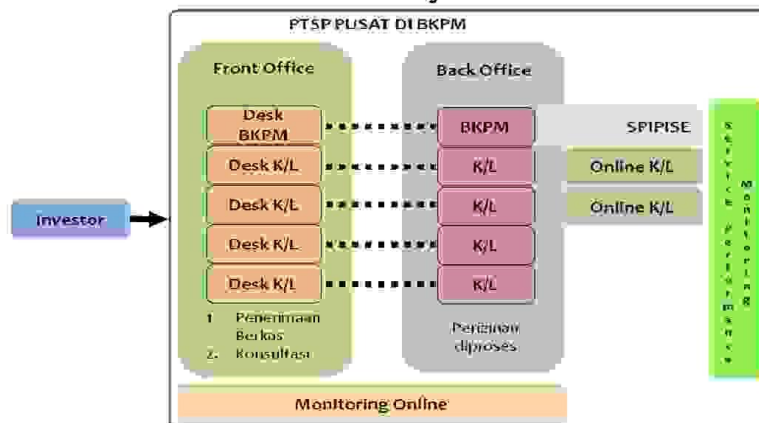
Gambar 3.2 Jenis dan Alur Proses Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal



Saat ini telah ada 22 K/L yang melimpahkan atau mendelegasikan wewenang pemberian izin usahanya serta menempatkan pejabat penghubung (*Liaison Officer/LO*) pada PTSP Pusat di BKPM. K/L tersebut adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standarisasi Nasional, Lembaga Sandi Negara, serta PT. PLN Persero.

Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terdapat di BKPM tersebut telah mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) antara 3-10 hari kerja. Adapun pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan di BKPM telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2008 (*Quality Management System Requirements*) dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sejak tahun 2013. Mekanisme SOP serta pelayanan perizinan dapat dipantau melalui *Service Performance Monitoring* (SPM) *dashboard* yang dapat diakses oleh Presiden, Wakil Presiden, dan K/L yang tergabung dalam PTSP Pusat di BKPM. Sementara itu, penanam modal dapat memonitor proses pelayanan perizinan atau nonperizinan melalui *tracking system* yang terdapat dalam SPIPISE. Hal ini dilakukan demi tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi. Skema mekanisme layanan pada PTSP Pusat di BKPM dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Mekanisme Layanan di PTSP Pusat



Pelaksanaan fungsi PTSP Pusat serta integrasi dengan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelayanan penanaman modal dilakukan secara bertahap yaitu tahap persiapan, tahap integrasi Pusat dengan Kementerian/Lembaga (K/L), serta tahap integrasi perizinan tingkat daerah. Rencana kerja menuju PTSP Pusat dan integrasi perizinan tingkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Peluncuran layanan perizinan online

2. Integrasi Pusat dengan K/L

Bidang Usaha Prioritas I

- Rapat koordinasi teknis (Rakortek) K/L bidang prioritas I
- Penugasan *Person in Charge* (PIC) dari setiap K/L
- Penerbitan Peraturan Menteri pelimpahan wewenang
- Persiapan infrastruktur di BKPM
- Persiapan infrastruktur IT (Telkom)
- Penugasan pejabat K/L (LO) di BKPM
- Evaluasi dan penyempurnaan
- *Launching* PTSP Pusat

Bidang Usaha Prioritas II

- Rakortek K/L bidang prioritas II

3. Integrasi Perizinan Tingkat Daerah (secara bertahap)

Tahap pertama: 5 Provinsi – 12 Kabupaten/Kota

- Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Persiapan infrastruktur dan BPM-PTSP
- Uji coba daerah prioritas
- Pelaksanaan PTSP di Daerah

Tahap-tahap berikutnya:

- Replikasi penerapan di seluruh PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota, KEK, dan KPBPB

Penyelenggaraan PTSP Pusat tahap I ditargetkan untuk melayani perizinan dan nonperizinan penanaman modal pada 7 (tujuh) sektor prioritas, kemudian dilanjutkan tahap II untuk keseluruhan sektor lainnya.

Saat ini, BKPM telah mengajukan usulan struktur kelembagaan dan tata laksana BKPM yang baru dalam rangka menjawab tantangan, meningkatkan keterkaitan unit kerja dan peran BKPM untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Mengingat bahwa struktur kelembagaan masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden, maka Renstra BKPM 2015-2019 masih menggunakan struktur kelembagaan yang lama. Jika struktur kelembagaan baru disetujui sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014, maka akan dilakukan revisi Renstra BKPM 2015-2019. Struktur kelembagaan BKPM tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

3.5 Kerangka Regulasi Penanaman Modal

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Bagian kerangka regulasi penanaman modal ini berisi tentang gambaran umum peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh BKPM dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan penanaman modal diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait penanaman modal:
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan sektoral dalam rangka penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal baik jangka waktu lama proses maupun jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
 - b. Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan standar prosedur dan waktu pengurusan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang akan menjadi payung hukum bagi semua Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - c. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana; (iii) investor dalam negeri yang mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri; serta (iv) investasi sektor minyak dan gas, dengan mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan mendorong peningkatan produktivitas sumur-sumur tua, eksplorasi daerah baru, dan laut dalam.
 - d. Melakukan *review* secara berkala terhadap Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal agar lebih menarik bagi investor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan internasional yang baru.
2. Dalam rangka peningkatan layanan penanaman modal:
 - a. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden sebagai dasar hukum pengaturan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
 - b. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden terkait peta jalan harmonisasi regulasi untuk percepatan investasi. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan dan nonperizinan di pusat dan daerah

- untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dan mendorong perbaikan iklim penanaman modal yang lebih kondusif.
- c. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam rangka percepatan pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal.
 - d. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengenai pelimpahan/pendelegasian wewenang yang belum dilimpahkan/didelegasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Kepala BKPM.
3. Selain itu, akan dilakukan upaya perbaikan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mendorong percepatan realisasi dan meningkatkan daya tarik penanaman modal, antara lain:
- a. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertanahan dan perizinan lokasi.
 - b. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal di bidang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
 - c. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kenaikan upah provinsi dan kabupaten/kota yang mengakibatkan beban industri semakin besar dan menurunkan daya saing sehingga akan tercipta hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
 - d. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait penyederhanaan perizinan lingkungan.
 - e. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
 - f. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait ketahanan pangan.
 - g. Mendorong penerbitan peraturan terkait fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus seperti mendorong penerbitan peraturan pemerintah tentang fasilitas fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus untuk dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor untuk melakukan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus.
 - h. Mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu agar fasilitas *tax allowance* dapat diberikan sesuai dengan bidang usaha/sektor prioritas baru, pengembangan KEK, mendorong pemerataan penanaman modal di luar Jawa khususnya Papua dan Papua Barat serta pengembangan infrastruktur dan konektivitas.
 - i. Mendorong penerbitan peraturan perundang-undangan terkait fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan meliputi:

- 1) Industri pionir strategis.
- 2) Industri padat karya.
- 3) Industri yang memberikan nilai tambah, orientasi ekspor dan substitusi impor.
- 4) Penanaman modal untuk pengembangan daerah-daerah *remote* dan perbatasan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri dari target penanaman modal, target kinerja dan kerangka pendanaan.

4.1 Target Penanaman Modal

Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,0%, tingkat inflasi rata-rata 4,0% dan nilai tukar rata-rata Rp 11.900. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan total investasi (PMTB) Rp 22.534 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2010-2014). Peran PMTB terhadap PDB pada periode 2015-2019 rata-rata sebesar 35,4% atau meningkat dibandingkan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (32,6%). Dengan demikian, diharapkan peran investasi semakin meningkat dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk membiayai sumber investasi tersebut, diharapkan dari kredit perbankan sebesar Rp 5.694 triliun, penerbitan saham sebesar Rp 734 triliun, penerbitan obligasi sebesar Rp 3.428 triliun, dan dana internal masyarakat atau perusahaan sebesar Rp 8.555 triliun. Sisanya diharapkan akan dibiayai melalui pembiayaan luar negeri sebesar Rp 4.070 triliun.

Tabel 4.1 Proyeksi Ekonomi Makro dan Sumber Investasi

	Total 2010-2014	Proyeksi Tahun						Total 2015-2019*
	2015	2016	2017	2018	2019			
Pertumbuhan PDB (%)	6,0	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0		7,0
Inflasi	8,2	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5		4,0
Kurs nilai tukar Rupiah	11.600	12.000	12.150	12.100	12.050	12.000		11.900
Kurs nilai tukar Rupiah (digunakan PMA/PMDN)	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
PDB Harga Berlaku	41.384	11.837	13.224	14.829	16.562	18.514		74.996
Investasi (PMTB) (Rp Triliun)	13.479	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947		26.558
- Investasi Pemerintah (Rp Triliun)	1.048	493	673	763	937	1.158		4.024
- Investasi Masyarakat (Rp Triliun)	12.431	3.452	3.827	4.425	5.042	5.789		22.534
a. Kredit Perbankan (Rp Triliun)	2.480	752,4	894	1.078	1.323	1.646		5.694
% PDB	5,8	6,4	6,8	7,3	8,0	8,8		7,6
b. Luar Negeri (Rp Triliun)	2.111	617	703	799	911	1.040		4.070
% PDB	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6		5,4
c. Penerbitan Saham (Rp Triliun)	270	74	103	152	181	224		734
% PDB	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2		1,0
d. Penerbitan Obligasi (Rp Triliun)	1.203	443	606	705	803	925		3.428
% PDB	2,8	3,8	4,6	4,8	4,9	5,0		4,6
e. Dana Internal Masyarakat (Rp Triliun)	6.356	1.565	1.521	1.691	1.824	1.954		8.555
% PDB	14,9	13,2	11,5	11,4	11,0	10,5		11,4

Keterangan: *) Pertumbuhan PDB dan inflasi dihitung berdasarkan rata-rata
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, diolah BKPM

Pertumbuhan investasi periode 2015-2019 akan didorong oleh investasi Pemerintah dan Masyarakat. Investasi Pemerintah diharapkan akan meningkat peranannya, terutama untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, yaitu dari 9,6% pada tahun 2014 menjadi 16,7% pada tahun 2019. Adapun investasi masyarakat termasuk dunia usaha diharapkan juga

meningkat secara nominal dari Rp 3.144 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 5.789 triliun pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 84%.

BKPM menargetkan penanaman modal (PMDN dan PMA) tumbuh rata-rata 15,1% pada periode 2015-2019 yaitu dari Rp 463,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 933,0 triliun pada tahun 2019. Penentuan target tersebut telah mempertimbangkan potensi penanaman modal dan risiko ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia.

Tabel 4.2 Proyeksi Ekonomi dan Investasi Tahun 2015-2019

	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	10.200,9	11.837	13.224	14.829	16.562	18.514	74.996
Investasi (PMTB) harga berlaku (Rp Triliun)	3.477	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947	26.558
Investasi berdasarkan Institusi							
I. Pemerintah (Rp Triliun)	333	493	673	763	937	1.158	4.024
% PMTB	9,6	12,5	15,0	14,7	15,7	16,7	14,9
% Pertumbuhan	27,9	48,0	36,5	13,3	22,8	23,6	28,9
II. Masyarakat (Rp Triliun)	3.144	3.452	3.827	4.425	5.041	5.789	22.534
A. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Rp Triliun)	717,6	865,9	982,8	1.157,1	1.352,1	1.599,1	5.957,0
% PMTB	20,6	22,0	21,8	22,3	22,6	23,0	22,4
% Pertumbuhan	19,3	20,7	13,5	17,7	16,8	18,3	17,4
B. Usaha Menengah dan Besar (Rp Triliun)	2.426,1	2.585,7	2.844,3	3.267,7	3.689,5	4.189,9	16.577,1
1. PMDN dan PMA (Rp Triliun)	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6
% PMTB	13,3	13,2	13,2	13,1	13,3	13,4	13,2
% Pertumbuhan	16,2	12,2	14,5	14,1	16,7	17,7	15,1
2. Lain-lain (Hulu Migas) (Rp Triliun)	1.963,0	2.066,2	2.249,5	2.588,9	2.897,0	3.256,9	13.058,5

Keterangan : *) Persentase dihitung berdasarkan rata-rata, angka PDB yang digunakan merupakan harga dasar tahun 2010

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta diolah BKPM

Sesuai dengan meningkatnya kemampuan pengusaha dalam negeri dan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi, PMDN diharapkan meningkat perannya dari 32,7% pada tahun 2014 menjadi 38,9% pada tahun 2019. Untuk itu, PMDN diharapkan tumbuh rata-rata 19,5% pada periode 2015-2019. Peran PMA masih diperlukan untuk kegiatan usaha yang risikonya masih tinggi, biaya yang besar, membuka akses pasar, dan transfer teknologi. Selain itu, seperti terlihat pada Tabel 4.3 bahwa masih dibutuhkan pendanaan dari luar negeri untuk menjaga ketahanan neraca pembayaran yang diperkirakan masih menghadapi tekanan dari neraca perdagangan (defisit ekspor-impor).

Tabel 4.3 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
PMDN (Rp Triliun)	156,1	175,8	208,4	249,8	297,8	363,0	1.294,8
% Total	33,7	33,8	35,0	36,8	37,6	38,9	36,4
% Pertumbuhan	21,8	12,6	18,6	19,9	19,2	21,9	19,5
PMA (Rp Triliun)	307,0	343,7	386,4	429,0	494,7	569,9	2.223,8
Dalam USD miliar	29,2	28,6	32,2	35,8	41,2	47,5	185,3
% Total	66,3	66,2	65,0	63,2	62,4	61,1	63,6
% Pertumbuhan	13,5	12,0	12,4	11,0	15,3	15,2	13,2
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Kegiatan penanaman modal diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa peran penanaman modal di sektor sekunder meningkat dari 42,9% pada tahun 2014 menjadi 55,5% pada tahun 2019 sesuai dengan bidang usaha prioritas nasional. Penanaman modal di sektor primer masih dianggap penting, khususnya untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin pasokan bahan baku hilir perkebunan, mineral dan energi, serta sektor prioritas kemaritiman. Sementara itu, sektor jasa akan diarahkan untuk logistik dan tenaga listrik.

Tabel 4.4 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sektor

Sektor	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
Primer (Rp Triliun)	91,5	88,4	97,6	107,9	119,3	131,8	550,2
% Total	19,8	17,0	16,4	15,9	15,1	14,1	15,7
% Pertumbuhan	5,4	-3,4	10,4	10,6	10,6	10,5	6,5
Sekunder (Rp Triliun)	198,9	267,5	313,5	363,2	431,9	517,8	1.893,9
% Total	42,9	51,5	52,7	53,5	54,5	55,5	53,5
% Pertumbuhan	-1,1	34,5	17,2	15,9	18,9	19,9	19,6
Tersier (Rp Triliun)	172,7	163,6	183,7	207,7	241,3	283,4	1.079,7
% Total	37,3	31,5	30,9	30,6	30,4	30,4	30,8
% Pertumbuhan	55,9	-5,3	12,3	13,1	16,2	17,4	14,0
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, penanaman modal akan didorong ke luar Pulau Jawa, khususnya industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam seperti *smelter*, hilirisasi perkebunan dan kemaritiman. Untuk itu, peran penanaman modal di luar Pulau Jawa diharapkan meningkat dari 43,1% pada tahun 2014 menjadi 62,0% pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 23,7% yaitu dari Rp 199,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 578,5 triliun pada tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.5. Untuk itu, perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pemberian insentif fiskal.

Tabel 4.5 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
Jawa (Rp Triliun)	263,3	282,6	302,6	317,4	337,6	354,5	1594,7
% total	56,9	54,4	50,9	46,8	42,6	38,0	46,5
Sumatera (Rp Triliun)	71	75,2	90,2	106,5	132,2	163,1	567,2
% total	15,3	14,5	15,2	15,7	16,7	17,5	15,9
Kalimantan (Rp Triliun)	71,6	74,5	88,8	109	128,1	156,9	557,3
% total	15,5	14,3	14,9	16,1	16,2	16,8	15,7
Sulawesi (Rp Triliun)	29,2	27,8	38,1	51,3	72,7	102,6	292,5
% total	6,3	5,3	6,4	7,6	9,2	11,0	7,9
Bali dan Nusa Tenggara (Rp Triliun)	11,1	19,0	24,9	31,9	43,2	58,1	177,1
% total	2,4	3,7	4,2	4,7	5,5	6,2	4,8
Maluku (Rp Triliun)	1,4	7,3	9,5	13,4	16,1	18,7	65
% total	0,3	1,4	1,6	2,0	2,0	2,0	1,8
Papua (Rp Triliun)	15,5	33,2	40,8	49,3	62,6	79,1	265
% total	3,3	6,4	6,9	7,3	7,9	8,5	7,4
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Matrik proyeksi penanaman modal 2015-2019 berdasarkan sektor dan wilayah secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran V.

4.2 Target Kinerja

Berdasarkan proyeksi penanaman modal 2015-2019, BKPM menyusun target kinerja Tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6. Dalam upaya mencapai target kinerja pada masing-masing program, BKPM menyusun kegiatan yang secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran IV.

Tabel 4.6 Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019

Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
Program peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi	• Perbaikan kemudahan memulai berusaha	8 prosedur	8 prosedur	7 prosedur	6 prosedur	5 prosedur
		• Rencana investasi	865,8T	991,3T	1.131,3T	1.320,8T	1.555,0
		• Persentase kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan	78%	85%	86%	87%	88%
		• Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM	3,10 dari skala 4	3,15 dari skala 4	3,20 dari skala 4	3,25 dari skala 4	3,3 dari skala 4
		• Realisasi penanaman modal	Rp. 519,5T	Rp. 594,8T	Rp. 678,8T	792,5T	933,0T
		• Peta Potensi Sektor prioritas	12	12	14	14	14
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM	Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan	• Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		• Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	B	A	A
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM	Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana dan prsarana dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	2,8 dari skala 5	3,1 dari skala 5	3,3 dari skala 5	3,4 dari skala 5	3,6 dari skala 5

4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk menunjang program kegiatan BKPM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp 3.250 miliar yang akan didanai melalui APBN yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan tiap tahun dapat dilihat pada Anak Lampiran IV.

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan BKPM Tahun 2015-2019

Program	Rencana Pendanaan (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Program peningkatan daya saing penanaman modal	434,19	479,10	480,20	510,71	508,22	2.412,42
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM	148,57	149,59	162,01	163,11	171,08	794,35
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM	7,23	9,00	9,00	9,00	9,00	43,23
TOTAL ANGGARAN	589,99	637,69	651,21	682,82	688,30	3.250,00

BAB V

PENUTUP

Agar dapat lepas dari *Middle Income Trap*, dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu rata-rata 7,0% dan investasi (PMTB) rata-rata 10,2% pada tahun 2015-2019. Untuk mencapai pertumbuhan PMTB yang tinggi tersebut, BKPM menargetkan pertumbuhan PMDN/PMA rata-rata 15,1%. Sejalan dengan RPJMN, pada periode 2015-2019, BKPM juga akan mendorong peningkatan kualitas penanaman modal. Kualitas penanaman modal tercermin dari makin meningkatnya peranan PMDN, meratanya sebaran penanaman modal, peningkatan penanaman modal yang memberikan nilai tambah tinggi, penguatan struktur ekonomi (mendukung hilirisasi dan ketahanan neraca pembayaran), serta penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, BKPM akan memulai mendorong penanaman modal ke luar (*outward investment*) dalam rangka mendukung ketahanan pangan, energi, dan perluasan pasar (menjadi *regional player*).

Target kuantitas dan kualitas penanaman modal tahun 2015-2019, dapat dicapai dengan berbagai kebijakan yang mendukung penanaman modal, salah satunya adalah peningkatan iklim penanaman modal dan peningkatan promosi penanaman modal di dalam negeri. Salah satu kebijakan peningkatan iklim penanaman modal yang akan dilakukan oleh BKPM adalah pembentukan PTSP Pusat dan Daerah, serta harmonisasi dan penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal. PTSP Pusat direncanakan akan mulai berjalan sejak awal tahun 2015. Sementara itu, PTSP Daerah direncanakan akan mulai beroperasi penuh pada akhir tahun 2016. Selain itu, harmonisasi dan penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan lamanya proses perizinan baik di Pusat maupun di Daerah. Berbagai kebijakan dalam bidang pelayanan penanaman modal dilakukan demi tercapainya proses perizinan dan nonperizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

Untuk mendorong peran PMDN, BKPM akan meningkatkan kegiatan promosi di dalam negeri yang terpadu dan efektif dalam rangka mendorong minat penanam modal dalam negeri pada bidang usaha yang strategis dan menjadi prioritas nasional. Selain itu, BKPM juga akan meningkatkan perannya dalam mendorong penanaman modal sektor prioritas, pengembangan wilayah, dan infrastruktur strategis dari tahap perencanaan, promosi, pelayanan penanaman modal, perbaikan regulasi penanaman modal, pengendalian, dan fasilitasi penyelesaian masalah.

Kegiatan tersebut dalam Renstra BKPM 2015-2019 dituangkan dalam rencana program kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Rencana tersebut disusun terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, sektoral, dan daerah melalui koordinasi yang intensif dengan Bappenas, K/L, dan Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan agar semua kebijakan yang telah direncanakan

dapat berjalan dengan lancar dan saling mendukung satu sama lain. Seluruh kegiatan tersebut telah dilakukan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Strategis BKPM 2015-2019.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN
2015-2019

MATRIK SEKTOR PRIORITAS TAHUN 2015-2019

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
1. KETENAGALISTRIKAN DALAM RANGKA Mendukung KETAHANAN ENERGI					
Pembangkit Tenaga Listrik	1. PLTP (Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi)	Seluruh Indonesia	PLTP 1. Jawa 2. Sumatera 3. Maluku 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi	- Penederbitan proses perizinan sektor ketenagalistrikan - Dukungan terhadap kemudahan pemberian izin rencana pengembangan ketenagalistrikan - Harmonisasi kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan - Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur - Perubahan Perpres 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Promosi sektor ketenagalistrikan secara terintegrasi	- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat - Fasilitasi harmonisasi kebijakan investasi - Fasilitasi perubahan Perpres Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur - Fasilitasi Perubahan Perpres 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait kebijakan sektor ketenagalistrikan - Fasilitasi promosi sektor ketenagalistrikan melalui <i>Market Sounding/Business Forum/Roadshow</i>
	2. PLTG (Pusat Listrik Tenaga Gas)		PLTG 1. Sumatera 2. Kalimantan 3. Nusa Tenggara 4. Sulawesi 5. Jawa		
	3. PLTMG (Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas)		PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		
	4. PLTU (Pusat Listrik Tenaga Uap)		PLTU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		
	5. PLTA (Pusat Listrik Tenaga Air)		PLTA 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		
	6. PS (PLTA <i>Pump Storage</i>)		PLTA 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		
	7. PLTGU (Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap)		PLTGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		
	8. PLTM (Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro)		PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		
	9. PLTGU/MG (Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap/Mesin Gas)		PLTGU/MG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		
	10. PLTS (Pusat Listrik Tenaga Surya)		PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		
	11. PLTB (Pusat Listrik		PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
Pembangkit Tenaga Listrik	12. PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel)	Seluruh Indonesia	PLTD 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua	- Pemberian kesempatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) dengan pola <i>Feed-in Tariff</i> . - Percepatan Pembangunan Pembangkit 35.000 MW	- Fasilitasi pembuatan peraturan baru terkait Feed in Tariff untuk PLTB - Fasilitasi percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW - Koordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW - Fasilitasi proyek-proyek sektor ketenagalistrikan yang akan melakukan ekspansi dan yang berpotensi didorong untuk melakukan ekspansi - Fasilitasi investor yang berminat investasi di sektor ketenagalistrikan - Fasilitasi perusahaan-perusahaan/proyek-proyek sektor ketenagalistrikan yang terkendala (<i>bottlenecking</i>) - Fasilitasi investor yang mengajukan permohonan melalui PTSP Pusat
	13. PLTU-Bi (Pusat Listrik Tenaga Uap-Biomassa)		PLTU-Bi 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua		
	14. Saluran Transmisi		PLTA 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Kalimantan 5. Maluku 6. Nusa Tenggara 7. Papua 8. Sulawesi		
			PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua 8. Sulawesi		
			PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua 8. Sulawesi		
			PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua 8. Sulawesi		
			PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua 8. Sulawesi		
			PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua 8. Sulawesi		
			PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua 8. Sulawesi		
			PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua 8. Sulawesi		
			PLTB 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMG 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Nusa Tenggara 5. Sulawesi PLTM 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTMGU 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua PLTS 1. Jawa 2. Sumatera 3. Bali 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Maluku 7. Nusa Tenggara 8. Papua 8. Sulawesi		

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
			PLTU Biomassa - Papua - Saluran Transmisi - Seluruh Indonesia		
2. INDUSTRI PADAT KARYA					
Industri Makanan	1. Makanan Olahan (olahan daging, sapi, ayam, ikan, udang, dan lain-lain) 2. Teh Kemasan 3. Minuman Ringan 4. Rumput laut 5. Agar-agar 6. Caregeenan	- Jawa Barat - Jawa Tengah - Jawa Timur - Banten	- Jawa Timur - Jawa Barat - Banten - Riau - Kalimantan Tengah - Sumatera Utara - Nusa Tenggara Barat, Lampung - DKI Jakarta	- Pemberian insentif fiskal berupa penurunan bea masuk (import) bahan baku. - Pemberian insentif kebijakan fiskal berupa penurunan bea keluar/ekspor untuk <i>fast moving consumer goods</i> atau makanan dengan spesifikasi khusus. - Pemenuhan persyaratan dan standarisasi produk makanan dan minuman sesuai dengan standar mutu internasional. - Promosi ekspor produk makanan dan minuman secara terkoordinasi. - Harmonisasi kebijakan perpajakan dan retribusi terkait perjanjian bilateral dan multilateral. - Optimalisasi pemberian fasilitas Kawasan Industri Tujuan Ekspor (KITE) atau Kawasan Berikat (KB). - Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan subsektor industri makanan. - Perbaikan mekanisme penetapan upah minimum dan kenaikannya. - Peningkatan anggaran untuk penelitian dan pengembangan (R & D) untuk meningkatkan kualitas produk. - Peningkatan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi SNI dan <i>halal food</i>.	- Penyusunan peta investasi subsektor industri makanan (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Fasilitasi pemberian jaminan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas), berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, melalui kemitraan atau <i>matchmaking</i> dengan UKM dalam negeri. - Fasilitasi harmonisasi kebijakan investasi pada subsektor industri makanan dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait. - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama subsektor industri makanan, a.l: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia, Switserland. - Promosi "<i>safe food</i>" secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. - Fasilitasi investor yang berminat investasi di subsektor industri makanan. - Fasilitasi kebijakan bea masuk (BM) terhadap berbagai jenis bahan baku industri makanan. - Fasilitasi konsultasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
					modalnya di luar wilayah Indonesia (<i>outward direct investment</i>) pada industri makanan.
					- Fasilitasi sertifikasi produk makanan dan minuman sesuai dengan standar mutu internasional.
Industri Tekstil dan Produk Tekstil	1. Serat tekstil 2. Benang 3. Kain 4. Garmen 5. Tekstil khusus	- Jawa Barat (Bandung, Selatan, Cimahi, Purwakarta, Tangerang) - Jawa Tengah (Pekalongan, Semarang Selatan, Solo Raya)	- Gorontalo - Jawa Barat (Purwakarta, Majalengka) - Jawa Tengah (Wonogiri, Kendal dan Boyolali)	- Pengembangan investasi serat sintetik yang berorientasi pasar domestik (meminjang pengembangan produk industri tekstil dan produk tekstil) (TPT) yang menjadi karakteristik nasional) serta pasar ekspor. - Peninjauan kebijakan ekspor migas untuk memenuhi kebutuhan PTA dan MEG didalam negeri dan memberikan kontinuitas suplai energi dengan harga lebih efisien. - Peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri, terutama kain. - Perbaikan mekanisme penetapan upah minimum dan kenaikannya. - Peningkatan kemampuan SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan penyiapan Lembaga Sertifikasi Profesi khusus industri TPT. - Melanjutkan pemberian insentif revitalisasi mesin/peralatan industri TPT dengan perubahan mekanisme pengaturan pengalokasiannya, dalam rangka peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi. - Optimalisasi pemberian fasilitas Kawasan Industri Tujuan Ekspor (KITE) atau Kawasan Berikat (KB). - Perbaikan mekanisme penetapan upah minimum dan kenaikannya. - Pemberian insentif khusus industri padat karya.	- Pembaruan peta investasi subsektor industri TPT (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi investasi subsektor industri TPT, terutama untuk industri serat sintesis, non-woven, dan garmen. - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama subsektor industri TPT, a.l: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Austria, Tiongkok, India, Vietnam. - Fasilitasi pemberian jaminan pasokan energi koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait (Kemen ESDM, PT, PLN). - Fasilitasi kebijakan bea keluar (BK) terhadap berbagai jenis produk industri TPT yang bertujuan untuk mendorong ekspor. - Fasilitasi insentif fiskal investasi pada subsektor industri TPT berbasis bahan baku non-serat alam. - Kewajiban penggunaan produk tekstil dalam negeri.

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
				- Pemberian insentif bagi investor industri TPT khusus berteknologi tinggi dan rumah lingkungan. - Peningkatan dukungan sektor pembiayaan terhadap industri TPT dengan pemberian suku bunga yang lebih kompetitif - Pengembangan litbang teknologi dalam negeri yang terintegrasi dan berkualitas guna peningkatan daya saing, melalui pemberian insentif. - Pengembangan kebijakan pengamanan industri dalam negeri melalui <i>safeguards</i> dan tindakan pengamanan lainnya. - Kewajiban penggunaan produk tekstil dalam negeri	
Industri Kulit, Barang dari kulit, dan Alas Kaki	1. Alas kaki 2. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>) 3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit non-konvensional	- Jawa Barat - Jawa Timur	- Jawa Barat - Jawa Tengah - Jawa Timur	- Pengembangan investasi industri bahan baku kulit sintetis dalam negeri. - Pengembangan investasi industri alas kaki lokasi terintegrasi dengan industri TPT berada dalam satu kawasan industri (klaster). - Standarisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah. - Memfasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual design produk alas kaki nasional. - Peninjauan kebijakan ekspor bahan baku kulit mentah (<i>wet blue</i>). - Fasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit. - Efisiensi birokrasi pemeriksaan kesehatan kulit di Badan Karantina Pertanian. - Optimalisasi pemberian fasilitas Kawasan Industri Tujuan Ekspor (KITE) atau Kawasan Berikat (KB). - Melanjutkan pemberian fasilitas revitalisasi mesin/peralatan industri alas kaki dengan perubahan mekanisme	- Pembaruan peta investasi subsektor industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi investasi industri penyamakan kulit, industri kulit sintetis, dan industri alas kaki (sepatu olahraga, sepatu <i>fashion and customized</i>, sepatu <i>safety</i>). - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama subsektor industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, a.l: Jepang, Korea Selatan, Italia, Taiwan, Tiongkok. - Fasilitasi pemberian insentif fiskal <i>tax allowance</i> (TA). - Fasilitasi pemberian insentif pembebasan bea masuk. - Fasilitasi kemitraan dengan industri mikro dan kecil yang bergerak di subsektor industri alas kaki dan pendukungnya.

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
				- aturan pengalokasiannya. - Perbaikan mekanisme penetapan upah minimum dan kenaikan - Pemberian insentif khusus industri padat karya. - Penambahan balai pelatihan dan peningkatan modernisasi alat-alat praktik bekerjasama dengan pelaku industri alas kaki "<i>champion</i>". - Peningkatan dukungan sektor pembiayaan terhadap industri alas kaki dengan pemberian suku bunga yang lebih kompetitif - Pengembangan litbang teknologi dalam negeri yang terintegrasi dan mengikuti perkembangan mode. - Kewajiban penggunaan produk tekstil dalam negeri.	- Kewajiban penggunaan produk alas kaki dalam negeri.
Industri Mineral Non Logam	1. Split/Batubelah/Andesit 2. Pasir Kwarsa 3. Lempung/Clay/Tanah Urugan 4. Semen 5. Keramik	- Jawa Timur - Jawa Barat - Sulawesi Selatan - Jawa Tengah	- Jawa Barat - Banten - Jawa Timur - Kalimantan Selatan - Sumatera Utara - Papua - Papua Barat	1. <u>Semen</u> - Pengembangan industri semen nasional khususnya di daerah Timur Indonesia. - Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam rekayasa, fabrikasi dan konstruksi pabrik semen. - Pemberian keamananan jaminan pasokan batubara melalui pemanfaatan potensi yang ada untuk industri semen nasional. - Peningkatan kemampuan rekayasa dan fabrikasi pabrik – pabrik semen generasi baru yang lebih efisien dan hemat energi. 2. <u>Keramik</u> - Peningkatan efisiensi dan konservasi energi. - Penerapan dan pengawasan SNI. - Pengembangan kompetensi SDM bagi industri keramik. - Pengembangan industri pemurnian dan penyapian bahan baku. - Pengembangan industri keramik bernilai tambah tinggi (<i>advanced ceramic</i>). - Pengembangan bidang desain, rekayasa	- Penyusunan peta investasi industri mineral non logam khususnya industri semen dan keramik (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama subsektor industri mineral non logam, a.l: Jepang, Tiongkok, India, Italia, Spanyol. - Fasilitasi pemberian jaminan pasokan energi koordinasi dengan Kementerian/ lembaga terkait (Kemen ESDM, PT, PLN). - Fasilitasi insentif fiskal bea masuk (BM) khususnya untuk industri keramik. - Fasilitasi konsultasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia (<i>outward direct investment</i>)

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
				dan pabrikasi pabrik keramik yang hemat energi.	terutama industri semen dalam rangka perluasan pasar.
3. INDUSTRI PERTANIAN UNTUK Mendukung Ketahanan Pangan dan Industri Pengolahan Hasil-Hasil Pertanian untuk Meningkatkan Nilai Tambah Ekspor					
Tanaman Pangan dan Perkebunan	Gula pasir berbasis tebu	- Jawa Timur - Lampung - Jawa Barat - Jawa Tengah - Sumatera Utara - Sulawesi Selatan - Gorontalo	- Papua (Merauke) - Sulawesi Tenggara (Konawe dan Muna) - Jawa Barat (Cirebon) - Jawa Timur (Madura) - Kalimantan Barat (Sambas) - Nusa Tenggara Barat (Dompu)	- Pembangunan pabrik gula pasir berbasis tebu dan perkebunan baru di luar Jawa. - Peningkatan produktivitas dan efisiensi tebu masyarakat. - Penyelesaian masalah status lahan. - Pembangunan infrastruktur (pelabuhan dan jalan). - Revitalisasi pabrik gula lama. - Amsalgamasi pabrik gula dengan kapasitas kecil di Jawa.	- Penyusunan peta investasi industri gula pasir berbasis tebu (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan) dengan memperhitungkan ketersediaan lahan perkebunan tebu. - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama industri gula pasir berbasis tebu dan turunannya: Brasil, Thailand. - Fasilitas pelayanan perizinan bagi investasi pembangunan pabrik gula baru (untuk menggantikan beberapa pabrik gula eksisting). - Fasilitas kerjasama swasta dengan pabrik BUMN untuk meningkatkan kinerja pabrik gula. - Mendukung kepastian tata ruang daerah sesuai dengan tata ruang nasional. - Koordinasi promosi potensi pembangunan pabrik gula baru pada investor potensial (dalam dan luar negeri).
	Kedelai	- Jawa Timur - Lampung - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara - Nusa Tenggara Barat		- Penyediaan areal perkebunan oleh Pemerintah - Pemberian insentif bagi petani kedelai - Pemberian subsidi harga kedelai - Penyediaan benih unggul tepat waktu.	- Penyusunan peta investasi komoditas kedelai (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Fasilitas penyediaan areal kedelai yang sesuai dan legal (luasan areal). - Promosi dan kerjasama dengan negara maju dalam riset kedelai, a.l. Brasil. - Koordinasi promosi investasi dengan BUMN.

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
	Crude Palm Oil (CPO) dan turunan, a.l.: - CPO - Oleokimia - Kemurgi	- Sumatera Utara - Riau - Kalimantan Barat - Lampung	- Sumatera Selatan - Kepulauan Riau - Lampung Barat - Kalimantan Timur (Malay) - Papua	- Pengembangan industri turunan CPO, antara lain industri oleokimia dan biodiesel - Konsistensi penggunaan biodiesel dalam negeri, melalui produksi biodiesel hingga 10 juta KL - Pemberian jaminan pasar produk biodiesel - Legalisasi kebun dan produk CPO	- Pembaharuan peta investasi industri oleokimia dan biodiesel (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi investasi industri oleokimia dan biodiesel - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama subsektor industri makanan, a.l. Jepang, Malaysia, Belanda. - Fasilitas Sertifikasi RSPO dan ISPO (data yang sudah dan belum terdaftar). - Sosialisasi keamanan CPO sebagai pangan.
	Karet dan produk karet, a.l.: - Crumb Rubber (TSNR) - Produk Karet (Ban, Benang Karet, Compound, Glove, Selang)	- Aceh - Sumatera Utara - Riau - Jambi - Sumatera Selatan - Lampung - Kalimantan Barat - Kalimantan Tengah - Bengkulu	- Kalimantan Tengah - Kalimantan Timur - Papua - Aceh - Kalimantan Barat	- Perbaikan tanaman karet dengan klon unggul - Perbaikan tata niaga karet - Pembangunan industri hilir - Penguatan kelompok dan koperasi petani - Fasilitas penelitian dan pengembangan terintegrasi sebagai upaya penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk karet - Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan IKM	- Penyusunan peta investasi industri karet (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi investasi industri hilir karet. - Promosi investasi pembangunan industri <i>crumb rubber</i> di beberapa daerah sentra boker oleh investor dalam negeri (antara lain: Aceh).
	Kakao dan olahannya, a.l.: - Biji Kakao - Kakao Olahan (<i>Butter</i>, Pasta, <i>Powder</i>)	- Sumatera Utara - Sumatera Barat - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara	- Sulawesi Selatan - Jawa Barat - Jawa Timur	- Pemberian insentif bagi biji hasil fermentasi - Penggantian dengan varietas unggul - Fasilitas kebijakan tarif bea masuk (BM) biji kakao dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha petani kakao dan kelangsungan industri pengolahan kakao dalam negeri - Penguatan kelompok tani kakao - Pembangunan industri makanan berbasis kakao	- Pembaharuan peta investasi industri kakao (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama subsektor industri makanan berbasis kakao, a.l. Jepang, Malaysia, Switzerland. - Fasilitas inventif lokal <i>for allouance</i> (TA) bagi industri berbasis kakao.

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
Kehutanan		- Riau - Sumatera Selatan - Kalimantan Barat - Kalimantan Timur - Kalimantan Selatan - Kalimantan Barat	- Kalimantan Selatan - Kalimantan Barat - Kalimantan Timur - Sumatera Selatan - Riau - Jambi	- Koordinasi kebijakan yang lebih intensif dengan Kab./Kota tentang penyusunan dan perubahan RTRWP yang berkaitan dengan kawasan hutan - Peningkatan operasi pengaman dan perlindungan hutan yang lebih intensif dan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait yakni polisi serta masyarakat peduli kelestarian hutan - Peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan kegiatan aneka usaha tani melalui PHBM dengan tanaman produktif (porang, ketela pohon, jagung) & pengembangan wana farma. - Pengaturan dan sosialisasi regulasi peraturan bidang kehutanan tentang industri hasil hutan - Peningkatan penelitian, pengembangan dan standarisasi penilaian hasil hutan non kayu dalam rangka meningkatkan PMBP bagi Pemerintah. - Penyelesaian kasus sengketa penggunaan lahan (enclosure), simpang pakai kawasan hutan, dan pengalihan fungsi hutan ke bidang lainnya secara cepat dan tepat menurut peraturan yang berlaku.	- Penyusunan peta investasi subsektor kehutanan, khususnya industri furniture dan rotan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil hutan (supply-demand, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi ekspor hasil hutan yang sesuai standar internasional. - Fasilitasi kebijakan Bea Keluar (BK) terhadap berbagai jenis produk industri hasil hutan yang bertujuan untuk mendorong ekspor. - Fasilitasi koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk mendorong investasi di subsektor kehutanan. - Fasilitasi bantuan dan konsultasi pada investor untuk menyelaraskan rencana investasi dengan RTRW, khususnya untuk RTRW hutan.
Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	1. Ban 2. Benang karet 3. Compound 4. Glove 5. Selang	- Jawa Timur - Jawa Barat - Banten	- Jawa Barat - Banten	- Pengembangan investasi industri ban sehingga menjadi salah satu basis industri ban dunia - Peningkatan produktivitas karet alam dan kualitas bahan olah karet - Pengembangan dan peningkatan daya saing industri barang – barang karet untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri - Pengembangan beragam industri barang – barang karet engineering - Pengembangan industri pemrosesan pendukung untuk pengembangan industri barang – barang karet	- Penyusunan peta investasi subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik (supply-demand, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi investasi subsektor industri karet, barang dari karet, dan plastik. - Fasilitasi kebijakan Bea Keluar (BK) terhadap berbagai jenis produk industri karet, barang dari karet dan plastik yang bertujuan untuk mendorong ekspor.

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
				- Penerapan wajib SNI barang-barang karet dan harmonisasi standar internasional barang-barang karet komponen otomotif - Peningkatan kompetensi SDM industri barang – barang karet.	- Fasilitasi pemberian jaminan pasokan energi, koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait (Kemend. ESDM, PT, PLN), untuk subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik. - Fasilitasi konsultasi penanaman modal dalam negeri yang menjelaskan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia (outward direct investment) terutama industri ban dalam rangka perluasan pasar.
4. INDUSTRI KEMARITIMAN					
Industri Perkapalan	1. Kapal laut 2. Komponen kapal (mekanik & elektronik) 3. Perawatan kapal	- Kepulauan Riau (KPBPP Batam) - Jawa Timur - Kalimantan Timur - Jabodetabek	- Jawa Timur (Lamongan) - Kepulauan Riau (KPBPP Batam)	- Pengembangan investasi industri perkapalan, terutama kapal dengan kapasitas > 50.000 DWT, serta kapasitas 1.200 – 3.000 DWT untuk mendukung konektivitas daerah Barat – Timur Indonesia untuk angkutan barang strategis melalui <i>Short Sea Shipping</i> (SSS) - Pemberian insentif fiskal <i>tax allowance</i> (TA) atau <i>tax holiday</i> (TH) - Penggunaan bahan baku baja dalam negeri guna melindungi serbuan produk impor dengan instrumen <i>dumping</i>, <i>safeguard</i> dan tindakan pengaman lainnya - Dukungan pembiayaan sektor perbankan dan jaminan Pemerintah - Harmonisasi kebijakan terkait izin transportasi laut, diintegrasikan dengan transportasi darat.	- Penyusunan peta investasi industri perkapalan (supply-demand, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama industri perkapalan, yakni: Korea Selatan, Jepang, Singapura, Jerman, dan Negara-negara Skandinavia (Norwegia, Finlandia, dan lainnya). - Promosi investasi industri perkapalan, terutama kapal dengan kapasitas > 50.000 DWT, serta kapasitas 1.200 – 3.000 DWT untuk mendukung konektivitas daerah Barat – Timur Indonesia untuk angkutan barang strategis melalui <i>Short Sea Shipping</i> (SSS). - Fasilitasi pemberian insentif fiskal <i>tax allowance</i> (TA) atau bila dimungkinkan <i>tax holiday</i> (TH).
Perikanan	Berbasis Perikanan Tangkap	- DKI Jakarta - Jawa Barat - Jawa Timur - Sulawesi utara		- Peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya sesuai potensi dan keunggulan lokal.	- Penyusunan peta investasi perikanan baik yang berbasis perikanan tangkap maupun berbasis perikanan budidaya (supply-demand, potensi investasi,

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
	Berbasis Perikanan Budidaya: 1. Udang 2. Rumput Laut 3. Nila 4. Patin 5. Lele	1. Udang - Lampung (Kab. Tulang Bawang) - Sulawesi Selatan (Kab. Pinrang) - Kawasan Pantura Jawa (Kab. Indramayu) 2. Rumput Laut - Kawasan Bali-Nusa Tenggara (Sumbawa-NTB, dan Sumba Timur-NTT) - Kawasan Sulawesi (Morowali-Sulawesi Tengah) 3. Nila Sumatera Selatan (Kab. Musi Rawas)		- Peningkatan produktifitas perikanan tangkap dengan memperhatikan ketersediaan stok dan aspek kesinambungan. - Revitalisasi tambak tidak produktif. - Pengasaan dan inovasi teknologi interaktif untuk pembesaran komoditas ikan strategis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. - Penguatan sistem dan jaringan penyediaan induk dan perbenihan, terutama di daerah Timur Indonesia. - Pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan dan sarana penangkapan ikan. - Pengembangan Sistem Logistik (Sislog) yang mendukung pengembangan industri perikanan. - Kebijakan pembinaan mutu produk hasil pengolahan ikan sesuai standar baik untuk konsumsi lokal dan ekspor. - Peningkatan utilisasi dan revitalisasi industri pengolahan atas kapasitas produksi hasil perikanan. - Pengembangan sistem produksi sesuai preferensi konsumen nasional. - Intensifikasi kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik dalam mengkonsumsi ikan. - Membangun Kerjasama bilateral & multilateral untuk mengurangi potensi hambatan tarif dan non-tarif. - Mempertahankan dan memperluas akses ke pasar ekspor tradisional serta membuka pasar ekspor baru seperti Tiongkok, Korea Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.	- lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi ekspor produk perikanan berbasis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. - Fasilitasi insentif bea masuk untuk pakan ikan.
5. INDUSTRI SUBSTITUSI IMPOR BAHAN BAKU DAN KONSUMSI UNTUK DALAM NEGERI					
Industri Kimia Dasar, Barang	1. Petrokimia hulu 2. Kimia organik 3. Pupuk	- Banten - Jawa Timur - Kalimantan	Kalimantan Timur, untuk basis C1 (gas	Pembangunan kilang minyak sebanyak 1 unit dengan total kapasitas 300 barel per hari	Pembaharuan peta investasi industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi (<i>supply-demand</i>).

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
Kimia, dan Farmasi ⁴⁾	4. Resin sintetis 5. Farmasi dan obat-obatan	Timur	- Jawa Timur, untuk basis aromatik - Banten, untuk basis olefin - Jawa Barat, untuk basis olefin - Jawa Tengah, untuk basis aromatik - Papua Barat, untuk basis C1 (gas alami) - Sumatera Selatan, untuk basis Batubara	- Pengembangan industri petrokimia hulu sebagai bahan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku/substitusi impor - Pengembangan <i>National Grand Strategy</i> pengintegrasian industri hulu, antara dan hilir sebagai prasyarat dalam membangun industri petrokimia yang kuat, stabil dan mandiri. - Pemantapan struktur industri petrokimia, peningkatan efisiensi produksi, perluasan lapangan kerja dan percepatan alih teknologi. - Pengembangan strategi simulan yaitu peningkatan utilisasi, penguatan struktur industri petrokimia yang terkait pada semua tingkat dalam rantai nilai (<i>value chain</i>), pengembangan teknologi masa depan dan pengembangan klaster. Khusus industri farmasi dan obat-obatan - Peningkatan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan terintegrasi. - Penguatan infrastruktur untuk penerapan standar-Farmakope Indonesia. - Pengembangan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar. - Pembangunan kompetensi dan kapabilitas riset farmasi untuk produk bioteknologi dan herbal.	- potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi investasi pembangunan kilang minyak sebanyak 1 unit dengan total kapasitas 300 barel per hari, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan institusi terkait. - Promosi investasi industri kimia dasar berbasis aromatik, olefin maupun gas alam. - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama subsektor industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi, yakni Inggris, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Jerman, Kanada, Belanda. - Fasilitasi kebijakan bea masuk (BM) terhadap berbagai jenis bahan baku impor subsektor industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi. - Fasilitasi pemberian insentif fiskal <i>tax allowance</i> (TA) atau <i>tax holiday</i> (TH). - Fasilitasi harmonisasi kebijakan investasi subsektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi dengan kementerian teknis/lembaga terkait untuk mempercepat pengembangan industri petrokimia terintegrasi. - Fasilitasi kerjasama dengan kementerian teknis/lembaga terkait (Kemend. ESDM, PT, PLN) untuk keberlangsungan jaminan pasokan energi yang cukup untuk kepentingan produksi. - Terlibat aktif dalam pengembangan roadmap jangka panjang industri
Industri Logam	1. Besi baja dasar 2. Logam dasar bukan	- Banten - Jawa Barat	- Banten - Jawa Barat	Pengembangan roadmap jangka panjang industri berbasis mineral.	Terlibat aktif dalam pengembangan roadmap jangka panjang industri

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
Dasar. Barang Logam, Mesin, dan Elektronik ^{a)}	- besi - Alumina - Aluminium - Nickel matte - Tembaga katoda 3. Logam mulia 4. Logam tanah jarang [rare earth] 5. Aneka logam (hasil samping/by product smelter)	- Jawa Timur	- Jawa Timur - Kalimantan Selatan - Sulawesi Tenggara - Maluku Utara - DKI Jakarta - Papua	- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi kebutuhan impor dengan utilisasi instrumen tarif bea keluar (BKL). - Optimalisasi penggunaan instrumen tarif, antara lain penetapan tarif bea masuk produk baja. - Evaluasi penetapan tarif bea masuk produk baja antara untuk menyerap produk baja dalam negeri yang kurang kompetitif dibandingkan produk impor. - Pemberian insentif fiskal investasi strategis. - Penetapan SNI terhadap produk baja secara lebih meluas. - Penetapan kebijakan energi untuk diprioritaskan bagi industri baja dalam negeri baik yang bersumber pada gas maupun batubara. - Pengembangan kebijakan harmonisasi tarif industri baja dalam negeri. - Penerapan secara konsisten dan optimal kebijakan pengamanan perdagangan (instrumen <i>safeguard</i> , anti dumping, anti subsidi, dll) dalam melindungi industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik dalam negeri.	- berbasis mineral, berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. - Penyusunan peta investasi industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik (<i>supply-demand</i> , potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Promosi investasi industri baja (<i>iron making</i> dan <i>steel making</i>), dan industri baja turunan penghasil produk-produk tertentu antara lain: HRC, HR plate, CRC/S, sesuai dengan <i>supply-demand</i> . - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama subsektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, a.l: Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, India, Tiongkok. - Promosi investasi, khususnya industri pengolahan dan penurutan besi baja (bijih besi, pasir besi), dan logam dasar bukan besi (nikel, aluminium, tembaga) dan memastikan keterkaitan dan keberlangsungan usaha (<i>forward-backward linkages</i>). - Fasilitasi pelayanan perizinan investasi yang lebih selektif, terutama industri baja, diperketat dengan persyaratan teknis, teknologi ramah lingkungan. - Fasilitasi kebijakan bea masuk (BM) terhadap berbagai jenis bahan baku impor industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik. - Fasilitasi pemberian insentif fiskal <i>tax allowance</i> (TA) atau <i>tax holiday</i> (TH). - Fasilitasi pemberian jaminan pasokan energi koordinasi dengan

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
					kementerian/ lembaga terkait (Kemendagri, PT, PLN). - Harmonisasi ketentuan perundangn terkait insentif fiskal, khususnya terkait kawasan ekonomi.
Peternakan	Sapi potong	- Jawa Timur - Jawa Tengah - Bali - Nusa Tenggara Timur - Nusa Tenggara Barat - Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara	- Jawa Timur (bagian selatan, Madura) - Nusa Tenggara Timur - Nusa Tenggara Barat - Sulawesi Selatan - Aceh - Papua	- Peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penambahan pakan yang cukup. - Pemediaan bibit unggul untuk peternakan kecil. - Penambahan populasi bibit induk sapi dan inseminasi buatan. - Pengembangan kawasan peternakan sapi dengan mendorong investasi swasta dan BUMN dan peternakan sapi rakyat termasuk salah satunya melalui integrasi sapi-sawit. - Pembangunan peternakan besar di daerah Timur Indonesia. - Penguatan modal peternakan kecil melalui peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan dan penyempurnaan skim kredit yang didukung Pemerintah.	- Penyusunan peta investasi peternakan (<i>supply-demand</i> , potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Fasilitasi bantuan dan konsultasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia (<i>forward direct investment</i>) pada subsektor peternakan. - Promosi investasi pembibitan sapi unggul. - Promosi investasi pembangunan peternakan skala besar di wilayah timur (<i>ranch</i>) (bekas lahan pertambangan di NTT). - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara utama subsektor peternakan, yakni: Australia, New Zealand. - Fasilitasi pemberian insentif pembibitan sapi unggul. - Fasilitasi pembangunan infrastruktur terutama pelabuhan ternak (<i>port shipping</i>) di sentra produksi ternak.
Industri permesinan	Alat kelistrikan 1. Motor/generator listrik 2. Baterai 3. Solar cell Mesin TPT 4. Mesin <i>sewing</i>	- Jawa Barat - Jawa Tengah	- Jawa Barat - Jawa Tengah - DI Yogyakarta - Jawa Timur	<u>Alat Kelistrikan</u> - Pengembangan investasi industri pembuat magnet - Pengembangan investasi industri komponen pembangkit listrik tenaga surya - Pengembangan investasi industri generator up kapasitas 3 – 25MW;	- Penyusunan peta investasi industri permesinan alat kelistrikan (<i>supply-demand</i> , potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Penyusunan/pembaharuan peta investasi industri permesinan TPT (<i>supply-demand</i> , potensi investasi,

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
	(pertununan) 5. Mesin <i>Knitting</i> (perajutan) 6. Perawatan dan perbaikan mesin TPT, terutama mesin <i>spinning</i> dan <i>weaving</i>			- industri mesin uap (turbin gas dan uap) dan generator kapasitas > 30MW - Fasilitas alih teknologi industri sel-surya melalui pendirian atau akuisisi - Fasilitas penelitian dan pengembangan produk sel surya untuk implementasi di industri dan masyarakat - Fasilitas penelitian kabel semi konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor/generator listrik yang efisien Mesin TPT - Pengembangan investasi industri permesinan mesin <i>weaving</i> (pertununan) - Pemberian insentif bagi industri TPT yang melakukan perluasan usaha di bidang reparasi mesin TPT, terutama mesin <i>spinning</i> (pemintalan) dan <i>weaving</i> (pertununan) - Perlunya dukungan pembiayaan sektor perbankan dan jaminan Pemerintah - Fasilitas penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi <i>design, engineering</i>, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika - Peningkatan peran IKM dalam rantai pasok komponen industri permesinan melalui pengembangan sentra industri pembuat <i>tools</i> dan komponen presisi.	- lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan) - Promosi investasi industri generator uap kapasitas 3 – 25MW; serta industri mesin uap (turbin gas dan uap) dan generator kapasitas > 30MW - Promosi investasi industri mesin TPT <i>weaving</i> (pertununan) terutama <i>shuttle-less loom</i> (<i>usuter/air</i>). - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara tujuan investasi utama subsektor industri permesinan alat kelistrikan dan permesinan industri TPT, yakni: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, dan Tiongkok. - Fasilitas pemberian insentif fiskal <i>tax allowance</i> (TA) atau <i>tax holiday</i> (TH) - Fasilitas untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari sektor perbankan dan jaminan Pemerintah
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	1. Otomotif (Kendaraan Bermotor) 2. Komponen otomotif	- Jawa Timur - Jawa Barat - Kepulauan Riau - DKI Jakarta	- Jawa Barat - Jawa Timur - DKI Jakarta - Banten	- Pelaksanaan pengembangan <i>roadmap</i> industri alat transportasi secara komprehensif yang bersifat antar moda untuk upaya mendukung peningkatan konektivitas dalam negeri. - Pengembangan pasar domestik melalui harmonisasi tarif dan perpajakan. - Penguatan industri permesinan melalui revitalisasi mesin/peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api, dan pesawat terbang.	- Fasilitas kebijakan bea masuk (BM) terhadap berbagai jenis bahan baku impor subsektor industri alat angkut dan transportasi lainnya. - Pembuatan peta investasi industri alat angkutan dan transportasi lainnya khususnya subsektor industri komponen otomotif (<i>supply-demand</i>), potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
				- Peningkatan kemampuan industri komponen otomotif dalam negeri. - Pemberian insentif untuk industri yang melakukan pengembangan penelitian dan pengembangan (R & D). - Pengembangan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri otomotif. - Pengembangan standarisasi produk, proses, manajemen (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau. - Pemberian insentif fiskal untuk menarik investasi industri komponen berteknologi tinggi. - Penguatan <i>supply chain</i> IKM modern (logam, karet, plastik, kulit).	- pengembangan). - Fasilitas untuk mendorong aliansi strategis dengan pemain otomotif utama dunia. - Promosi investasi industri komponen otomotif. - Promosi dan Kerjasama investasi ke negara-negara tujuan investasi utama subsektor industri alat angkutan dan transportasi lainnya, yakni: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, Jerman, Italia, Prancis.
6. INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK PERTAMBANGAN UNTUK MEMBERIKAN NILAI TAMBAH EKSPOR					
Pertambangan (terintegrasi dengan pengolahan lainnya)	1. Bijih besi 2. Pasir besi 3. Nikel 4. Bauksit 5. Tembaga 6. Mangan 7. Logam mulia 8. Logam tanah jarang (<i>rare earth</i>) 9. Aneka logam (<i>hasil sampingan/by product smelter</i>)	1. Bijih besi (Kalimantan Selatan) 2. Pasir besi (DI Yogyakarta) 3. Nikel (Sulawesi Selatan) 4. Bauksit (Bintan, Riau) 5. Tembaga (Papua) 6. Mangan (DI Yogyakarta, Jawa Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat) 7. Logam mulia (Aceh, Riau, Bengkulu).	- Bijih besi: Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan - Pasir besi: DI Yogyakarta, Jawa Tengah - Nikel: Maluku Utara, Sulawesi Tenggara - Bauksit: Kalimantan Barat - Tembaga: Papua - Mangan: DI Yogyakarta - Logam mulia: Aceh, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat - Aneka logam	- Mendorong <i>Public Private Partnership</i> (PPP) sebagai kerangka kebijakan khususnya di bidang pertambangan. - Harmonisasi kebijakan teknis pelaksanaan lintas kementerian teknis/lembaga yang mendukung kegiatan pada subsektor pertambangan seperti eksplorasi, konstruksi, produksi, jasa usaha pertambangan dan pengirisan hasil produksi. - Penetapan pemerintah tentang akses informasi data hasil eksplorasi dan eksploitasi yang dimiliki oleh pelaku usaha pertambangan. - Penataan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menetapkan WE/WUP/WUPK. - Pertimbangan keberlangsungan nilai ekonomis atas pelaku usaha pemegang KK/PPK2B dengan memperhitungkan penyusutan volume cadangan serta konsekuensi atas nilai investasi sebelumnya - Review Permendag Nomor 32/2013 tentang tata niaga timah, khususnya	- Penyusunan peta investasi industri pengolahan hasil pertambangan khususnya mineral logam dan aneka logam (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan). - Fasilitas kebijakan Bea Kehar (BK) terhadap berbagai jenis mineral yang bertujuan untuk mengendalikn ekspor. - Fasilitas harmonisasi kebijakan investasi pada pertambangan dengan kementerian teknis/lembaga/pemda terkait. - Fasilitas penyusunan mekanisme kemitraan sektor publik dan swasta di bidang investasi pertambangan. - Fasilitas bantuan dan konsultasi pada investor untuk menyelaraskan rencana investasi dengan RTRW. - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara tujuan investasi utama industri alat angkutan dan transportasi lainnya, yakni:

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
		Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Papua, NTB) 8. Aneka Logam (Banten, Jawa Barat.)		terkait kewenangan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk mengelola tata niaga timah) - Pemberian insentif fiskal dalam menentukan besaran pajak ekspor atau bea keluar (BK) berdasarkan pada progres pembangunan smelter secara bertingkat. Semakin besar progres pembangunan smelter-nya, semakin kecil BK yang akan dikenakan.	Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, Australia.
7. INDUSTRI PARIWISATA					
Pariwisata	1. Kawasan Pariwisata 2. Daya Tarik Wisata 3. Jasa Transportasi Wisata 4. Jasa Perjalanan Wisata 5. Jasa Makanan dan Minuman 6. Penyediaan Akomodasi 7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 8. Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 9. Jasa Informasi Pariwisata 10. Jasa Konsultan Pariwisata 11. Jasa Promuwisata 12. Wisata Tirta 13. Usaha SPA	1. KSPN Tobo, Sumatera Utara 2. KSPN Kepulauan Seribu, DKI Jakarta 3. KSPN Kota Tua-Sunda Kelapa, DKI Jakarta 4. KSPN Boreobudur, Jawa Tengah 5. KSPN Bromo-Tenger, Jawa Timur 6. KSPN Kintamani-Batur, Bali 7. KSPN Menjangan, Penuturan, Bali 8. KSPN Kuta, Sanur, Nusa Dua, Bali 9. KSPN Rinjani, NTB 10. KSPN Komodo, NTT	- Bugan Raya, Kalimantan Tengah - Palalawan (Bone), Riau - Wakatobi, Sulawesi Tenggara - Tobasa, Sumatera Utara - Saumlaki, Maluku - Sabang, NAD - Bintan, Kep. Riau - Anambas, Kep. Riau - Rote, NTT - Omtungitoli, Sumatera Utara - Nias Utara, Sumatera Utara - Bangka, Kepulauan Bangka Belitung - Sumenep, Jawa Timur - Tanjung Lesung, Banten	- Percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARD), Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-KP), bagi Pemerintah Provinsi, Kab./Kota yang belum menyelesaikannya sehingga proyek investasi pariwisata yang terhambat karena tidak adanya dokumen bisa berjalan kembali - Meningkatkan jumlah sekolah menengah kejuruan pariwisata, akademi atau pelatihan-pelatihan di bidang pariwisata untuk meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian di bidang pariwisata yang berdaya saing - Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah pariwisata (jalan, air bersih, pengelolaan limbah, listrik, dan telekomunikasi) - Meningkatkan jumlah transportasi darat, laut dan udara yang belum memadai di wilayah pariwisata. - Perlunya insentif dari pemerintah daerah bagi investor yang berusaha dibidang pariwisata di daerah tersebut. - Jaminan keamanan dan ketertiban di daerah wisata.	- Penyusunan peta investasi pariwisata (<i>supply-demand</i>), potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan], beserta perencanaan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk daerah yang memiliki potensi wisata agar menjadi menarik. - Penyusunan perencanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata khususnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk mengidentifikasi produk wisata yang berpotensi dikembangkan, regulasi investasi, kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya di wilayah pariwisata, kendala dan strategi pengembangan pariwisata ke depannya. - Fasilitasi investor yang akan menanamkan modalnya di bidang pariwisata. - Fasilitasi pertemuan antara investor, BKPM, instansi terkait, pemerintah daerah, masyarakat sekitar dan <i>stakeholder</i> lainnya untuk membahas kendala investasi yang dihadapi investor dan solusinya.

Subsektor	Rincian Subsektor/Komoditas	Lokasi Eksisting	Lokasi Pengembangan	Rekomendasi Kebijakan	Program
		11. KSPN Ende-Kelimutu, NTT 12. KSPN Tanjung Puting, Kalimantan Tengah 13. KSPN Toraja, Sulawesi Selatan 14. KSPN Bunaken, Sulawesi Utara 15. KSPN Wakatobi, Sulawesi Tenggara 16. KSPN Raja Ampat, Papua Barat	- Mandalika, NTB - Teluk Mekaki, NTB - Belitung, Bangka Belitung - Medana Bay, NTB - Tanjung Ringgit, NTB	- Percepatan Pelayanan penanaman modal di daerah dengan mengoptimalkan pelaksanaan PTSP. - Peningkatan infrastruktur IT di daerah dalam rangka mendukung kegiatan promosi investasi pariwisata (<i>Wifi</i> , internet, telepon, <i>faximile</i> , telex)	- Fasilitasi bimbingan dan PTSP daerah. - Koordinasi dan harmonisasi kebijakan penanaman modal di bidang pariwisata dengan instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, investor, masyarakat setempat dan <i>stakeholder</i> lainnya. - Sosialisasi kebijakan investasi di bidang pariwisata baik di pusat maupun daerah. - Promosi daerah-daerah wisata maupun daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. - Promosi dan kerjasama investasi ke negara-negara tujuan investasi utama pariwisata, yakni: Singapura, Australia, New Zealand, Jepang, Belanda.

Keterangan:
*) Termasuk dalam subsektor yang dikembangkan dalam rangka substitusi impor.
**) Termasuk dalam sektor yang dikembangkan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan substitusi impor.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-
2019

MATRIK RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015-2019

Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Tahun 2015-2019:

No.	Pembangunan	Eksisting	Target 2015-2019
a.	Kawasan Ekonomi Khusus	8	7
b.	Kawasan Industri	79	14
c.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	-

**) Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Sumber: RPJMN 2015-2019 (diolah)*



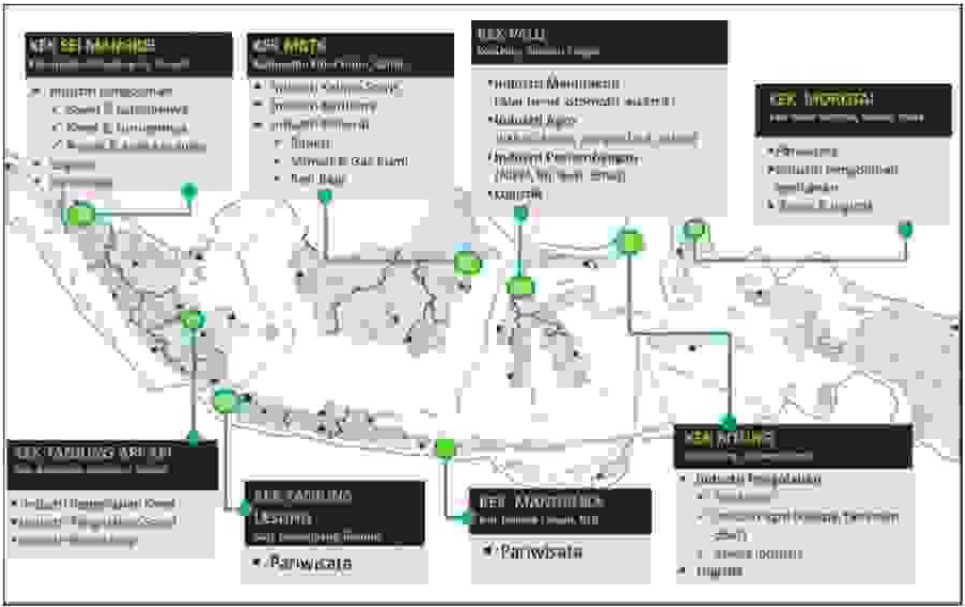
A. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geostrategi, serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, logistik,

pariwisata, energi, pengembangan teknologi, pengolahan ekspor, dan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pengembangan KEK bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis; memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi Menurut tinggi; mempercepat perkembangan daerah; dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain: industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

A.1 Peta Pengembangan KEK yang Telah Ditetapkan Pemerintah



Sumber: RPJMN 2015-2019

Isu Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia:

- Percepatan penyelesaian peraturan mengenai Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai (fiskal) di KEK.
- Penyelesaian peraturan mengenai pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat dan daerah kepada Administrator KEK.
- Penyelesaian peraturan mengenai ketenagakerjaan di KEK.
- Perlunya kesiapan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan KEK.

A.2 Matrik Pengembangan KEK yang Telah Ditetapan Pemerintah Sampai Tahun 2014

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Status	Infrastruktur yang Tersedia	Investasi (yang Akan Ditarik)	Luas Lahan yang Ditawarkan	Kegiatan yang Sudah Dilakukan	Kendala dan Registran yang Akan Dilaksanakan
A. Wilayah Papua									
B. Wilayah Maluku									
1	KEK Morotai	Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara	1.101,76	Sudah ditetapkan melalui PP No. 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai	Pelabuhan Daruba kapasitas eksisting 750 (DWT), jalan, Bandara Leo Watimena, dan air bersih	Pariwisata, industri pengolahan perikanan, bisnis dan logistik	Belum terdata	- BKPM telah melakukan fasilitasi investor yang berminat untuk berinvestasi di KEK Morotai - BKPM melaksanakan kegiatan sosialisasi / promosi penanaman modal di KEK Morotai	- Perlunya koordinasi dukungan infrastruktur wilayah, yaitu pembangunan jalan lingkar Morotai, pengembangan Pelabuhan Morotai, serta penyediaan air bersih dan listrik - Perlunya fasilitasi Pembentukan Administrator - Perlunya koordinasi Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan setelah Administrator KEK Morotai terbentuk
C. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara									
2	KEK Mandalika	Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.035	Sudah ditetapkan melalui PP No. 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Bandara Internasional Lombok, jalan akses, listrik dan air bersih	Pariwisata: Dua lapangan golf, kegiatan olahraga air, Hotel berbintang, kondominium Spa, pusat-pusat kesehatan, Perumahan untuk komunitas dan pensiunan, Komersial & pusat ritel, Outlet makanan & minuman, Fasilitas Konvensi, Tempat hiburan, Objek wisata	<i>Saleable area:</i> 621,95 ha	- BKPM telah melakukan kegiatan fasilitasi Pokja KEK Mandalika terkait pembentukan Administrator, serta profil proyek yang akan ditawarkan kepada investor - BKPM melaksanakan kegiatan sosialisasi / promosi penanaman modal di KEK Mandalika	- Perlunya koordinasi dukungan infrastruktur wilayah, yaitu penyediaan listrik dan air bersih - Perlunya fasilitasi Pembentukan Administrator - Perlunya koordinasi Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan setelah Administrator KEK Mandalika terbentuk

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Status	Infrastruktur yang Tersedia	Investasi (yang Akan Ditarik)	Luas Lahan yang Ditawarkan	Kegiatan yang Sudah Dilakukan	Kendala dan Registran yang Akan Dilaksanakan
D. Wilayah Sulawesi									
3	KEK Palu	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	1.500	- Sudah ditetapkan melalui PP No. 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu - Administrator sudah dibentuk melalui Perda Kota Palu No. 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu	Pelabuhan Pantoloan yang berdekatan dengan lokasi KEK Palu, jalan dalam kawasan, listrik, air bersih, Pusat Inovasi Rotan Nasional, Laboratorium Kakao	Industri manufaktur, Industri agro berbasis kakao, rumput laut, dan rotan, industri pengolahan nikel, biji besi, dan emas, serta logistik	Zona industri dan pengolahan seluas 1.450 ha dan zona logistik seluas 50 Ha	- BKPM menyiapkan pelimpahan wewenang pemberian izin prinsip dan izin usaha kepada Administrator KEK Palu - BKPM melaksanakan kegiatan sosialisasi/promosi penanaman modal di KEK Palu - BKPM telah melakukan kegiatan fasilitasi minat investasi di KEK Palu	- Perlunya koordinasi dukungan infrastruktur wilayah, yaitu pembangunan flyover akses KEK - Pelabuhan Pantoloan, pengembangan Pelabuhan Pantoloan, pembangunan jalan pintas Palu Parigi, dan penyediaan air bersih - Perlunya koordinasi dalam rangka percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Administrator KEK Palu
4	KEK Bitung	Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	534	Sudah ditetapkan melalui PP No. 34 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung	Air bersih yang bersumber dari Sungai Tendeki (40 liter/detik) dan Sungai Pinakolan (s/d 100 liter/detik), Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Bitung (akan dikembangkan menjadi pelabuhan hub internasional), Jalan nasional Girian-Rema	Industri pengolahan perikanan, industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat, aneka industri, dan logistik	Kawasan Industri Intranasia (22 Ha) • Industri seluas 5,39 ha • Pelabuhan perikanan seluas 5,95 ha • CFS seluas 5 ha • Pergudangan seluas 1,1 ha • Pembangkit	- BKPM telah melakukan kegiatan fasilitasi Pokja KEK Bitung terkait pembentukan Administrator - BKPM melaksanakan kegiatan sosialisasi/promosi penanaman modal di KEK Bitung	- Perlunya koordinasi dalam pengadaan lahan dan dukungan infrastruktur wilayah, yaitu pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Pengembangan Pelabuhan Bitung, serta penyediaan air bersih dan listrik - Perlunya fasilitasi Pembentukan Administrator - Perlunya koordinasi Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan setelah

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Status	Infrastruktur yang Tersedia	Investasi (yang Akan Ditarik)	Luas Lahan yang Ditawarkan	Kegiatan yang Sudah Dilakukan	Kendala dan Kegiatan yang Akan Dilaksanakan
							Listrik & STP seluas 1,33 ha Kawasan Industri (120 Ha) : perumahan, kawasan komersial, perkantoran, trade center		Administrator KEK Bitung terbentuk
E. Wilayah Kalimantan									
5	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	597,34	Sudah ditetapkan melalui PP No. 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan	Jalan dan pelabuhan	Industri kelapa sawit dan logistik, serta pengolahan ekspor	Belum terdada	Koordinasi progress pembangunan KEK MBTK	- Perlunya koordinasi dukungan infrastruktur wilayah, yaitu peningkatan jalan dan pengembangan pelabuhan CPO Maloy - Perlunya fasilitasi Pembentukan Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator - Perlunya koordinasi Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan setelah Administrator KEK MBTK terbentuk
F. Wilayah Jawa-Bali									
6	KEK Tanjung Lesung	Kabupaten Pandeglang , Provinsi Banten	1.500	- Sudah ditetapkan melalui PP No. 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung - Administrator	- Jalan dalam kawasan - Pagar batas KEK - Listrik tahap I (kapasitas terpasang: 10 MVA) - Jaringan telekomunikasi	Pariwisata dengan peluang investasi: 100% saham modal dapat dimiliki oleh investor asing untuk usaha: Hotel bintang 3-5, Resort, Golf Course & Driving	- 300 ha (Lahan) - 50 ha (Hotel/ Perumahan) - 5 ha (Hotel Resort)	- BKPM menyiapkan pelimpahan wewenang pemberian izin prinsip dan izin usaha kepada Administrator KEK Tanjung Lesung - BKPM melaksanakan	- Perlunya koordinasi dukungan infrastruktur wilayah, yaitu pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang, pembangunan Bandara Uman Uman Banten Selatan, dan penyediaan air bersih - Perlunya koordinasi dalam rangka percepatan

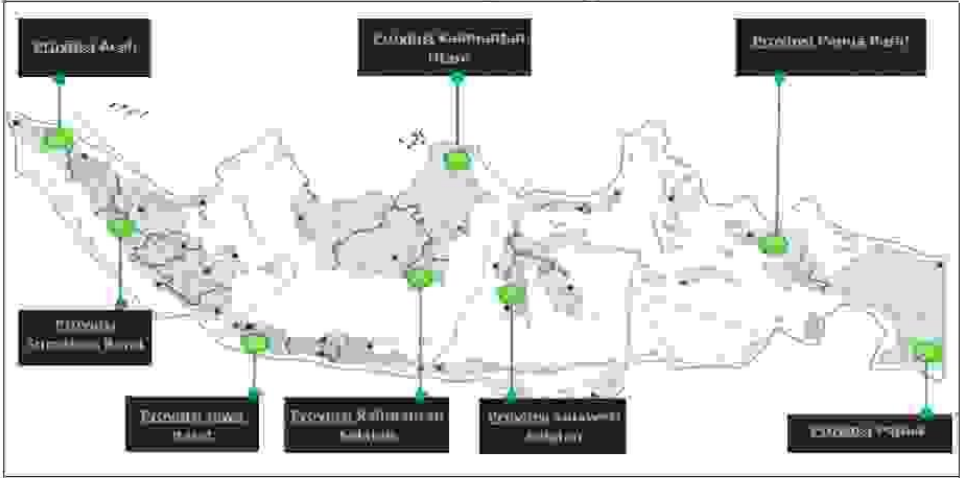
No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Status	Infrastruktur yang Tersedia	Investasi (yang Akan Ditarik)	Luas Lahan yang Ditawarkan	Kegiatan yang Sudah Dilakukan	Kendala dan Kegiatan yang Akan Dilaksanakan
				KEK telah dibentuk melalui Perda Kabupaten Pandeglang No. 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang	1 fibre optic (kapasitas terpasang: 6 core) - Air bersih (kapasitas terpasang: 4,7 liter/detik) - Drainase - Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (kapasitas terpasang: 0,6 liter/detik) - Fasilitas persampahan	<i>Range Convention & Exhibition Center</i> , Operator hotel internasional, Konsultan Pariwisata (termasuk manajemen hotel), Penyertaan Modal Asing (50% saham dimiliki oleh investor asing) untuk usaha: <i>Hotel & Lodging</i> , Rumah tinggal, <i>Catering</i> , Spa, <i>Amusement Center</i> , Bar, <i>Kafe</i> , <i>Singing Room</i> (karaoke), Restaurant, Tamat rekreasi, <i>Tour Operator</i> , <i>PCO (Professional Conference Organizer)</i> , impresariat, serta Objek wisata budaya dan alam (kecuali dalam struk konservasi)		kegiatan sosialisasi/ <i>promosi</i> penanaman modal di KEK Tanjung Lesung - BKPM telah melakukan kegiatan fasilitasi minat investasi di KEK Tanjung Lesung	pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Administrator KEK Tanjung Lesung - Perlunya dukungan penyediaan perangkat komputer untuk pendukung sistem SIPMSE di kantor Administrator KEK Tanjung Lesung - Perlunya pelatihan PTSP bagi personil Administrator
G. Wilayah Sumatera									
7	KEK Sei Mangkei	Kabupaten Simalungana, Provinsi Sumatera Utara	2.002,77	- Sudah ditetapkan melalui PP No. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan	- Gedung pengelola kawasan - Instalasi pengolahan air dengan	Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Karet, Pupuk dan Aneka	- Zona industri seluas 1.411,57 Ha dengan peruntukan	- Aksi yang sudah dilakukan BKPM: - Pemberitaan Izin Prinsip atas nama PT. Unilever Oleochemical	Perlunya koordinasi dukungan infrastruktur wilayah, yaitu penyediaan listrik, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan jalur kereta

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Status	Infrastruktur yang Tersedia	Investasi (yang Akan Ditarik)	Luas Lahan yang Ditawarkan	Kegiatan yang Sudah Dilakukan	Kendala dan Kegiatan yang Akan Dilaksanakan
				Ekonomi Khusus Sei Mangkei - Administrator dan PTSP sudah dibentuk, serta sudah mendapatkan pelimpahan wewenang perizinan dari BKPM dan Kementerian Perdagangan - Deklarasi kesiapan beroperasi pada 22 Januari 2013 - Pembangunan pabrik PT Uniker Oleochemical Indonesia dengan nilai investasi Rp 1,45 Triliun	kapasitas 250m3/jam - Jalan ROW 43 (0,95 km) dan ROW 28 (1,75 km) - Saluran induk (1,9 km), jaringan listrik, fasilitas telekomunikasi, perumahan - Pusat inovasi kelapa sawit	Industri, Logistik, dan Pariwisata, dengan rencana investasi sebesar Rp 5,7 Triliun (Kawasan) dan Rp 71,2 Triliun (tenant)	untuk Industri sawit (204,8 Ha), Industri karet (64,8 Ha), Aneka industri (543,35 Ha), dan lainnya. - Zona logistik seluas 293,5 Ha - Zona pariwisata seluas 297,7 Ha.	Indonesia (UOI) No. 16/1/TP/1/PMA/2012 tanggal 18 Januari 2012 jo. No. 1221/1/TP-PB/PMA/2014 tanggal 2 Mei 2014 - Penerbitan SP Pabean (Mesin) untuk PT. UCI No.543/Pabean/PM A/2013 tanggal 15 November 2013, No. 33/PABEAN/PB/PM A/2014 tanggal 29 Januari 2014 - Fasilitasi untuk pemberian Tax Holiday kepada PT. OUI dengan terbitnya EMEK No. 463/2014 tanggal 28 Desember 2012 - Pelimpahan wewenang pemberian Izin Prinsip dan Izin Usaha kepada Kepala Administrator KEK Sei Mangkei melalui Perka BKPM No. 1 dan No. 2 Tahun 2014 - Penyediaan perangkat komputer untuk pendukung sistem SIMPSE di kantor Administrator KEK Sei Mangkei	api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, dan peningkatan akses jalan dari sumber bahan baku ke KEK

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Status	Infrastruktur yang Tersedia	Investasi (yang Akan Ditarik)	Luas Lahan yang Ditawarkan	Kegiatan yang Sudah Dilakukan	Kendala dan Kegiatan yang Akan Dilaksanakan
								- Pelatihan PTSP bagi personil Administrator - BKPM melaksanakan kegiatan sosialisasi / promosi penanaman modal di KEK Sei Mangkei - BKPM telah melakukan kegiatan fasilitasi minat investasi di KEK Sei Mangkei	
8	KEK Tanjung Api-Api	Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	2.030	Sudah ditetapkan melalui PP No. 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Api-Api, Jaringan rel kargo eksisting	Industri pengolahan karet, Industri pengolahan sawit, dan industri petrokimia dengan total nilai investasi industri sebesar Rp 33 Triliun	Industri kimia dasar (1.039,29 Ha), Industri kecil (100,91 Ha) dan Aneka industri (214,08 Ha)	- BKPM telah melakukan kegiatan fasilitasi Pokja KEK Tanjung Api-Api terkait pembentukan Administrator - BKPM melaksanakan kegiatan sosialisasi/promosi penanaman modal di KEK Tanjung Api-Api	- Perlunya koordinasi dukungan infrastruktur wilayah, yaitu pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api, pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim - KEK Tanjung Api-Api, peningkatan jalan, dan penyediaan air bersih - Perlunya fasilitasi pembentukan Administrator - Perlunya koordinasi Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan setelah Administrator KEK Tanjung Api-Api terbentuk

Keterangan:
ROW: Right of Way

A.3 Peta Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KEK Tahun 2015-2019



A.4 Matrik Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KEK Tahun 2015-2019

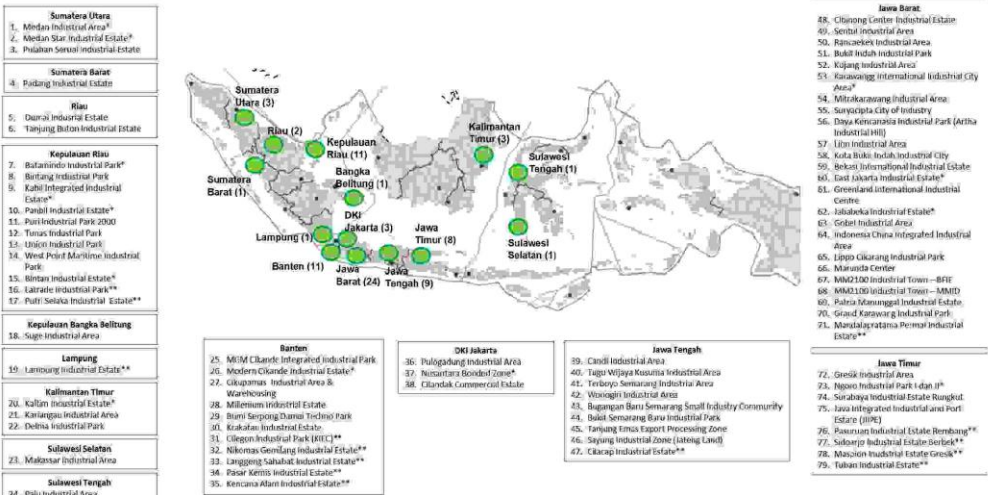
No.	Provinsi	Indikasi Lokasi
1.	Papua	Merauke
2.	Papua Barat	Sorong, Teluk Bintuni, Raja Ampat
3.	Sulawesi Selatan	Garambing Baru, Takabonerate-Selayar
4.	Kalimantan Utara	Tarakan
5.	Kalimantan Selatan	Batu Licin
6.	Jawa Barat	-
7.	Sumatera Barat	Padang-Pariaman
8.	Aceh	Lhokseumawe

B. Kawasan Industri

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri. Selanjutnya, Pasal 106 menyebutkan bahwa perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. Adapun tujuan pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri Pasal 2, yaitu:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang;
- b. meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
- c. mempercepat pertumbuhan Industri di daerah;
- d. meningkatkan daya saing Industri;
- e. meningkatkan daya saing investasi; dan
- f. memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

B.1 Peta Pengembangan Kawasan Industri Eksisting



*Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI)
** Belum terdaftar sebagai anggota HRI
Sumber: Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (diolah)

Isu Strategis Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia, yaitu:

- Perlunya peningkatan pengawasan dan pengelolaan terkait masalah lingkungan hidup.
- Perlunya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk terus melakukan penyederhanaan perizinan.
- Perlunya dukungan infrastruktur pendukung KI, antara lain ketersediaan listrik dan sistem logistik (darat dan laut) guna menarik investor.
- Pentingnya peran aktif instansi penanaman modal untuk memfasilitasi pengamanan dan kenyamanan berinvestasi, khususnya dalam kawasan industri yang dikategorikan sebagai obyek vital nasional sektor industri (OVNI).

Khusus di Pulau Jawa, yaitu:

- Tingginya ketergantungan impor bahan baku, suku cadang, dan permesinan.
- Masih kurangnya pengembangan R&D.
- Perlunya penajaman roadmap dan clustering industri.
- Masalah lingkungan.
- Tingginya harga lahan karena adanya spekulasi-spekulasi.

Khusus di Luar Pulau Jawa, yaitu:

- Terbatasnya SDM yang ahli dan terampil.
- Kurangnya pasokan energi.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA daerah.
- Terbatasnya dukungan infrastruktur wilayah.
- Belum semua Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Masih perlunya penyederhanaan berbagai peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

B.2 Matrik Pengembangan Kawasan Industri Eksisting

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Infrastruktur yang Tersedia	Harga Jual Lahan/SFB (/ m²)	Harga Sewa Lahan/SFB (/m²)	Luas Lahan yang Ditawarkan (ha)
A. Wilayah Papua							
B. Wilayah Maluku							
C. Wilayah Nusa Tenggara							
D. Wilayah Sulawesi							
1	Kawasan Industri Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	703	Air bersih [2.300 m³/hari], pengolahan air limbah [3.000 m³/hari], listrik [20 MW], dan telekomunikasi [2.000 sambungan]	Lahan industri : Rp 400 ribu-600 ribu/bulan	SFB : Rp 15 ribu-20 ribu/bulan Warehouse : Rp 15 ribu-20 ribu/bulan	Belum terdata
2	Kawasan Industri Palu	Palu, Sulawesi Tengah	1.500	Pelabuhan Pantoloan yang berdekatan dengan lokasi KEK Palu, jalan dalam kawasan, listrik, air bersih, Pusat Inovasi Rotan Nasional, Laboratorium Kakao	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
E. Wilayah Kalimantan							
3	Kawasan Industri Kariangau	Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur	399,3	Air bersih [industri: 0,55 l/detik/hari, perumahan: 150 l/orang/hari] , Listrik [2x100 MW dan 2x25 MW], Telekomunikasi	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
4	Kalim Industrial Estate	Bontang, Kalimantan Timur	214	Air bersih [144 m³/hari], pengolahan air limbah [25 m³/hari], listrik [23 MW], dan telekomunikasi [250 sambungan]	Lahan industri : US\$ 120/tahun	Lahan industri : US\$ 6/tahun	34,8
5	Kawasan Industri Delma	Bulungan, Kalimantan Utara	400	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
F. Wilayah Jawa-Bali							
6	MGM Cikande Integrated Industrial Park	Serang, Banten	662	Air bersih, listrik, telekomunikasi	Dapat dinegosiasikan	-	Belum terdata
7	Modern Cikande Industrial Estate	Serang, Banten	1.050	Air bersih, listrik [180-240 MVA], telekomunikasi [5.000 sambungan], gas, Jalan ROW primer [32-50 m], dan ROW sekunder [15-24 m]	Lahan industri : Rp 1.400.000	-	220 [tahap 5]
8	Krakatau Industrial Estate Cilegon	Cilegon, Banten	625	Air bersih [2.500 liter/detik], listrik [3.400 MVA], telekomunikasi, gas [9 mmsecf], jalan kelas A, pelabuhan [150.000 DWT]	Lahan industri: US\$ 150-180	SFB: US\$ 3,5/bulan	10% dari total area
9	Jababeka Industrial Estate - Cilegon	Cilegon, Banten	1.000	Air bersih, listrik, dan telekomunikasi	Lahan industri : dapat dinegosiasikan	-	-

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Infrastruktur yang Tersedia	Harga Jual Lahan/SFB (/ m²)	Harga Sewa Lahan/SFB (/m²)	Luas Lahan yang Ditawarkan (ha)
10	Cikupas Industrial Park & Storage	Tangerang, Banten	250	Air bersih, listrik, dan telekomunikasi	Lahan industri : dapat dinegosiasikan	-	-
11	Millennium Industrial Estate	Tangerang, Banten	273,66	Air bersih, listrik, gas, dan telekomunikasi	Lahan industri : dapat dinegosiasikan SFB : dapat dinegosiasikan	Lahan industri : dapat dinegosiasikan SFB : dapat dinegosiasikan	200
12	Taman Tekno Bumi Serpong Damai	Tangerang, Banten	200	Air bersih [8.640 m³/hari], pengolahan air limbah [5.184 m³/hari], listrik [75 MVA], dan telekomunikasi [1.800 sambungan]	Lahan industri : Rp 2,6 juta SFB : Harga sesuai permintaan kebutuhan lahan	-	-
13	Kawasan Industri Nikomas Gemilang	Serang, Banten	165	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
14	Kawasan Industri Langgeng Sahabat	Serang, Banten	500	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	495
15	Kawasan Industri Pasar Kemis	Serang, Banten	73,64	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	-
16	Kawasan Industri Kencana Alam	Serang, Banten	62	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	8
17	Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Jakarta Timur, DKI Jakarta	500	Air bersih, listrik, telekomunikasi, Jalan ROW primer [30 m], dan ROW sekunder [12 m]	Lahan industri : Rp 2,6 juta	SFB: Harga sesuai permintaan kebutuhan bangunan	85
18	Kawasan Berikat Nusantara	Jakarta Utara, DKI Jakarta	578	Air bersih, listrik, dan telekomunikasi [1000 sambungan]	-	Lahan industri : US\$ 9- 12/tahun SFB : Harga sesuai permintaan, kebutuhan lahan	20% dari total area
19	Cilandak Commercial Estate	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	11,2	Air bersih [700 liter/detik], listrik [6,6 KVA], dan telekomunikasi [950 sambungan]	-	Lahan industri : Office : US\$ 15/bulan Warehouse : US\$ 9,5/bulan Workshop : US\$ 9,5/bulan	-

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Infrastruktur yang Tersedia	Harga Jual Lahan/SPB (/ m²)	Harga Sewa Lahan/SPB (/ m²)	Luas Lahan yang Ditawarkan (ha)
20	Kawasan Industri Sentul	Bogor, Jawa Barat	100	Air bersih, listrik, telekomunikasi, serat optik, gas	Lahan industri: dapat dinegosiasikan	Belum terdata	Belum terdata
21	Cibinong Center Industrial Estate	Bogor, Jawa Barat	140	Air bersih (70 liter/detik), listrik (6 MVA), telekomunikasi, jalan ROW primer (24 m), jalan ROW sekunder (20 m), dan jalan ROW tersier (13 m)	Lahan industri: Rp 3.000/bulan SPB: Rp 32.500/bulan	Belum terdata	Belum terdata
22	Bekasi International Industrial Estate	Bekasi, Jawa Barat	200	Air bersih (13.000 m³/hari), pengolahan air limbah (8.000 m³/hari), listrik (900 MVA), telekomunikasi, Jalan ROW primer (40 m), dan ROW sekunder (20 m)	Sudah terjual (sold out)	-	-
23	East Jakarta Industrial Park	Bekasi, Jawa Barat	320	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, gas, dan telekomunikasi	Dapat dinegosiasikan	Dapat dinegosiasikan	Belum terdata
24	Greenland International Industrial Center	Bekasi, Jawa Barat	1.000	Air bersih, listrik, telekomunikasi	Lahan industri: Rp 850,000	Belum terdata	Belum terdata
25	Jababeka Industrial Estate Cikarang	Bekasi, Jawa Barat	1.840	Air bersih (47.500 m³/hari), Pengolahan air limbah (42.000 m³/hari), Listrik (2 x 150 MW dan 1 x 340 MW), Telekomunikasi (25.000 sambungan), Serat optik (36 core terminal)	Lahan industri: mulai dari Rp 3.600.000	10% dari harga jual	Belum terdata
26	Patria Manunggal Industrial Estate	Bekasi, Jawa Barat	39	Air bersih, listrik, telekomunikasi	Dapat dinegosiasikan	Belum terdata	Belum terdata
27	Kawasan Industri Gobel	Bekasi, Jawa Barat	54	Air bersih, listrik, gas, telekomunikasi	Dapat dinegosiasikan	Belum terdata	Belum terdata
28	Kawasan Industri Terpadu Indonesia – China	Bekasi, Jawa Barat	200	Air bersih, listrik, telekomunikasi	Dapat dinegosiasikan	Dapat dinegosiasikan	80
29	Lippo Cikarang	Bekasi, Jawa Barat	1.000	Air bersih (40.000 m³/hari), pengolahan air limbah (10.000 m³/hari), listrik (20 MW), telekomunikasi (15.000 sambungan), Jalan ROW primer (40 m), dan jalan ROW sekunder (20 m)	Dapat dinegosiasikan	Dapat dinegosiasikan	Lahan industri: 5.000 m² SPB Lahan : 1.357 – 1.800 m² Bangunan : 860 – 1.024 m²
30	Marunda Center	Bekasi, Jawa Barat	540	Air bersih (10.000 m³/hari), pengolahan air limbah (600 m³/hari), listrik (20 MW), telekomunikasi (2.000 sambungan), Jalan ROW primer (24-48 m), dan jalan ROW sekunder (20 m)	Dapat dinegosiasikan	Dapat dinegosiasikan	Lahan industri: 5.000 - 100.000 m² SPB Lahan : 600 – 1.800 m² 6.01

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Infrastruktur yang Tersedia	Harga Jual Lahan/SPB (/ m²)	Harga Sewa Lahan/SPB (/ m²)	Luas Lahan yang Ditawarkan (ha)
							Bangunan : 320 – 1.200 m²
31	MM2100 Industrial Town (BPIE)	Bekasi, Jawa Barat	300	Air bersih (72.000 m³/hari), pengolahan air limbah (64.800 m³/hari), listrik (348 MVA), telekomunikasi (10.000 sambungan), gas alam, gas industri, jalan ROW primer (41-60 m), dan jalan ROW sekunder (18-20 m)	Lahan industri: US\$ 130	-	Belum terdata
32	MM2100 Industrial Town (MMID)	Bekasi, Jawa Barat	1.200	Air bersih (72.000 m³/hari), pengolahan air limbah (64.800 m³/hari), listrik (648 MVA), telekomunikasi (10.000 sambungan), gas alam, gas industri, Jalan ROW primer (41-60 m), dan jalan ROW sekunder (18-20 m)	Lahan industri: US\$ 110-115	-	Belum terdata
33	Karawang International Industrial City	Karawang, Jawa Barat	1.200	Air bersih (30.000 m³/hari), pengolahan air limbah (36.000 m³/hari), listrik (180 MVA), telekomunikasi	Lahan industri: dapat dinegosiasikan	Belum terdata	Belum terdata
34	Artha Industrial Hill	Karawang, Jawa Barat	390	Air bersih (300 liter/detik), pengolahan air limbah (240 liter/detik), listrik (100 MVA), telekomunikasi, gas, jalan ROW primer (45 m), jalan ROW sekunder (10 m), dan jalan ROW tersier (6 m)	Lahan industri : US\$ 170	-	390
35	Kawasan Industri Mitra Karawang	Karawang, Jawa Barat	500	Air bersih (900 m³/hari), listrik (124 MVA), telekomunikasi (1.500 sambungan), Jalan ROW primer (45 m), dan ROW sekunder (25 m)	Lahan industri : dapat dinegosiasikan	-	-
36	Kujang Industrial Estate	Karawang, Jawa Barat	140	Air bersih (5.000 m³/hari), listrik (20 KVA), telekomunikasi (200 sambungan), Jalan ROW primer (33 m), dan ROW sekunder (17 m)	-	Lahan industri : US\$ 4,5/tahun	35
37	Suryadipa City of Industry	Karawang, Jawa Barat	1.400	Air bersih (43.500 m³/hari), pengolahan air limbah (30.450 m³/hari), listrik (300 MVA), telekomunikasi (3.000 sambungan), gas, Jalan ROW primer (50 m), ROW sekunder (30 m), dan ROW tersier (24 m)	Lahan industri : dapat dinegosiasikan SPB : Harga sesuai kebutuhan lahan	-	200
38	Bukit Indah Industrial Park	Karawang, Jawa Barat	700	Air bersih (14.000 m³/hari), pengolahan air limbah (11.600 m³/hari), listrik (250 MVA), telekomunikasi, gas	Lahan industri: dapat dinegosiasikan	-	322,4
39	Kota Bukit Indah Industrial City	Purwakarta, Jawa Barat	1.300	Air bersih (60.000 m³/hari), pengolahan air limbah (28.000 m³/hari), listrik (250 MVA), telekomunikasi, gas, jalan ROW primer (45 m), jalan ROW sekunder (30-35 m), dan jalan ROW tersier (20-26 m)	Lahan industri: US\$ 70	Tanah: US\$ 1,25/bulan Bangunan: US\$ 4.00-5.00/bulan	498

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Infrastruktur yang Tersedia	Harga Jual Lahan/SFB (/ m²)	Harga Sewa Lahan/SFB (/ m²)	Luas Lahan yang Ditawarkan (ha)
40	Kawasan Industri Lion	Purwakarta, Jawa Barat	50	Air bersih, listrik, telekomunikasi	Dapat dinegosiasikan	Belum terdata	Belum terdata
41	Kawasan Industri Rancagek	Bandung, Jawa Barat	200	Air bersih (3 liter/detik), listrik (s/d 16,5 kVA), dan telekomunikasi (500 sambungan)	Lahan industri : dapat dinegosiasikan SFB : Rp 3 miliar/unit	SFB: 14,6 juta/bulan	40
42	Kawasan Industri Mandalapratama Permai	Bekasi, Jawa Barat	302,5	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
43	Grand Karawang Industrial Park	Karawang, Jawa Barat	566	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
44	Kawasan Industri Candi	Bogor, Jawa Barat	500	Air bersih, listrik, dan telekomunikasi	Lahan industri : Rp 500 ribu	SFB : US\$ 1,75/bulan	-
45	Terboyo Semarang Industrial Area	Semarang, Jawa Tengah	300	Air bersih (500 m³/hari), listrik (2,5 MVA), dan telekomunikasi	Lahan industri : dapat dinegosiasikan	-	-
46	Tugu Wijaya Kusuma Industrial Area	Semarang, Jawa Tengah	250	Air bersih (1.000 m³/hari), pengolahan air limbah (600 m³/hari), listrik (60 MW), telekomunikasi, jalan primer (30 m), jalan sekunder (22 m)	Lahan industri : Rp 400-450 ribu	Warehousing: Rp 10 ribu - 12 ribu/bulan	160
47	Bugangan Baru Semarang Small Industry Community	Semarang, Jawa Tengah	105	Air bersih (66 liter/detik), pengolahan air limbah (30 liter/detik), listrik (10.000 KVA), dan telekomunikasi	Lahan industri : Rp 250 ribu	-	-
48	Taman Industri Bukit Semarang Baru	Semarang, Jawa Tengah	120	Air bersih (30 liter/detik), pengolahan air limbah, listrik (65 MW), dan telekomunikasi (501 sambungan)	Lahan industri : Rp 1.500.000	-	27
49	Tanjung Emas Export Processing Zone	Semarang, Jawa Tengah	101	Air bersih (2.160 m³/hari), listrik (10 MWA), dan telekomunikasi (600 sambungan)	SFB : Gedung : US\$ 2/bulan Lahan : US\$ 6/bulan	Lahan/Bangunan : 3.050 m²/1.856 m² per unit Bangunan : US\$ 2 /bulan Tanah: US\$ 0,6/bulan	71
50	Kawasan Industri Sayung (Jatengland)	Demak, Jawa Tengah	300	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, telekomunikasi	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
51	Kawasan Industri Cilacap	Cilacap, Jawa Tengah	154	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	9

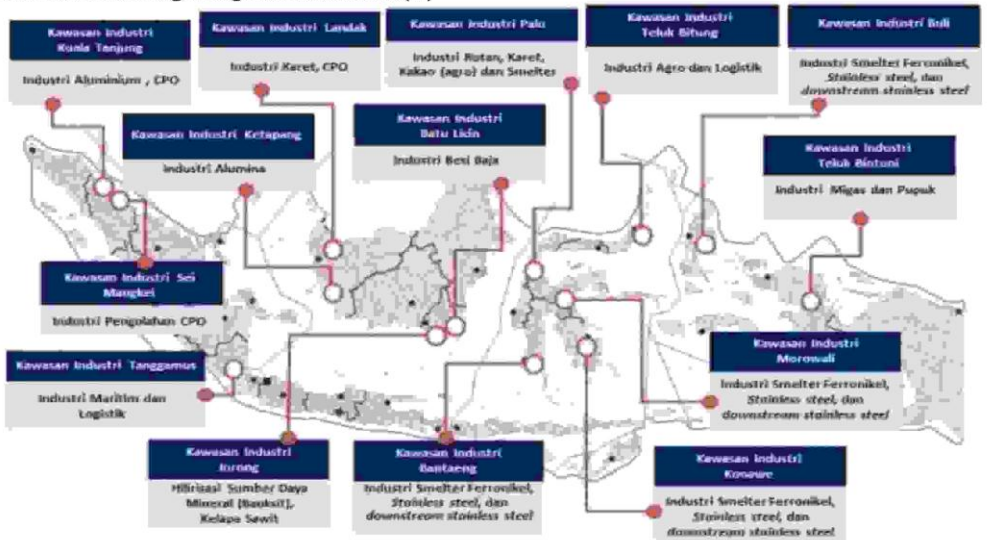
No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Infrastruktur yang Tersedia	Harga Jual Lahan/SFB (/ m²)	Harga Sewa Lahan/SFB (/ m²)	Luas Lahan yang Ditawarkan (ha)
52	Kawasan Industri Wonogiri	Wonogiri, Jawa Tengah	400	Air bersih, listrik, telekomunikasi	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
53	Kawasan Industri Gresik	Gresik, Jawa Timur	140	Air bersih (200 m³/hari), pengolahan air limbah (500 m³/hari), listrik (40,2 MWA), dan telekomunikasi (400 sambungan)	Lahan industri : Rp 650 ribu -1,3 juta	SFB : Rp 16 ribu-21 ribu/bulan Warehousing : Rp 12 ribu-15 ribu/ bulan Lahan Industri : Rp 45 ribu-50 ribu/bulan	44,3
54	Kawasan Industri Tuban	Tuban, Jawa Timur	227	Air bersih (15 liter/detik), listrik (100 MW), gas (5 juta m³/bulan), telekomunikasi (6 ribu sambungan), jalan primer (2 x 7 m), jalan sekunder (8 m)	Lahan industri : Rp 750 ribu	Rp 50 ribu/tahun	204,5
55	Kawasan Industri Maspien	Gresik, Jawa Timur	341,5	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, jetty	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
56	Java Integrated Industrial Port and Estate	Gresik, Jawa Timur	1.761	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, gas, dan telekomunikasi	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
57	Ngoro Industrial Park	Surabaya, Jawa Timur	440	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, gas alam, dan telekomunikasi	Lahan industri : dapat dinegosiasikan	SFB/Warehousing : Rp 15 ribu/bulan	80
58	Surabaya Industrial Estate Rungkut	Surabaya, Jawa Timur	335	Air bersih, pengolahan air limbah (10.000 m³/hari, listrik, gas alam, dan telekomunikasi (1.200 sambungan)	Lahan industri : Rp 400 ribu-450 ribu/bulan	SFB : 15 ribu -20 ribu/bulan Warehousing : Rp 17 ribu-20 ribu/bulan	-
59	Sidoarjo Industrial Estate Berbek	Sidoarjo, Jawa Timur	87	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, gas, dan telekomunikasi	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
60	Pasuruan Industrial Estate Rembang	Pasuruan, Jawa Timur	500	Air bersih, pengolahan air limbah (5.000 m³/hari), listrik, gas, dan telekomunikasi	Lahan industri : Rp 400 ribu-450 ribu/bulan	Lahan: 5 - 15% x RUP/tahun SFB : 15 ribu -20 ribu/bulan Warehousing : Rp 17 ribu-20 ribu/bulan	Belum terdata
G. Wilayah Sumatera							
61	Kawasan Industri Medan	Medan, Sumatera	780	Air bersih (300 l/detik) , Pengolahan air limbah (18.000 m³/hari), listrik (120 MVA), Telekomunikasi	US\$ 65	Rp 5.000-6.000/bulan	Belum terdata

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Infrastruktur yang Tersedia	Harga Jual Lahan/SFB (/ m²)	Harga Sewa Lahan/SFB (/ m²)	Luas Lahan yang Ditawarkan (ha)
		Utara		[1.500 sambungan], Gas Industri [1.500 m³/jam]		Warehouse: Rp 19.000/bulan	
62	Medanatar Industrial Estate	Tanjung Morawa	103	Air bersih [2.000 m3/jam], Pengolahan air limbah [5.600 - 6.400 m³/hari], Listrik [17.500 KVA], Telekomunikasi [628 sambungan]	US\$ 30-35	Belum terdata	5
63	Pulahan Seruni Industrial Estate	Medan, Sumatera Utara	650	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, dan telekomunikasi	US\$ 25-55	US\$1.200-1.350/bulan	600
64	Kawasan Industri Padang	Padang, Sumatera Barat	200	Air bersih [400 l/detik], Listrik [30 MVA], Telekomunikasi	US\$ 25	Belum terdata	45
65	Kawasan Industri Dumai	Dumai, Riau	1.146	Air bersih [750 m³], Pengolahan air limbah (150 m³), Listrik [50 MW], dan telekomunikasi	US\$ 60	Belum terdata	547
66	Kawasan Industri Tanjung Buton	Tanjung Buton, Siak, Riau	590	Pelabuhan Tanjung Buton (25.000 DWT), jalan akses ke pelabuhan	Dapat dinegosiasikan	Dapat dinegosiasikan	Belum terdata
67	Batamindo Industrial Park	Batam, Kepulauan Riau	320	Air bersih [4.500 m³/hari], Listrik (150 MW), Telekomunikasi (2.500 sambungan)	Belum terdata	S\$ 3.50 - 10.50 / m² / bulan	320
68	Bintang Industrial Park	Batam, Kepulauan Riau	70	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, dan telekomunikasi	Lahan industri : S\$ 60 Bangunan pabrik : S\$ 400	S: L3.600/B1.950 S\$4/bulan	47
69	Kabil Integrated Industrial Estate	Batam, Kepulauan Riau	520	Air bersih (3.080 m3/hari), Listrik (30 MW), Telekomunikasi (2.000 sambungan)	Lahan industri : US\$ 80-100 Bangunan pabrik : dapat dinegosiasikan	Lahan industri : US\$ 80-150/bulan Warehouse : US\$ 5-6/bulan	150
70	Panbil Industrial Estate	Batam, Kepulauan Riau	103	Air bersih [2.500 m³/hari], pengolahan air limbah, listrik (48 MW), dan telekomunikasi (3.000 SST)	Dapat dinegosiasikan	S\$ 4.00 - 5.50/bulan	4.96
71	Puri Industrial Park 2000	Batam, Kepulauan Riau	30	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik (3 MVA), telekomunikasi (100 SST), Jalan ROW primer (1 km), ROW sekunder (2 km), dan ROW tersier (1 km)	Lahan industri : S\$ 90 atau Rp 650.000 SFB : S\$ 425 atau Rp 3.000.000	S\$ 4/bulan	10
72	Tunas Industrial Estate	Batam, Kepulauan Riau	38	Air bersih, listrik (10 MVA), dan telekomunikasi (300 sambungan)	-	S\$ 3.5	Belum terdata

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Infrastruktur yang Tersedia	Harga Jual Lahan/SFB (/ m²)	Harga Sewa Lahan/SFB (/ m²)	Luas Lahan yang Ditawarkan (ha)
73	Union Industrial Estate	Batam, Kepulauan Riau	23	Air bersih, listrik (2 MVA), telekomunikasi (100 SST), Jalan ROW primer (20 m), ROW sekunder (15 m), dan ROW tersier (15 m)	Belum terdata	S\$ 3-4/bulan	7
74	West Point Maritime Industrial Park	Batam, Kepulauan Riau	360	Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, dan telekomunikasi	-	Lahan industri : Harga sesuai permintaan, kebutuhan lahan	285
75	Bintan Industrial Estate	Bintan, Kepulauan Riau	273	Air bersih [7.500 m³/hari], pengolahan air limbah, listrik (21 MW), dan telekomunikasi (1.000 sambungan)	-	-	-
76	Latrade Industrial Park	Batam, Kepulauan Riau	52	Air bersih, listrik, telekomunikasi	Lahan industri: S\$ 60-80 Bangunan: S\$ 300-350	Pabrik: S\$ 4.50 - 5.00/bulan Hostel: S\$ 500/kamar/bulan	32
77	Kawasan Industri Suge	Belitung, Kepulauan Bangka Belitung	1.414,7	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	300
78	Kawasan Industri Lampung	Lampung	126,8	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	78
79	Puri Selaka Industrial Estate	Batam, Kepulauan Riau	200	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata

Keterangan:
SFB : Standard Factory Building
US\$: US Dollar
S\$: Singapore Dollar

B.3 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Industri (KI)



Sumber: RRMN 2015-2019

B.4 Matrik Rencana Pengembangan Kawasan Industri Baru

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Fokus Sektor	Kebutuhan Infrastruktur
A. Wilayah Papua					
1	Kawasan Industri Bintuni	Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat	2.344	Industri migas dan pupuk	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 300 MW, akses jalan sepanjang 25 Km dari Jalan Lintas Provinsi ke Kawasan Industri, pelabuhan Trestle sepanjang 5 km dengan kapasitas 50.000 DWT, pembangunan perumahan untuk pekerja, pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja, dan Sekolah Kejuruan dan Akademi Komunitas
B. Wilayah Maluku					
2	Kawasan Industri Boli Halmahera Timur	Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara	300	Industri smelter ferro-nickel, stainless steel, dan downstream stainless steel	Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTU) 2 x 110 MW, peningkatan kualitas jalan dari Maba ke Boli (Alternatif Jalan Provinsi) kurang lebih 8 km, pembangunan jalan akses Pelabuhan – Pabrik 1 km, pembangunan jalan akses Pabrik – Town Site 2 km, dan pembangunan Pelabuhan : 2 jeti dengan kapasitas masing-masing 14000 DWT dan 35000 DWT sepanjang 2,5 km
C. Wilayah Nusa Tenggara					
D. Wilayah Sulawesi					
3	Kawasan Industri Biting	Biting, Sulawesi Utara	534	Industri agro dan logistik	Penyelesaian pembangunan PLT Panasbumi Lahendong V daya 1x20MW, penyelesaian pembangunan PLT Uap Kema daya 2x25MW, penyelesaian pembangunan PLT Gas Likupang daya 3x25MW, penyelesaian pembangunan Gardu Induk Pundi 150 KV dan Tanjung Merah 150 KV, peningkatan Kapasitas Sumber Air Tendeiki 1239,05 ltr/detik, peningkatan baik Ruas Jalan Nasional Girian – Kema sepanjang 5 Km, pembangunan Jalan Nasional akses ke Tol Manado – Biting dari pintu tol Km 28,5 ke KEM sepanjang 5 KM, peningkatan Jalan Tol Biting Minut Manado sepanjang 4,3 KM, pengembangan reklamasi seluas 247 ha, pembangunan perumahan untuk pekerja, dan pembangunan Politeknik Kelapa dan Perikanan.
4	Kawasan Industri Palu	Palu, Sulawesi Tengah	1.500	Industri rotan, karet, kakao (agro), dan smelter	Jalan Layang Nasional, jalan Lingkar luar (Moda Transportasi Barang) 4,5 km, peningkatan Pelabuhan Pantolon dan Terminal Peti Kemas, gudang Logistik, gedung Trading Center, dan Balai Latihan Kerja 3 in 1
5	Kawasan Industri Morowali	Jalan Trans Sulawesi Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Sulawesi Tengah	1.200	Industri smelter ferro-nickel, stainless steel, dan downstream stainless steel	PLT Batubara 250 – 350 MW, pembuatan Transmisi Listrik ke Lokasi Kawasan Industri, pembuatan Situ/Waduk 1000 – 1200 liter/detik, pelebaran dan peningkatan jalan dari Bungku ke lokasi Kawasan Industri (40 Km), pelebaran dan peningkatan jalan dari Bandara ke lokasi Kawasan Industri (5 Km), dukungan dari Kementerian Perhubungan RI untuk memperluas Perizinan Pelabuhan dan Bandara, pembangunan perumahan untuk pekerja, pembangunan Rumah Sakit untuk Pekerja, pendirian Politeknik Pertambangan dan Industri Logam di Kawasan Industri Morowali, pendirian Pusat Inovasi Industri Logam (berbasis nikel).
6	Kawasan Industri Bantaeng	Bantaeng, Sulawesi Selatan	3.000	Industri smelter ferro-nickel, stainless steel, dan downstream stainless steel	Pembangunan Pelabuhan dapat menampung kapal dengan kapasitas 10.000-20.000 DWT, pembangunan perumahan untuk pekerja, dan pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja
7	Kawasan Industri Konawe	Kec. Bondola & Kec.	5.500	Industri smelter ferro-nickel, stainless	Pembangunan jembatan di dalam kawasan, komunikasi 1100 SST, pembangunan perumahan untuk pekerja, dan pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (ha)	Fokus Sektor	Kebutuhan Infrastruktur
		Kapolela, Konawe Sulawesi Tenggara		steel, dan downstream stainless steel	
E. Wilayah Kalimantan					
8	Kawasan Industri Ketapang	Kab. Ketapang, Kalimantan Barat	1.000	Industri alumina	Peningkatan kapasitas jalan provinsi di sekitar kawasan, peningkatan akses jalan industri menuju pelabuhan sekitar 30 km, dan pengembangan pelabuhan sebagai akses masuk ke kawasan dan untuk bongkar muat industri
9	Kawasan Industri Londak	Kab. Landak, Kalimantan Barat	306	Industri karet, CPO	Jaringan listrik dari jalan raya menuju kawasan industri 2 km dan Gardu Induk, pembuatan waduk (embung) pengolahan kebutuhan air industri dari sungai Mandor, dan jalan tembus dari kawasan industri menuju ke pelabuhan Pontianak 34 km
10	Kawasan Industri Batulicem	Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	530	Industri besi baja	Jaringan jalan alternatif ke pelabuhan sepanjang 15 km dari jalan lingkar, pelabuhan dermaga dengan Jeti 750 m kedalaman 22 m
11	Kawasan Industri Jorong	Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Belum terdata	Hilirisasi sumber daya mineral (bauksit), kelapa sawit	Belum terdata
F. Wilayah Jawa-Bali					
G. Wilayah Sumatera					
12	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Batubara, Sumatera Utara	1.000	Industri aluminium, CPO	Jalan Utama (volume 97,125 m2), jalan lingkungan (volume 271.950 m2), dan pembangunan Jalur KA Bandar Tinggi Pantibalan – Kuala Tanjung (22,15 km)
13	Kawasan Industri Sei Mangkal	Simahungun, Sumatera Utara	2.002,77	Industri pengolahan CPO	Pembangunan Jalur KA KER Sei Mangkal – Sepur Simpang (2,9 Km), peningkatan rer.Jalur KA Gunung Bayu – Perlansan (4,15 km), dan penambahan kelengkapan mesin dan peralatan pusat inovasi
14	Kawasan Industri Tanggamus	Tanggamus, Lampung	3.500	Industri maritime dan logistik	Pembangunan energi listrik power plant, peningkatan jalan menuju Kawasan Industri Maritim (lebar 8 m, panjang 10 km), peningkatan pengembangan pelabuhan Jeti di Kawasan Industri, dan pembangunan Balai Latihan Kerja

C. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

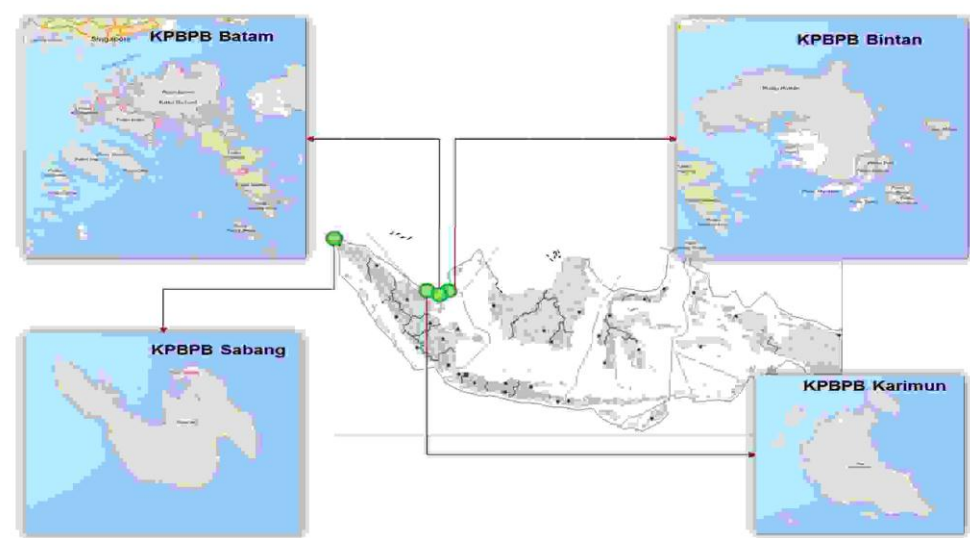
Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Fungsi tersebut meliputi:

- a. Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;
- b. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.

Isu Strategis Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia, yaitu:

- Diperlukan pembagian peran yang jelas di antara KPBPB yang telah ada, seperti KPBPB Batam, KPBPB Bintan (dan Tanjung Pinang), KPBPB Karimun.
- Diperlukan penajaman roadmap dan *clustering*/spesialisasi industri.
- Diperlukan pengembangan industri inovatif dan peningkatan *value added*.
- Diperlukan dukungan kebijakan (regulasi dan kontribusi pembiayaan) lintas sektor terkait masing-masing industri.
- Diperlukan dukungan pembiayaan sinergi pusat dan daerah (APBN/APBD).

C.1 Peta Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)



C.2 Matrik Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (km²)	Status	Cakupan Wilayah	Sektor Unggulan	Kendala dan Aksi yang dapat dilakukan
A. Wilayah Papua							
B. Wilayah Maluku							
C. Wilayah Nusa Tenggara							
D. Wilayah Sulawesi							
E. Wilayah Kalimantan							
F. Wilayah Jawa-Bali							
G. Wilayah Sumatera							
1	KPBPB Sabang	Pulau Weh, Aceh	394	Ditetapkan melalui UU No. 37 Tahun 2000	Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako & Pulau Rondo) dan Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom	Perikanan, perdagangan dan industri, pariwisata	- Terbatasnya ketersediaan infrastruktur. Perlu pengembangan Bandara Maimun Saleh, Pelabuhan Sabang, dan jalan lingkar Pulau Weh (Sabang – Keneuka). - Perlu adanya perencanaan yang komprehensif antara skema insentif dan pembiayaan pembangunan KPBPB dengan dukungan regulasi dan pembiayaan sinergi antara pusat dan daerah (APBN/APBD). - Perlu penajajaran <i>roadmap</i> dan <i>clustering</i>/spesialisasi industri dengan dukungan kebijakan lintas sektor terkait masing-masing industri. Dalam hal ini, Sabang perlu dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa kepelabuhan serta pariwisata internasional.
2	KPBPB Batam	Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau	415	Ditetapkan melalui PP No. 46 Tahun 2007	Meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru	Sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya	- Diperlukan penajajaran <i>roadmap</i> dan <i>clustering</i>/spesialisasi industri, disamping itu perlu pengembangan industri inovatif dan peningkatan <i>value added</i>. Untuk itu, harus ada dukungan kebijakan (regulasi dan kontribusi pembiayaan) lintas sektor terkait masing-masing industri. - Infrastruktur yang perlu dikembangkan/dibangun yaitu Pelabuhan Batu Ampar dan pelabuhan Tanjung South, jalur KA Tanjung Ugang – Batam Center, keteragalistrikan yaitu penambahan kapasitas interkoneksi Batam – Bintan 150 KVA, pembangunan sumber daya air (Estuaria Dam Sei Gong, Rempang Utara, Teluk Nongsa, dan Pulau Kepala Jeri), pengelolaan sampah kota, dan pembangunan <i>techno park</i> berbasis industri
3	KPBPB Bintan	Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	61.296,5	Ditetapkan melalui PP No. 47 Tahun 2007	Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Labuan. Sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang Kawasan Industri	Sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya	- Adanya hambatan pelaksanaan tugas pengelola KPBPB karena aspek struktural dimana terdapat ketidakjelasan status kelembagaan dan juga keterbatasan ruang lingkup/cakupan wilayah bebas yang bersifat <i>enclave</i>. Selain itu, adanya hambatan finansial dimana terbatasnya besaran dana APBN yang dialokasikan dan lambatnya proses administrasi penetapan pengelola anggaran. - Perlu adanya koordinasi dan dukungan kebijakan lintas sektor dan antara pusat dan daerah untuk kejelasan regulasi, status kelembagaan, pengaturan lahan, spesialisasi industri dan pembiayaan yang sinergi antara pusat dan daerah. - Infrastruktur yang tersedia juga masih terbatas. Infrastruktur yang perlu dibangun/dikembangkan antara lain pembangunan jalan lingkar Kota Tanjung Pinang – Kab. Bintan, dan sumber daya air (Tampungan Air Baku DAS Rawal

No.	Kawasan	Lokasi	Luas (km ²)	Status	Cakupan Wilayah	Sektor Unggulan	Kendala dan Aksi yang dapat dilakukan
					Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat		Kab. Bintan dan Estuaria Dam Busung, Kab. Bintan).
4	KIPB/P3 Karimun	Kabupaten Karimun dan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	11.722	Ditetapkan melalui PP No.48 Tahun 2007	Sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak	Sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, pariwisata dan bidang lainnya	- Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, antara lain perlu pembangunan ketenagalistrikan PLTG/MG TB, Karimun Peaker 40 MW dan PLTU TB, Karimun Peaker 20 MW. - Perlu adanya perencanaan yang komprehensif antara skema insentif dan pembiayaan pembangunan KIPB/P3 dengan dukungan regulasi dan pembiayaan sinergi antara pusat dan daerah (APBN/APBD). - Selain itu, diperlukan juga penajaman <i>roadmap</i> dan <i>clustering</i>/spesialisasi industri dengan dukungan kebijakan lintas sektor terkait masing-masing industri.

D. Kawasan Pariwisata

D.1 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Dalam rangka meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, Pemerintah telah menetapkan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). RIPPARNAS telah menggariskan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pencapaian program pembangunan pariwisata nasional hingga 2025. RIPPARNAS mengacu pada empat pilar utama, yakni strategi pembangunan industri pariwisata, destinasi wisata, pengembangan pemasaran pariwisata, serta pengembangan kelembagaan pariwisata dengan menargetkan 50 destinasi wisata nasional, 88 kawasan strategis wisata nasional, dan 222 kawasan pengembangan wisata nasional.

Rencana Pengembangan Sektor Pariwisata Tahun 2015-2019

No.	Uraian Sasaran	Baseline 2014	2019
1	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,2%	8%
2	Wisatawan Mancanegara (Orang)	9 Juta	20 Juta
3	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	250 Juta	275 Juta
4	Devisa (triliun rupiah)	120	240

Sumber: Kementerian Pariwisata

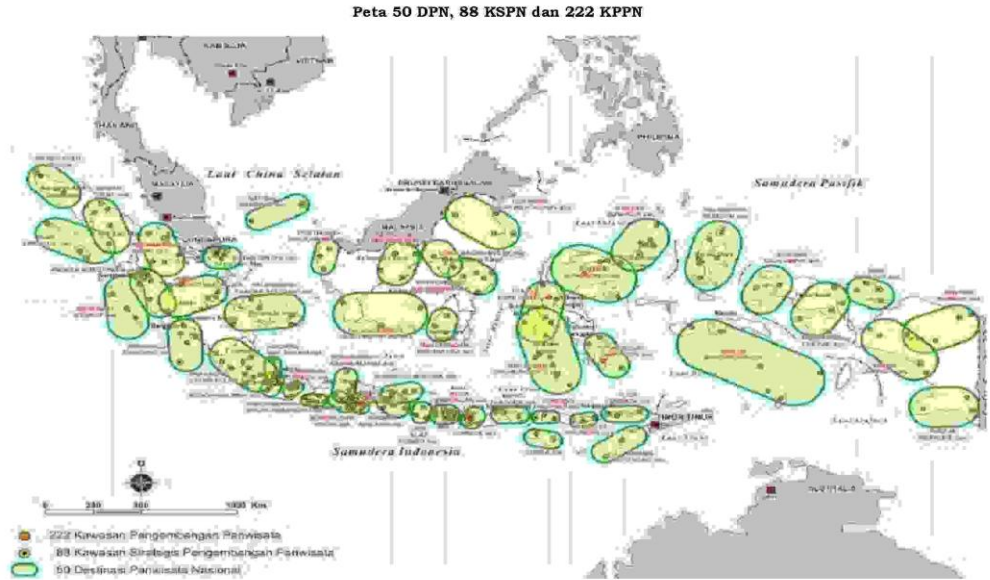
Berdasarkan RIPPARNAS dan RPJMN 2015-2019 Pemasaran Pariwisata Nasional diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara, dengan strategi fokus pada 16 pasar wisatawan manca Negara dan 16 pasar utama wisatawan domestik. Jenis pariwisata yang akan dikembangkan khususnya untuk wisatawan mancanegara mencakup: (1) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (2) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (3) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu. Dalam rangka peningkatan pemasaran pariwisata nasional, akan dibentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih serta pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

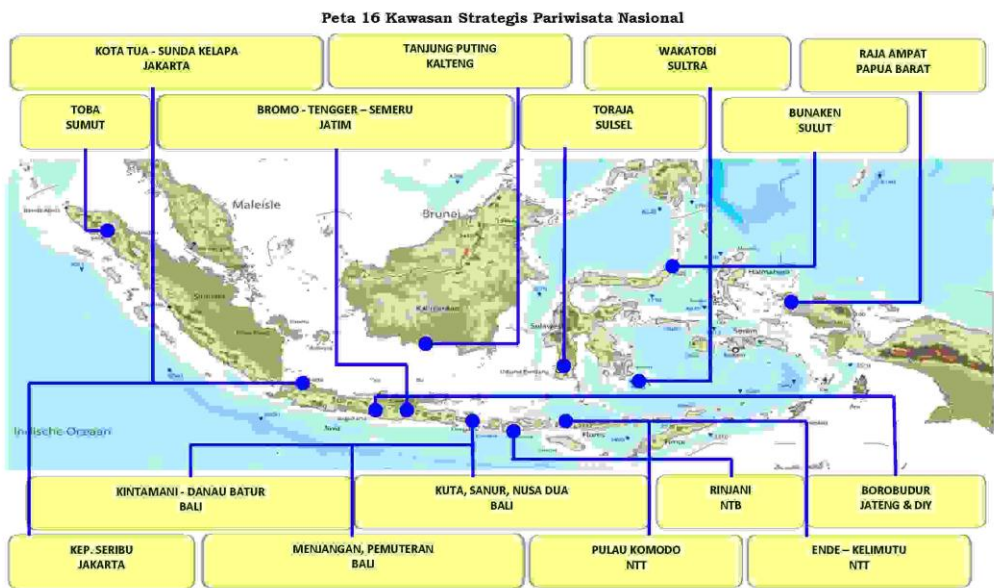
13 Destinasi Prioritas Nasional (DPN) dan 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

No.	DPN	Provinsi	KSPN	Sektor Unggulan	Kendala dan aksi yang akan dilaksanakan
A. Wilayah Papua					
1	Serong-Raja Ampat, dskt	Papua Barat	Raja Ampat, dskt	Wisata bahari, hotel, cottage, restoran, resort	- Perluunya penambahan sarana transportasi umum laut dan penetapan jadwal dan tarif yang jelas. - Pembangunan pelabuhan/marina yang bisa dilabuh kapal penumpang berukuran sedang/besar.
B. Wilayah Maluku					
C. Wilayah Nusa Tenggara					
2	Lombok-Gili Tramenra, dskt	NTB	Rinjani, dskt	Wisata alam, pondok wisata, eko-wisata, hotel, resort	- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas ke kawasan TN Gunung Rinjani - Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata serta pelayanan publik lainnya seperti bank, kantor pos, rumah sakit, pasar dan terminal - Pelaksanaan event-event pariwisata tahunan termasuk kegiatan Visit Lombok dan Sumbawa (VLS)
3	Komodo-Ruteng, dskt	NTT	Komodo, dskt	Wisata bahari, hotel, cottage, restoran, dan resort	- Pembangunan pelabuhan/marina yang bisa dilabuh kapal penumpang berukuran sedang/besar. - Perluunya penambahan sarana transportasi umum baik darat maupun laut dan penetapan jadwal dan tarif yang jelas - Perluunya peningkatan mutu dan kualitas SDM dibidang pariwisata dengan membangun SMK maupun Akademi Pariwisata - Pembangunan fasilitas hyperbaric chambers, pengolahan limbah/sampah, penyediaan air minum/air bersih, museum swasta, balai latihan kerja - Perlu dikembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan skema kemitraan.
4	Kelimutu-Maumere, dskt	NTT	Ende-Kelimutu, dskt	Wisata alam, hotel, cottage	- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas ke kawasan Ende-Kelimutu - Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di kawasan Ende-Kelimutu (penambahan lampu penerangan, toilet, tempat sampah dan tempat makan) - Pembangunan sarana pengolahan air bersih/air minum - Perluunya penambahan sarana transportasi umum darat yang terjadwal.
D. Wilayah Sulawesi					
5	Toraja-Loreindu, dskt	Sulawesi Selatan	Toraja, dskt	Wisata budaya, hotel, cottage, restoran	- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas ke kawasan Toraja. - Perlu mengoptimalkan bandara Pongko dan menambah frekuensi penerbangannya.

No.	DPN	Provinsi	KSPN	Sektor Unggulan	Kendala dan aksi yang akan dilaksanakan
6	Manado-Bunaken, dskt	Sulawesi Utara	Bunaken, dskt	Wisata bahari, hotel, cottage, restoran, resort	- Perluunya penambahan sarana transportasi umum laut dan penetapan jadwal dan tarif yang jelas. - Pembangunan marina yang bisa dilabuh kapal penumpang berukuran sedang/besar.
7	Kendari-Wakatobi, dskt	Sulawesi Tenggara	Wakatobi, dskt	Wisata bahari, hotel, cottage, restoran, resort	- Perluunya penambahan sarana transportasi umum laut dan penetapan jadwal dan tarif yang jelas. - Pembangunan pelabuhan/marina yang bisa dilabuh kapal penumpang berukuran sedang/besar.
E. Wilayah Kalimantan					
8	Palangkaraya-Tanjung Puting, dskt	Kalimantan Tengah	Tanjung Puting, dskt	Wisata alam, cottage	- Akan dikembangkan sebagai tujuan wisata terbatas, bukan mass tourism. Kedepan akan dibangun sistem antrre memasuki kawasan yang mengandung pesona oragutan borneo (<i>Pongo pygmaeus</i>). - Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan
F. Wilayah Jawa-Bali					
9	Jakarta-Kep. Seribu, dskt	DKI Jakarta	Kep. Seribu, dskt	Hotel, cottage, restoran, eco-resort dan wisata tirta	- Perluunya penambahan sarana transportasi laut yang terjadwal dan lebih mengutamakan keselamatan penumpang. - Pembangunan marina yang bisa dilabuh kapal penumpang berukuran sedang/besar. - Perlu ditingkatkannya kegiatan promosi wisata Kepulauan Seribu.
			Kota-Tua-Sunda Kelapa, dskt	Akomodasi (hotel) dan wisata budaya	- Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di kawasan kota tua (penambahan lampu penerangan, tempat sampah, lahan parkir, kawasan pedagang dan tempat makan). - Revitalisasi bangunan-bangunan bersejarah yang telah rusak. - Peningkatan keamanan dan ketertiban di kawasan Kota-Tua.
10	Borobudur-Yogyakarta, dskt	Jawa Tengah - DIY	Borobudur, dskt	Hotel, cottage, restoran dan wisata budaya	- Perlu dibuatnya taman-taman wisata di sekitar lingkungan candi Borobudur sehingga konsentrasi pengunjung Candi bisa terpecaar. - Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di kawasan Borobudur (penambahan lampu penerangan, tempat sampah, lahan parkir, kawasan pedagang dan tempat makan).
11	Bromo-Malang, dskt	Jawa Timur	Bromo-Tengger-Semeru, dskt	Hotel, cottage, restoran, dan wisata alam	- Perluunya pelebaran jalan akses menuju kawasan Bromo-Tengger-Semeru. - Perluunya membentuk DMO (<i>Destination Management Organization</i>) - Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di kawasan Bromo, Tengger Semeru (penambahan lampu penerangan, toilet, kawasan pedagang dan tempat makan) - Pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk ikut menunjang kegiatan pariwisata (pemandu wisata, warung makan, penginapan dan penyewaan Jip)

No.	DPN	Provinsi	KSPN	Sektor Unggulan	Kendala dan aksi yang akan dilaksanakan
12	Bali-Rusa Lembongan, dskt	Bali	Kintamani- Danau Batur, dskt	Hotel, cottage, restoran, dan wisata alam	- Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di kawasan Kintamani-Danu Batur (tempat sampah, lahan parkir, kawasan pedagang dan restoran, dan pasar tradisional) - Masalah perambahan kawasan, pencurian sumber daya alam hayati, perburuan liar kebakaran hutan, pengeboman ikan dan terumbu karang cukup mengprihatinkan, oleh karena itu perlu ditingkatkannya efektivitas pengamanan dengan menempatkan pos pengamanan di daerah yang rawan pelanggaran yang dilengkapi dengan pengamanan laut (speed boat dan perahu mesin) dan pengamanan darat (motor trail) - Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan di daerah penyangga - Peningkatan kegiatan promosi wisata ke Menjangan, Pemuteran
			Menjangan, Pemuteran, dskt	Hotel, cottage, restoran, wisata alam, dan wisata budaya	
		Kuta, Sanur, Nusadua, dskt	Hotel, cottage, restoran, dan wisata tirta	- Perbaikan daerah Sanur terutama 7 kilometer sepanjang tepi Pantai Sanur sampai dengan Pantai Mertasari dan Pantai Matahari terbit. Serta desa wisata percontohan di Desa Serangan, Sanur. - Untuk daerah Kuta, beberapa daerah telah dipilih perbaikan termasuk dalam jangka pendek Pantai Pandawa, Desa Adat Kuku, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. - Perbaikan akses jalan sepeda dan jalan di sepanjang tepi Pantai Sanur dan penataan zonasi antara kios wisata bahari dan kegiatan lainnya	
G. Wilayah Sumatera					
13	Medan-Toba, dskt	Sumatera Utara	Toba, dskt	Hotel berbintang, restoran, desa wisata, dan taman safari	- Perlu penambahan sarana transportasi umum baik darat maupun laut/danau yang terjadwal. - Perlu pembangunan pelabuhan penumpang di beberapa titik di tepi danau Toba dan pulau samosir (Tigaras – Simanindo, Ajibata-Tuktuk, Sibutar-Balige, Nalngolan-Muara, dermaga wisata Pusuk Buhit/Parapat) untuk memudahkan para wisatawan dalam menikmati keindahan danau. - Pembangunan fasilitas pengolahan limbah/sampah dan penyediaan air minum/air bersih. - Perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penyuluhan dan pembinaan.
13 DPN		12 PROVINSI	16 KSPN		





Selain 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional diatas, berdasarkan Laporan Kegiatan *Indonesia Tourism Investment Day* tahun 2014 yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata, ada 19 lokasi potensi investasi pariwisata dengan status lahan *clean and clear* yang terdiri dari 13 lokasi milik Pemerintah Daerah meliputi Wakatobi, Bugam Raya, Palalawan (Bono), Tobasa, Saumlaki, Sabang, Bintan, Anambas, Rote, Gunungsitoli dan Nias Utara, Bangka dan Sumenep serta 6 (enam) lokasi milik pengembang swasta yaitu Tanjung Lesung, Mandalika, Teluk Mekaki, Belitung, Medana Bay dan Tanjung Ringgit, sebagaimana ditampilkan dalam tabel matrik rencana pengembangan wilayah jasa pariwisata nasional di bagian D.2.

Isu Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional yaitu:

1. Perlunya percepatan pelayanan penanaman modal di bidang pariwisata.
2. Permudah pelayanan kepabeanan, keimigrasian dan karantina (CIQ).
3. Percepatan penyelesaian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah bagi Kabupaten, Kota dan Provinsi yang masih belum menyelesaikan.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang menunjang kegiatan pariwisata.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban di destinasi pariwisata.
6. Pengembangan Sarana Penyebaran informasi potensi pariwisata di Indonesia.
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata yang berdaya saing.

D.2 Matrik Rencana Pengembangan Wilayah Jasa Pariwisata Nasional

No.	KPPN/KSPN	Aksesibilitas	Investasi (yang akan ditarik)
A. Wilayah Papua			
1	Raja Ampat, Provinsi Papua Barat	Gunakan penerbangan menuju Sorong yang dilayani beberapa maskapai nasional. Jika terbang dari Jakarta akan memakan waktu 4 jam penerbangan ke Sorong yang berhenti di Manado dengan Lion Air atau Wings Air. Pilihan lain terbang selama 6 dengan Garuda atau Sriwijaya Air dengan transit di Makassar. Tersedia pula penerbangan langsung 4 jam dari Jakarta ke Sorong dengan Express Air Kepulauan Raja Ampat, terletak di Pulau Waigeo Selatan. Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Bisa lewat Jalur udara, Bandara Domine Eduard Osok maupun jalur laut, Pelabuhan Waisai dan Pelabuhan Rakyat Sorong.	1. Wisata Bahari (Snorkling, Diving) 2. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort) 3. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata 4. Kapal penumpang
B. Wilayah Maluku			
2	Segitiga Wisata Bahari MAN, Provinsi Maluku	Kabupaten Saumlaki memiliki 2 pulau yang bisa dikembangkan yaitu Pulau Matikus yang berpenghuni dengan luas 474 Ha dan Pulau Nustabun yang tidak berpenghuni dengan luas area 100 Ha. Bisa dicapai dengan perjalanan menggunakan pesawat berbalik (express air dan Triguna Air) dari Bandara Ambon Pattimura ke Bandara Saumlaki Cililit. Ada dua ferry besar yang memiliki rute antara Saumlaki, Maluku Tengah (Ambon) dan Papua dengan kedatangan beberapa kali dalam satu bulan tergantung dengan cuaca. Perahu Kayu Tradisional dan Perahu Fiberglass melayani perjalanan dari pulau Yamadena ke pulau sekitarnya.	1. Pelabuhan kapal penangkap ikan, cold storage, fasilitas pengeeringan rumput laut 2. Marina 3. Restaurant, Hotel, Bar 4. Toko kerajinan tangan dan seni, olah raga air, fasilitas air bersih dan fasilitas penyediaan bahan bakar 5. Pelabuhan kecil untuk jetty, speed boat, perahu tradisional 6. Pesawat dan helicopter terapaning
C. Wilayah Nusa Tenggara			
3	Gunung Rinjani, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peluang pertumbuhan pariwisata Lombok di masa datang juga akan semakin terbuka dengan banyaknya maskapai yang mulai membuka rute penerbangan ke Lombok, seperti Merpati, Lion Air, Air Asia dan Citilink. Banyaknya maskapai yang melayani penerbangan ke Lombok akan semakin memudahkan wisatawan untuk berkunjung.	1. Pengembangan kawasan Wisata Outbond dan Adventure 2. Kondisi alam serta keragaman flora dan fauna yang dimiliki TN Gunung Rinjani juga dapat menjadi sarana yang bagus bagi pengembangan wisata outbond dan petualangan (adventure). 3. Pengembangan Pondok Wisata 4. Perkembangan pengunjung wisata di TN Gunung Rinjani dapat menjadi peluang bagi pengembangan pondok wisata. Sesuai dengan ketentuan, pondok wisata ini hanya dapat dibangun di zona pemanfaatan TN Gunung Rinjani dan harus sesuai dengan desain tapak yang telah ditentukan. 5. Pengembangan kebun raya atau taman-taman rekreasi berbasis alam dan pendidikan lingkungan/ekologi. Pengembangan obyek wisata ini diperlukan untuk sarana rekreasi dan pendidikan ekologi serta untuk melayani wisatawan yang tidak dapat berwisata ke puncak gunung.

No.	KPPN/KSPN	Aksesibilitas	Investasi (yang akan ditarik)
			6. Pembangunan Hotel/Cottage atau Sarana Akomodasi lainnya Provinsi NTB khususnya di sekitar kawasan TN Gunung Rinjani membutuhkan usaha-usaha jasa pengisian/hotel/resort. Perkiraan investasi pembangunan hotel/resort lengkap dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya untuk di kawasan TN Gunung Rinjani adalah sekitar 137 milyar
4	Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Komodo termasuk dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bisa ditempuh melalui jalur udara lewat bandara udara Komodo. Jalur laut juga bisa ditempuh lewat Pelabuhan Penumpang di Labuan Bajo.	1. Wisata Bahari (Snorkling, Diving, Water sport, fishing) 2. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort) 3. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata 4. Kapal penumpang
5	Ende Kelimutu, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bisa lewat Jalur udara, Bandara H. Aroeboesman maupun jalur laut, Pelabuhan Ippi-Ende	Pengembangan kawasan Wisata <i>Outbond</i> dan <i>Adventure</i> . Investasi petualangan sangat pas dikembangkan di TN Kelimutu. Sangat pas bagi wisatawan yang gemar menjelajahi alam (jungle track) atau hiking.
6	Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pulau rote bisa dicapai oleh turis domestik maupun mancanegara, melalui: - Bandara: Lelikuik Rote (bandara lokal dengan jadwal yang tidak padat, melayani rute penerbangan dari Kupang ke Rote Ndao sekali sehari) - Bandara luas yang terdekat adalah bandara El Tari di Kupang - Bandara internasional terdekat adalah Bandara Ngurah Rai di Bali - Pelabuhan lainnya antara lain: pelabuhan Ba'a di Lobalain, pelabuhan Batutuba di Rote Barat Daya, Pelabuhan Oelaba di Rote Barat Laut, Pelabuhan Papela di Rote Timur. - Pelabuhan Ferry Pantai Baru di Pantai Baru	Beberapa pulau dan pantai bisa dikembangkan untuk beberapa bidang usaha yaitu: 1. Hotel berbintang 3-5 2. Restoran, Cafe dan Bar 3. Spa dan villa 4. Taman rekreasi dan taman wisata alam 5. Desa wisata
7	Mandalika Resort Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dari Bandara Internasional Lombok hanya 16 km atau 20 menit menggunakan mobil. Menggunakan kapal bisa dari Bali melalui pulau Gil selama 1 jam, kemudian dilanjutkan lagi 1,5 jam untuk mencapai Mandalika Resort Lombok maupun dengan Ferry yang lebih lambat dari Bali bisa mencapai (5 Jam) sandar di sebelah barat pulau Lembar	1. Dua lapangan golf 18 hole dengan fasilitas penunjangnya 2. Hotel, Condotel, dan Villa 3. Pusat Kesehatan dan Kebagunan 4. Tempat tinggal untuk komunitas pensiunan 5. Restaurant, Bar 6. Fasilitas Rapat/pertemuan/pameran 7. Taman hiburan 8. Museum (seni dan gallery kerajinan tangan) 9. Infrastruktur (jalan) 10. Pelabuhan dan Marina 11. Jaringan listrik, air, komunikasi dan data 12. Transportasi umum yang berkelanjutan 13. Wisata air dan kegiatan olahraga lainnya
8	Mekaki Bay, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dari Bandara Internasional Lombok dapat ditempuh selama 1,5-2 jam lewat perjalanan darat. Total Area: 200 Ha	1. Taman Wisata Alam 2. Hotel 3. Resort 4. Eko Wisata

No.	KPPN/KSPN	Aksesibilitas	Investasi (yang akan ditarik)
9	Medana Bay, Provinsi Nusa Tenggara Barat	- Bandara Internasional Lombok bisa diakses dari Jakarta (CKG) 1 Jam 50 Menit, Bali (DPS) 25 Menit, Silk Air dari Singapura (3 Jam) - Dari Bandara Lombok ke Medana bisa ditempuh melalui jalan darat selama 90 menit (55 km) - Ferry dari Lembar ke Padang Bai Bali (4 Jam), dari Lombok Timur melalui Sumbawa Barat (1 Jam) - Kapal cepat dari Bali ke Gili Trawangan dan Jetty umum di Bangsal sejauh 6 km.	1. Mid-Rise Apartment 2. Hotel Bintang 4 (100-150 ruangan) 3. Villa 4. Kolam renang anak, taman bermain anak 5. Lapangan tenis dan badminton 6. Toko perlengkapan menyelam 7. Klinik kesehatan 8. Spa, Gym dan olah raga air
10	Tanjung Ringgit, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pulau Delapan di Sumbawa	- Lewat jalan darat 1,5 jam dari Bandara Internasional Lombok - Lewat jalan laut bisa ditempuh selama 20 menit dari telongelung ke Tanjung Ringgit dan perkiraan 1 jam ke Pulau Delapan - Luas Area 400 Ha (Tanjung Ringgit) dan 20.000 Ha (Pulau Delapan)	1. Eco resort dan Hotel 2. Ekowisata (rumah dan villa) 3. Marina 4. Fasilitas transportasi 5. Pembangunan energi terbarukan 6. Pusat pelatihan selam dan olahraga air 7. SPA dan klinik kesehatan 8. Restoran dan bar
D. Wilayah Sulawesi			
11	Suku Tona di Provinsi Sulawesi Selatan	Suku Tona adalah suku yang menetap di Kabupaten Tana Toraja, pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Untuk menuju Tana Toraja dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.	Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran) Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata
12	Bunaken yang terletak di Sulawesi Utara	Pulau Bunaken terletak di Teluk Manado, Sulawesi. Luasnya sekitar 8,08 km ² dan termasuk ke dalam bagian dari Kota Manado. Untuk mencapai Pulau Bunaken dapat ditempuh dengan <i>speed boat</i> dengan lama perjalanan sekitar 30 menit dari pelabuhan kota Manado. Daya tarik pulau ini adalah karena terdapat Taman Nasional Bunaken yang keindahannya terkenal sampai wisatawan mancanegara.	Wisata Bahari (Snorkling, Diving, Water sport, fishing) Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort) Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata Kapal penumpang
13	Wakatobi, Provinsi Sulawesi Selatan	Taman Nasional Wakatobi terletak di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mencapai TN Wakatobi dapat menggunakan pesawat dengan tujuan Kendari Bandara Mahkota. Dari Kendari perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan kapal ke Wanci yang terletak di Pulau Wangi-Wangi dengan lama perjalanan 10-12 jam. Pulau ini merupakan pintu gerbang pertama memasuki kawasan TN Wakatobi. Ada pelayanan ferry yang terjadwal diantara pulau-pulau di Wakatobi. Luas Area: 3500 Ha	Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan eco-resort), Spa, airport internasional, Desa Wisata Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata Wisata Tirta (Snorkling, Diving, Water sport, fishing)
E. Wilayah Kalimantan			
14	Bugan Bay, Provinsi Kalimantan Tengah	Untuk mencapai Bugan Bay dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Iskandar, Pangkalan Bun membutuhkan waktu 1,5 Jam dan tersedia jadwal rutin setiap harinya. Terdapat Fasilitas pelabuhan di Hulu Sungai, Kumai, wisatawan bisa menggunakan ferry sungai, ferry antar pulau dan kapal penumpang dan barang. Total Area: 105,5 km ²	1. Perlu nya pembuatan transportasi utama diantara Keraya dan Sebau (Zone KB1). 2. Perlu nya shuttle yang menghubungkan bandara dan airport 3. Pelabuhan laut yang komplt yaitu untuk terminal ferry antar pulau, ferry sungai, cruise ship, Marina untuk Super dan Cruise Yatch.

No.	KPPN/KSPN	Aksesibilitas	Investasi (yang akan ditarik)
			4. Terpadu dengan pelabuhan perlu dibuatnya restoran, toko-toko, fasilitas hiburan, layanan yang dibutuhkan warga/wisatawan. 5. Lapangan Golf, Water Park, Animal Parks 6. Floating Hotel
15	TN Tanjung Puting, Provinsi Kalimantan Tengah	Cara terbaik menuju Taman Nasional tanjung Puting adalah melalui Kumai, kota kecamatan dan kota pelabuhan laut yang terletak 15 km dari Pangkalan Bun (Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat). Untuk menuju Pangkalan Bun dari Pulau Jawa dapat dicapai dengan menggunakan pesawat udara. Ada beberapa maskapai penerbangan yang melayani penerbangan dari Semarang ke Pangkalan Bun. Demikian pula jika melalui kota-kota di Kalimantan seperti Pontianak, Ketapang, atau Banjarmasin, ada maskapai penerbangan yang melayani penerbangan ke Pangkalan Bun. Kemudian, dari Bandara Iskandar Pangkalan Bun dapat menggunakan taksi carteran ke Kumai. Bila menggunakan kapal laut menuju Pelabuhan Kumai dapat menggunakan jasa PELNI (Binaiya, Lawit, Tilong Kabita, Leusen) atau kapal laut swasta dari Semarang atau Surabaya. Untuk mencapai lokasi kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dari Kumai dapat menggunakan klotok atau speed boat. Dengan Speed Boat: Kumai - Tanjung Harapan (20 km) : 0,5 jam Kumai - Pondok Tanggui (30 km) : 1,0 jam Kumai - Camp Leakey (40 km) : 1,5 jam Dengan Klotok: Kumai - Tanjung Harapan (20 km) : 1,5 jam Kumai - Pondok Tanggui (30 km) : 3,0 jam Kumai - Camp Leakey (40 km) : 4,5 jam	Pengembangan kawasan Wisata <i>Outbond</i> dan <i>Adventure</i> Investasi petualangan bagi wisatawan yang gemar menjelajahi alam (jungle track) atau hiking.
F. Wilayah Jawa-Bali			
16	Tanjung Lesung, Provinsi Banten	- Terletak 180 Km dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta - Bisa ditempuh melalui Jalan Tol Jakarta-Merak, keluar pintu Serang Timur, melalui Pandeglang-Labuan-Tanjung Lesung - Tanjung Lesung juga bisa ditempuh melalui transportasi laut dari Marina Ancol (4 jam), Pantai Muara (4 Jam) dan Carita (1 Jam). - Total Area: 1500 Ha	Mengembangkan <i>All in One Resort</i> , lengkap dengan fasilitas hiburan, sekolah, rumah sakit, hotel dan tempat komersial lainnya
17	Kota Tua di jantung Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Kota Tua terletak di bagian utara Kota Jakarta. Akses untuk menuju Kota Tua sangat mudah baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.	Akomodasi (hotel), Wisata Budaya
18	Kepulauan Seribu gugusan 76 kepulauan karang yang terletak di DKI Jakarta	Kepulauan Seribu terletak di sebelah utara pontal Jakarta. Lokasi Pulau Seribu relatif mudah dijangkau karena ada beberapa pelabuhan lokasi yang membuka rute kapal menuju Pulau Seribu yaitu Muara Angke, Muara Kamal, dan Pelabuhan Marina Ancol	1. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan eco-resort) 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata 3. Wisata Tirta (Snorkling, Diving, Water sport, fishing)

No.	KPPN/KSPN	Aksesibilitas	Investasi (yang akan ditarik)
19	Candi Borobudur, Jawa Tengah	Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai Candi Borobudur dapat menggunakan jalur darat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dengan waktu tempuh 2,5 jam dari Semarang dan 1 jam dari Yogyakarta.	1. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort), Wisata Budaya, 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata
20	Bromo, Tengger, dan Semeru, Provinsi Jawa Timur	Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru termasuk ke dalam 4 (empat) wilayah kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang di Provinsi Jawa Timur. TNDTS dapat dijangkau melalui jalur darat dari Surabaya atau Malang.	1. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort) 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata 3.
21	Danau Batur di Kintamani, Provinsi Bali	Danau Batur terletak di Kabupaten Bangli, Bali. Jarak tempuh yang diperlukan untuk mencapai Danau Batur sekitar 1,5 jam perjalanan mobil dari kota Denpasar dan 20 menit dari Kota Bangli.	1. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort) 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata
22	Pulau Menjangan, dengan candi yang terletak di bawah Laut Pemuteran, Provinsi Bali	Lokasi Pulau Menjangan berada di Desa Sumber Klampok, Gerokgak, sekitar 55 km dari Kota Singaraja, Bali.	1. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran) 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata
23	Kuta, Sanur, dan Nusa Dua, Provinsi Bali	Pantai Kuta, Sanur, dan Nusa Dua berlokasi di Pulau Bali. Pantai Sanur berjarak sekitar 6 km dari pusat kota Denpasar dan dapat dicapai dengan kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor. Pantai Kuta dan Pantai Nusa Dua terletak tidak jauh dari Bandara Internasional Ngurah Rai yaitu sekitar 40 menit ke Pantai Kuta dan 30 menit ke Pantai Nusa Dua.	1. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort) 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata 3. Wisata Tirta (Snorkling, Diving, Water sport, fishing)
24	Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur	Sumenep dapat dijangkau baik oleh wisatawan domestik maupun internasional melalui: - Terminal bus Aryawirajaya, terminal bus tipe A - Pelabuhan Kalianget (menghubungkan Kabupaten Sumenep dengan pulau kecilnya) - Bandara lokal (Trunojoyo) - Bandara internasional terdekat yaitu bandara Juanda di Surabaya dan Ngurah Rai di Bali	1. Pantai Lombang bisa dikembangkan untuk hotel berbintang, restoran, hotel, kafe dan bar, spa, villa, bilyard, tenis lapangan, dan kolam renang, taman rekreasi dan taman wisata 2. Pulau Giliyung bisa dikembangkan SPA dan villa
G. Wilayah Sumatera			
25	Danau Toba di Sumatera Utara	Danau Toba terhampar di atas beberapa kabupaten di Sumatera Utara, antara lain Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Dairi. Luasnya kurang lebih 100 km x 30 km. Untuk mencapai Danau Toba wisatawan dapat melalui rute Medan – Parapat atau Medan Berastagi yang jaraknya kurang lebih 176 km dan waktu tempuh 4 jam dengan kendaraan roda dua atau empat. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir yang juga merupakan daya tarik keindahan Danau Toba. Untuk menuju Pulau Samosir dapat ditempuh melalui jalan darat yaitu melalui jembatan penyeberangan dan jalur air dengan kapal. Ada tiga Wilayah di Kabupaten Samosir yang akan dikembangkan, yaitu:	1. Wilayah Aek Natonang a. Hotel berbintang 3-5 b. Wisata Alam/taman safari c. Rumah pensiunan d. Hotel dan restaurant dengan gaya Batak e. Fasilitas Konferensi dan Konferensi 2. Wilayah Lagundi a. Hotel b. Fasilitas Berkemah c. Olah raga air 3. Wilayah Sigulatti Geo Park

No.	KPPN/KSPN	Aksesibilitas	Investasi (yang akan ditarik)
		a. Wilayah Aek Natonang, berupa dataran tinggi, dizonasikan untuk pariwisata, berukuran 94 Ha termasuk Danau 14 Ha dan hutan lindung dibagian selatannya b. Wilayah Lagundi seluas 28 Ha c. Wilayah Sigulatti	
26	Pulau Weh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	Pulau weh dapat dijangkau oleh turis domestik maupun turis asing melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh dari Banda Aceh turis dapat mencapai pulau Weh dengan menggunakan ferry melalui pelabuhan UleeLheu (ferry kecil dan cepat memakan waktu 45 menit sedangkan yang besar dan lebih lambat memakan waktu 1,5 sampai 2 jam)	1. Pantai Iboih, dengan luas area 1,5 Ha bisa dikembangkan investasi hotel bintang 1-2, restoran, cafe dan villa. 2. Pantai Lhok Weng dengan luas area 15 Ha bisa dikembangkan investasi hotel berbintang, spa, villa dan kolam renang 3. Pelabuhan CT3 dengan total luas lahan 15 Ha, baru dibangun 3 Ha dengan panjang pelabuhan 430 meter, bisa dikembangkan investasi Galangan kapal, transportasi laut khusus wisata baik domestik maupun internasional 4. Pantai Sumur Tiga, dengan luas lokasi 2 Ha, investasi yang bisa dikembangkan antara lain, hotel berbintang, restoran dan kafe, spa dan villa, kolam renang 5. Balohan, dengan luas lahan 5 Ha, bisa dikembangkan hotel berbintang, restoran, kafe, MICE 6. Jaboi Geothermal Site dengan luas area 15 Ha, bisa dikembangkan SPA, villa, taman wisata dan pemandian air panas 7. Bango dengan total luas lahan 48,6 Ha bisa dikembangkan hotel berbintang, spa, villa, lapangan golf, lapangan tennis, taman rekreasi, taman wisata, MICE 8. Balik Gumung dengan total luas lahan 142,6 Ha, bisa dikembangkan hotel berbintang, restoran, spa, villa, fasilitas olahraga, lapangan tennis, lapangan golf, taman rekreasi, taman wisata alam dan kawasan pariwisata
27	Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	- Bandara Udara Iskandar Muda Internasional Airport terletak 13,5 km sebelah tenggara Banda Aceh - Umumnya dari Banda Aceh ke Sabang ditempuh melalui laut (1-2 jam perjalanan) - Luas area 100 Ha	1. Pelayanan Kerpelabuhan 2. Marina 3. Agen Wisata 4. Pembangkit tenaga listrik ramah lingkungan 5. Golf 6. Restoran Internasional 7. Hotel, Resort dan Villa/Pungalow 8. Wisata air
28	Tobasa, Sumatera Utara	Terdapat bandara yang terdekat yaitu Silangit, dekat dengan Balige, 40 menit penerbangan dari bandara Kuala Namu dilanjutkan perjalanan darat 2 Jam ke	Banyak investasi bisa dikembangkan di areal pesisir dan masuk pulau, yaitu:

No.	KPPN /KSPN	Aksesibilitas	Investasi (yang akan ditarik)
		Parapat	1. Hotel berbintang 3-5 2. Desa Wisata 3. Hotel dan Restorant bergaya rumah adat Batak 4. Hiburan keluarga di wilayah pesisir 5. Taman safari
29	Ombak Bono Sungai Kampar, Provinsi Riau	Tersedia bandara udara internasional di pekanbaru dengan menerima perjalanan internasional dari Singapura dan Kuala Lumpur dan perjalanan domestik dari Jakarta, Padang, Kuala Namu (Medan), dan Batam plus bandara lokal. Dari Pekan Baru dilanjutkan jalan darat ke Pangkalan Kerinci ibukota Kabupaten Pelalawan sejauh 70 km, dilanjutkan perjalanan darat 3-4 jam ke tempat wisata ombak Bono sungai Kampar	1. Hotel berbintang 3-5 2. Taman Alam 3. Perumahan untuk para pensiunan 4. Wisata air dan fasilitas olahraga air 5. Fasilitas hiburan keluarga 6. Fasilitas pertemuan 7. Desa Wisata (rumah tradisional Riau)
30	Belitung, Provinsi Bangka Belitung	Dapat ditempuh dari bandara Soekarno-Hatta ke Tanjung Pandan Belitung selama 45 Menit. 3 Jam perjalanan dari Mentok ke Pangkal Pinang (Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung) 3 Jam perjalanan laut dari Bom Baru Palembang ke Tanjung Kalian. Mentok. Total area 300-500 Ha	1. Taman Wisata Alam 2. Hotel 3. Resort 4. Eko Wisata
31	Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Airport pribadi khusus untuk turis (bisa untuk 737 dan A320), 35 menit dari Lagoi Bay lewat darat. Beberapa jadwal pesawat menuju Bandara Kijang Bintan, yaitu Sriwijaya (2x dari Jakarta), Sky Aviation (7x dari Pekanbaru), dan Lion Air (5x dari Jakarta)	1. Resort 2. Spa 3. Golf 4. Restaurant dan Bar 5. Wisata Tirta
32	Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	Penerbangan dengan menggunakan pesawat dengan propeller turbo 6 hari dalam seminggu dari Tanjung Pinang, Bintan atau dari Batam. Lama perjalanan 1 jam. Saat ini satu-satunya bandara di Anambas adalah di Pulau Matak. Kapal kecil dan ferry menghubungkan Matak ke Tarempa, ibukota Kabupaten. Tiga ferry besar melewati alur laut diantara Tanjung Pinang dan Tarempa, Siantan dua kali seminggu dengan waktu tempuh 9 jam. Dari 4 pelabuhan di Kabupaten Anambas hanya 2 yang bisa dilalui ferry besar yaitu Tarempa dan Letung. Anambas termasuk dalam koridor kapal cruise yang menghubungkan Hong Kong, Singapura dan Philipina. Oleh karena itu perlunya pemerintah Kabupaten untuk menyediakan terminal untuk kapal cruise berukuran sedang di masa yang akan datang.	Pemda setempat telah mempersiapkan beberapa pulau dan pantai sebagai pusat pengembangan utama pariwisata (Ekwisat), beberapa bidang yang bisa dikembangkan, yaitu 1. Boutique Hotel berbintang 3-5 2. SPA 3. Wisata tirta dan fasilitas olah raga 4. Hotel dan restaurant dengan gaya perkampungan nelayan 5. Fasilitas Konvensi/Konferensi
33	Gumung Sitoli, Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara	Pulau nias dapat dijangkau oleh turis domestik maupun turis asing melalui: - Bandara Binaka (bandara lokal dengan frekuensi penerbangan yang rendah melayani rute Nias-Medan) - Kualanamu adalah bandara internasional terdekat - Pelabuhan Gumungsitoli dan Teluk Dalam	1. Miga Beach Hotel, Resto dan Galeri dengan luas 1,5 Ha (peluang bisnisnya antara lain hotel berbintang, restoran, kafe, bar. 2. Goa Togi Ndrawa dengan luas 1,4 Ha (bisa dikembangkan taman rekreasi dan wisata alam) 3. Pantai Hoya dengan luas 31 Ha bisa dikembangkan hotel berbintang, restoran, kafe dan bar, spa dan villa, lapangan tenis dan golf, taman rekreasi dan taman

No.	KPPN /KSPN	Aksesibilitas	Investasi (yang akan ditarik)
			wisata, kawasan pariwisata, MICE 4. Sungai Muara Indah dengan luas 4,5 Ha bisa dikembangkan hotel berbintang, restoran, kafe dan bar, spa dan villa, taman rekreasi dan taman wisata
34	Bangka, Provinsi Bangka Belitung	Pulau Bangka dapat dijangkau oleh turis asing maupun domestik melalui: - Bandara lokal yaitu Bandara Depati Amir (melayani Jakarta-Pangkal Pinang, Batam-Pangkal Pinang, Palembang-Pangkalpinang, Belitung-Pangkal Pinang) - Bandara internasional terdekat yaitu Soekarno Hatta, Sultan Mahmud Badruddin di Palembang - Pelabuhanannya yaitu Pangkalbalam di kota Pangkalpinang, Pelabuhan Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu, dan Tanjung Kalian di kecamatan Muntok	1. Pantai Parai, beberapa potensi investasi yang bisa dikembangkan antara lain: Hotel berbintang 3-5, Restoran, kafe dan bar, Spa dan villa, marina, lapangan golf, bilyard, tenis lapangan, dan kolam renang. Taman rekreasi maupun taman wisata 2. Pantai Rambok dengan total area 110 Ha dan 80 Ha nya dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan untuk investasi khususnya di bidang pariwisata, beberapa bidang yang dapat dikembangkan yaitu Hotel berbintang 3-5, Restoran, kafe dan bar, Spa dan villa, marina, lapangan golf, bilyard, tenis lapangan, dan kolam renang. Taman rekreasi maupun taman wisata dan desa wisata.
35	Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara	Pulau Nias dapat dijangkau oleh turis domestik maupun turis asing melalui: - Bandara Binaka (bandara lokal dengan frekuensi penerbangan yang rendah melayani rute Nias-Medan) - Kualanamu adalah bandara internasional terdekat - Pelabuhan Gumungsitoli dan Teluk Dalam	1. Pantai Pasir Berbungyi, beberapa potensi investasi yang bisa dikembangkan antara lain: Hotel berbintang, Restoran, kafe dan bar, Spa dan villa, marina, lapangan golf, kawasan Pariwisata, tenis lapangan, MICE, Taman rekreasi maupun taman wisata 2. Pantai Lafau, beberapa potensi investasi yang bisa dikembangkan antara lain: Hotel berbintang, Restoran, kafe dan bar, Spa dan villa, marina, lapangan golf, Kawasan Pariwisata, tenis lapangan, MICE, Taman rekreasi maupun taman wisata 3. Pantai Tureloto, beberapa potensi investasi yang bisa dikembangkan antara lain: Hotel berbintang, Restoran, kafe dan bar, Spa dan villa, marina, lapangan golf, Kawasan Pariwisata, tenis lapangan, MICE, Taman rekreasi maupun taman wisata

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN
2015-2019

MATRIK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
TAHUN 2015-2019

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp. Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
1.	Pembangunan Bandara Nabire Baru	Papua	1,00	APBN/APBD	Bappenas
2.	Pengembangan Bandara Timika	Papua	1,00	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
3.	Pengembangan Bandara Seritani	Papua	0,37	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
4.	Pengembangan Bandara Nduga	Papua	1,50	APBN/APBD	Bappenas
5.	Perpanjangan Bandara Mopah Merauke (2015)	Papua	0,13	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
6.	Pengembangan Bandara Sorong	Papua Barat	0,20	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
7.	Perpanjangan Landasan Bandara Kebar	Papua Barat	1,00	APBN/APBD	Bappenas
8.	Perpanjangan Landasan Bandara Werur	Papua Barat	1,00	APBN/APBD	Bappenas
9.	Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok (2015)	Papua Barat	0,20	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
10.	Pengembangan Bandara Rendani, Manokwari	Papua Barat	0,20	APBN/APBD	Bappenas
B. Wilayah Maluku					
11.	Pembangunan Bandara Ambon	Maluku	4,50	APBN/APBD	Bappenas
12.	Pembangunan Bandara Tual	Maluku	4,00	APBN/APBD	Bappenas
13.	Pembangunan Bandara Moa	Maluku	0,01	APBN/APBD	Bappenas
14.	Pengembangan Bandar Udara Amahai	Maluku	0,15	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp. Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
15.	Pembangunan Bandara Namtwei	Maluku	0,01	APBN/APBD	Bappenas
16.	Pembangunan Bandara Halmahera	Maluku Utara	6,70	APBN/APBD	Bappenas
17.	Peningkatan Bandara Babullah, Ternate	Maluku Utara	4,50	APBN/APBD	Bappenas
18.	Peningkatan Bandara Oesman Sadik - Labuha	Maluku Utara	1,20	APBN/APBD	Bappenas
19.	Pembangunan Bandara Pitu Merotai	Maluku Utara	2,00	APBN/APBD	Bappenas
C. Wilayah Nusa Tenggara					
20.	Perluasan Terminal Penumpang Bandara Internasional Lombok	NTB	0,83	BUMN	Kemenko Ekon, Bappenas
21.	Pengembangan Bandara Bima	NTB	1,20	APBN/APBD	Bappenas
22.	Pengembangan Bandara El Tari	NTT	0,04	APBN/APBD	Bappenas
23.	Pengembangan Bandara Komodo	NTT	0,13	APBN/APBD	Bappenas
D. Wilayah Sulawesi					
24.	Lanjutan Pembangunan Bandara Djalaluddin	Gorontalo	2,93	APBN/APBD	Bappenas
25.	Pengembangan Bandara Baru Buntu Kurik, Tanatoraja	Sulawesi Selatan	0,04	APBN/APBD	Pemprov
26.	Pembangunan Bandara Banggai Laut	Sulawesi Tengah	1,00	APBN/APBD	BPMP
27.	Pembangunan Bandara Morowali	Sulawesi Tengah	1,20	APBN/APBD	BPMP
28.	Peningkatan Bandara Haluoleo Kendari	Sulawesi Tenggara	1,46	APBN/APBD	Bappenas
29.	Pengembangan Bandara Samratulangi	Sulawesi Utara	1,50	APBN/APBD	Bappenas
E. Wilayah Kalimantan					
30.	Peningkatan Bandara Rahadi Oesman - Ketapang	Kalimantan Barat	1,00	APBN/APBD	Bappenas
31.	Pengembangan Bandara Putussibau	Kalimantan Barat	2,30	APBN/APBD	Pemprov
32.	Pengembangan Bandara Sintang	Kalimantan Barat	2,00	APBN/APBD	Pemprov
33.	Pembangunan Bandara Singkawang	Kalimantan Barat	2,00	APBN/APBD	Pemprov
34.	Pengembangan Bandara Paloh	Kalimantan Barat	2,50	APBN/APBD	Pemprov
35.	Pengembangan Bandara Saragau Ledo	Kalimantan Barat	2,00	APBN/APBD	Pemprov
36.	Pengembangan Bandara Supadio	Kalimantan Barat	1,70	BUMN	Bappenas
37.	Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor	Kalimantan Selatan	1,46	APBN/APBD	Bappenas
38.	Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	0,17	APBN/APBD	Bappenas
39.	Pengembangan Bandara Tjilik Riwut	Kalimantan Tengah	0,35	PPP	Bappenas
40.	Pembangunan Bandara Muara Teweh	Kalimantan Tengah	0,30	APBN/APBD	Bappenas
41.	Bandara Samarinda Baru	Kalimantan Timur	2,00	APBN/APBD	Bappenas
42.	Pembangunan Bandara Tana Paser	Kalimantan Timur	0,40	Campuran (APBN - BUMN)	Bappenas
43.	Pengembangan Bandara Bontang	Kalimantan Timur	0,40	Campuran (APBN - BUMN)	Bappenas
44.	Pembangunan Bandara Tarsakan	Kalimantan Utara	3,50	APBN/APBD	Bappenas
45.	Pembangunan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan	Kalimantan Utara	2,00	APBN/APBD	Bappenas
46.	Pembangunan Bandara Maratus	Kalimantan Utara	0,15	APBN/APBD	Bappenas
F. Wilayah Jawa-Bali					
47.	Pembangunan Bandara Banten Selatan	Banten	0,85	PPP	Kemenhub, Kemenko Ekon
48.	Pembangunan Bandara Baru Kulon Progo	DI Yogyakarta	6,00	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
48.	Pembangunan Bandara Kertajati	Jawa Barat	9,80	APBN/APBD	Bappenas
50.	Pengembangan Bandara Ahmad Yani	Jawa Tengah	1,20	APBN/APBD	Bappenas
51.	Pengembangan Terminal Penumpang Bandara Djuanda	Jawa Timur	1,05	BUMN	Bappenas
52.	Pengembangan Bandara Sumenep	Jawa Timur	0,01	APBN/APBD	Bappenas
53.	Pengembangan Bandara Blimbingsari Banyuwangi	Jawa Timur	0,04	APBN/APBD	Bappenas
54.	Pengembangan Bandara Noto Hadinegoro Jember	Jawa Timur	0,02	APBN/APBD	Bappenas
55.	Pembangunan Bandara Pulau Bawean Gresik	Jawa Timur	0,017	APBN/APBD	Bappenas
56.	Pengembangan Bandara Baru Bali	Bali	12,00	PPP	Bappenas
G. Wilayah Sumatera					
57.	Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda	Aceh	0,01	BUMN	Bappenas
58.	Pengembangan Bandara Fatmawati	Bengkulu	1,60	PPP	Bappenas
59.	Pembangunan Bandara Enggano	Bengkulu	0,02	APBN/APBD	Bappenas
60.	Pengembangan Panjang Runway Bandara Depati Parbo	Jambi	0,30	APBN/APBD	Bappenas
61.	Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Jambi	0,44	Campuran [APBN - BUMN]	Bappenas
62.	Pengembangan Bandara H.A.S Hananjoeddin	Kep. Bangka Belitung	0,13	PPP	Bappenas
63.	Pengembangan Bandara Depati Amir	Kep. Bangka Belitung	0,40	BUMN	Bappenas
64.	Konstruksi Runway Bandara Dabo-Singkep	Kep. Riau	1,50	APBN/APBD	Bappenas
65.	Pembangunan Bandara Letung	Kep. Riau	0,18	APBN/APBD	Bappenas
66.	Pembangunan Bandara Tambelan	Kep. Riau	0,26	APBN/APBD	Bappenas
67.	Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II, Lampung	Lampung	0,15	PPP	Bappenas
68.	Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II	Riau	0,55	BUMN	Bappenas
69.	Pengembangan Bandara Minangkabau	Sumatera Barat	2,20	APBN/APBD	Bappenas
70.	Pembangunan bandara perintis Kubang Balambak	Sumatera Barat	1,50	APBN/APBD	Bappenas
71.	Pengembangan Bandara Rokot	Sumatera Barat	0,30	APBN/APBD	Bappenas
72.	Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II	Sumatera Selatan	0,17	BUMN	Bappenas
73.	Pengembangan Bandara Kualanamu	Sumatera Utara	0,50	APBN/APBD	Bappenas
74.	Pengembangan Bandara Bina Gn. Sitoli	Sumatera Utara	0,04	APBN/APBD	Bappenas

B. Jalan

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
1.	Peningkatan Jalan Timika-Nabire	Papua	0,63	APBN/APBD	Kemenko Ekon
2.	Peningkatan Jalan Merauke -Muting-Waropko (511,4 km)	Papua	2,20	APBN/APBD	Kemenko Ekon
3.	Peningkatan Kapasitas Jalan Jayapura - Wamena - Muliia	Papua	5,60	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
4.	Pembangunan Jalan Enarotali - Tiom (240 km) [2015]	Papua	1,68	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
5.	Penanganan Jalan Kumbes - Okaba - Nakias (150 km) [2015]	Papua	0,76	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
6.	Penanganan Jalan Habema - Yaguru (110 km) [2015]	Papua	0,36	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
7.	Pembangunan Jalan Timika - Urumuka (2016)	Papua	0,70	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
8.	Pembangunan Jalan Mendukung MIFEE [Duraka-Peletom, Merauke-Erambu, Merauke-Okaba-Duraka-Wanani-Bian-Wagikel]	Papua	12,00	APBN/APBD	Bappenas
9.	Pembangunan Jembatan Holtekam	Papua	3,00	APBN/APBD	Bappenas
10.	Pembangunan Ringroad Jayapura dan Penanganan Jalan Depapre - Bonggrang	Papua	3,00	APBN/APBD	Kemenko Ekon
11.	Pembangunan Jalan Jayapura - Sarini	Papua	4,00	APBN/APBD	Bappenas
12.	Rehabilitas Jalan Sentani - Batas Kota Papua	Papua	3,50	APBN/APBD	Bappenas
13.	Pembangunan Jalan Tanah Miring - Jagebob - SP13	Papua	0,18	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
14.	Pembangunan Jalan Erambu - Torai	Papua	0,07	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
15.	Pembangunan Jalan Iwuf - Waropko	Papua	3,00	APBN/APBD	Bappenas
16.	Pembangunan Jalan Oksibil - Dekai	Papua	5,60	APBN/APBD	Bappenas
17.	Pembangunan Jalan Oksibil - Iwuf	Papua	3,00	APBN/APBD	Bappenas
18.	Rekonstruksi Jalan Bedudipa - Batas Kota Nabire	Papua	1,20	APBN/APBD	Bappenas
19.	Rekonstruksi Jalan Memberamo - Tugon	Papua	0,78	APBN/APBD	Bappenas
20.	Penanganan Jalan Manokwari-Kebau-Sorong (606,2 km)	Papua Barat	4,58	APBN/APBD	Bappenas
21.	Peningkatan Jalan Manokwari-Bintuni (257 km)	Papua Barat	1,37	APBN/APBD	Bappenas
22.	Pembangunan Jalan Sorong - Sausapor - Werman - Mulurani - Manokwari	Papua Barat	0,10	APBN/APBD	Bappenas
23.	Peningkatan Jalan Kokas-Fakfak-Bomberai (140 km)	Papua Barat	0,73	APBN/APBD	Kemenko Ekon
24.	Pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat	Papua Barat	4,70	APBN/APBD	Bappenas
25.	Pembangunan jembatan Arar II	Papua Barat	0,15	APBN/APBD	Pemprov, Bappenas, Kemenko Ekon
26.	Pembangunan Jalan Bourouf - Boufer - Bomberai	Papua Barat	0,50	APBN/APBD	Bappenas
27.	Pembangunan Jalan Tiwara - Moyana - Sp. Wonama - Wonama - Beurof	Papua Barat	2,00	APBN/APBD	Bappenas
28.	Pembangunan Jalan Wendes - idor - Tiwara	Papua Barat	1,00	APBN/APBD	Bappenas
29.	Pembangunan Jalan Kamiaman - Tanggarum - Sp. Wonama	Papua Barat	1,00	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
30.	Pembangunan Jalan Mameli - Wendesi - Ambuni - Tandia	Papua Barat	0,50	APBN/APBD	Bappenas
31.	Pembangunan Jalan Resei - Tandia - Sanderawoi - Batas Papua	Papua Barat	1,00	APBN/APBD	Bappenas
32.	Pembangunan Jalan Sorong - Aror	Papua Barat	0,30	APBN/APBD	Bappenas
33.	Jalan Lintas Provinsi ke Kawasan Industri	Papua Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kementerian Perindustrian
B. Maluku					
34.	Pembangunan Jalan Trans Maluku	Maluku	7,00	APBN/APBD	Bappenas
35.	Jembatan Wai Lata Besar	Maluku	2,00	APBN/APBD	Bappenas
36.	Penanganan Jalan Masohi-Haya-Laim-Werinama	Maluku	1,00	APBN/APBD	Kemenko Ekon
37.	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Halmahera	Maluku Utara	6,75	APBN/APBD	Bappenas
38.	Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Selatan (Weda - Matuting - Gane, Sakea - Dehep - Payahel)	Maluku Utara	1,07	APBN/APBD	Bappenas
39.	Pembangunan Jalan Daruba - Wayabula - Sopi - Barebare	Maluku Utara	0,21	APBN/APBD	Bappenas
40.	Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Tengah (Boboneigo-Ekor-Sulalai-Lokahata-Tamtati-Akclamo-Gamlohe-Jera-Jera-Buli-Maba-Sagea-Patani)	Maluku Utara	1,53	APBN/APBD	Bappenas
41.	Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara (Sidangeli-Jailolo-Geat-Kedj-Galela)	Maluku Utara	0,80	APBN/APBD	Bappenas
42.	Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Selatan (Weda - Matuting - Gane, Sakea - Dehep - Payahel)	Maluku Utara	1,07	APBN/APBD	Bappenas
43.	Jembatan Ake Anloto II	Maluku Utara	4,00	APBN/APBD	Bappenas
44.	Jalan Lingkar Morotai	Maluku Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kemenko Ekon
C. Wilayah Nusa Tenggara					
45.	Peningkatan Jalan Ende - Maumere (Jalan Nasional). Maumere - Megapanda (Jalan Strategis Nasional) total 138,293 km	NTT	0,11	APBN/APBD	Kemenko Ekon
46.	Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Timor (Batuputih-Panite-Omlausi-Boking-Motamasin)	NTT	0,80	APBN/APBD	Bappenas
47.	Pembangunan Jalan Lintas Utara Pulau Flores (Ngorang-Kondo-Reo-Riung-Megapanda-Maumere)	NTT	0,40	APBN/APBD	Bappenas
48.	Pembangunan Jalan Poros Tengah Kupang-Timor Tengah Utara (Gilmasi - Sulamoi)	NTT	0,14	APBN/APBD	Bappenas
49.	Pembangunan Jalan Waingapu-Mekelo-Baling (P. Sumba)	NTT	0,40	APBN/APBD	Bappenas
50.	Pembangunan Jalan Perbatasan NTT - Timor Leste (Motomasin - Lakutusa - Fatubesi - Dafala - Wedomu	NTT	1,20	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
51.	Pembangunan Jalan Batutua - Baa - Pantebaru - Eakun	NTT	0,30	APBN/APBD	Bappenas
52.	Pembangunan Jalan Seba - Mesara	NTT	0,30	APBN/APBD	Bappenas
53.	Pembangunan Jalan Terang - Bari - Keliindi	NTT	0,30	APBN/APBD	Bappenas
54.	Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pulau Flores	NTT	2,10	APBN/APBD	Bappenas
55.	Peningkatan Jalan Bangau - Dompu - Ramba -Lb. Bajo (159,25) untuk mendukung industri rumput laut	NTT	0,32	APBN/APBD	Kemenko Ekon
56.	Peningkatan Jalan Bolok - Tenuu - Kupang - Oesau - Oesapa (59,35 Km)	NTT	0,13	APBN/APBD	Kemenko Ekon
57.	Pembangunan Jalan Pemenang - Tanjung - Bayan - Sanbella - Lb.Lombok	NTB	0,11	APBN/APBD	Bappenas
58.	Pembangunan Jalan Penyarang-Labu Sawo dan Moyu - Sebewe (Samota)	NTB	0,16	APBN/APBD	Bappenas
59.	Pembangunan Jalan Akses BIL (Gerong - Patung Sapi - Gadjah Madaj)	NTB	0,30	APBN/APBD	Bappenas
60.	Pembangunan Jalan Benete - Sejong - Lunyuk	NTB	0,38	APBN/APBD	Bappenas
61.	Pembangunan Jalan Bangau - Dompu - Ramba - Lb. Bajo	NTB	1,38	APBN/APBD	Bappenas
62.	Pembangunan Jalan Benete - Simpang Negara	NTB	0,83	APBN/APBD	Bappenas
63.	Pembangunan Jalan Lunyuk-Ropang-Sekokat-Toro-Sp.Dompu-Dompu	NTB	0,20	APBN/APBD	Bappenas
64.	Pembangunan Jalan Lembar - Sekotong - Pelangan - Lb. Poh	NTB	0,07	APBN/APBD	Bappenas
65.	Pembangunan Jalan Sp.Banggo-Sp.Kempe-Doropati-Lb.Kenanga-Kawindato-Sp.Kore	NTB	0,20	APBN/APBD	Bappenas
66.	Pembangunan Jembatan Meninting	NTB	0,30	APBN/APBD	Bappenas
67.	Pengembangan Pelabuhan Lombok	NTB	1,50	APBN/APBD	Kemenhub
68.	Pembangunan Jalan Dompu-Hunu	NTB	3,50	APBN/APBD	Bappenas
69.	Pembangunan Lingkar Pulau Sumbawa	NTB	2,00	APBN/APBD	Bappenas
D. Wilayah Sulawesi					
70.	Pembangunan Jalan Gorontalo - Biluhu	Gorontalo	1,25	APBN/APBD	Pemprov
71.	Pembangunan Jalan strategis provinsi Boidu - Longalo - Dulamayo	Gorontalo	1,00	APBN/APBD	Pemprov
72.	Pembangunan Jalan strategis Tulabolo - Pinogu	Gorontalo	0,50	APBN/APBD	Pemprov
73.	Pelebaran Jalan Bulondjo - Tolingoda	Gorontalo	3,80	APBN/APBD	Bappenas
74.	Gorontalo Outer Ring Road (GORR)	Gorontalo	3,00	APBN/APBD	Bappenas
75.	Pembangunan Jalan Bilato - Tangkobi	Gorontalo	1,25	APBN/APBD	Pemprov
76.	Pembangunan Jalan Biluhu Barat - Bilato	Gorontalo	1,25	APBN/APBD	Pemprov
77.	Pembangunan jembatan Biluhu	Gorontalo	0,60	APBN/APBD	Pemprov

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
78.	Pembangunan jembatan Dumata Pelehu	Gorontalo	1,00	APBN/APBD	Pemprov
79.	Pembangunan jembatan Masuru (Bangunan bawah)	Gorontalo	1,00	APBN/APBD	Pemprov
80.	Pembangunan jembatan Tapadaa	Gorontalo	0,50	APBN/APBD	Pemprov
81.	Peningkatan Jalan Majene-Polewali (49,8 km)	Sulawesi Barat	0,11	APBN/APBD	Kemenko Ekon
82.	Pembangunan Jalan tembus Mamasa-Tana Toraja	Sulawesi Barat	5,60	APBN/APBD	BPMP
83.	Pembangunan flyover akses bandara	Sulawesi Selatan	0,10	APBN/APBD	Pemprov
84.	Peningkatan Jalan dari Siwa-Pare-pare-Barri-Maros-Makassar (293 km)	Sulawesi Selatan	0,97	APBN/APBD	Kemenko Ekon
85.	Pembangunan Jalan By Pass Marminasata	Sulawesi Selatan	3,50	APBN/APBD	Bappenas
86.	Peningkatan Jalan Batas Sultra-Malili-Masamba-Palopo-Siwa (318 km)	Sulawesi Selatan	0,21	APBN/APBD	Kemenko Ekon
87.	Peningkatan Jalan Maros-Watampone-Pelabuhan Baje	Sulawesi Selatan	0,24	APBN/APBD	Kemenko Ekon
88.	Pembangunan Jalan Layang ke Pelabuhan Pentokan	Sulawesi Tengah	3,00	APBN/APBD	BPMP
89.	Pembangunan Jalan lintas Pulu Parigi	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kemenko Ekon
90.	Pembangunan Jalan Layang Nasional (Kawasan Industri Palu)	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kementerian Perindustrian
91.	Pembangunan Jalan Lingkar luar (Moda Transportasi Barang) 4,5 kmNasional (Kawasan Industri Palu)	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kementerian Perindustrian
92.	Peningkatan Jalan dari Bungku ke lokasi kawasan Industri (40 Km)	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kementerian Perindustrian
93.	Peningkatan Jalan dari Bandara ke lokasi Kawasan Industri (5 Km)	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kementerian Perindustrian
94.	Peningkatan Jalan Kendari-Asera	Sulawesi Tenggara	0,28	APBN/APBD	Kemenko Ekon
95.	Peningkatan Jalan Mendukung Kegiatan Tambang/Industri Mikel di Kolaka Utara menuju ke Pelabuhan Lasusa (132 km)	Sulawesi Tenggara	0,30	APBN/APBD	Kemenko Ekon
96.	Peningkatan Jalan Sp. Torobulu-lainca-Kendari (127 km)	Sulawesi Tenggara	0,17	APBN/APBD	Kemenko Ekon
97.	Rekonstruksi Jalan Ambesia-Lainca	Sulawesi Tenggara	1,00	APBN/APBD	Bappenas
98.	Rekonstruksi Jalan Matanaurwe-Lasalimu	Sulawesi Tenggara	1,00	APBN/APBD	Bappenas
99.	Pembangunan Jalan ringroad Manado III	Sulawesi Utara	2,50	APBN/APBD	Pemprov
100.	Peningkatan Piste Rusa Jalan Nasional Girian – Kema (akses kawasan Industri Ertung)	Sulawesi Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kementerian Perindustrian
E. Wilayah Kalimantan					
101.	Pembangunan Jembatan Tayan	Kalimantan Barat	0,58	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
102.	Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - Teluk Batang	Kalimantan Barat	0,68	APBN/APBD	Kemenko Ekon
103.	Pembangunan terminal darat perbatasan Entikong	Kalimantan Barat	3,50	APBN/APBD	Pemprov

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
104.	Pembangunan Pontianak Outer Ring Road	Kalimantan Barat	4,50	APBN/APBD	Pemprov, Bappenas
105.	Pebangunan terminal darat perbatasan Badau	Kalimantan Barat	0,70	APBN/APBD	Pemprov
106.	Pembangunan Jalan Tebas-Sentebang-Tn.Hitam-Jeruju-Laki - Merbau –Tanjung	Kalimantan Barat	1,50	APBN/APBD	Bappenas
107.	Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanau - Galing - Aruk	Kalimantan Barat	1,30	APBN/APBD	Bappenas
108.	Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Temajuk - Gunung Kukul -Sumpang Tanjung	Kalimantan Barat	2,00	APBN/APBD	Bappenas
109.	Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberati - Bus.Kee-Siding - Bts.Kab. Sanggau - Bts Kee Sekayam - Bts. Kab. Sintang	Kalimantan Barat	0,10	APBN/APBD	Bappenas
110.	Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng	Kalimantan Barat	0,10	APBN/APBD	Bappenas
111.	Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau - Nanga Era - BtsKaltim	Kalimantan Barat	1,20	APBN/APBD	Bappenas
112.	Pembangunan Jalan Kasau - Sepulau	Kalimantan Barat	1,00	APBN/APBD	Bappenas
113.	Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli - Nengatayap	Kalimantan Barat	0,02	APBN/APBD	Bappenas
114.	Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng	Kalimantan Barat	0,10	APBN/APBD	Bappenas
115.	Pembangunan Jalan layang (fly over) Garot Subroto	Kalimantan Selatan	1,00	APBN/APBD	Pemprov
116.	Pembangunan jembatan Basirih	Kalimantan Selatan	3,50	APBN/APBD	Bappenas
117.	Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin	Kalimantan Selatan	0,02	APBN/APBD	Bappenas
118.	Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelabuhan di Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan	0,05	APBN/APBD	Bappenas
119.	Pembangunan Jalan Benua Anyar - Margasari-Ma. Muring-Kandangan	Kalimantan Selatan	0,65	APBN/APBD	Bappenas
120.	Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin	Kalimantan Selatan	0,20	APBN/APBD	Bappenas
121.	Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpang, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kumpang,dan Sump. Kodece-Mentewe	Kalimantan Selatan	0,16	APBN/APBD	Bappenas
122.	Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito)	Kalimantan Selatan	0,10	APBN/APBD	Bappenas
123.	Pembangunan Jalan Ambungan – Tajau Pecah	Kalimantan Selatan	1,20	APBN/APBD	Bappenas
124.	Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-Bts Kalbar	Kalimantan Tengah	0,10	APBN/APBD	Bappenas
125.	Pembangunan Jalan Palangkaraya-Bukitringgi-Bukit Batu-Buntek-Ampah	Kalimantan Tengah	6,50	APBN/APBD	Bappenas
126.	Peningkatan Jalan Strategis Nasional dari Sampit-Bagendang-Ujung Pandaran-82 km (35 km masih Tanah)	Kalimantan Tengah	0,25	APBN/APBD	Kemenko EkonBappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
127.	Pembangunan Jembatan Loa Kulu	Kalimantan Timur	0,75	APBN/APBD	Bappenas
128.	Pembangunan Jalan Singkawang (jembatan kelay) – Bandara Kalimantan	Kalimantan Timur	0,05	APBN/APBD	Bappenas
129.	Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai	Kalimantan Timur	0,30	APBN/APBD	Bappenas
130.	Jembatan Pulau Balang	Kalimantan Timur	1,90	APBN/APBD	Kemenke Ekon. Bappenas
131.	Pelebaran Jalan Menuju Kawasan Wisata Sepanjang 30 km (Pengembangan Destinasi Pulau Derawan dan Tanjung Batu)	Kalimantan Timur	0,20	APBN/APBD	Kemenke Ekon.
132.	Rekonstruksi Jalan SP.3 Muara Wahau - Kelay	Kalimantan Timur	0,50	APBN/APBD	Bappenas
133.	Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipo-Tou Lumbis	Kalimantan Utara	4,00	APBN/APBD	Bappenas
134.	Pembangunan Jalan Bulungan - Tarakan (jembatan bulan)	Kalimantan Utara	9,00	APBN/APBD	Bappenas
135.	Pembangunan Jalan Long Nawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim	Kalimantan Utara	5,00	APBN/APBD	Bappenas
136.	Pembangunan Jalan Perbatasan Long Nawang - Long Bujungan - Long Remuat - Langap – Mahau	Kalimantan Utara	7,00	APBN/APBD	Bappenas
137.	Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau – Punan - Long Bawan – Long Midang	Kalimantan Utara	4,00	APBN/APBD	Bappenas
138.	Rekonstruksi Jalan Sinangaris- Batas Negara	Kalimantan Utara	0,80	APBN/APBD	Bappenas
F. Wilayah Jawa-Bali					
139.	Jembatan Selat Sunda	Banten	250,00	PPP	Kemenke ekon
140.	Peningkatan Jalan Strategis Nasional Serdang - Bojonegara - Merak (35 km)	Banten	0,11	APBN/APBD	Kemenke ekon
141.	Pembangunan Jalan Cikande - Rangkasbitung	Banten	0,15	APBN/APBD	Bappenas
142.	Pembangunan Jalan Cikande – Serang – Cilegon	Banten	0,95	APBN/APBD	Bappenas
143.	Pembangunan Jalan Cipanas-Waring banten - Bayah	Banten	0,84	APBN/APBD	Bappenas
144.	Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (24 Km)	Banten	0,84	APBN/APBD	Bappenas
145.	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa (Temon-Bugel-Girjati-Baron-Jepitu-Jerukwudel)	DI Yogyakarta	0,50	APBN/APBD	Bappenas
146.	Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	0,40	APBN/APBD	Bappenas
147.	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Barat (Tegal Buleud-Sindang Barang-Kelapageneh)	Jawa Barat	2,00	APBN/APBD	Bappenas
148.	Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (EJUTR)	Jawa Barat	11,52	APBN/APBD	Bappenas
149.	Rekonstruksi Jalan Jatibarang Kab. Cirebon	Jawa Barat	0,80	APBN/APBD	Bappenas
150.	Pembangunan Flyover Bulak Kapal (Bekasi)	Jawa Barat	0,62	APBN/APBD	Bappenas
151.	Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) - Kiaracondong	Jawa Barat	0,60	APBN/APBD	Bappenas
152.	Jalan Poncosari-Greese	Jawa Tengah	5,00	APBN/APBD	Bappenas
153.	Pembangunan Jalan Bypass Brebes-Tegal	Jawa Tengah	0,20	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
154.	Pembangunan Jalan Kb. Agung-Wanayasa-Dieng-Wonosobo	Jawa Tengah	2,00	APBN/APBD	Bappenas
155.	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Tengah (Slarang – Jladri- Muar – Conged)	Jawa Tengah	1,00	APBN/APBD	Bappenas
156.	Pembangunan Fly Over Kali Banteng (Menuju Pelabuhan Tanjung Emas)	Jawa Tengah	0,164	APBN/APBD	Bappenas
157.	Pembangunan Jalan akses Pelabuhan Penyeberangan Kendal	Jawa Tengah	0,034	APBN/APBD	Bappenas
158.	Pembangunan Jalan Rembang - Blora-Batas Jatim	Jawa Tengah	0,50	APBN/APBD	Bappenas
159.	Jalan Akses Pelabuhan Teluk Lamong	Jawa Timur	5,00	APBN/APBD	Bappenas
160.	Pembangunan Jalan Bonojegoro-Cepu	Jawa Timur	2,00	APBN/APBD	Bappenas
161.	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur (Jarit – Puger-Glenmore)	Jawa Timur	2,00	APBN/APBD	Bappenas
162.	Pembangunan Jalan Prigi-Durenen	Jawa Timur	0,04	APBN/APBD	Bappenas
163.	Pembangunan Jalan Situbondo-Garduatak-Silapak-Ketapang-Banyuwangi	Jawa Timur	2,00	APBN/APBD	Bappenas
164.	Pembangunan Jalan Bangkalan - Tj Bumi-Ketapang-Sotobar-Sumenep	Jawa Timur	3,00	APBN/APBD	Bappenas
165.	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur (Talok – Wonorogo –Ngrejo – Prigi – Panggul)	Jawa Timur	2,00	APBN/APBD	Bappenas
166.	Pembangunan Jalan Kintamani – Danau Batur	Bali	0,30	APBN/APBD	Bappenas
167.	Pembangunan Jalan Sp. Tohpati - Pantai Siut	Bali	0,30	APBN/APBD	Bappenas
168.	Pembangunan Jalan Pantai – Siut – Kusamba	Bali	0,31	APBN/APBD	Bappenas
169.	Pembangunan Jalan Denpasar – Tuhan	Bali	5,00	APBN/APBD	Bappenas
170.	Pembangunan Jalan Sp. Ngurah Rai	Bali	0,30	APBN/APBD	Bappenas
171.	Pembangunan Flyover Ngurah Rai	Bali	0,50	APBN/APBD	Bappenas
172.	Pembangunan Jalan Antosari - Bts. Kota Tabanan	Bali	0,50	APBN/APBD	Bappenas
G. Wilayah Sumatera					
173.	Peningkatan Jalan Pameu-Genting Cerbang Seksi 1	Aceh	2,80	APBN/APBD	Bappenas
174.	Pembangunan Jalan Krungzeva-Tibang	Aceh	0,02	APBN/APBD	Bappenas
175.	Pembangunan Jalan Gempang - Pameuh	Aceh	1,50	APBN/APBD	Bappenas
176.	Pengembangan Pelabuhan Banda Aceh	Aceh	1,50	APBN/APBD	Kemenuh
177.	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Simelue	Aceh	0,02	APBN/APBD	Bappenas
178.	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Ketumkal)	Aceh	2,00	APBN/APBD	Bappenas
179.	Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bengkulu	Bengkulu	1,00	APBN/APBD	Bappenas
180.	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Enggano	Bengkulu	0,01	APBN/APBD	Bappenas
181.	Pelebaran Jalan Mukomuko-Bantal	Bengkulu	0,50	APBN/APBD	Bappenas
182.	Pelebaran Jalan Simpang Rukis-Tanjung Kemuning	Bengkulu	0,80	APBN/APBD	Bappenas
183.	Pembangunan Jalan dari Kota Jambi ke Candi	Jambi	3,00	APBN/APBD	Pemprov

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
184.	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tungkal	Jambi	0,08	APBN/APBD	Bappenas
185.	Pengembangan Panjang Runway Bandara Depati Parbo Kabupaten Kintil	Jambi	0,30	APBN/APBD	Bappenas
186.	Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Jambi	0,44	Campuran (APBN - BUMN)	Bappenas
187.	Pembangunan Jalan lingkar Jambi - Talang Dukuh	Jambi	0,03		Bappenas
188.	Pembangunan Jalan Sp. Miam – Merlung	Jambi	0,05		Bappenas
189.	Pembangunan Jalan Talang Duku - Muara Sabak	Jambi	1,00		Bappenas
190.	Pembangunan Jalan Bangko-Sp P' Bengas-Sungai Penih	Jambi	1,00	APBN/APBD	Bappenas
191.	Pelebaran Jalan Tj. Kelian-Ibul	Kep. Bangka Belitung	0,40	APBN/APBD	Bappenas
192.	Pembangunan Ruas Jalan Trans-Babel	Kep. Bangka Belitung	12,00	APBN/APBD	Pemprov
193.	Pembangunan Jalan Tanjung Gudang-Paritiga-Jebus- Ibul	Kep. Bangka Belitung	1,50	APBN/APBD	Bappenas
194.	Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu	Kep. Bangka Belitung	0,64	APBN/APBD	Bappenas
195.	Pembangunan Jalan Tanjung Kelian - Petaling – Pangkalpinang	Kep. Bangka Belitung	1,50	APBN/APBD	Bappenas
196.	Pembangunan Jalan Petaling - Namang – Toboali	Kep. Bangka Belitung	1,00	APBN/APBD	Bappenas
197.	Pembangunan Jalan Koba - Lubuk Besar - Tanjung Berikat	Kep. Bangka Belitung	0,50	APBN/APBD	Bappenas
198.	Pelebaran Jalan Simpang Sekunyam-Desa Cemaga	Kep. Riau	0,10	APBN/APBD	Bappenas
199.	Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulo Bantan bayu- Sp.Gesek	Kep. Riau	1,00	APBN/APBD	Bappenas
200.	Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo	Kep. Riau	1,40	APBN/APBD	Bappenas
201.	Pembangunan Jalan Sei Teran-Sp. Limbung-Tj.Buton	Kep. Riau	1,00	APBN/APBD	Bappenas
202.	Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	Kep. Riau	0,09	APBN/APBD	Bappenas
203.	Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang - Kab. Bintan	Kep. Riau	0,01	APBN/APBD	Bappenas
204.	Pembangunan Flyover Sp. Kahil dan Sp. Jam	Kep. Riau	0,20	APBN/APBD	Bappenas
205.	Pelebaran Jalan Puguang Tampak-Simpang Gumung Kemala	Lampung	4,50	APBN/APBD	Bappenas
206.	Pembangunan Jalan Camp ITI – Seloarjo	Lampung	1,00	APBN/APBD	Bappenas
207.	Pembangunan Flyover Sp. Pelabuhan Panjang	Lampung	0,50	APBN/APBD	Bappenas
208.	Pembangunan Jalan Mesir Ilir - Sri Rejeki	Lampung	0,03	APBN/APBD	Bappenas
209.	Pembangunan Jalan Mesuji - Hiamangan Umpu	Lampung	0,16	APBN/APBD	Bappenas
210.	Pembangunan Jalan Lingkar Bandajaya	Lampung	1,00	APBN/APBD	Bappenas
211.	Pembangunan Jalan Mesir Ilir - Pakuan Ratu	Lampung	0,02	APBN/APBD	Bappenas
212.	Pembangunan Jalan Sp.Way Tuba - Mesir Ilir	Lampung	0,14	APBN/APBD	Bappenas
213.	Peningkatan Jalan menuju Kawasan Industri Maritim (lebar 8 m, panjang 10 km)	Lampung	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kementerian Perindustrian

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
214.	Pembangunan Jalan Sp. Lago-Sp. Buatan-Siak Sri Indrapura-Pelabuhan Buton (91,25 km)-Jalan Provinsi	Riau	0,27	APBN/APBD	Kemenko Ekon
215.	Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-Buton Tahap I. Paket VI : Simpang Pusako-Buton (19,13 km)	Riau	1,11	APBN/APBD	Kemenko Ekon
216.	Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru- Buton Tahap I. Paket II: Maredan-Buatan (16 km)	Riau	0,34	APBN/APBD	Kemenko Ekon
217.	Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru- Buton tahap I. Paket III : Buatan-Dayun (22,5 km)	Riau	0,48	APBN/APBD	Kemenko Ekon
218.	Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru- Buton Tahap I. Paket IV : Dayun-Sungai Tonggak (20 km)	Riau	0,43	APBN/APBD	Kemenko Ekon
219.	Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru- Buton Tahap I. Paket V : Sungai Tonggak-Simpang Pusako (15,5 km)	Riau	0,82	APBN/APBD	Kemenko Ekon
220.	Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru- Buton Tahap I. Paket VII: Simpang Pusako-Teluk Mesjid (15,69 km)	Riau	0,32	APBN/APBD	Kemenko Ekon
221.	Peningkatan Jalan menuju kawasan industri Tenayan	Riau	3,50	APBN/APBD	Pemprov
222.	Jalan Dumai-Pelintung (25 km)-Jalan Provinsi	Riau	0,13	APBN/APBD	Kemenko Ekon
223.	Peningkatan Jalan Pangkalan Heran-Siberida (51 km) dan Siberida-Batas Provinsi Jambi (49 km)	Riau	0,21	APBN/APBD	Kemenko Ekon
224.	Jl. Sp. Kulim-Pb. Dumai (44,37 km). Panjang Ruas 48 km, yang perlu ditingkatkan 21 km (rigid pavement)	Riau	0,11	APBN/APBD	Kemenko Ekon
225.	Peningkatan Jalan Sorek-Sp. Japura-Rengat-Rumbai Jaya-Kuala Enok (238 km)	Riau	0,30	APBN/APBD	Kemenko Ekon
226.	Pengembangan Jalan Sp. Batang-Lb. Gaung (19,5 km)	Riau	0,20	APBN/APBD	Kemenko Ekon
227.	Pembangunan Jalan Pekanbaru By-Pass	Riau	0,21	APBN/APBD	Bappenas
228.	Jembatan Sungai Daroh	Sumatera Barat	3,00	APBN/APBD	Bappenas
229.	Pembangunan Jalan Pesaman Baru-Bandara Laban Nagari Kapa Kecamatan Lubuk Nan Duo	Sumatera Barat	2,50	APBN/APBD	Pemprov
230.	Pembangunan Jalan Sicincin-Lb.Alung	Sumatera Barat	2,00	APBN/APBD	Bappenas
231.	Pembangunan Jalan Tapan-Bts Jambi	Sumatera Barat	2,50	APBN/APBD	Bappenas
232.	Pembangunan Jalan Tilu-Sasak-Air Bangis-Bts.Prov Sumut	Sumatera Barat	2,00	APBN/APBD	Bappenas
233.	Pembangunan Jalan Balinka-Matur-Ngarai Sihangok (Jembatan dan Terowongan)	Sumatera Barat	3,00	APBN/APBD	Bappenas
234.	Pembangunan Jalan Siberut - Muara Sigep	Sumatera Barat	2,00	APBN/APBD	Bappenas
235.	Pembangunan Jalan Mara - Sibban – Taopejat	Sumatera Barat	2,00	APBN/APBD	Bappenas
236.	Pembangunan Jalan Padang – Mukomuko	Sumatera Barat	1,50	APBN/APBD	Bappenas
237.	Pembangunan Jalan Kiliranjao - Teluk Kuantan	Sumatera Barat	0,03	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
238.	Pembangunan Jalan P. Sipora	Sumatera Barat	0,50	APBN/APBD	Bappenas
239.	Pembangunan Jalan Padang Panjang – Solok	Sumatera Barat	1,50	APBN/APBD	Bappenas
240.	Pembangunan Jalan Kiliranjao – Bangko	Sumatera Barat	1,00	APBN/APBD	Bappenas
241.	Pengembangan Terminal Terpadu Karya Jaya, Palembang	Sumatera Selatan	0,75	PPP	Bappenas
242.	Pembangunan Jalan Palembang-Tj Api-Api	Sumatera Selatan	6,00	PPP	Bappenas
243.	Pembangunan Jalan Tanjung Enim – Muara Enim	Sumatera Selatan	0,06	APBN/APBD	Bappenas
244.	Pembangunan Jalan Pasanglaya	Sumatera Selatan	1,00	APBN/APBD	Bappenas
245.	Peningkatan Jalan Wiralaga-Sp. Pematang-(P)-40 km	Sumatera Selatan	0,28	APBN/APBD	Kemenko Ekon
246.	Pembangunan Jalan Akses Belawan 15 km	Sumatera Utara	0,15	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
247.	Pengembangan Jalan Akses Kualanamu	Sumatera Utara	0,26	APBN/APBD	Kemenko Ekon
248.	Peningkatan Jalan Lima Puluh-Pematang Siantar-Kisaran (64,15 km)	Sumatera Utara	0,26	APBN/APBD	Kemenko Ekon
249.	Perbaikan Jalan Raya Ruas : Lima Puluh-Simpang Inalum (22km)	Sumatera Utara	0,15	APBN/APBD	Kemenko Ekon
250.	Jalan Lingkar Kep. Nias	Sumatera Utara	2,00	APBN	
251.	Pelebaran dari KISM-Lima Puluh (10 km)	Sumatera Utara	0,14	APBN/APBD	Kemenko Ekon
252.	Lubuk Pakam-Tebing Tinggi (43,5 km)	Sumatera Utara	7,10	PPP	Kemenko Ekon
253.	Pelebaran Jalan Botas Sibolga - Batangtoru	Sumatera Utara	0,06	APBN/APBD	Bappenas
254.	Pembangunan Jalan KISM - Sp. Mayang - Lima Puluh - Sp. Inalum – Kuala Tanjung	Sumatera Utara	0,29	APBN/APBD	Bappenas
255.	Pembangunan Jalan Pematang Siantar - Tb. Tinggi	Sumatera Utara	0,26	APBN/APBD	Bappenas
256.	Pembangunan Jalan Tanjung Morawa – Saribudolok – Tongging	Sumatera Utara	0,05	APBN/APBD	Bappenas
257.	Pembangunan Jalan Simp. Sei Balai - Ujung Kubu	Sumatera Utara	0,03	APBN/APBD	Bappenas
258.	Pembangunan Jalan Sp. Mayang-Sei Mangkei-Simpang Pasar Baru – Holuk	Sumatera Utara	0,02	APBN/APBD	Bappenas
259.	Pembangunan Jalan Sp. Pal Xi - Sp. Kotapinang	Sumatera Utara	0,02	APBN/APBD	Bappenas
260.	Pembangunan Jalan Tele – Pangururan	Sumatera Utara	0,15	APBN/APBD	Bappenas
261.	Pembangunan Jalan Ujung Kubu - Kuala Tanjung	Sumatera Utara	0,15	APBN/APBD	Bappenas
262.	Pembangunan Flyover Seimangke, Pinang Baris, Katemas dan Gatot Subroto	Sumatera Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
263.	Pengembangan Bandara Tina Gn. Sitoli	Sumatera Utara	0,04	APBN/APBD	Bappenas
264.	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nias	Sumatera Utara	2,00	APBN/APBD	Bappenas
265.	Pembangunan Jalan Natak-Bts. Sumbir	Sumatera Utara	1,50	APBN/APBD	Bappenas

C. Jalan Tol

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
B. Wilayah Maluku					
C. Wilayah Nusa Tenggara					
D. Wilayah Sulawesi					
1.	Jalan Tol Manado-Ditung (46 km)	Sulawesi Utara	4,20	PPP	BPJT, Bappenas, Kemenko Ekon
2.	Pembangunan Jalan Tol Tomohon-Manado	Sulawesi Utara	14,00	APBN/APBD	Pemprov
E. Wilayah Kalimantan					
3.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (99.02 km)	Kalimantan Timur	15,00	PPP	BPJT, Bappenas, Kemenko Ekon
F. Wilayah Jawa-Bali					
4.	Jalan Tol Panimbang-Serang (83 km)	Banten	11,91	PPP	Kemenko Ekon
5.	Jalan Tol Cilegon-Bujoegara	Banten	1,07	PPP	BPJT, kemenko ekon
6.	Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja	Banten	5,17	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT, Bappenas
7.	Jalan Tol Kamal - Tebuk Naga - Batu Ceper	Banten	3,99	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
8.	Jalan Tol Bakauheni – Terbangi Besar	Banten	17,38	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
9.	Pembangunan Jalan Akses Tol Tanjung Priok	DKI Jakarta	3,90	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT, Bappenas
10.	Percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Kunciran	DKI Jakarta	3,50	BUMN	Kemenko Ekon
11.	Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu 21,04 km;	DKI Jakarta	7,20	BUMN	Kemenko ekon
12.	Jalan Tol Depok-Antasari 21,55 km;	DKI Jakarta	4,80	BUMN	Kemenko ekon
13.	Percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong 11,19 KM	DKI Jakarta	2,60	BUMN	Kemenko ekon
14.	Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan	Jawa Barat	1,25	PPP	Bappenas
15.	Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan	Jawa Barat	10,16	PPP	BPJT, Bappenas
16.	Jalan Tol Pasir Koja-Soreang 10,87 km;	Jawa Barat	14,30	PPP	BPJT, Kemenko Ekon,Bappenas
17.	Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Jawa Barat	4,20	PPP	Bappenas
18.	Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (JORR 2) 25,39 km	Jawa Barat	4,40	BUMN	Kemenko Ekon
19.	Jalan Tol Ciawi-Sukabumi	Jawa Barat	7,80	BUMN	Kemenko Ekon
20.	Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR)	Jawa Barat	11,52	APBN/APBD	Bappenas
21.	Jalan Tol Sukohumi – Ciranjang – Padalarang	Jawa Barat	0,50	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
22.	Jalan Tol Terusan Pasteur - Ujung Berung - Cileunyi - Soekarno Hatta – Gedebage	Jawa Barat	12,10	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
23.	Jalan Tol Gedebage - Majalaya	Jawa Barat	0,90	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
24.	Pembangunan Jalan Tol Semarang - Solo	Jawa Tengah	6,21	PPP	Bappenas
25.	Pembangunan Jalan Tol Pemalang – Batang	Jawa Tengah	4,08	PPP	Bappenas
26.	Jalan Tol Semarang-Ungaran (Seksi I) : Ungaran-Bawen-Solo (Seksi II-V) total 72 km	Jawa Tengah	6,20	BUMN	Kemenko ekon

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
27.	Jalan Tol Semarang – Demak	Jawa Tengah	2,96	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
28.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Jawa Tengah	6,08	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
29.	Jalan Tol Yogyakarta - Solo	Jawa Tengah	0,23	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
30.	Jalan Tol Solo-Ngawi	Jawa Tengah	1,43	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
31.	Jalan Tol Legundi-Bunder	Jawa Timur	6,50	PPP	Bappenas
32.	Panduan – Malang Toll Road, East Java	Jawa Timur	4,62	PPP	BPJT, Bappenas
33.	Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto	Jawa Timur	3,48	PPP	Bappenas
34.	Pembangunan Jalan Tol Solo – Kertosono	Jawa Timur	10,32	PPP	Bappenas
35.	Jalan Tol Genipol - Pasuruan (32 Km)	Jawa Timur	2,80	BUMN	Kemenko Ekon
36.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo 45,32 Km	Jawa Timur	6,00	BUMN	Kemenko Ekon
37.	Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto	Jawa Timur	3,12	Campuran (APBN - BUMN)	Bappenas
38.	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Jawa Timur	18,43	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT, Kemenko Ekon
39.	Jalan Tol Bandara Juanda – Tanjung Perak	Jawa Timur	0,50	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
40.	Jalan Tol Ngawi – Kertosono	Jawa Timur	1,24	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT
G. Wilayah Sumatera					
41.	Pembangunan Jalan Tol Langsa-Lhokseumawe	Aceh	16,88	BUMN	Kemenko Ekon
42.	Pembangunan Jalan Tol Lhokseumawe-Sigli	Aceh	16,88	BUMN	Kemenko Ekon
43.	Pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh	Aceh	14,00	BUMN	Kemenko Ekon
44.	Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Palembang	Bengkulu	2,75	BUMN	Kemenko Ekon
45.	Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim	Kep. Riau	2,20	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BRJT, Bappenas
46.	Bakahehi-Terbanggi Besar Toll Road (150 km)	Lampung	9,38	PPP	Kemenko Ekon, Bappenas
47.	Tegineneng-Babahan Toll Road	Lampung	2,73	PPP	Bappenas
48.	Terbanggi Besar-Mengala-Pematang Panggang Toll Road	Lampung	12,50	BUMN	Kemenko Ekon
49.	Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai	Riau	17,34	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT, Kemenko Ekon
50.	Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru	Sumatera Barat	30,00	BUMN	Penprov
51.	Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung	Sumatera Selatan	13,29	BUMN	BPJT, Bappenas,Kemenko Ekon
52.	Pembangunan Jalan Tol Palembang-Jambi	Sumatera Selatan	29,38	BUMN	
53.	Pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya	Sumatera Selatan	2,31	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT, Bappenas
54.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat	Sumatera Utara	20,00	BUMN	Kemenko Ekon
55.	Jalan Tol Sibolga - Sibolga	Sumatera Utara	3,00	APBN/APBD	
56.	Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai	Sumatera Utara	2,29	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT, Bappenas
57.	Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	Sumatera Utara	2,21	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	BPJT, Bappenas
58.	Jalan Tol Binjai - Perbatasan Aceh	Sumatera Utara	13,75	BUMN	Kemenko Ekon

D. Ketenagalistrikan

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Papua					
1.	PLTBiomassa Merauke 10 MW	Papua	0,02	SWASTA	PLN
2.	PLTU Blak 2x7 MW	Papua	0,23	SWASTA	PLN
3.	PLTU Nabire 2x7 MW	Papua	0,23	SWASTA	PLN
4.	PLTU Jayapura 2x15 MW	Papua	0,49	SWASTA	PLN
5.	PLTU Timika 4x7 MW	Papua	0,46	BUMN	PLN,Bappenas
6.	PLTU Holtekamp 2 2x15 MW	Papua	0,05	BUMN	PLN
7.	PLTA Baliem 50 MW	Papua	1,00	BUMN	PLN
8.	PLTM Kalibumi I	Papua	0,50	APBN/APBD	PLN
9.	PLTU Jayapura (PTPI) – Holtekamp 10MW	Papua	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
10.	PLTMG Blak 15 MW	Papua	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
11.	PLTMG Merauke 20 MW	Papua	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
12.	PTMPD Merauke 2x3,5 MW	Papua	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
13.	PTMPD Serui 2x1,2 MW	Papua	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
14.	PLTMG jayapura Peaker 40 MW	Papua	0,44	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
15.	PTMPD Blak 2x3,5 MW	Papua	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
16.	PTMPD Timika 2x3,5 MW	Papua	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
17.	PLTA Orya 2 10 MW	Papua	0,20	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
18.	PLTM Mariorotu I 1,3 MW	Papua	0,03	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
19.	PLTM Amal I 4 MW	Papua	0,03	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
20.	PLTM Kalibumi II 5 MW	Papua	0,10	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
21.	PLTM Mariorotu II 1,3 MW	Papua	0,03	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
22.	PLTM Waleli Blok II 6x1 MW	Papua	0,12	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
23.	PLTMG Timika Peaker 5 MW	Papua	0,06	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
24.	PLTM Kalibumi III 7,5 MW	Papua	0,15	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
25.	PLTMG Nabire 10 MW	Papua	0,11	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
26.	PLTU Merauke 2x10 MW	Papua	0,33	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
27.	PLTU Klalin 2x15 MW	Papua Barat	0,49	SWASTA	PLN
28.	PLTU Andai 2x7 MW	Papua Barat	0,23	SWASTA	PLN
29.	PLTM kombenur 2x3,3 MW	Papua Barat	0,13	BUMN	PLN
30.	PLTU Manokwan 2x7 MW	Papua Barat	0,23	BUMN	PLN
31.	PLTMG Mobile PP (Manokwari) 20 MW	Papua Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
32.	PLTMG Fak-Fak 10 MW	Papua Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
33.	PLTMG Bintuni 10 MW	Papua Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
34.	PTMPD Fak-Fak 2x1,2 MW	Papua Barat	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
35.	PTMPD Sorong 2x3,5 MW	Papua Barat	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
36.	PLTM Waigo 1 MW	Papua Barat	0,02	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
37.	PLTM Prafi 2.1 MW	Papua Barat	0,02	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
38.	PLTM Ransidi 6 MW	Papua Barat	0,12	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
39.	PLTA Warsamson 46,5 MW	Papua Barat	0,93	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
40.	PLTU Manokwari 2 2x7 MW	Papua Barat	0,23	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
41.	PTMPD Pak-Pak 3,5 MW	Papua Barat	0,07	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
B. Wilayah Maluku					
42.	PLTM Wai Tina 2x6 MW	Maluku	0,16	SWASTA	PLN
43.	PLTM Sapalewa 2x4 MW	Maluku	0,16	SWASTA	PLN
44.	PLTP Tulehu (FTP 2) 2x10 MW	Maluku	0,35	BUMN	PLN
45.	PLTU Ambon 2 2x15 MW	Maluku	0,49	BUMN	PLN
46.	PLTU Ambon (FTP 1) 2x15 MW	Maluku	0,49	BUMN	PLN, Hapenas
47.	PTMPD Bulu 2x1,2 MW	Maluku	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
48.	PLTMG Dobo10 MW	Maluku	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
49.	PTMPD Kairatu 1x1,2 MW	Maluku	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
50.	PLTMG Langgur 20 MW	Maluku	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
51.	PTMPD Masohi 1x1,2 MW	Maluku	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
52.	PLTMG Saumlaki 10 MW	Maluku	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
53.	PLTM Tene 4 MW	Maluku	0,08	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
54.	PLTMG Ambon Peaker 30 MW	Maluku	0,55	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
55.	PLTMG Seram Peaker 20 MW	Maluku	0,11	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
56.	PTMPD Namlea 1x3,5 MW	Maluku	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
57.	PLTM Makariki 2 MW	Maluku	0,08	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
58.	PLTM Nua (Masohi) 2x4,4 MW	Maluku	0,16	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
59.	PLTM Wae Mala 1 MW	Maluku	0,03	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
60.	PLTA Wai Tala 54 MW	Maluku	1,08	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
61.	PLTM Isal 8 MW	Maluku	0,16	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
62.	PLTMG Ambon Peaker 2 10 MW	Maluku	0,11	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
63.	PLTU Ambon 3 15 MW	Maluku	0,25	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
64.	PLTU Waai (FTP 1) 2x15 MW	Maluku	n/a	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
65.	PLTMG Mobile PP (Ambon) 70 MW	Maluku	n/a	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
66.	PLTM Isal-3 2 MW	Maluku	n/a	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
67.	PLTP Songa Wayana (FTP 2) 5 MW	Maluku Utara	0,09	SWASTA	PLN
68.	PLTP Jailolo (FTP 2) 10 MW	Maluku Utara	0,18	SWASTA	PLN
69.	PLTU Tidore 2 2x7 MW	Maluku Utara	0,23	BUMN	PLN
70.	PLTU Sofifi 2x3 MW	Maluku Utara	0,10	BUMN	PLN
71.	PTMPD Bacan 2x1,2 MW	Maluku Utara	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
72.	PTMPD Sofifi 2x1,2 MW	Maluku Utara	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
73.	PLTMG Ternate Peaker 20 MW	Maluku Utara	0,22	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
74.	PTMPD Daruba 2x1,2 MW	Maluku Utara	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
75.	PTMPD Sarana 2x1,2 MW	Maluku Utara	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
76.	PLTP Jailolo 2 5 MW	Maluku Utara	0,09	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
77.	PTMPD Jailolo 2x1,2 MW	Maluku Utara	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
78.	PLTMG Ternate Peaker 10 MW	Maluku Utara	0,11	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
79.	PLTU Tobelo 2x7 MW	Maluku Utara	0,23	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
80.	PTMPD Tobelo 7 MW	Maluku Utara	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
81.	PLTU Maluku Utara/Tidore (FTP 1) 2x7 MW	Maluku Utara	0,43	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
82.	PLTMG Mobile PP Tobelo 10 MW	Maluku Utara	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
83.	PLTMG Mobile PP (Ternate) 30 MW	Maluku Utara	n/a	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
84.	PLTMG Mobile PP (Sofifi) 10 MW	Maluku Utara	n/a	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
85.	PLTMG Malifut Rekaer 5 MW	Maluku Utara	n/a	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
C. Wilayah Nusa Tenggara					
86.	PLTU Lombok Timur 2x25 MW	NTB	0,82	SWASTA	PLN
87.	PLTP Bu'u 2x10 MW	NTB	0,35	SWASTA	PLN
88.	PLTU Bima (FTP 1) 2 x 10 MW	NTB	0,23	BUMN	PLN
89.	PLTU Sumbawa Barat 2 x 7 MW	NTB	0,90	BUMN	PLN
90.	PLTU Bima 2 2 x 10 MW	NTB	1,63	BUMN	PLN
91.	PLTG Lombok Peaker 150 MW	NTB	0,33	BUMN	PLN
92.	PLTU Sumbawa 2 x 10 MW	NTB	0,33	BUMN	PLN
93.	PLTU Lombok (FTP 2) 2x30 MW	NTB	0,33	BUMN	PLN
94.	PLTU Lombok (FTP1) 25 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
95.	PLTG Mobile PP Lombok (Ampenan) 50 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
96.	PLTMG Sumbawa 50 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
97.	PLTMG Bima 50 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
98.	PLTU Lombok 2 50 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
99.	PLTU Lombok 25 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
100.	PLTM Segara 1 1,5 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
101.	PLTM Sedau 1,3 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
102.	PLTM Kokok Baban 2,3 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
103.	PLTM Beang Bea 2 3,8 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
104.	PLTM Beang Bea 1 2,5 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
105.	PLTM Bintang Bano 8,8 MW	NTB	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
106.	PLTU Kupang 30 MW	NTT	0,19	SWASTA	PLN
107.	PLTP Atadei (FTP 2) 5 MW	NTT	0,19	SWASTA	PLN
108.	PLTP Mataloko (FTP 2) 5 MW	NTT	0,19	SWASTA	PLN
109.	PLTP Oka Lie Ange (FTP 2) 10 MW	NTT	0,19	SWASTA	PLN
110.	PLTP Sukoria (FTP 2) 3x5 MW	NTT	0,19	SWASTA	PLN
111.	PLTM Ndungga 1,9MW	NTT	0,19	BUMN	PLN
112.	PLTP Ulumbu 5 MW	NTT	0,19	BUMN	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
113.	PLTU Alor 6 MW	NTT	0,19	BUMN	PLN
114.	PLTU NTT Ende FIP1 2x7 MW	NTT	0,19	BUMN	PLN
115.	PLTU NTT Kupang 2X16,5 MW (PTP)	NTT	0,24	BUMN	PLN
116.	PLTU Rote Ndao 2x3 MW	NTT	0,19	BUMN	PLN
117.	PLTU Atambua 4x6 MW	NTT	0,19	BUMN	PLN
118.	PLTU Matimere 2x10 MW	NTT	0,19	BUMN	PLN
119.	Pengembangan Transmisi total 590 kms	NTT	0,30	BUMN	Kemenko Ekon.
120.	PLTA Wae Rancang 1 10 MW	NTT	0,19	BUMN	PLN
121.	PLTA Wae Rancang II 6,5 MW	NTT	0,19	BUMN	PLN
122.	PLTMG Mobile PP (Kupang) 30 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
123.	PLTMG Waingapu 10 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
124.	PLTMG Mobile PP Flores 20 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
125.	PLTMG Alor 10 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
126.	PLTMG Maumere Peaker 40 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
127.	PLTMG Kupang Peaker 40 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
128.	PLTU Timor 1 25 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
129.	PLTM Lokomoro 6, 7 0.4 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
130.	PLTM Wae Rea – Ngada 0.4 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
131.	PLTM Harau 1 5 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
132.	PLTM Sita – Borong 1 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
133.	PLTP Mataloko (FTP 2) 10 MW	NTT	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
D. Wilayah Sulawesi					
134.	PLTU Gorontalo FTP 1 2x25 MW	Gorontalo	0,82	BUMN	Kemenko Ekon. PLN, Bappenas
135.	PLTG Gorontalo Peaker 100 MW	Gorontalo	0,50	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
136.	PLTU Subagai 1 2x50 MW	Gorontalo	1,53	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
137.	PLTU Sulbagit 3 2x30 MW	Gorontalo	0,38	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
138.	PLTM Taludaa 3 MW	Gorontalo	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
139.	PLTM Iya 2 MW	Gorontalo	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
140.	PLTU Gorontalo Energy 7 MW	Gorontalo	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
141.	PLTA Karama 100 dan 350 MW	Sulawesi Barat	16,50	SWASTA	PLN, Bappenas
142.	PLTU Mamuju 2x25 MW	Sulawesi Barat	1,50	SWASTA	PLN
143.	PLTA Peko 2x117 MW	Sulawesi Barat	7,02	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
144.	PLTGU Sengkong 60 MW	Sulawesi Selatan	0,36	SWASTA	PLN
145.	PLTMG Wajo 20 MW	Sulawesi Selatan	0,12	SWASTA	PLN
146.	PLTU Jenepono 2 2x113 MW	Sulawesi Selatan	3,69	SWASTA	PLN
147.	PLTA Bonto Batu (FTP 2) 110 MW	Sulawesi Selatan	4,33	SWASTA	PLN
148.	PLTA Malea (FTP 2) 90 MW	Sulawesi Selatan	3,54	SWASTA	PLN
149.	PLTU Sulsel Barru 50 MW	Sulawesi Selatan	2,90	BUMN	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
150.	PLTU Pinrangwa (FTP 2) 2x100 MW	Sulawesi Selatan	3,26	BUMN	PLN
151.	Pembangunan Gardu Induk di Prov. Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	0,55	BUMN	Kemenko Ekon.
152.	Pembangunan Jaringan Transmisi Prov Sulawesi Selatan 757 km	Sulawesi Selatan	0,92	BUMN	Kemenko Ekon.
153.	PLTM Ratelimbong - Kolaka 2 MW	Sulawesi Selatan	2,90	BUMN	Kemenko Ekon.
154.	PLTG Makassar Peaker 600 MW	Sulawesi Selatan	9,79	BUMN	PLN
155.	PLTMG Mobile PP Sulsel (Tallo Lama) 100 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
156.	PLTGU Sulsel Peaker 300 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
157.	PLTGU Sulsel Peaker 150 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
158.	Mobile PP Sulsel (Tello) 50 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
159.	PLTMG Selayar 10 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
160.	PLTM Ussu Malili 3 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
161.	PLTM Siteba 7.5 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
162.	PLTM Pasuti 2 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
163.	PLTM Pasuti 6 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
164.	PLTM Mahua 5 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
165.	PLTM Tombolo Pao 2 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
166.	PLTM Bantaeng 1 4.2 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
167.	PLTM Pongharik 3 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
168.	PLTM Kondongan 3 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
169.	PLTM Mallawa 5 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
170.	PLTM Bungin III 5 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
171.	PLTM Datara 7 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
172.	PLTM Belajen 8.3 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
173.	PLTM Galiase 9 MW	Sulawesi Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
174.	PTMPD Selayar 7 MW	Sulawesi Selatan	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
175.	PLTG Sulsel Barru 100 MW	Sulawesi Selatan	0,60	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
176.	PLTU Sulsel 2 2x200 MW	Sulawesi Selatan	8,00	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
177.	PLTA Bakaru 2 2x63 MW	Sulawesi Selatan	2,06	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
178.	PLTM Lambangin 3 MW	Sulawesi Tengah	0,03	SWASTA	PLN
179.	PLTM Sakita 2 MW	Sulawesi Tengah	0,02	SWASTA	PLN
180.	PLTM Wawopada 6,5 MW	Sulawesi Tengah	0,07	SWASTA	PLN
181.	Pengembangan PLTU Tawaeli 2x15 MW	Sulawesi Tengah	0,50	SWASTA	PLN
182.	PLTM Koro Kabalo 2.5 MW	Sulawesi Tengah	0,03	SWASTA	PLN
183.	PLTM Tomasa 10 MW	Sulawesi Tengah	0,10	SWASTA	PLN
184.	PLTM Yaeritu 10 MW	Sulawesi Tengah	0,10	SWASTA	PLN
185.	PLTG Luwuk 10 MW	Sulawesi Tengah	0,06	BUMN	Kemenko Ekon. PLN
186.	PLTU Ampama 2 x 3 MW	Sulawesi Tengah	0,10	BUMN	Kemenko Ekon. PLN
187.	PLTU Leok 2 x 3 MW	Sulawesi Tengah	0,10	BUMN	Kemenko Ekon. PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
188.	PLTU Bangkir 2 x 3 MW	Sulawesi Tengah	0,10	BUMN	Kemenko Ekon
189.	PLTU Kolondale 2 x 3 MW	Sulawesi Tengah	0,10	BUMN	Kemenko Ekon
190.	PLTU Tambu 2 x 3 MW	Sulawesi Tengah	0,10	BUMN	Kemenko Ekon
191.	PLTU Toli - Toli 2 x 3 MW	Sulawesi Tengah	0,10	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
192.	PLTM Tomini II 2 x 1 MW	Sulawesi Tengah	3,47	BUMN	Kemenko Ekon
193.	PLTM Buleleng 1,2 MW	Sulawesi Tengah	0,01	APBN/APBD	PLN
194.	PLTM Hahula 1,2 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
195.	PLTM Pono 6 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
196.	PLTM Biak I 1,5 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
197.	PLTM Biak II 1,3 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
198.	PLTM Biak III 1,2 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
199.	PLTM Bangkasa 1,4 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
200.	PLTM Bambalo 2,3 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
201.	PLTM Bambalo II 1,8 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
202.	PLTM Alani 5,6 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
203.	PLTU Tawaeli (Ekspansi) 15 MW	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
204.	PLTM Sawidago 3 1,6 MW	Sulawesi Tengah	0,02	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
205.	PTMPD Leok 2x1,2 MW	Sulawesi Tengah	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
206.	PLTU Paku 3 2x50 MW	Sulawesi Tengah	1,63	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
207.	PTMPD Biangai 2x1,2 MW	Sulawesi Tengah	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
208.	PTMPD Tolitoli 2x3,5 MW	Sulawesi Tengah	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
209.	PLTG Luwuk Peakier 20 MW	Sulawesi Tengah	0,12	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
210.	PLTG Morowali 20 MW	Sulawesi Tengah	0,12	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
211.	PLTU Kendari 3 2x50 MW	Sulawesi Tenggara	1,63	BUMN	PLN
212.	Pengembangan PLTU Nii Tanasa 10 MW	Sulawesi Tenggara	0,16	BUMN	PLN
213.	PLTM Ronggi 0,8 MW	Sulawesi Tenggara	0,01	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
214.	PLTU Bau - Bau 10 MW	Sulawesi Tenggara	0,16	BUMN	Biapenas
215.	PLTU Bau - Bau 2x10 MW	Sulawesi Tenggara	0,33	BUMN	PLN
216.	PLTU Raha 2x3 MW	Sulawesi Tenggara	0,10	BUMN	Kemenko Ekon
217.	PLTU Wangi - Wangi 2 x 3 MW	Sulawesi Tenggara	0,10	BUMN	Kemenko Ekon, Biapenas
218.	Pembangunan Gardu Induk di Prov. Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	0,27	BUMN	Kemenko Ekon
219.	Pembangunan Jaringan Transmisi Prov. Sulawesi Tenggara 1.000km	Sulawesi Tenggara	0,55	BUMN	Kemenko Ekon
220.	PLTU Kendari 2 x 10 MW	Sulawesi Tenggara	1,02	BUMN	Kemenko Ekon
221.	PLTU Kendari 3 2x50 MW	Sulawesi Tenggara	1,63	BUMN	PLN
222.	PLTM Lapa 2 4 MW	Sulawesi Tenggara	0,04	APBN/APBD	PLN
223.	PLTMG Bau-Bau 30 MW	Sulawesi Tenggara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
224.	PLTMG Mobile PP Wangi-Wangi 5 MW	Sulawesi Tenggara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
225.	PLTMG Mobile PP Bombasa 10 MW	Sulawesi Tenggara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
226.	PLTMG Mobile PP Kolaka Utara 5 MW	Sulawesi Tenggara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
227.	PLTG Mobile PP Sultra (Kendari) 50 MW	Sulawesi Tenggara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
228.	PLTM Riorita 0,5 MW	Sulawesi Tenggara	0,01	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
229.	PLTM Toaha 0,5 MW	Sulawesi Tenggara	0,01	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
230.	PLTU Raha 2 2x3 MW	Sulawesi Tenggara	0,10	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
231.	PLTA Konawe 30 MW	Sulawesi Tenggara	2,80	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
232.	PLTA Watunohu 15 MW	Sulawesi Tenggara	0,60	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
233.	PLTP Lahendong VI (FTP 2) 20 MW	Sulawesi Utara	0,35	SWASTA	PLN
234.	PLTM Duminanga 1x3,5 MW	Sulawesi Utara	0,07	SWASTA	PLN
235.	PLTP Lahendong V (FTP 2) 20 MW	Sulawesi Utara	0,35	SWASTA	PLN
236.	PLTU Amurang 2x25 MW	Sulawesi Utara	0,82	SWASTA	PLN
237.	PLTG Minahasa Peakier 150 MW	Sulawesi Utara	0,90	BUMN	PLN
238.	PLTU Talaud 2x3 MW	Sulawesi Utara	0,10	BUMN	PLN
239.	PLTU Suhat I (FTP 1) 2x25 MW	Sulawesi Utara	0,82	BUMN	PLN
240.	PLTM Lelipang 0,5 MW	Sulawesi Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
241.	PLTG Mobile PP Sulbagut (Amurang) 100 MW	Sulawesi Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
242.	PLTM Duminanga 0,5 MW	Sulawesi Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
243.	PLTM Pirtung 2 MW	Sulawesi Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
244.	PLTM Ranwangko 2,2 MW	Sulawesi Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
245.	PTMPD Siau 2x1,2 MW	Sulawesi Utara	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
246.	PTMPD Talitna 2x3,5 MW	Sulawesi Utara	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
247.	PTMPD Talaud 2x1,2 MW	Sulawesi Utara	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
248.	PLTU Suhat 3 2x50 MW	Sulawesi Utara	2,00	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
249.	PLTA Poigar 2 30 MW	Sulawesi Utara	0,60	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
250.	PLTA Sawangan 12 MW	Sulawesi Utara	0,24	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
E. Wilayah Kalimantan					
251.	PLTGB Sewa Tayan 6 MW	Kalimantan Barat	0,04	SWASTA	PLN
252.	PLTU Ketapang (PP) 2x6 MW	Kalimantan Barat	0,20	SWASTA	PLN
253.	PLTU Parit Baru (FTP 1) 2x50 MW	Kalimantan Barat	0,90	BUMN	PLN
254.	PLTU Pantai Kura-Kura (FTP 1) 2x28 MW	Kalimantan Barat	6,82	BUMN	PLN
255.	PLTU Sintang 3x7 MW	Kalimantan Barat	0,34	BUMN	PLN
256.	PLTU Ketapang Biomassa 10 MW	Kalimantan Barat	0,33	BUMN	PLN
257.	PLTU Parit Baru (FTP 2) 2x55 MW	Kalimantan Barat	1,69	BUMN	PLN
258.	PLTG Kalbar Peakier 100 MW	Kalimantan Barat	0,60	BUMN	PLN
259.	PTMPD Ketapang 2x3,5 MW	Kalimantan Barat	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
260.	PTMPD Naoga Puteh 2x3,5 MW	Kalimantan Barat	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
261.	PTMPD Putussibau 2x3,5 MW	Kalimantan Barat	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
262.	PLTU Kalbar-1 2x100 MW	Kalimantan Barat	4,00	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
263.	PLTM Melanggar 0.5 MW	Kalimantan Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
264.	PLTM kembayung-2 2.5 MW	Kalimantan Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
265.	PLTM Mahap 1.3 MW	Kalimantan Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
266.	PLTM Jitan 3.4 MW	Kalimantan Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
267.	PLTM Kalis 3.0 MW	Kalimantan Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
268.	PLTG Mobile PP Kalbar 100 MW	Kalimantan Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
269.	PLTD Ketapang CPO 10 MW	Kalimantan Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
270.	PLTM kembayung-1 4.5 MW	Kalimantan Barat	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
271.	PLTU Kalsel (PTP 2) 2x100 MW	Kalimantan Selatan	3,08	SWASTA	Kemenko Ekon, PLN
272.	PLTU Asam Asam 2x63 MW	Kalimantan Selatan	3,31	BUMN	Bappenas, PLN
273.	PLTU Kotalbaru 2x7 MW	Kalimantan Selatan	0,23	BUMN	PLN
274.	PLTU Kalsel Peaker 1 200 MW	Kalimantan Selatan	0,20	BUMN	PLN
275.	PLTU Kalselteng 2 100 MW	Kalimantan Selatan	1,40	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
276.	PLTG Mobile PP Kalselteng 2x100 MW	Kalimantan Selatan	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
277.	PLTU Kalselteng 1 100 MW	Kalimantan Tengah	1,40	SWASTA	PLN
278.	PLTU Pulang Pisau (PTP 1) 2x60 MW	Kalimantan Tengah	1,85	BUMN	PLN, Bappenas
279.	PLTGU Bangkanai (PTP) 2x70 MW	Kalimantan Tengah	2,51	BUMN	PLN, Bappenas
280.	PLTU Kuala Pembuang 2x3 MW	Kalimantan Tengah	0,11	BUMN	PLN
281.	PLTU Sampit (2x25 MW)	Kalimantan Tengah	1,11	BUMN	PLN
282.	PLTU Lati (Ekspansi) 5 MW	Kalimantan Timur	0,82	SWASTA	PLN
283.	PLTGU Senipah 35 MW	Kalimantan Timur	0,67	SWASTA	PLN
284.	PLTU Tanah Grogot 2x7 MW	Kalimantan Timur	0,23	SWASTA	PLN
285.	PLTU Kaltim (PTP 2) 2x100 MW	Kalimantan Timur	3,08	SWASTA	PLN
286.	PLTU Kaltim (MT) 2x27,5 MW	Kalimantan Timur	0,90	SWASTA	PLN
287.	PLTMG Tana Pesik-2 100 MW	Kalimantan Timur	0,50	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
288.	PLTMG Mobile PP Kalimantan 30 MW	Kalimantan Timur	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
289.	PLTU Tanjung Redep 2x70 MW	Kalimantan Timur	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
290.	PLTU Teluk Balikpapan (PTP 1) 2x110 MW	Kalimantan Timur	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
291.	PLTU Kaltim-4 100 MW	Kalimantan Timur	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
292.	PLTU Malinau 2x3 MW	Kalimantan Utara	0,10	BUMN	PLN
293.	PLTMG Tanjung Seor	Kalimantan Utara	0,40	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
294.	PLTMG Tana Tidung	Kalimantan Utara	0,40	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
295.	PLTU Tanjung Seor 2x7 MW	Kalimantan Utara	n/a	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
296.	PLTMG Nunukan-2 10 MW	Kalimantan Utara	n/a	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
297.	PLTMG Malinau 5 MW	Kalimantan Utara	n/a	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
F. Wilayah Jawa-Bali					
298.	PLTM Bulakan 10 MW	Banten	0,04	SWASTA	PLN
299.	PLTM Cidano 1.5 MW	Banten	4,41	SWASTA	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
300.	PLTM Cikidang 2 MW	Banten	0,04	SWASTA	PLN
301.	PLTM Cisneut 2 MW	Banten	0,06	SWASTA	PLN
302.	PLTM Ciungwang II 3 MW	Banten	0,10	SWASTA	PLN
303.	PLTM Cibareno 1.5 MW	Banten	0,20	SWASTA	PLN
304.	PLTM Ciasih Leutik 4 MW	Banten	0,12	SWASTA	PLN
305.	PLTM Nagajaya 6 MW	Banten	1,93	SWASTA	PLN
306.	PLTU Lontar Exp 315 MW	Banten	0,08	SWASTA	PLN
307.	PLTP Rawa Dano (PTP 2) 110 MW	Banten	0,04	SWASTA	PLN
308.	PLTM Sitanulya 3 MW	Banten	N/A	SWASTA	PLN
309.	PLTU Banten 625 MW	Banten	N/A	SWASTA	PLN
310.	PLTU Jawa-7 2x1000 MW	Banten	N/A	SWASTA	PLN
311.	PLTU Jawa-5 (PTP2)	Banten	N/A	SWASTA	PLN
312.	PLTU Jawa-9 600 MW	Banten	N/A	SWASTA	PLN
313.	PLTU/MG Peaker Jawa-Bali 3 400 MW	Banten	N/A	SWASTA	PLN
314.	PLTU Bojonegara 750 MW	Banten	12,00	BUMN	Kemenko Ekon
315.	PLTU Surabaya 625 MW	Banten	8,13	BUMN	Kemenko Ekon
316.	PLTU Teluk Naga/Lontar 945 MW	Banten	12,23	BUMN	Kemenko Ekon
317.	PLTB Samas (Kab. Bantul)	DI Yogyakarta	N/A	BUMN	PLN
318.	Pembangunan PLTG Muara Karang 400 MW	DKI Jakarta	2,00	BUMN	Kemenko Ekon
319.	Pembangunan PLTGU Priok Extension 500 MW	DKI Jakarta	4,00	BUMN	Kemenko Ekon
320.	PLTGU Muara Karang	DKI Jakarta	N/A	BUMN	PLN
321.	PLTM Cimandiri 3 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
322.	PLTM Cianten 1 2 MW	Jawa Barat	0,04	SWASTA	PLN
323.	PLTM Cianten 2 5 MW	Jawa Barat	0,10	SWASTA	PLN
324.	PLTM Cibalapulang 9 MW	Jawa Barat	0,18	SWASTA	PLN
325.	PLTM Cibatarua 5 MW	Jawa Barat	0,10	SWASTA	PLN
326.	PLTM Cicatih 6 MW	Jawa Barat	0,12	SWASTA	PLN
327.	PLTM Cikopo-2 6 MW	Jawa Barat	0,12	SWASTA	PLN
328.	PLTM Cilaki IB 10 MW	Jawa Barat	0,20	SWASTA	PLN
329.	PLTM Cilaki 7 MW	Jawa Barat	0,14	SWASTA	PLN
330.	PLTM Pakenjeng Bawah 6 MW	Jawa Barat	0,12	SWASTA	PLN
331.	PLRM Cikemang-2 7.2 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
332.	PLTM Caringin 4 MW	Jawa Barat	0,08	SWASTA	PLN
333.	PLTM Ciarimem 3 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
334.	PLTM Ciasem 3 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
335.	PLTM Cibalapulang 2 7 MW	Jawa Barat	0,14	SWASTA	PLN
336.	PLTM Cibalapulang 3 6 MW	Jawa Barat	0,12	SWASTA	PLN
337.	PLTM Cijampang 1 1 MW	Jawa Barat	0,02	SWASTA	PLN
338.	PLTM Cikandang 6 MW	Jawa Barat	0,12	SWASTA	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
339.	PLTM Cikaniiki 1 3 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
340.	PLTM Cikaniiki 2 3 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
341.	PLTM Cilaki 1A 3 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
342.	PLTM Cisarigiri 3 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
343.	PLTM Kalapa Munggal 3 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
344.	PLTM Paketjeng Atas 4 MW	Jawa Barat	0,08	SWASTA	PLN
345.	PLTM Pusaka 1 9 MW	Jawa Barat	0,18	SWASTA	PLN
346.	PLTM Pusaka 3 3 MW	Jawa Barat	0,06	SWASTA	PLN
347.	PLTA Jarigede (FTP 2) 2x55 MW	Jawa Barat	1,10	SWASTA	PLN
348.	PLTM Cirompang 8 MW	Jawa Barat	N/A	SWASTA	PLN
349.	PLTP Karaha Bodas (FTP2) 30 MW	Jawa Barat	N/A	SWASTA	PLN
350.	PLTA Rajamanjula 47 MW	Jawa Barat	N/A	SWASTA	PLN
351.	PLTP Patuha (FTP2) 55 MW	Jawa Barat	N/A	SWASTA	PLN
352.	PLTU Jawa-1 (FTP2) 1000 MW	Jawa Barat	N/A	SWASTA	PLN
353.	PLTP Tangkuban Perahu 1 (FTP2) 55 MW	Jawa Barat	N/A	SWASTA	PLN
354.	PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 300 MW	Jawa Barat	N/A	SWASTA	PLN
355.	PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 150 MW	Jawa Barat	N/A	SWASTA	PLN
356.	PLTA Upper Cisokan Pump Storage 1000 MW	Jawa Barat	6,50	BUMN	Kemenko Ekon
357.	PLTP Kampojang Unit 5 1 x 40 MW	Jawa Barat	0,96	BUMN	Kemenko Ekon
358.	PLTU Jabbar - Pelabuhan Batu 3 x 350 MW	Jawa Barat	13,65	BUMN	Kemenko Ekon
359.	PLTG Suryaragi 600 MW	Jawa Barat	3,00	BUMN	Kemenko Ekon
360.	PLTGU Muara Tawar Blok 5 234 MW	Jawa Barat	1,87	BUMN	Kemenko Ekon
361.	Pembangunan PLTU Indramayu 4 (1 x 1000 MW)	Jawa Barat	25,30	BUMN	Kemenko Ekon
362.	Pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-On 2 150 MW	Jawa Barat	1,20	BUMN	Kemenko Ekon
363.	PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 1 400 MW	Jawa Barat	N/A	BUMN	PLN
364.	PLTA Gede Bage	Jawa Barat	0,56	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Bappenas
365.	PLTU Jawa Tengah	Jawa Tengah	35,00	PPP	PLN, Bappenas
366.	PLTM Banjaran Kebonmanis 2,2 MW	Jawa Tengah	0,04	SWASTA	PLN
367.	PLTM Logawa Babakan 1,3 MW	Jawa Tengah	0,03	SWASTA	PLN
368.	PLTM Logawa Baseh 3 MW	Jawa Tengah	0,06	SWASTA	PLN
369.	PLTM Logawa Baseh Karangpelem 1,9 MW	Jawa Tengah	0,04	SWASTA	PLN
370.	PLTM Adipasir 1 0,3 MW	Jawa Tengah	0,01	SWASTA	PLN
371.	PLTM Adipasir 2 0,3 MW	Jawa Tengah	0,01	SWASTA	PLN
372.	PLTM Ambal 2,1 MW	Jawa Tengah	0,02	SWASTA	PLN
373.	PLTM Banyumayu 0,5 MW	Jawa Tengah	0,01	SWASTA	PLN
374.	PLTM Bendosari 4 MW	Jawa Tengah	0,08	SWASTA	PLN
375.	PLTM Gelang 0,3 MW	Jawa Tengah	0,01	SWASTA	PLN
376.	PLTM Gunung Wugul 3 MW	Jawa Tengah	0,06	SWASTA	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
377.	PLTM Pagarpelah 3,2 MW	Jawa Tengah	0,06	SWASTA	PLN
378.	PLTM Palumbungan 1,6 MW	Jawa Tengah	0,03	SWASTA	PLN
379.	PLTM Pugeran 6 MW	Jawa Tengah	0,12	SWASTA	PLN
380.	PLTM Serayu 8,6 MW	Jawa Tengah	0,17	SWASTA	PLN
381.	PLTM Timbangreja 0,4 MW	Jawa Tengah	0,01	SWASTA	PLN
382.	PLTU Cilacap Exp 614 MW	Jawa Tengah	7,98	SWASTA	PLN
383.	PLTM Binangun 3,8 MW	Jawa Tengah	0,08	SWASTA	PLN
384.	PLTM Dadapayam 3 MW	Jawa Tengah	0,06	SWASTA	PLN
385.	PLTM Damar 2,1 MW	Jawa Tengah	0,04	SWASTA	PLN
386.	PLTM Harjosari 9,9 MW	Jawa Tengah	0,20	SWASTA	PLN
387.	PLTM Jimat 0,5 MW	Jawa Tengah	0,01	SWASTA	PLN
388.	PLTM Lambur 8 MW	Jawa Tengah	0,16	SWASTA	PLN
389.	PLTM Pageruyung 4,4 MW	Jawa Tengah	0,09	SWASTA	PLN
390.	PLTM Preng-1 1,8 MW	Jawa Tengah	0,04	SWASTA	PLN
391.	PLTM Preng-2 4,5 MW	Jawa Tengah	0,09	SWASTA	PLN
392.	PLTM Pektu Samudrata 1,5 MW	Jawa Tengah	0,03	SWASTA	PLN
393.	PLTM Tulis 9 MW	Jawa Tengah	0,18	SWASTA	PLN
394.	PLTP Dieng (FTP 2) 55 MW	Jawa Tengah	0,96	SWASTA	PLN
395.	PLTU Jawa-4 (FTP 2) 2x1000 MW	Jawa Tengah	0,84	SWASTA	PLN
396.	PLTP Baturaden (FTP 2) 110 MW	Jawa Tengah	1,93	SWASTA	PLN
397.	PLTP Guci (FTP 2) 110 MW	Jawa Tengah	1,93	SWASTA	PLN
398.	PLTP Ungaran (FTP 2) 55 MW	Jawa Tengah	0,96	SWASTA	PLN
399.	PLTM Kinci Putih 1 MW	Jawa Tengah	N/A	SWASTA	PLN
400.	PLTM Logawa Sunyalangu 1,5 MW	Jawa Tengah	N/A	SWASTA	PLN
401.	PLTU Jawa-8 1000 MW	Jawa Tengah	N/A	SWASTA	PLN
402.	PLTU Adipala 1 x 660 MW	Jawa Tengah	8,58	BUMN	Kemenko Ekon
403.	Pembangunan transmisi di Jawa Tengah; terdapat 1764 KMS	Jawa Tengah	3,80	BUMN	Kemenko Ekon
404.	PLTMG Karimunjawa 4 MW	Jawa Tengah	0,04	BUMN	PLN
405.	PLTU Matanggeng PS 443 MW	Jawa Tengah	2,88	BUMN	Kemenko Ekon
406.	PLTU Jawa -10 660 MW	Jawa Tengah	N/A	BUMN	PLN
407.	PLTM Balele 4,3 MW	Jawa Timur	0,08	SWASTA	PLN
408.	PLTM Jompo-1 2 MW	Jawa Timur	0,04	SWASTA	PLN
409.	PLTM Jompo-2 3 MW	Jawa Timur	0,06	SWASTA	PLN
410.	PLTM Kali Tengah 1 MW	Jawa Timur	0,02	SWASTA	PLN
411.	PLTM Ketajek 3 MW	Jawa Timur	0,06	SWASTA	PLN
412.	PLTM Lodayo 9,5 MW	Jawa Timur	0,20	SWASTA	PLN
413.	PLTM Zelandia 2 MW	Jawa Timur	0,04	SWASTA	PLN
414.	PLTM Pacet 1,5 MW	Jawa Timur	0,04	SWASTA	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
415.	PLTP Ijen (PTP-2) 55 MW	Jawa Timur	0,96	SWASTA	PLN
416.	PLTP Walis (PTP-2) 55 MW	Jawa Timur	0,96	SWASTA	PLN
417.	PLTU Ti. Awar-awar 350 MW	Jawa Timur	N/A	SWASTA	PLN
418.	PLTGU Grati Add-on Blok 2 150 MW	Jawa Timur	N/A	SWASTA	PLN
419.	PLTU Paltan 660 MW	Jawa Timur	8,38	BUMN	Kemenko Ekon
420.	PLTGU Jawa-1 2x800 MW	Jawa Timur	11,60	BUMN	PLN
421.	PLTGU Tuban 1 500 MW	Jawa Timur	12,00	BUMN	Kemenko Ekon
422.	Pembangunan PS Grindulu PS 500 MW	Jawa Timur	3,25	BUMN	Kemenko Ekon
423.	Pembangunan transmisi di Jawa Timur: terdapat 1.147 KMS	Jawa Timur	2,16	BUMN	Kemenko Ekon
424.	PLTMG Bawean 2 MW	Jawa Timur	0,02	BUMN	PLN
425.	PLTA Kalikonto 62 MW	Jawa Timur	0,93	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
426.	PLTA Kesamben 37 MW	Jawa Timur	0,56	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
427.	PLTMG Bawean 3 MW	Jawa Timur	0,03	BUMN	PLN
428.	PLTMG Bawean 2 MW	Jawa Timur	0,02	BUMN	PLN
429.	PLTA Kalikonto 62 MW	Jawa Timur	0,93	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
430.	PLTA Kesamben 37 MW	Jawa Timur	0,56	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
431.	PLTMG Bawean 3 MW	Jawa Timur	0,03	BUMN	PLN
432.	PLTGU Jawa-3 800 MW	Jawa Timur	N/A	BUMN	PLN
433.	PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 2 500 MW	Jawa Timur	N/A	BUMN	PLN
434.	PLTU Grati (300 MW)	Jawa Timur	4,20	APBN/APBD	Bappenas, PT, PLN
435.	PLTU Grati (150 MW)	Jawa Timur	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
436.	PLTGU Jawa-2 800 MW	Jawa Timur	6,80	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
437.	PLTA Karangates-4-5 100 MW	Jawa Timur	2,00	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
438.	PLTU Bali Utara/ Cehukan Bawang 2x125 MW	Bali	1,58	SWASTA	PLN
439.	PLTM Miasa 1,4 Mw	Bali	0,92	SWASTA	PLN
440.	PLTU Cehukan Bawang 130 MW	Bali	N/A	SWASTA	PLN
441.	PLTM Sambangan 1,9 MW	Bali	0,04	SWASTA	PLN
442.	PLTM Telagawaja 4 Mw	Bali	0,08	SWASTA	PLN
443.	PLTM Ayung 2 MW	Bali	0,04	SWASTA	PLN
444.	PLTM Sunduwati 2 MW	Bali	0,04	SWASTA	PLN
445.	PLTM Telagawaja Ayu 1 MW	Bali	0,08	SWASTA	PLN
446.	PLTM Tukad Jaya 8 MW	Bali	0,16	SWASTA	PLN
447.	PLTMG Pesanggaran 4x50 MW	Bali	1,65	BUMN	PLN, Bappenas
448.	Pengembangan Transmisi total 786 kms	Bali	2,40	BUMN	Kemenko Ekon
449.	PLTP Bedugul	Bali	0,32	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
G. Wilayah Sumatera					
450.	PLTP Jaboi (PTP 2) 5 MW	Aceh	0,18	SWASTA	PLN
451.	PLTU Sinabang Iek (Tapaktuan) 14 MW	Aceh	2,44	BUMN	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
452.	PLTA Pusanngan 1-2 88MW	Aceh	1,76	BUMN	PLN
453.	PLTGU Sumbagut-2 peaker (Arum) 250 MW	Aceh	3,75	BUMN	PLN
454.	PLTG Arun	Aceh	1,92	APBN/APBD	Bappenas, PT, PLN
455.	PLTG Aceh 25 MW	Aceh	0,15	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
456.	PTMPD Sabang (ORC) 7 MW	Aceh	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
457.	PTMPD Sinabang (ORC) 7 MW	Aceh	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
458.	PLTU Melulaboh #3 4 400 MW	Aceh	5,60	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
459.	PLTS Sinabang 2 MW	Aceh	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
460.	PLTS Sabang 1 MW	Aceh	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
461.	PLTS Singkil 1 MW	Aceh	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
462.	Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi Bengkulu (6 titik)	Bengkulu	0,29	BUMN	Kemenko Ekon
463.	PLTU Ipuh (Sablat) 6 MW	Bengkulu	0,10	BUMN	PLN
464.	Pembangunan PLTP Hululuis Kapasitas 55 MW	Bengkulu	1,76	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
465.	Pembangunan PLTA Simpang Aur (2x5 MW) dan (2x9 MW)	Bengkulu	0,45	APBN/APBD	Kemenko Ekon
466.	PTMPD Muko Muko (ORC) 7 MW	Bengkulu	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
467.	PTMPD Ipuh Baru (OCH) 2,4 MW	Bengkulu	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
468.	PTMPD Kota Bani (ORC) 7 MW	Bengkulu	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
469.	PLTU Bengkulu 200 MW	Bengkulu	3,26	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
470.	PLTU Jambi 500 MW	Jambi	10,40	SWASTA	PLN
471.	PLTGU Batanghari 30 MW	Jambi	0,26	BUMN	PLN
472.	PLTMG Sungai Gelan (CRG/Peaker) 92 MW	Jambi	10,12	BUMN	PLN
473.	PLTU Kuala Tungkal 14 MW	Jambi	0,23	BUMN	PLN
474.	PLTG Jambi Peaker 100 MW	Jambi	0,60	BUMN	PLN
475.	Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi Jambi (7 titik)	Jambi	1,80	BUMN	Kemenko Ekon
476.	Pembangunan PLTP Sungai Penut Kapasitas 2x55 MW	Jambi	1,80	BUMN	Kemenko Ekon
477.	PLTG Tanjung Jabung Timur 100 MW	Jambi	0,60	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
478.	PLTG Payo Selinaah 50 MW	Jambi	0,30	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
479.	PTMPD Batang Asia (OCH)	Jambi	0,40	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
480.	Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi Kep. Bangka Belitung (4 titik)	Kep. Bangka Belitung	0,33	BUMN	Kemenko Ekon
481.	PLTU Belitung baru (PTP) 17 MW	Kep. Bangka Belitung	0,54	BUMN	PLN
482.	PLTU Bangka (Seval) 60 MW	Kep. Bangka Belitung	0,92	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
483.	PLTU Belitung 4 30 MW	Kep. Bangka Belitung	0,43	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
484.	PLTG Belitung Peaker-3 30 MW	Kep. Bangka Belitung	0,12	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	RUPPL
485.	PLTG Bangka peaker 2x50 MW	Kep. Bangka Belitung	0,60	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
486.	PLTU Belitung-5 34 MW	Kep. Bangka Belitung	0,56	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
487.	PLTG Rawa Minyak 15 MW	Kep. Riau	0,25	SWASTA	PLN
488.	PLTU Dabo Singkep 1, 6 MW	Kep. Riau	0,10	SWASTA	PLN
489.	PLTU Tanjung Pinang 1 (TLB)	Kep. Riau	0,10	SWASTA	PLN
490.	PLTMG Kurau 10 MW	Kep. Riau	0,11	SWASTA	PLN
491.	PLTU Tanjung Batu 1-14 MW	Kep. Riau	0,23	SWASTA	PLN
492.	PLTU Tanjung Batu Baru 14 MW	Kep. Riau	0,23	BUMN	PLN
493.	PLTU TB. Karimun - I (FTP2) 15 MW	Kep. Riau	0,25	BUMN	PLN
494.	PLTG Rengat New 12,5 MW	Kep. Riau	0,21	BUMN	PLN
495.	PLTG Tanjung Pinang 2 (FTP2) 30 MW	Kep. Riau	0,49	BUMN	PLN
496.	PLTG Natuna-2 25 MW	Kep. Riau	0,23	BUMN	PLN
497.	PTMPD Bengkalis (ORC) 12 MW	Kep. Riau	0,24	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
498.	PTMPD Dabo Singkep (ORC) 7 MW	Kep. Riau	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
499.	PTMPD Ranai (ORC) 7 MW	Kep. Riau	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
500.	PTMPD Selat Panjang (ORC) 7 MW	Kep. Riau	0,14	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
501.	PLTG Dabo Singkep 7 MW	Kep. Riau	0,11	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
502.	PLTU Natuna-2 14 MW	Kep. Riau	0,23	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
503.	PLTU Tanjung Pinang 3 100 MW	Kep. Riau	1,54	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
504.	PLTG TB. Karimun Peaker-1 40 MW	Kep. Riau	0,22	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
505.	PLTU Dabo Singkep-2 14 MW	Kep. Riau	0,08	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
506.	PLTU TB. Karimun #2 (FTP1)	Kep. Riau	0,22	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
507.	PLTG Dabo Singkep 16 MW	Kep. Riau	0,08	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
508.	PLTS TB. Karimun 2,5 MW	Kep. Riau	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
509.	PLTS Tanjung Batu 1 MW	Kep. Riau	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
510.	PLTS Bengkalis 1,5 MW	Kep. Riau	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
511.	PLTS Selat Panjang 1,5 MW	Kep. Riau	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
512.	PLTP Uluhehli #3,4 (FTP2) 110 MW	Lampung	1,93	SWASTA	PLN
513.	PLTA Semangka (FTP2) 56 MW	Lampung	1,12	SWASTA	PLN
514.	PLTP Wai Ratai (FTP2) 55 MW	Lampung	0,96	SWASTA	PLN
515.	PLTU Tarahan Mulut Tambang (2x8 MW)	Lampung	2,44	BUMN	Kemenko Ekon
516.	PLTG/MG Lampung Peaker 200 MW	Lampung	1,20	BUMN	PLN
517.	Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi Lampung (11 titik)	Lampung	5,89	BUMN	Kemenko Ekon
518.	PLTG Lampung (Sribawene+Sutami) 200 MW	Lampung	1,20	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
519.	PLTU Riau Kemirraan (PLN-TNB-PTBA) 2x600 MW	Riau	36,00	SWASTA	PLN
520.	PLTG Riau Peaker 2x100 MW	Riau	1,20	BUMN	PLN
521.	PLTU Mulut Tambang Riau 2x300 MW	Riau	1,25	BUMN	Kemenko Ekon
522.	PLTU Riau (Tenayan) 2 x 100 MW	Riau	3,10	BUMN	Kemenko Ekon
523.	PLTU Riau (Amendemen FTP1) 220 MW	Riau	2,68	BUMN	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
524.	PLTMG Duri 112 MW	Riau	1,23	BUMN	PLN
525.	PLTU Tembilahan 14 MW	Riau	0,23	BUMN	PLN
526.	PLTU Peranap 2x10 MW	Riau	3,12	APBN/APBD	Kemenko Ekon
527.	PLTU Dumai 240 MW	Riau	3,36	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
528.	PLTGU Riau 160 MW	Riau	0,43	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
529.	PTMPD Tua Pejat (ORC) 2,4 MW	Sumatera Barat	0,05	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
530.	PLTU Banjarsari 230 MW	Sumatera Selatan	3,22	SWASTA	PLN
531.	PLTU Keban Agung 2x112,5 MW	Sumatera Selatan	3,15	SWASTA	PLN
532.	PLTU Sumsel - 7 2x150 MW	Sumatera Selatan	4,20	SWASTA	PLN
533.	Pembangunan Infrastruktur PLTU Kawasan Industri Muara Enim (2x10 MW)	Sumatera Selatan	0,40	SWASTA	Kemenko Ekon
534.	PLTP Rantau Daulap (FTP2) 110 MW	Sumatera Selatan	3,85	SWASTA	PLN
535.	PLTU Sumsel - 6 300 MW	Sumatera Selatan	N/A	SWASTA	PLN
536.	PLTGU Keramasan 80 MW	Sumatera Selatan	0,68	BUMN	PLN
537.	Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi Sumatera Selatan (21 titik)	Sumatera Selatan	0,36	BUMN	Kemenko Ekon
538.	PLTU Sumbagsel-1 MT 2x150 MW	Sumatera Selatan	4,20	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
539.	PLTU Sumsel - 8 MT 2x600 MW	Sumatera Selatan	16,80	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
540.	PLTP Lumut Balai Unit 1 dan 2 (2x55 MW)	Sumatera Selatan	3,48	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
541.	PLTP Lumut Balai Unit 3 dan 4 (2x55MW)	Sumatera Selatan	3,38	BUMN	Kemenko Ekon, PLN
542.	PLTA Wampu (FTP2) 45 MW	Sumatera Utara	0,90	SWASTA	PLN
543.	PLTU Nias (FTP2) 21 MW	Sumatera Utara	0,34	SWASTA	PLN
544.	PLTP Sarulla I (FTP2) 330 MW	Sumatera Utara	5,78	SWASTA	PLN
545.	PLTP Sorik Merapi (FTP2) 240 MW	Sumatera Utara	4,82	SWASTA	PLN
546.	PLTA Sikikalang-1 15 MW	Sumatera Utara	N/A	SWASTA	PLN
547.	PLTA Hasan (FTP2) 40 MW	Sumatera Utara	N/A	SWASTA	PLN
548.	PLTMH Tersebar Sumut 10,9 MW	Sumatera Utara	N/A	SWASTA	PLN
549.	PLTMH Tersebar Sumut 63 MW	Sumatera Utara	N/A	SWASTA	PLN
550.	PLTMH Tersebar Sumut 98,7 MW	Sumatera Utara	N/A	SWASTA	PLN
551.	PLTU Pangkalan Susu #1,2 (FTP1) 2x220 MW	Sumatera Utara	5,20	BUMN	PLN
552.	PLTA Batang Toru (Tapael) 510 MW	Sumatera Utara	2,61	BUMN	Bappenas
553.	PLTGU Sumbagut-4 Peaker 250 MW	Sumatera Utara	2,13	BUMN	PLN
554.	PLTGU Sumbagut-3 Peaker 250 MW	Sumatera Utara	2,13	BUMN	PLN
555.	PLTU Nias (merahputih) 20 MW	Sumatera Utara	0,33	BUMN	PLN
556.	PLTU Sibayak 3	Sumatera Utara	0,36	BUMN	Kemenko Ekon
557.	Pengembangan Hidro 2 x 87 MW Porsea (Asahan 3)	Sumatera Utara	3,48	BUMN	Kemenko Ekon
558.	PLTG Mobile PP Nias 25 MW	Sumatera Utara	N/A	BUMN	PLN
559.	PLTA Asahan III (FTP2) 174 MW	Sumatera Utara	N/A	BUMN	PLN
560.	PLTU Pangkalan Susu #4 (FTP2) 200 MW	Sumatera Utara	N/A	BUMN	PLN

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
561.	PLTG Barge Mounted Summit 100 MW	Sumatera Utara	N/A	BUMN	PLN
562.	PLTG Barge Mounted Summit 250 MW	Sumatera Utara	N/A	BUMN	PLN
563.	PLTGU Sumbagut-1 Peaker 250 MW	Sumatera Utara	2,13	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
564.	PLTU Summit-1 300 MW	Sumatera Utara	4,20	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN
565.	PTMPD Nias (ORC) 12 MW	Sumatera Utara	0,30	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	PLN

E. Minyak dan Gas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
1.	Pembangunan Pipa Gas	Papua Barat	3,67	BUMN	Bappenas
B. Wilayah Maluku					
C. Wilayah Nusa Tenggara					
D. Wilayah Sulawesi					
2.	Pembangunan Pipa Gas	Sulawesi Barat	3,41	BUMN	Bappenas
E. Wilayah Kalimantan					
3.	Pembangunan Pipa Gas Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	3,40	BUMN	Bappenas
F. Wilayah Jawa-Bali					
4.	Market Expansion Jawa Bagian Tengah dan Timur (Semarang, Jogjakarta, Solo)	Jawa Tengah	2,62	BUMN	PGN
5.	Inland Mini LNG Jawa Timur	Jawa Timur	2,62	BUMN	PGN
6.	Market Extension Jawa Bagian Timur	Jawa Timur	2,62	BUMN	PGN
G. Wilayah Sumatera					
7.	Kilang Arun	Aceh	0,88	BUMN	PGN, Bappenas
8.	Mini LNG Rub Batam-Jatim-NTT	Kep. Riau	3,15	BUMN	PGN
9.	Pipa Transmisi Natuna-Jawa	Kep. Riau	3,15	BUMN	PGN
10.	PSRU Lampung	Lampung	3,15	BUMN	PGN
11.	Pipa Distribusi Duri - Dumai	Riau	3,15	BUMN	PGN
12.	Pipa Transmisi Dumai-Medan	Riau	3,15	BUMN	PGN

F. Pelabuhan

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
1.	Pengembangan Pelabuhan Merauke	Papua	1,50	APBN/APBD	Kemenuh
2.	Pengembangan Pelabuhan Jayapura	Papua	1,00	APBN/APBD	Kemenuh

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
3.	Pembangunan Faspel Laut Agats	Papua	0,16	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
4.	Pembangunan Faspel Laut Bade	Papua	0,24	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
5.	Pembangunan Faspel Laut Depapre	Papua	0,25	APBN/APBD	Kemenko Ekon
6.	Pengembangan Pelabuhan Nabire	Papua	0,16	APBN/APBD	Kemenko Ekon
7.	Pengembangan Pelabuhan Wamena	Papua	0,32	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
8.	Pengembangan Pelabuhan Pomako (2015)	Papua	0,14	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
9.	Pengembangan Pelabuhan Serui (2015)	Papua	0,57	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
10.	Pengembangan Pelabuhan Amamapare	Papua	0,13	APBN/APBD	Kemenko Ekon
11.	Pengembangan Pelabuhan Sarmi	Papua	0,17	APBN/APBD	Kemenko Ekon
12.	Pengembangan Pelabuhan Saunek	Papua Barat	0,15	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
13.	Pelabuhan Kokas	Papua Barat	0,15	APBN/APBD	Kemenko Ekon,Bappenas
14.	Pelabuhan Kaimana	Papua Barat	4,80	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
15.	Pembangunan Pelabuhan Iait,Owi	Papua Barat	0,20	APBN/APBD	Pemprow, Bappenas, Kemenko Ekon
16.	Pembangunan Pelabuhan Seget, Sorong	Papua Barat	1,50	APBN/APBD	Pemprow, Kemenuh, Bappenas
17.	Pengembangan Pelabuhan Teminabuan	Papua Barat	0,26	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
18.	Pembangunan Faspel Laut Arar	Papua Barat	0,318	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
19.	Pengembangan Pelabuhan Fak Fak	Papua Barat	0,26	APBN/APBD	Bappenas
B. Wilayah Maluku					
20.	Pengembangan Pelabuhan Ambon	Maluku	1,00	APBN/APBD	Kemenuh
21.	Pelabuhan Container di Paso	Maluku	0,15	APBN/APBD	Bappenas
22.	Pengembangan Pelabuhan Ternate	Maluku	0,16	APBN/APBD	Bappenas
23.	Pembangunan Faspel Laut Kobisonta	Maluku	0,10	APBN/APBD	Bappenas
24.	Pembangunan Faspel Laut Kroing	Maluku	0,15	APBN/APBD	Bappenas
25.	Pembangunan Faspel Laut Romeau	Maluku	0,15	APBN/APBD	Bappenas
26.	Pembangunan Faspel Laut Saumlaki	Maluku	0,12	APBN/APBD	Bappenas
27.	Pembangunan Faspel Laut Tuto Kambong	Maluku	0,10	APBN/APBD	Bappenas
28.	Pembangunan Pelabuhan Areate	Maluku	0,10	APBN/APBD	Bappenas
29.	Pengembangan Pelabuhan Namlea	Maluku	0,01	APBN/APBD	Bappenas
30.	Pengembangan Pelabuhan Dobo	Maluku	0,05	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
31.	Pengembangan Pelabuhan Banda Naira	Maluku	0,06	APBN/APBD	Bappenas
32.	Pengembangan Pelabuhan Batu Goyang/Kalar-kalar	Maluku	0,10	APBN/APBD	Bappenas
33.	Pengembangan Pelabuhan Tulehu	Maluku	0,02	APBN/APBD	Bappenas
34.	Pembangunan Pelabuhan Gebe	Maluku Utara	0,20	APBN/APBD	Bappenas
35.	Pembangunan Faspel Laut Tobelo	Maluku Utara	0,07	APBN/APBD	Bappenas
36.	Pembangunan Faspel Laut Doruba	Maluku Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
37.	Pembangunan Faspel Laut Tidore	Maluku Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
38.	Pembangunan Faspel Laut Yaha	Maluku Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
39.	Pembangunan Pelabuhan Sofifi	Maluku Utara	0,15	APBN/APBD	Bappenas
40.	Pembangunan Pelabuhan Ternate	Maluku Utara	0,20	APBN/APBD	Bappenas
41.	Pembangunan Faspel Laut Kaititi	Maluku Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
42.	Pengembangan Pelabuhan Malbua	Maluku Utara	0,04	APBN/APBD	Bappenas
43.	Pengembangan Pelabuhan Tikong	Maluku Utara	0,02	APBN/APBD	Bappenas
44.	Pembangunan Pelabuhan Khusus di Tanjung Buli	Maluku Utara	0,23	APBN/APBD	Bappenas
45.	Pengembangan Pelabuhan Laut Falabisahaya	Maluku Utara	0,20	APBN/APBD	Bappenas
46.	Pengembangan Pelabuhan Subaim	Maluku Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
47.	Pengembangan Pelabuhan Wayaluar-Obi	Maluku Utara	0,02	APBN/APBD	Bappenas
48.	Pengembangan Pelabuhan Saketa	Maluku Utara	0,02	APBN/APBD	Bappenas
49.	Pengembangan Pelabuhan Bosoa	Maluku Utara	0,03	APBN/APBD	Bappenas
50.	Pengembangan Pelabuhan Matui-Jalolo	Maluku Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
51.	Pengembangan Pelabuhan Labuha/Babang	Maluku Utara	0,18	APBN/APBD	Bappenas
52.	Pengembangan Pelabuhan Morotai	Maluku Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Bappenas
C. Wilayah Nusa Tenggara					
53.	Pengembangan Pelabuhan Lombok	NTB	1,50	APBN/APBD	Kemenhub
54.	Pembangunan Pelabuhan Bima	NTB	0,15	APBN/APBD	Bappenas
55.	Pengembangan Pelabuhan Badas	NTB	0,10	APBN/APBD	Bappenas
56.	Pengembangan Pelabuhan Benete	NTB	0,05	APBN/APBD	Bappenas
57.	Pembangunan Pelabuhan Lendah	NTB	0,41	APBN/APBD	Bappenas
58.	Pembangunan Dermaga Parwisata Ende	NTT	0,07	APBN/APBD	Bappenas
59.	Pembangunan Pelabuhan Pulau Komodo	NTT	0,10	APBN/APBD	Bappenas
60.	Pembangunan Dermaga Parwisata Labuan Bajo	NTT	0,20	APBN/APBD	Bappenas
61.	Pembangunan Dermaga Parwisata Maumere	NTT	0,07	APBN/APBD	Bappenas
62.	Pembangunan Faspel Laut Batutua	NTT	0,10	APBN/APBD	Bappenas
63.	Pembangunan Faspel Laut Pota	NTT	0,10	APBN/APBD	Bappenas
64.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	NTT	1,50	APBN/APBD	Bappenas, Kemenhub
65.	Pengembangan Faspel Laut Marapokot	NTT	0,08	APBN/APBD	Bappenas
66.	Pengembangan Pelabuhan Maritang	NTT	0,05	APBN/APBD	Bappenas
D. Wilayah Sulawesi					
67.	Pengembangan Pelabuhan Baru Makassar	Sulawesi Selatan	1,50	PPP	Bappenas, Kemenhub
68.	Pengembangan Pelabuhan Garongkong	Sulawesi Selatan	1,50	PPP	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
69.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Gorontalo	Gorontalo	0,14	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
70.	Pembangunan Faspel Laut Belang Belang	Sulawesi Barat	0,10	APBN/APBD	Bappenas
71.	Pembangunan Faspel Laut Bajaj	Sulawesi Selatan	0,07	APBN/APBD	Bappenas
72.	Pembangunan Faspel Laut Benteng Selayar	Sulawesi Selatan	0,10	APBN/APBD	Bappenas
73.	Pembangunan Faspel Laut Bungkotok	Sulawesi Tenggara	0,10	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
74.	Pembangunan Pelabuhan bau-bau	Sulawesi Tenggara	0,13	APBN/APBD	Kemenko Ekon
75.	Pembangunan Pelabuhan Raha	Sulawesi Tenggara	0,11	APBN/APBD	Kemenko Ekon
76.	Pembangunan Pelabuhan Hub. Internasional Bitung	Sulawesi Utara	38,50	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas, Kemenhub
77.	Pembangunan Faspel Laut Tahuna	Sulawesi Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
78.	Pengembangan Pelabuhan Pantoloan	Sulawesi Tengah	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Bappenas
E. Wilayah Kalimantan					
79.	Pengembangan Pelabuhan Kumai	Kalimantan Tengah	0,40	BUMN	Kemenko Ekon
80.	Pengembangan Pelabuhan Bumiharjo	Kalimantan Tengah	0,11	BUMN	Kemenko Ekon
81.	Pengembangan Pelabuhan Bagendang	Kalimantan Tengah	0,06	BUMN	Bappenas
82.	Pengembangan Pelabuhan Laut Baratang, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai	Kalimantan Tengah	1,50	Campuran (APBN - BUMN)	Bappenas
83.	Pelabuhan Teluk Melano	Kalimantan Barat	0,43	APBN/APBD	Kemenko Ekon
84.	Pembangunan Pelabuhan Laut Temajak	Kalimantan Barat	0,15	APBN/APBD	Pemprov
85.	Pengembangan Pelabuhan Pontianak	Kalimantan Barat	1,50	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Kemenhub
86.	Pengukuran Alur Pelayaran Pelabuhan Pontianak	Kalimantan Barat	0,05	APBN/APBD	Bappenas
87.	Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin	Kalimantan Selatan	0,12	Campuran (APBN - BUMN)	Bappenas
88.	Pengembangan Pelabuhan Pelahari	Kalimantan Selatan	0,46	Campuran (APBN - BUMN)	Bappenas
89.	Pembangunan Pelabuhan laut Swarangan, Tanah Laut	Kalimantan Selatan	0,10	APBN/APBD	Pemprov
90.	Pengembangan Pelabuhan Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,50	APBN/APBD	Kemenhub
91.	Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebukti)	Kalimantan Selatan	0,11	APBN/APBD	Bappenas
92.	Pengembangan Pelabuhan Palingkaraya	Kalimantan Tengah	1,00	APBN/APBD	Kemenhub
93.	Pembangunan Pelabuhan Pangkajene Bun	Kalimantan Tengah	0,20	APBN/APBD	Bappenas
94.	Pelabuhan Tongkang Bangkuang	Kalimantan Tengah	0,18	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
95.	Pembangunan Pelabuhan Malay	Kalimantan Timur	4,80	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas, Kemenhub
96.	Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan, (Terminal Peti Kemas Karimau)	Kalimantan Timur	0,71	APBN/APBD	Bappenas
97.	Pelabuhan Tarah Groet	Kalimantan Timur	0,16	APBN/APBD	Kemenko Ekon
98.	Pelabuhan Tongkang Tanjung Isau [90 km]	Kalimantan Timur	0,18	APBN/APBD	Kemenko Ekon
99.	Pelabuhan Kuala Samboja	Kalimantan Timur	0,15	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
100.	Pembangunan Pelabuhan Nunukan	Kalimantan Utara	0,70	APBN/APBD	Bappenas
101.	Karpel Sei Nyamuk	Kalimantan Utara	1,50	APBN/APBD	Bappenas
F. Wilayah Jawa-Bali					
102.	Penambahan dermaga dan fasilitas bongkar muat serta perluasan areal Pelabuhan Merak dan Bakauheni	Banten	2,10	BUMN	Bappenas
103.	Pembangunan Pelabuhan Petikemas Bejonegara	Banten	5,00	Campuran (APBN - BUMN)	Kemenko Ekon
104.	Perluasan Pelabuhan Tanjung Priok	DKI Jakarta	36,00	APBN/APBD	Bappenas
105.	Pembangunan Pelabuhan Cilamaya	Jawa Barat	50,10	PPP	Bappenas
106.	Pembangunan Faspel Laut Pamanukan	Jawa Barat	0,10	APBN/APBD	Bappenas
107.	Pembangunan Faspel Laut Pangandaran	Jawa Barat	0,10	APBN/APBD	Bappenas
108.	Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang	Jawa Tengah	0,67	BUMN	Kemenko Ekon, Bappenas
109.	Pembangunan Pelabuhan Wonogiri di Kecamatan Parangupito	Jawa Tengah	1,92	BUMN	Bappenas
110.	Pembangunan Faspel Laut Batang	Jawa Tengah	0,10	APBN/APBD	Bappenas
111.	Pengembangan Pelabuhan Cilacap	Jawa Tengah	1,50	APBN/APBD	Kemenhub
112.	Pengembangan Pelabuhan Kendal	Jawa Tengah	0,09	APBN/APBD	Bappenas
113.	Pengembangan Pelabuhan Lamongan	Jawa Timur	2,21	SWASTA	Bappenas
114.	Pengembangan Pelabuhan Probolinggo	Jawa Timur	0,41	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Bappenas
115.	Pengembangan Pelabuhan Branta	Jawa Timur	0,16	APBN/APBD	Kemenko Ekon
116.	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak	Jawa Timur	1,50	APBN/APBD	Kemenhub
117.	Pembangunan Faspel Laut Taddan	Jawa Timur	0,10	APBN/APBD	Bappenas
118.	Pembangunan Faspel Laut Telaga Biru	Jawa Timur	0,10	APBN/APBD	Bappenas
119.	Pengembangan Pelabuhan pariwisata/cruise Tanah ampe	Bali	0,04	PPP	Bappenas
120.	Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kab Buleleng	Bali	0,15	BUMN	Bappenas
G. Wilayah Sumatera					
121.	Perluasan Pelabuhan (houksemawe (Krueng Geukeuli)	Aceh	1,30	PPP	Bappenas
122.	PembangunanPelabuhan Malahayati Banda Aceh	Aceh	1,50	BUMN	Bappenas
123.	Pembangunan Faspel P Banyak	Aceh	0,10	APBN/APBD	Bappenas
124.	Pembangunan Faspel Singkil	Aceh	0,10	APBN/APBD	Bappenas
125.	Pengembangan Pelabuhan Banda Aceh	Aceh	1,50	APBN/APBD	Kemenhub
126.	Pengembangan Pelabuhan Sabang	Aceh	6,00	APBN/APBD	Bappenas
127.	Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu	Bengkulu	0,53	BUMN	Bappenas
128.	Pembangunan Faspel Laut Pasapat	Bengkulu	0,10	APBN/APBD	Bappenas
129.	Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Jambi	3,00	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
130.	Pengembangan Pelabuhan Muntok - Pelabuhan Tj. Berikat (P. Bangka Ruas Tj. Batu - Manggar (P. Belitung)	Kep. Bangka Belitung	1,30	BUMN	Bappenas
131.	Pengembangan Pelabuhan Samudera Tj. Berikat - Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung	0,50	Campuran (APBN - BUMN)	Bappenas
132.	Pembangunan Pelabuhan Sadai (Bangka Selatan)	Kep. Bangka Belitung	0,20	APBN/APBD	Pemprov
133.	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Kalian (Bangka Barat)	Kep. Bangka Belitung	0,25	APBN/APBD	Pemprov
134.	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Batu (Belitung)	Kep. Bangka Belitung	0,20	APBN/APBD	Pemprov
135.	Pengembangan Pelabuhan kontainer Batu Ampar Batam	Kep. Riau	4,55	BUMN	Bappenas
136.	Pengembangan Pelabuhan Kahl (Tanjung Saub)	Kep. Riau	9,00	BUMN	Bappenas
137.	Peningkatan Pelabuhan Tanjung Saub Batam	Kep. Riau	9,00	APBN/APBD	Bappenas, Kemenko Ekon
138.	Penyelesaian Dermaga Penyeberangan Matak Kepulauan Anambas	Kep. Riau	0,20	APBN/APBD	Bappenas
139.	Pengembangan Pelabuhan Pangkal Pinang	Kep. Riau	1,50	APBN/APBD	Kemenhub
140.	Pengembangan Pelabuhan Dompok	Kep. Riau	0,06	APBN/APBD	Bappenas
141.	Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut	Kep. Riau	0,06	APBN/APBD	Bappenas
142.	Pengembangan Pelabuhan Pulau Subi	Kep. Riau	0,05	APBN/APBD	Bappenas
143.	Pengembangan Pelabuhan Letung	Kep. Riau	0,05	APBN/APBD	Bappenas
144.	Pengembangan Pelabuhan Malirko	Kep. Riau	0,20	APBN/APBD	Bappenas
145.	Pengembangan Pelabuhan Panjang	Lampung	1,50	APBN/APBD	Kemenko Ekon
146.	Peningkatan pengembangan Pelabuhan Jeti di Kawasan Industri Tanggamus	Lampung	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kementerian Perindustrian
147.	Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru	Riau	0,26	Campuran (APBN - BUMN)	Bappenas
148.	Perluasan Pelabuhan Dumai	Riau	1,50	APBN/APBD	Kemenko Ekon
149.	Pembangunan Faspel Laut Bagan Siapi-api	Riau	0,20	APBN/APBD	Bappenas
150.	Pembangunan Faspel Laut Batu Parijang	Riau	0,14	APBN/APBD	Bappenas
151.	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton	Riau	0,50	APBN/APBD	Bappenas
152.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur	Sumatera Barat	2,00	APBN/APBD	Bappenas
153.	Satker Pembangunan Faspel Laut Cerocek Paiman	Sumatera Barat	0,12	APBN/APBD	Kemenko Ekon
154.	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api	Sumatera Selatan	15,00	APBN/APBD	Bappenas
155.	Pengembangan Pelabuhan di Palembang	Sumatera Selatan	0,28	APBN/APBD	Bappenas
156.	Hub Kuala Tanjung	Sumatera Utara	33,50	PPP	Bappenas, Kemenhub
157.	Pengembangan Pelabuhan Belawan	Sumatera Utara	3,00	APBN/APBD	Bappenas, Kemenhub

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
1.	Pembangunan Intake SA- Sungai Maro Kota Merauke Tahap III	Papua	0,20	APBN/APBD	Bappenas
2.	Lanjutan Pembangunan Bendung Wariori	Papua Barat	2,00	APBN/APBD	Bappenas
B. Wilayah Maluku					
3.	Ambon <i>Waterfront City</i>	Maluku	2,00	APBN/APBD	Bappenas
4.	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pulau Seram	Maluku	1,50	APBN/APBD	Bappenas
5.	Pembangunan Waduk Way Apu	Maluku	0,20	APBN/APBD	Bappenas
6.	Pembangunan Bendung D.I Bula (Fufu)	Maluku	0,15	APBN/APBD	Bappenas
7.	Pembangunan Bendung D.I Werinama, Sungai Muliha (lanjutan)	Maluku	3,00	APBN/APBD	Bappenas
8.	Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Pulau Buru	Maluku	0,20	APBN/APBD	Bappenas
9.	Pembangunan D.I. Way Simi Buru Selatan	Maluku	0,10	APBN/APBD	Bappenas
10.	Pembangunan Irigasi Lahai Kering Kee, Tanimbar Maluku Tenggara Barat	Maluku	0,10	APBN/APBD	Bappenas
11.	Ambon <i>Waterfront City</i>	Maluku	2,00	APBN/APBD	Bappenas
12.	Pembangunan Bendung dan Jar. Irigasi D.I. Jani Halmahera Barat	Maluku Utara	0,40	APBN/APBD	Bappenas
13.	Pembangunan Bendung dan Jaringn Irigasi Di. Leleseng Halmahera Timur	Maluku Utara	0,40	APBN/APBD	Bappenas
14.	Pembangunan Bendung Akelamo (<i>Multi - Years Contract</i>) Tahap III	Maluku Utara	1,00	APBN/APBD	Bappenas
15.	Pembangunan Embung Pulau Sanana Kab. Kepulauan Sula	Maluku Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
C. Wilayah Nusa Tenggara					
16.	Pembangunan Bendungan Tanju dan Bendungan Mita	NTB	0,36	APBN/APBD	Bappenas
17.	Pembangunan Bendungan Krekeh Sumbawa	NTB	0,30	APBN/APBD	Bappenas
18.	Pembangunan Jaringan Irigasi Di. Rababaka Kompleks	NTB	0,10	APBN/APBD	Bappenas
19.	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Dodokan Lombok Barat	NTB	0,10	APBN/APBD	Bappenas
20.	Raknamo Dam and Kolhua Dam	NTT	1,20	APBN/APBD	Kemenko Ekon., Bappenas
21.	Pembangunan Bendungan Napunggete, Kab. Sikka	NTT	0,20	APBN/APBD	Bappenas
22.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Mbatig Kab. Sumba Timur	NTT	0,30	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
23.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng	NTT	0,30	APBN/APBD	Bappenas
D. Wilayah Sulawesi					
24.	Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan	Gorontalo	3,80	APBN/APBD	Bappenas
25.	Pembangunan Bendungan Torere	Sulawesi Selatan	0,65	APBN/APBD	Pemprov
26.	Pembangunan Bendungan Bontosunggu	Sulawesi Selatan	0,60	APBN/APBD	Pemprov
27.	Pembangunan Bendungan Passellorang	Sulawesi Selatan	0,75	APBN/APBD	Pemprov
28.	Pembangunan Bendungan Kelara Karalloe	Sulawesi Selatan	2,70	APBN/APBD	Bappenas
29.	Bendungan Lolak (Kapasitas 16 juta m ³)	Sulawesi Utara	4,50	APBN/APBD	Bappenas
30.	Peningkatan Kapasitas Sumber Air Tendeiki 1259,05 ltr/detik (Kawasan Industri Bitung)	Sulawesi Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kementerian Perindustrian
E. Wilayah Kalimantan					
31.	Pembangunan Waduk Tapin	Kalimantan Selatan	0,60	APBN/APBD	Bappenas
32.	Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai	Kalimantan Selatan	0,10	APBN/APBD	Bappenas
33.	Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Barito	Kalimantan Selatan	0,20	APBN/APBD	Bappenas
34.	Bendungan Muara Juloi	Kalimantan Tengah	4,50	APBN/APBD	Bappenas
35.	Pembangunan Waduk Wain untuk Kebutuhan Air Baku	Kalimantan Timur	0,29	APBN/APBD	KEMENKO
36.	Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	0,15	APBN/APBD	Bappenas
37.	Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Serangan	Kalimantan Timur	0,10	APBN/APBD	Bappenas
38.	Pembangunan Embung Aji Baden Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	0,10	APBN/APBD	Bappenas
39.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Tanjung Buka	Kalimantan Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
40.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Serunggur	Kalimantan Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
41.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak Tanah Kuning	Kalimantan Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
42.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Teres Baru	Kalimantan Utara	0,10	APBN/APBD	Bappenas
F. Wilayah Jawa-Bali					
43.	Pengendalian Banjir Sungai Chujung Cidanau Cidurian	Banten	0,02	APBN/APBD	Bappenas
44.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cisadane	Banten	0,01	APBN/APBD	Bappenas
45.	Pembangunan Waduk Sindang Heula Kab. Serang	Banten	0,60	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Bappenas
46.	Pembangunan Waduk Karangtulan, Sleman	DI Yogyakarta	0,22	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
47.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kamijoro	DI Yogyakarta	0,10	APBN/APBD	Bappenas
48.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Poncosari	DI Yogyakarta	0,10	APBN/APBD	Bappenas
49.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Karangtulin	DI Yogyakarta	0,10	APBN/APBD	Bappenas
50.	National Capital Integrated Coastal Development Tahap II (Pembangunan Giant Sea Wall Sisi Barat dan Pengembangan Reklamasi)	DKI Jakarta	22,00	PPP	Pemprov
51.	National Capital Integrated Coastal Development Tahap I (Proyek Penguatan Tanggul Eksisting Pesisir Pantai Jakarta, Percepatan Pembangunan Sanitasi, Perbaikan Kualitas Air)	DKI Jakarta	20,00	APBN/APBD	Pemprov
52.	Pembangunan <i>water conveyer</i> dari Waduk Karian	DKI Jakarta	4,50	APBN/APBD	Pemprov
53.	Pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi	Jawa Barat	1,20	APBN/APBD	Bappenas
54.	Pembangunan Waduk Cipanas	Jawa Barat	0,40	APBN/APBD	Bappenas
55.	Pengendalian Banjir Sungai Citarum	Jawa Barat	1,25	APBN/APBD	Bappenas
56.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Leuwigoong Kab. Garut	Jawa Barat	0,11	APBN/APBD	Bappenas
57.	Pembangunan Waduk Jlantah	Jawa Tengah	2,00	APBN/APBD	Bappenas
58.	Pembangunan Waduk Matenggeng	Jawa Tengah	1,50	APBN/APBD	Bappenas
59.	Pembangunan Waduk Bener	Jawa Tengah	2,50	APBN/APBD	Bappenas
60.	Pembangunan Waduk Bendo	Jawa Timur	5,00	APBN/APBD	Bappenas
61.	Pembangunan Bendungan Wonodadi, Pacitan	Jawa Timur	0,40	APBN/APBD	Bappenas
62.	Pembangunan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	0,20	APBN/APBD	Bappenas
63.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Mrican Kanan	Jawa Timur	0,20	APBN/APBD	Bappenas
64.	Pembangunan Waduk Lambuk, Tabanan	Bali	0,30	APBN/APBD	Bappenas
65.	Pembangunan Waduk Telaga Waja, Karangasem	Bali	0,20	APBN/APBD	Bappenas
66.	Pembangunan Waduk Titab Kab. Buleleng	Bali	0,20	APBN/APBD	Bappenas
67.	Pembangunan Waduk Musara Unda, Klungkung	Bali	0,20	APBN/APBD	Bappenas
G. Wilayah Sumatera					
68.	Pembangunan Bendungan Jambo Aye	Aceh	5,39	APBN/APBD	Bappenas
69.	Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lhok Guei	Aceh	0,20	APBN/APBD	Bappenas
70.	Pembangunan Waduk Kreuto	Aceh	1,03	APBN/APBD	Bappenas
71.	Pembangunan Waduk Rukoh dan Tiro Pidie	Aceh	0,80	APBN/APBD	Bappenas
72.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Cawang Kidau	Bengkulu	0,10	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
73.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Segitim Kiri Kota Agung	Bengkulu	0,10	APBN/APBD	Bappenas
74.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Shulak Detas	Jambi	0,20	APBN/APBD	Bappenas
75.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Batang Asai	Jambi	0,10	APBN/APBD	Bappenas
76.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Bendung Renah Pemetik	Jambi	0,10	APBN/APBD	Bappenas
77.	Pembangunan Bendung Pice Besar D.I. Selingsing di Kab. Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung	0,30	APBN/APBD	Bappenas
78.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Selingsing	Kep. Bangka Belitung	0,10	APBN/APBD	Bappenas
79.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Dungun Raya	Kep. Bangka Belitung	0,10	APBN/APBD	Bappenas
80.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Pergan/Serdang	Kep. Bangka Belitung	0,10	APBN/APBD	Bappenas
81.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Batu Betumpang	Kep. Bangka Belitung	0,10	APBN/APBD	Bappenas
82.	Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam	Kep. Riau	0,06	APBN/APBD	Bappenas
83.	Pembangunan Estuari Dam Busung	Kep. Riau	0,30	APBN/APBD	Bappenas
84.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kedarik	Kep. Riau	0,10	APBN/APBD	Bappenas
85.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tapau	Kep. Riau	0,10	APBN/APBD	Bappenas
86.	Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam	Kep. Riau	0,06	APBN/APBD	Bappenas
87.	Pembangunan Waduk Sukaraja III	Lampung	0,30	APBN/APBD	Bappenas
88.	Pembangunan Waduk Segalamider, Lampung Tengah	Lampung	0,30	APBN/APBD	Bappenas
89.	Pembangunan Waduk Way Sekampung, Pringsewu	Lampung	0,40	APBN/APBD	Bappenas
90.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Jabung	Lampung	0,10	APBN/APBD	Bappenas
91.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Adi Mulyo	Lampung	0,20	APBN/APBD	Bappenas
92.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Okok	Riau	0,20	APBN/APBD	Bappenas
93.	Pembangunan Chek Dam Ahur Sungai Silam Dusun Bangkinang Barat Kab. Kampar	Riau	0,20	APBN/APBD	Bappenas
94.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Batang Sinamar	Sumatera Barat	0,10	APBN/APBD	Bappenas
95.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Tarusan	Sumatera Barat	0,20	APBN/APBD	Bappenas

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
96.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lempuing	Sumatera Selatan	0,10	APBN/APBD	Bappenas
97.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lintang Kiri	Sumatera Selatan	0,10	APBN/APBD	Bappenas
98.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Konering	Sumatera Selatan	0,10	APBN/APBD	Bappenas
99.	Pembangunan Bendungan Lan Simeme	Sumatera Utara	1,15	APBN/APBD	Bappenas
100.	Pembangunan Waduk Lausimeme Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	1,05	APBN/APBD	Bappenas
101.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Bendung Sei Padang D.I. Bajayu, D.I. Paya Lombang dan D.I. Langau	Sumatera Utara	0,20	APBN/APBD	Bappenas

H. Pengolahan Sampah

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
B. Wilayah Maluku					
1.	Pembangunan Pengolahan Sampah di Sofifi	Maluku Utara	1,00	APBN/APBD	Pemprov
C. Wilayah Nusa Tenggara					
D. Wilayah Sulawesi					
2.	Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP)	Sulawesi Selatan	4,00	APBN/APBD	Bappenas
3.	Solid Waste Final Disposal and Treatment Facility-Bogor dan Depok Area	Sulawesi Utara	1,50	APBN/APBD	Bappenas
E. Wilayah Kalimantan					
4.	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan TPA Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	0,70	PPP	Bappenas
F. Wilayah Jawa-Bali					
5.	DKI Jakarta Sewerage System	DKI Jakarta	5,40	PPP	Bappenas
6.	Solid Waste Final Disposal and Treatment Facility-Bogor dan Depok Area	Jawa Barat	0,60	PPP	Bappenas
7.	Solid Waste Treatment dan Final Disposal - Putri Cempo Mojokerto, Surakarta	Jawa Tengah	0,30	PPP	Bappenas
G. Wilayah Sumatera					
8.	Pengolahan Limbah Padat Kota Padang	Sumatera Barat	0,70	APBN/APBD	Pemprov
9.	Pembangunan TPA regional Kabupaten Solok	Sumatera Barat	0,45	APBN/APBD	Pemprov
10.	TPA Regional (Kartamantul), Pyungan	DI Yogyakarta	0,85	APBN/APBD	Bappenas

I. Perkeretaapian

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
B. Wilayah Maluku					
C. Wilayah Nusa Tenggara					
D. Wilayah Sulawesi					
1.	Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Gorontalo	Gorontalo	2,50	APBN/APBD	Pemprov
2.	Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare-Pare	Sulawesi Selatan	8,00	APBN/APBD	Bappenas
3.	Pembangunan KA Perkotaan Mamujuasafa	Sulawesi Selatan	8,60	APBN/APBD	Bappenas
E. Wilayah Kalimantan					
4.	Jalur KA Pontianak-Mempawah-Singkawang	Kalimantan Barat	12,00	APBN/APBD	Kemenhub
5.	Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya	Kalimantan Selatan	14,00	APBN/APBD	Kemenhub
6.	Jalur KA Batubara Tanjung Barabai-Martapura-Banjarmasin	Kalimantan Selatan	15,00	APBN/APBD	Kemenhub
7.	Pirukcaho-Bangkaung-Mangkatip Raiheay (290 km)	Kalimantan Tengah	25,00	PPP	Kemenhub
8.	Jalur KA Batubara Bangkoang-Lupak Dalam	Kalimantan Tengah	14,00	APBN/APBD	Kemenhub
9.	Jalur KA Batubara Tanjung-Burtek-Muara Teweh	Kalimantan Tengah	20,00	APBN/APBD	Kemenhub
10.	Jalur KA Batubara Kudangan-Kumai	Kalimantan Tengah	14,00	APBN/APBD	Kemenhub
11.	Jalur KA Batubara Muara Wahau-Lubuk Tutung	Kalimantan Timur	14,00	APBN/APBD	Kemenhub
12.	Jalur KA Batubara Bontang-Sangkulirang-Tanjung Releap	Kalimantan Timur	8,50	APBN/APBD	Kemenhub
13.	Jalur KA Baru Murug Raya menuju Balikpapan	Kalimantan Timur	0,24	APBN/APBD	Kemenhub
F. Wilayah Jawa-Bali					
14.	Kereta Api Akses Bandara Soekarno Hatta - Halim Perdanakusumah	Banten	25,70	PPP	Kemenko Ekon. Bappenas
15.	Peningkatan Kapasitas Jalur Ganda Serpong-Maja-Rangkasbitung-Merak	Banten	0,02	APBN/APBD	Kemenhub
16.	Kereta Api Akses Pelabuhan Bojonegara, Merak	Banten	0,67	APBN/APBD	Kemenhub
17.	Revitalisasi Stasiun Kereta Api Yogyakarta dan Trotoar Pejalan Kaki Malioboro	DI Yogyakarta	10,50	PPP	Bappenas
18.	Pembangunan MRT dan Monorail Jakarta	DKI Jakarta	30,00	PPP	Bappenas
19.	Kereta Api antar Kota (Peningkatan Kapasitas) Jalur Baru Lingkar Luar Jabodetabek (Parungpanjang-Nambo-Cikarang-Tj. Priok/Kaliharjo)	DKI Jakarta	25,10	APBN/APBD	Kemenhub
20.	Peningkatan Kapasitas Jalur Ganda Manggarai-Cikarang	DKI Jakarta	3,00	APBN/APBD	Bappenas, Kemenhub
21.	Pembangunan Kereta Api Layang Ruas Timur (11,1 km) dan Barat (14,3 km)	DKI Jakarta	9,00	APBN/APBD	Pemprov
22.	Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung	DKI Jakarta	58	APBN/APBD	Bappenas
23.	Rel Kereta Api Terintegrasi Gelebang, Bandung	Jawa Barat	1,40	PPP	Bappenas
24.	Monorail Kota Bandung	Jawa Barat	0,67	PPP	Bappenas, Kemenhub

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
25.	Monorail Bandung Raya (Sumedang-Kota Bandung-Cimahy-Kab. Bandung)	Jawa Barat	15,00	SWASTA	Pemprov
26.	Kereta Api Akses Pelabuhan Cilamaya	Jawa Barat	5,00	APBN/APBD	Kemenhub
27.	Kereta Api Akses Bandara Kertajati	Jawa Barat	4,50	APBN/APBD	Kemenhub
28.	Kereta Api Akses Pelabuhan Cirebon/Cangkring	Jawa Barat	5,00	APBN/APBD	Kemenhub
29.	Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Cirebon-Troyok)	Jawa Barat	5,60	APBN/APBD	Kemenhub
30.	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang)	Jawa Barat	0,15	APBN/APBD	Kemenhub
31.	Kereta Api Akses Pelabuhan Tanjung Emas	Jawa Tengah	5,00	APBN/APBD	Kemenhub, Bappenas
32.	Jalur Ganda Solo - Madiun (97 km)	Jawa Tengah	2,80	APBN/APBD	Kemenhub
33.	Kereta Api Perkotaan Elektrifikasi Yogyakarta-Solo-Semarang	Jawa Tengah	3,40	APBN/APBD	Kemenhub
34.	Kereta Api Perkotaan Semarang	Jawa Tengah	3,50	APBN/APBD	Kemenhub
35.	Pembangunan Double Track Lintas Utara Jawa (Semarang-Bojonegara)	Jawa Tengah	0,14	APBN/APBD	Kemenhub
36.	Peningkatan Kapasitas Jalur Ganda Purwokerto-Kroya-Kutoarjo	Jawa Tengah	3,00	APBN/APBD	Kemenhub
37.	Kereta Api Perkotaan Surabaya (Monorail, Tram)	Jawa Timur	11,70	APBN/APBD	Kemenhub
38.	Jalur Kereta Api Double Track Ke Dermaga Tanjung Perak	Jawa Timur	5,00	APBN/APBD	Kemenhub
39.	Kereta Api Madiun-Surabaya (165 km Double Track)	Jawa Timur	5,20	APBN/APBD	Kemenhub
40.	Kereta Api Akses Pelabuhan Teluk Lamong	Jawa Timur	5,00	APBN/APBD	Kemenhub
G. Wilayah Sumatera					
41.	Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Antar Kota Sigli-Bireun-Ihukseumawe 172 Km	Aceh	5,20	PPP	Bappenas
42.	Jalur KA Batubara Muara Enim – Pulau Baai (230 km)	Bengkulu	40,80	PPP	Bappenas
43.	Pembangunan Monorail Batam	Kep. Riau	2,74	PPP	Bappenas
44.	Pembangunan Jalur KA Rejosari-Tarahan	Lampung	5,60	APBN/APBD	Kemenhub
45.	Padang Monorail	Sumatera Barat	4,65	PPP	Bappenas
46.	Pembangunan Jalur KA Shortcut Padang-Solek	Sumatera Barat	10,00	APBN/APBD	Kemenhub, Kemenko Ekon
47.	Monorail Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	5,50	PPP	Bappenas
48.	Proyek Pembangunan Rel Kereta Api Muara Enim-Tanjung Carat (Tanjung Api-Api) dan Pelabuhan Batu Bara Tanjung Carat	Sumatera Selatan	34,22	PPP	Kemenko Ekon, Bappenas
49.	Jalur KA Tanjung Enim - Lampung	Sumatera Selatan	17,01	Campuran [APBN - BUMN]	Kemenhub
50.	Pembangunan Jaringan Rel KA Kertapati-Sinjang-Tanjung Api-Api	Sumatera Selatan	25,00	APBN/APBD	Kemenhub

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
51.	Kereta Api Layang Medan - Kualanamu	Sumatera Utara	15,00	APBN/APBD	
52.	Monorail Kota Medan	Sumatera Utara	5,00	APBN/APBD	
53.	Arsikabo - Medan Double Track	Sumatera Utara	1,10	APBN/APBD	Kemenhub
54.	Jalur KA Bandar Tinggi Panihalan – Kuala Tanjung (22,15 km)	Sumatera Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kemenhub, Kementerian Perindustrian
55.	Jalur KA KKK Sei Mangkei – Sepur Simpang (2,9 Km)	Sumatera Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kemenhub, Kementerian Perindustrian
56.	Peningkatan Rel Jalur KA Gunung Bayu – Perlanaan (4,15 km)	Sumatera Utara	N/A	APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA	Kemenhub, Kementerian Perindustrian

J. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
1.	Pembangunan IPA Reservoir dan Unit Distribusi Kab. Mimika	Papua	0,04	APBN/APBD	Kemenko Ekon
2.	Pembangunan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sumber Air Sungai Maro Untuk Kota Merauke (400 lt/dt)	Papua	0,55	APBN/APBD	Bappenas
3.	Pembangunan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Kab. Teluk Bintuni	Papua Barat	1,00	APBN/APBD	Bappenas
B. Wilayah Maluku					
C. Wilayah Nusa Tenggara					
4.	SPAM Kabupaten Ende	NTB	0,85	APBN/APBD	Bappenas
5.	Pembangunan IPA Kab. Kupang (100 l/s)	NTT	0,11	APBN/APBD	Kemenko Ekon
D. Wilayah Sulawesi					
6.	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sumbaselo	Sulawesi Barat	1,50	APBN/APBD	Bappenas
7.	Pembangunan SPAM Mamminasata	Sulawesi Selatan	0,60	APBN/APBD	Bappenas
E. Wilayah Kalimantan					
8.	Pengembangan SPAM Kota Singkawang	Kalimantan Barat	1,00	APBN/APBD	Pemprov
9.	Pembangunan Intake, Bangunan Pelengkap dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Intan Banjar SPAM Regional Banjar Bakula (Lanjutan Tahap IV)	Kalimantan Selatan	1,20	APBN/APBD	Kemenko Ekon
10.	Pembangunan Sistem Air Baku Regional Banjarbakula Kapasitas 7800 l/det	Kalimantan Selatan	1,00	APBN/APBD	Bappenas
F. Wilayah Jawa-Bali					
11.	Pembangunan Transmisi Pipa SPAM hingga Muarekorang	DKI Jakarta	2,80	SWASTA	Pemprov

No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
12.	Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi, dan Karawang (Kanal Tarum Barat 5.000 l/s)- BOT	DKI Jakarta	5,20	APBN/APBD	Kemenko Ekon
13.	Air Minum Pondok Gede, Bekasi	Jawa Barat	0,20	PPP	Bappenas
14.	Pengembangan SPAM Jatiluhur Tahap 2	Jawa Barat	2,40	APBN/APBD	Bappenas
15.	SPAM Kota Semarang Barat	Jawa Tengah	0,83	PPP	Bappenas
16.	SPAM Bali Selatan	Bali	3,40	PPP	Bappenas
17.	Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Mata Air Gungayun Klungkung - 40 l/s	Bali	1,10	APBN/APBD	Kemenko Ekon
18.	Pembangunan IPA Ayung (400 l/s) dan Paned (300 l/s)	Bali	0,16	APBN/APBD	Kemenko Ekon
19.	Pembangunan IPA Petanu (Tukad Petanu, Kabupaten Gianyar, Badung, dan Denpasar) 300 l/s	Bali	0,11	APBN/APBD	Kemenko Ekon
G. Wilayah Sumatera					
20.	Pembangunan Pekanbaru <i>Water Supply</i>	Riau	1,50	PPP	Bappenas
21.	Pengembangan SPAM Kota Padang	Sumatera Barat	0,30	PPP	Bappenas
22.	SPAM Agam Timur dan Bukit Tinggi	Sumatera Barat	0,17	PPP	Bappenas
K. Telematika					
No.	Nama Proyek	Provinsi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Skema Pembiayaan	Lembaga
A. Wilayah Papua					
1.	Pembangunan Jaringan <i>Backbone</i> Serat Optik di Koridor Maluku - Papua (2015)	Papua	2,50	BUMN	Kemenko Ekon
2.	Palapa Ring di Papua (2015)	Papua	0,62	APBN/APBD	Kemenko Ekon
3.	Palapa Ring di Papua Barat	Papua Barat	0,47	APBN/APBD	Kemenko Ekon, Kominfo
B. Wilayah Maluku					
4.	Palapa Ring di Maluku (2015)	Maluku	0,539	APBN/APBD	Kemenko Ekon
5.	Palapa Ring di Maluku Utara (2015)	Maluku Utara	0,093	APBN/APBD	Kemenko Ekon
C. Wilayah Nusa Tenggara					
D. Wilayah Sulawesi					
E. Wilayah Kalimantan					
F. Wilayah Jawa-Bali					
G. Wilayah Sumatera					
6.	Sumatera Barat <i>Information Exchange</i> (ITI SIX) Project	Sumatera Barat	2,50	APBN/APBD	Pemprov

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN
2015-2019

MATRIK PROGRAM / KEGIATAN DAN PENDANAAN BKPM TAHUN 2015 - 2019

PROGRAM / KEGIATAN	SARANAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAJINTA BKPM	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKPM dalam mendukung tugas dan fungsi BKPM		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dijanjikan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	148.57	149.59	162.01	163.11	171.08	794.35		
				Dilaksanakan	B	B	B	A	A								
	Pengawasan/pemantauan/ pengontrolan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM	1. Penyelenggaraan pengawasan/pemantauan/ pengontrolan dan evaluasi IKPM terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM	Jumlah laporan pengawasan/pemantauan/ pengontrolan	Dilaksanakan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	3.95	3.95	4.35	4.35	4.57	21.17	Inspekturat (Eselon II) Birodit	
		2. Penulisan dan audit pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM	Jumlah laporan penulisan dan audit	Dilaksanakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan								
		3. Penulisan dan audit pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM	Jumlah laporan penulisan dan audit	Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen								
		INDIKATOR: - Survei kepuasan kepada pengguna - Penilaian institusi yang berwenang															

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAS INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALAJUTKAN / TIDAK DIKALAJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANSIRASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan SKPM	Meningkatnya kualitas kelembagaan pemerintahan modal	1. Peningkatan kemampuan administrasi kelembagaan modal	Laporan administrasi kelembagaan modal	Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	94.25	94.25	102.15	102.15	107.26	500.06	Biro Umum (Setoran)	
		2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik	Pelayanan publik	Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%								
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPHISE)	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPHISE)	1. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan dan sertifikasi yang terintegrasi ke dalam sistem pelayanan publik	Jumlah pengguna aplikasi pelayanan perizinan dan sertifikasi yang terintegrasi ke dalam sistem pelayanan publik	Dilaksanakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	20.85	21.90	24.00	24.10	25.12	115.97	Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Setoran II Mendiri)	Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (Setoran II Mendiri)
		2. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan dan sertifikasi yang terintegrasi ke dalam sistem pelayanan publik	Jumlah pengguna aplikasi pelayanan perizinan dan sertifikasi yang terintegrasi ke dalam sistem pelayanan publik	Dilaksanakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket								
		3. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan dan sertifikasi yang terintegrasi ke dalam sistem pelayanan publik	Jumlah pengguna aplikasi pelayanan perizinan dan sertifikasi yang terintegrasi ke dalam sistem pelayanan publik	Dilaksanakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket								
		4. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan dan sertifikasi yang terintegrasi ke dalam sistem pelayanan publik	Jumlah pengguna aplikasi pelayanan perizinan dan sertifikasi yang terintegrasi ke dalam sistem pelayanan publik	Dilaksanakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAS INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALAJUTKAN / TIDAK DIKALAJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANSIRASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Pengelolaan data dan informasi pemerintahan modal	Meningkatnya kualitas data dan informasi pemerintahan modal	1. Peningkatan kapasitas data center, DBC, jaringan dan sistem keamanan informasi	Tersedianya data center, DBC, jaringan dan sistem keamanan informasi yang terintegrasi	Dilaksanakan	1 paket	1 paket	1 paket			1.83	1.83	2.08	2.08	2.13	10.10	Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Setoran II Mendiri)	
		2. Peningkatan kapasitas data center, DBC, jaringan dan sistem keamanan informasi	Tersedianya data center, DBC, jaringan dan sistem keamanan informasi yang terintegrasi	Dilaksanakan	1 paket	1 paket	1 paket										
Pengembangan sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Peningkatan kapasitas aparaturnya	Jumlah aparaturnya	Dilaksanakan	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	13.30	13.30	13.21	13.21	13.97	73.99	Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Setoran II Mendiri)	
		2. Peningkatan kapasitas aparaturnya	Jumlah aparaturnya	Dilaksanakan	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang								
		3. Peningkatan kapasitas aparaturnya	Jumlah aparaturnya	Dilaksanakan	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang								
		4. Peningkatan kapasitas aparaturnya	Jumlah aparaturnya	Dilaksanakan	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang								
		5. Peningkatan kapasitas aparaturnya	Jumlah aparaturnya	Dilaksanakan	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang								

PROGRAM / KEGIATAN	BASIS DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARI / DIKALUJUTKAN / TIDAK DIKALUJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2019-2019 (Rp. Miliar)	URUT PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
			6. Penyelenggaraan kegiatan festival SMP/SMK tingkat PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KEM dan PTZ yang menahului SMP/SMK	Jumlah aparaturnya PDP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KEM dan PTZ yang menahului SMP/SMK	Beran		500 orang	500 orang	500 orang	500 orang							
			7. Penyelenggaraan diikat teknis kawasan dan Pengembangan bagi aparaturnya SMP/SMK	Jumlah aparaturnya BHKM yang memiliki kemampuan teknis lainnya	Beran		160 orang	160 orang	160 orang	160 orang							
Peningkatan pelayanan hukum penanaman modal	Meningkatnya pelayanan hukum penanaman modal	INDIKATOR: - Suport hukum pelayanan hukum	1. Pelaksanaan fungsi fungsi pelayanan hukum Jumlah pelaksanaan hukum 2. Peningkatan suporta/tenaga di bidang penanaman modal	Dilaksanakan Dilaksanakan	45 22 karesa	200 25 karesa	200 25 karesa	200 25 karesa	200 25 karesa	200 25 karesa	3.40	3.40	3.75	3.75	3.94	Pusat Bantuan Hukum (Zachia H Maulana)	
Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BHKM	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran BHKM	INDIKATOR: - Survey, laporan penyelenggaraan program dan anggaran - Perencanaan jumlah nilai anggaran	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan 2. Penyusunan rencana anggaran BHKM 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan BHKM	Dilaksanakan Beran	3 dokumen 40 DIPA	3 dokumen 40 DIPA	3 dokumen 40 DIPA	3 dokumen 40 DIPA	3 dokumen 40 DIPA	3.40	3.40	3.75	3.75	3.94	18.34	Biro Perencanaan Program dan Anggaran (Setiawan)	
Pengembangan produk hukum penanaman modal serta peningkatan pelayanan hukum masyarakat, khususnya penanaman modal usaha pimpinan	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kebijakan, keputusan, kebijaksanaan dan pelaksanaan penanaman modal	INDIKATOR: Hasil survei kepuasan stakeholder	1. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal 2. Penyelenggaraan hukum 3. Penyelenggaraan kegiatan dalam ketenagakerjaan	Dilaksanakan Dilaksanakan	3 RPU 60 kegiatan	3 RPU 60 kegiatan	3 RPU 60 kegiatan	3 RPU 60 kegiatan	3 RPU 60 kegiatan	7.00	7.00	7.75	7.75	8.11	37.35	Biro Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Masyarakat dan Tata Usaha (Firdaus)	

PROGRAM / KEGIATAN	SARANA DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARI / DIKALUJUT AS / TIDAK DIKALUJUT AS	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2019-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SIPKRI	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana		Perawatan tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah	Dilanjutkan	100%	100%	100%	100%	100%	7,23	9,00	9,00	9,00	9,00	43,23		
Pembangunan/pragradip/peningkatan sarana dan prasarana	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	Pengembangan sarana dan prasarana	Perawatan tercapainya peningkatan sarana dan prasarana	Dilanjutkan	100%	100%	100%	100%	100%	7,23	9,00	9,00	9,00	9,00	43,23	thru Unsur (Sarnas)	
	INDIKATOR: Terdapat survei kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana		Jumlah sarana pengalihan dari di SIPKRI Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Evaluasi Dipertahankan dan Dikembangkan	410 unit	1633 unit	300 unit	200 unit	200 unit								
PROGRAM PENINGKATAN DATA RANG PERNAMANAN MODAL	Meningkatnya kualitas data rang pernaman modal dan realisasi investasi		Realisasi investasi	Dilanjutkan	519,5 T	594,6 T	678,6 T	792,5 T	933,0 T	434,19	479,10	480,20	510,71	508,22	2.412,42		
			Kasus realisasi penanaman modal di luar Jawa	Dilanjutkan	46,80%	49,10%	52,80%	57,40%	62,00%								
			Kasus realisasi investasi PMOR	Dilanjutkan	33,80%	35,00%	36,30%	37,60%	38,90%								
Peningkatan dukungan kebijakan penanaman modal	Meningkatnya kualitas data rang pernaman modal	1. Perumusan kebijakan dalam rangka perbaikan data rang pernaman modal dan realisasi investasi	Terdapatnya rumusan kebijakan dalam rangka perbaikan data rang pernaman modal dan realisasi investasi	Pengembangan n kegiatan subkegiatan	1 paket rumusan	1 paket rumusan	1 paket rumusan	1 paket rumusan	1 paket rumusan	11,48	12,10	12,70	18,70	18,30	63,28	Directorat Dan egiatan Perumusan Modal	Kepolisian Pemerintah Berkas Berkas Berkas dan SIPKRI
	INDIKATOR: Hasil survei kepuasan pemangku bisnis (Kasus of Being Business) di Indonesia (FIC, WEF, UNCTAD), dan pemangku lainnya	2. Perumusan rekomendasi regulasi sektoral	Jumlah rekomendasi regulasi sektoral	Pengembangan n kegiatan subkegiatan	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi								
		3. Pengembangan sosialisasi kebijakan penanaman modal di dalam negeri	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami kebijakan penanaman modal di dalam negeri	Pengembangan n kegiatan subkegiatan	640 orang	640 orang	640 orang	640 orang	640 orang								
		4. Pengembangan sosialisasi kebijakan penanaman modal di luar negeri	Jumlah kegiatan/pameran sosialisasi kebijakan penanaman modal di luar negeri	Pengembangan n kegiatan subkegiatan	14 kegiatan	125 orang	14 kegiatan	125 orang	14 kegiatan								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Pengembangan potensi perikanan modal daerah	Meningkatnya kualitas informasi potensi perikanan modal di daerah	5. Penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Terdapatnya pelatihan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Baru	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	-	-	Direktorat Pengembangan Perikanan Daerah (DPPM)	
		6. Penataan kebijakan iklim investasi antara lain investasi antara lain investasi antara lain	Terdapatnya penataan kebijakan investasi antara lain	Baru	-	1 laporan	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-		
		1. Penyelenggaraan workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Tidak dilanjutkan	Workshop di 5 daerah dan sosialisasi di 5 daerah	-	-	-	-	7,19	7,50	7,90	8,30	8,70	39,59		
		2. Penyelenggaraan kajian dan penataan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri	Jumlah kajian dan penataan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri	Tidak dilanjutkan	1 kajian dan 15 penataan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3. Pemutakhiran informasi potensi perikanan modal daerah secara elektronik melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah daerah yang pemutakhiran informasi potensi perikanan modal daerah secara elektronik melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Dilaksanakan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	-	-	-	-	-	-		
Pengembangan potensi perikanan modal daerah	Meningkatnya kualitas informasi potensi perikanan modal di daerah	4. Penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Terdapatnya pelatihan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Baru	300 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	-	-	-	-	-	-	Direktorat Pengembangan Perikanan Daerah (DPPM)	
		5. Penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Terdapatnya pelatihan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Baru	300 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	-	-	-	-	-	-		
		6. Penataan kebijakan iklim investasi antara lain investasi antara lain investasi antara lain	Terdapatnya penataan kebijakan investasi antara lain	Baru	-	1 laporan	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-		
		1. Penyelenggaraan workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Tidak dilanjutkan	Workshop di 5 daerah dan sosialisasi di 5 daerah	-	-	-	-	7,19	7,50	7,90	8,30	8,70	39,59		
		2. Penyelenggaraan kajian dan penataan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri	Jumlah kajian dan penataan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri	Tidak dilanjutkan	1 kajian dan 15 penataan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Pengembangan potensi perikanan modal daerah	Meningkatnya kualitas informasi potensi perikanan modal di daerah	5. Penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Terdapatnya pelatihan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Baru	15 daerah	17 daerah	17 daerah	17 daerah	17 daerah	-	-	-	-	-	-	Direktorat Pengembangan Perikanan Daerah (DPPM)	
		1. Pelaksanaan forum komunikasi pengembangan potensi daerah	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pengembangan potensi daerah	Tidak dilanjutkan	6 daerah	-	-	-	-	8,75	9,30	9,60	10,10	10,50	48,15		
		2. Pelaksanaan monitoring di dalam dan luar negeri	Jumlah pelaksanaan monitoring di dalam dan luar negeri	Tidak dilanjutkan	12 daerah (6 daerah/6 luar negeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3. Pelaksanaan pelatihan pengembangan potensi daerah	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengembangan potensi daerah	Tidak dilanjutkan	6 daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4. Pelaksanaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi daerah	Jumlah UTM potensial dan PRA/PMIR yang dikembangkan untuk bermitra usaha	Tidak dilanjutkan	2 kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pengembangan potensi perikanan modal daerah	Meningkatnya kualitas informasi potensi perikanan modal di daerah	5. Pelaksanaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi daerah	Terdapatnya kajian, penelitian, dan pengembangan potensi daerah	Baru	-	1 kajian	-	1 kajian	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Pengembangan Perikanan Daerah (DPPM)	
		6. Pelaksanaan UTM yang berpotensi untuk bermitra usaha	Terdapatnya data UTM yang berpotensi untuk bermitra usaha	Baru	1 buku direktori	1 buku direktori	1 buku direktori	1 buku direktori	1 buku direktori	-	-	-	-	-	-		
		7. Pelaksanaan monitoring di dalam dan luar negeri	Jumlah pelaksanaan monitoring di dalam dan luar negeri	Tidak dilanjutkan	12 daerah (6 daerah/6 luar negeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		8. Pelaksanaan pelatihan pengembangan potensi daerah	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengembangan potensi daerah	Tidak dilanjutkan	6 daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		9. Pelaksanaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi daerah	Jumlah UTM potensial dan PRA/PMIR yang dikembangkan untuk bermitra usaha	Tidak dilanjutkan	2 kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal	Terdapatnya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas INDIKATOR: - Hasil survei kepuasan terhadap strategi promosi investasi	5. Penyelenggaraan penanaman modal pelayanan konsultasi yang diberikan oleh	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi layanan sesuai	Baru		200 perusahaan	200 perusahaan	200 perusahaan	200 perusahaan								
		1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi investasi	Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi	Tidak Dilaksanakan	35 laporan	-	-	-	-	65.14	67.50	69.00	70.00	72.00	343.64	Direktorat Pengembangan Promosi (Promosi)	
		2. Perencanaan strategi promosi investasi	Terdapatnya strategi promosi investasi	Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		3. Penyelenggaraan dan pengembangan media promosi melalui kantor perwakilan BKPM di luar negeri (IPC/Budapest Investment Center) di luar negeri	Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IPC (Budapest Investment Center) di luar negeri	Dilaksanakan	11 IPC	11 IPC	11 IPC	11 IPC	11 IPC								
		4. Pemantauan dan pembinaan kegiatan di IPC	Jumlah kegiatan pemantauan/pembinaan IPC	Dilaksanakan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan								
		5. Pelaksanaan market intelligence	Terdapatnya analisis market intelligence	Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
Promosi penanaman modal efektifitas dan integritas berbasis sektor dan negara	Meningkatnya jumlah asesmen, minat dan komitmen investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas INDIKATOR: - Hasil survei investasi - Jumlah minat dan asesmen	1. Penyelenggaraan promosi melalui berdasarkan sektor dan kawasan ekonomi prioritas	Jumlah kegiatan promosi melalui berdasarkan sektor dan kawasan ekonomi prioritas	Dilaksanakan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	176.33	180.00	182.00	185.00	190.00	918.33	Direktorat Promosi Sektor (Promosi)	
		2. Penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam forum forum internasional di dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal dalam forum forum internasional di dalam dan luar negeri	Baru	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Inventarisasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas	Inventarisasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas	3. Penyelenggaraan promosi melalui media dalam rangka <i>reporting</i> Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	Jumlah media elektronik dan cetak dalam rangka <i>reporting</i> Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	Baru	4 media elektronik dan 1 media cetak	4 media elektronik dan 1 media cetak	4 media elektronik dan 2 media cetak	4 media elektronik dan 2 media cetak	4 media elektronik dan 2 media cetak								
		1. Penyelenggaraan fasilitas promosi daerah	Jumlah kegiatan fasilitas promosi daerah	Dilaksanakan	20 kegiatan	23 kegiatan	25 kegiatan	23 kegiatan	25 kegiatan	15.48	16.50	17.00	17.50	18.00	85.03	Direktorat Fasilitas Daerah (Promosi)	
		2. Penyelenggaraan fasilitas pelayanan penanaman modal dalam negeri atau luar negeri di pusat dan atau di daerah	Jumlah fasilitas pelayanan penanaman modal dalam negeri atau luar negeri di pusat dan atau di daerah	Dilaksanakan	45 kali	50 kali	55 kali	60 kali	60 kali								
		3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri atau luar negeri melalui <i>Tollgate</i> , <i>Trade Portal</i> Investasi Daerah (TIPID), <i>Simulasi Investasi</i> (Simulasi), <i>Meeting, Match Making, One-on-One Meeting</i> , <i>workshop</i> strategi promosi dan fasilitasi penanaman modal promosi investasi daerah	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri atau luar negeri melalui <i>Tollgate</i> , <i>Trade Portal</i> Investasi Daerah (TIPID), <i>Simulasi Investasi</i> (Simulasi), <i>Meeting, Match Making, One-on-One Meeting</i> , <i>workshop</i> strategi promosi dan fasilitasi penanaman modal promosi investasi daerah	Dilaksanakan	15 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN AS / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Peningkatan akses dan pengembangan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan luar negeri	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan luar negeri INDIKATOR: - Jumlah pengunjung website - Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap sarana promosi	1. Penyelenggaraan pameran	Terdapatnya bahan-bahan informasi potensi penanaman modal berupa media cetak dan elektronik	Dilaksanakan	5 jenis bahan pameran	5 jenis bahan pameran	5 jenis bahan pameran	5 jenis bahan pameran	5 jenis bahan pameran	25.97	36.50	36.50	36.50	36.50	151.97	Direktorat Pameran dan Sarana Promosi (Promosi)	
		2. Penyelenggaraan pameran	Jumlah lokasi pameran pada pameran penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri	Dilaksanakan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan								
		3. Penyelenggaraan forum pertemuan	Terdapatnya forum pertemuan berbasis internasional bidang penanaman modal	Dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan								
		4. Penyusunan dan distribusi materi	Jumlah penyusunan dan distribusi materi dalam promosi investasi	Dilaksanakan	2 media	3 media	3 media	3 media	3 media								
		5. Pengadaan investasi e-matching system	Terdapatnya investasi e-matching system	Baru	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		6. Pemeliharaan dan pemutakhiran website	Terdapatnya website penanaman modal	Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal INDIKATOR: Jumlah kesepakatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	1. Partisipasi HKPM pada pertemuan	Jumlah pertemuan/pertemuan dengan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Dilaksanakan	34 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	11.92	12.00	12.40	14.00	14.78	65.10	Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral (Kerjasama)	
		2. Penyelenggaraan forum	Jumlah forum pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Dilaksanakan	27 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN AS / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Kegiatan penanaman modal		3. Penyelenggaraan pertemuan	Jumlah pertemuan internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama penanaman modal	Dilaksanakan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan								
		4. Penyelenggaraan sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi yang menerima kesepakatan hasil perundingan bilateral dan multilateral	Dilaksanakan	125 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang								
		5. Penyelenggaraan policy dialogue	Jumlah rumusan policy dialogue untuk penanaman modal untuk pertemuan penanaman modal pada pertemuan bilateral dan multilateral	Baru		3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan								
		6. Penyelenggaraan forum	Jumlah forum pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal	Dilaksanakan	34 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	6.65	7.00	7.30	7.70	8.00	36.65		
		7. Penyelenggaraan forum	Jumlah forum pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal	Dilaksanakan	34 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan								
Kerjasama regional di bidang penanaman modal	Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal INDIKATOR: Jumlah kesepakatan kerjasama regional di bidang penanaman modal	1. Partisipasi HKPM pada pertemuan	Jumlah pertemuan/pertemuan dengan kerjasama regional di bidang penanaman modal	Dilaksanakan	34 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan							Direktorat Kerjasama Regional (Kerjasama)	
		2. Penyelenggaraan forum	Jumlah forum pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal	Dilaksanakan	34 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan								
Kegiatan penanaman modal		3. Penyelenggaraan sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi yang menerima kesepakatan hasil perundingan regional	Dilaksanakan	225 orang	215 orang	215 orang	215 orang	215 orang								
		4. Penyelenggaraan sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi yang menerima kesepakatan hasil perundingan regional	Dilaksanakan	225 orang	215 orang	215 orang	215 orang	215 orang								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALUJUTKAN / TIDAK DIKALUJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		4. Kajian dan perbaikan penempatan pusat tunggal ASEAN (MEA) dalam rangka peningkatan investasi	Terwujudnya kajian dan evaluasi pemacfaaan pusat tunggal ASEAN (MEA) dalam rangka peningkatan investasi	Baru		1 kajian		1 kajian									
Kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal	Meningkatnya jumlah usaha optimal dari penanaman modal dengan dunia usaha internasional INDIKATOR: Perentase kesepakatan atau MoU yang telah ditandatangani	1. Peningkatan IRPM dalam pertemuan/pertemuan dengan dunia usaha	Jumlah pertemuan/pertemuan dengan dunia usaha	Dilaksanakan	15 laporan	15 laporan	16 laporan	17 laporan	18 laporan	3.29	3.50	3.60	3.80	4.00	18.19	Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional (Kerjasama)	
		2. Peningkatan cakupan ekspedient dan kajian informasi pasar serta potensi investasi di luar negeri	Terwujudnya data investasi Indonesia di luar negeri dan peluang investasi di luar negeri	Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		3. Peningkatan kegiatan penanaman modal dengan investasi di dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan penanaman modal dengan investasi di dalam dan luar negeri	Baru	5 MoU	5 MoU	5 MoU	5 MoU	5 MoU								
		4. Peningkatan sosialisasi yang dilakukan MoU yang telah ditandatangani	Jumlah peserta sosialisasi yang menghadiri MoU yang telah ditandatangani	Baru	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang								
Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	1. Peningkatan kapasitas teknis bagi aparaturnya pelaksanaan pelayanan penanaman modal	Jumlah penyediaan kapasitas teknis bagi aparaturnya pelaksanaan pelayanan penanaman modal	Tidak Dilaksanakan	12 kali	-	-	-	-	3.36	3.40	3.60	3.80	3.90	17.96	Direktorat Pelayanan Aplikasi (Pelayanan)	

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALUJUTKAN / TIDAK DIKALUJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	INDIKATOR: Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan penanaman modal	2. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang diberikan IRPM dan verifikasi persetujuan yang diberikan oleh daerah	Jumlah persetujuan penanaman modal yang diberikan IRPM dan verifikasi persetujuan yang diberikan oleh daerah	Dilaksanakan	5000 persetujuan	5100 persetujuan	5200 persetujuan	5300 persetujuan	5400 persetujuan								
		3. Peningkatan sosialisasi data harmonisasi tata cara pelayanan penanaman modal bagi aparaturnya	Jumlah kegiatan sosialisasi dan harmonisasi tata cara pelayanan penanaman modal bagi aparaturnya	Dilaksanakan	25 kali	25 kali	27 kali	29 kali	30 kali								
		4. Peningkatan sosialisasi yang dilakukan MoU yang telah ditandatangani	Jumlah peserta sosialisasi yang menghadiri MoU yang telah ditandatangani	Dilaksanakan	-	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang								
		5. Peningkatan sosialisasi yang dilakukan MoU yang telah ditandatangani	Jumlah peserta sosialisasi yang menghadiri MoU yang telah ditandatangani	Dilaksanakan	-	12000 konsultasi	12000 konsultasi	12000 konsultasi	12000 konsultasi								
Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	1. Peningkatan kapasitas teknis bagi aparaturnya pelaksanaan pelayanan penanaman modal	Jumlah penyediaan kapasitas teknis bagi aparaturnya pelaksanaan pelayanan penanaman modal	Tidak Dilaksanakan	22 kali	-	-	-	-	5.90	4.10	4.20	4.40	4.50	16.12	Direktorat Pelayanan Aplikasi (Pelayanan)	Kegiatan Pelayanan Pasca-MoU (Pelayanan)

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALUJUTKAN / TIDAK DIKALUJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	INDIKATOR: Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan perikanan modal	2. Pengembangan pelayanan perikanan modal yang diikutsertakan IKM dan verifikasi perikanan yang diikutsertakan oleh daerah	Jumlah perikanan perikanan modal yang diikutsertakan IKM dan verifikasi perikanan yang diikutsertakan oleh daerah	Dilaksanakan	4000 perikanan	4200 perikanan	4400 perikanan	4700 perikanan	5000 perikanan								
		3. Strukturisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perikanan modal bagi aparat pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota serta KEP/KUPB/KAP ET	Jumlah kegiatan sosialisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perikanan modal bagi aparat pemerintah propinsi dan kabupaten/kota serta KEP/KUPB/KAP ET	Dilaksanakan	15 kali	20 kali	20 kali	25 kali	25 kali								
		4. Penyusunan pedoman pembinaan perikanan perikanan perikanan perikanan modal	Jumlah pedoman pembinaan perikanan perikanan perikanan modal	Dilaksanakan	-	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku								
		5. Pengembangan sosialisasi pedoman tata cara pembinaan perikanan perikanan modal	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami tata cara pembinaan perikanan perikanan modal	Dilaksanakan	-	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang								
Peningkatan kualitas pelayanan perikanan modal	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas perikanan modal INDIKATOR: Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan fasilitas	1. Peningkatan kapasitas teknis bagi aparat perikanan perikanan modal 2. Pengembangan pelayanan fasilitas perikanan modal	Jumlah peningkatan kapasitas teknis bagi aparat perikanan perikanan modal Jumlah kegiatan pembinaan fasilitas perikanan modal	Tidak Dilaksanakan	8 materi	-	-	-	-	3,49	3,70	3,80	4,00	4,20	19,19	Direktorat Pelayanan Fasilitas (Pelayanan)	
				Dilaksanakan	1000 peserta	990 peserta	1030 peserta	1100 peserta	1150 peserta								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALUJUTKAN / TIDAK DIKALUJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	perikanan modal	3. Pengembangan Harmonisasi/koordinasi tentang tata cara pelayanan fasilitas perikanan modal bagi dunia usaha dan aparat pemerintah baik di dalam maupun luar negeri	Harmonisasi/koordinasi tata cara pelayanan fasilitas perikanan modal	Baru	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		4. Penyusunan pedoman verifikasi perikanan fasilitas perikanan modal	Jumlah pedoman verifikasi perikanan fasilitas perikanan modal	Dilaksanakan	1 buku pedoman	1 buku pedoman	1 buku pedoman	1 buku pedoman	1 buku pedoman								
		5. Pengembangan sosialisasi tata cara pembinaan fasilitas perikanan modal	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami tata cara pembinaan fasilitas perikanan modal	Baru	-	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang								
Pengendalian pelaksanaan perikanan modal Wilayah I	Mendorong realisasi perikanan modal di Wilayah I INDIKATOR: Meningkatnya kualitas perikanan modal di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung	1. Peningkatan realisasi perikanan modal yang terjamin di Wilayah I 2. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah I 3. Pengembangan kegiatan perikanan modal yang terjamin di Wilayah I	Nilai realisasi perikanan modal yang terjamin di Wilayah I Jumlah perikanan modal di Wilayah I Jumlah kegiatan perikanan modal di Wilayah I	Dilaksanakan	Rp. 77,93 triliun	Rp. 80,20 triliun	Rp. 101,82 triliun	Rp. 111,20 triliun	Rp. 105,93 triliun	7,36	7,36	8,16	8,56	8,96	40,56	Direktorat Wilayah I (Dakak)	
				Dilaksanakan	10 perikanan	10 perikanan	10 perikanan	10 perikanan	10 perikanan								
				Dilaksanakan	440 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		4. Penyelenggaraan pembinaan pengalangan investasi kepada perusahaan PMA/PMDI	Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengalangan investasi kepada perusahaan PMA/PMDI	Dilaksanakan.		-	1 kegiatan	-	1 kegiatan								
		5. Penyelenggaraan workshop LKPM secara online bagi aparaturnya daerah dan penanam modal di Wilayah I	Jumlah peserta workshop LKPM secara online bagi aparaturnya daerah dan penanam modal di Wilayah I	Baru	240 orang	220 orang	230 orang	250 orang	230 orang								
		6. Penyelenggaraan program pelatihan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan terpelatihan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal di Wilayah I	Jumlah perusahaan yang diberikan penggunaan fasilitas penanaman modal dan terpelatihan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal di Wilayah I	Dilaksanakan	40 perusahaan	45 perusahaan	50 perusahaan	55 perusahaan	60 perusahaan								
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Wilayah II	Mendukung realisasi penanaman modal di Wilayah II INDIKATOR: Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	1. Peningkatan realisasi penanaman modal yang terapan di Wilayah II	Rata realisasi penanaman modal yang terapan di Wilayah II	Dilaksanakan.	Rp. 125,83 Triliun	Rp. 178,44 Triliun	Rp. 203,64 Triliun	Rp. 237,75 Triliun	Rp. 279,90 Triliun	9,79	10,30	10,80	11,30	11,80	53,99	Direktorat Wilayah II (Daerah)	
		2. Penyelenggaraan pelatihan diseminasi masalah penanaman modal di Wilayah II	Jumlah perusahaan diseminasi masalah penanaman modal di Wilayah II	Dilaksanakan	7 Orang (Perusahaan)	7 perusahaan	7 perusahaan	7 perusahaan	7 perusahaan								
		3. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Wilayah II	Jumlah aparaturnya daerah dan penanam modal yang menerima bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Wilayah II	Dilaksanakan	433 orang	560 orang	580 orang	600 orang	620 orang								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		4. Penyelenggaraan workshop LKPM secara online bagi aparaturnya daerah dan penanam modal di Wilayah II	Jumlah peserta workshop LKPM secara online bagi aparaturnya daerah dan penanam modal di Wilayah II	Dilaksanakan.	100 orang	75 orang	110 orang	245 orang	280 orang								
		5. Pelaksanaan penggunaan kewenangan perusahaan penanaman modal	Terpilihkannya penggunaan kewenangan perusahaan penanaman modal	Dilaksanakan	83 media	83 media	83 media	83 media	83 media								
		6. Penyelenggaraan pelatihan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan terpelatihan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal di Wilayah II	Jumlah perusahaan yang diberikan penggunaan fasilitas penanaman modal dan terpelatihan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal di Wilayah II	Dilaksanakan	40 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	63 perusahaan	70 perusahaan								
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Wilayah III	Mendukung realisasi penanaman modal di Wilayah III INDIKATOR: Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi	1. Peningkatan realisasi penanaman modal yang terapan di Wilayah III	Rata realisasi penanaman modal yang terapan di Wilayah III	Dilaksanakan	Rp. 181,85 triliun	Rp. 208,18 triliun	Rp. 247,58 triliun	Rp. 277,37 triliun	Rp. 326,25 triliun	8,95	9,40	9,90	10,30	10,80	49,35	Direktorat Wilayah III (Daerah)	
		2. Penyelenggaraan pelatihan diseminasi masalah penanaman modal di Wilayah III	Jumlah perusahaan diseminasi masalah penanaman modal di Wilayah III	Dilaksanakan	12 Orang (12 Perusahaan)	12 perusahaan	12 perusahaan	12 perusahaan	12 perusahaan								
		3. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Wilayah III	Jumlah aparaturnya daerah dan penanam modal yang menerima bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Wilayah III	Dilaksanakan	433 orang	500 orang	530 orang	560 orang	590 orang								

PROGRAM / KEGIATAN	SARANAN DAN INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALAKUTKAN / TIDAK DIKALAKUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Pengembangan polikultur perikanan modal di Wilayah IV	Mendorong realisasi penanaman modal di Wilayah IV	4. Pengembangan usaha/ship LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah II	Jumlah peserta workshop LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah II	Baca	600 orang	600 orang	600 orang	600 orang	600 orang								
		5. Pengembangan perikanan terdistribusi perikanan fasilitas penanaman modal dan terdistribusi dalam pelaksanaan ketertarikan perikanan penanaman modal di Wilayah II	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan terhadap perikanan fasilitas penanaman modal dan terdistribusi dalam pelaksanaan ketertarikan perikanan penanaman modal di Wilayah II	Dilaksanakan	120 perusahaan	48 perusahaan	56 perusahaan	64 perusahaan	72 perusahaan								
		1. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Rilis realisasi penanaman modal yang terdistribusi di Wilayah IV	Dilaksanakan	Rp 303,98 triliun	Rp 118,96 triliun	Rp 155,76 triliun	Rp 128,20 triliun	Rp 156,20 triliun	30,39	31,96	34,16	39,60	41,20	181,19	Direktorat Wilayah IV (Induk)	
		2. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan								
Pengembangan polikultur perikanan modal di Wilayah IV	Meningkatkan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	3. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	460 orang	450 orang	600 orang	550 orang	600 orang								
		4. Pengembangan usaha/ship LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Jumlah peserta workshop LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Baca	150 orang	200 orang	240 orang	260 orang	320 orang								
		5. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	1428 proyek di 32 Provinsi	1428 proyek di 32 Provinsi	1904 proyek di 32 Provinsi	1904 proyek di 32 Provinsi	1904 proyek di 32 Provinsi								
		6. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah proyek yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	361 FISP	361 FISP	361 FISP	361 FISP	361 FISP	0,00	15,00	0,00	18,00	0,00	33,00	Direktorat Wilayah IV (Induk)	
Pengembangan polikultur perikanan modal di Wilayah IV	Meningkatkan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	1. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Rilis realisasi penanaman modal yang terdistribusi di Wilayah IV	Dilaksanakan	Rp 303,98 triliun	Rp 118,96 triliun	Rp 155,76 triliun	Rp 128,20 triliun	Rp 156,20 triliun	30,39	31,96	34,16	39,60	41,20	181,19	Direktorat Wilayah IV (Induk)	
		2. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan								
		3. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	460 orang	450 orang	600 orang	550 orang	600 orang								
		4. Pengembangan usaha/ship LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Jumlah peserta workshop LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Baca	150 orang	200 orang	240 orang	260 orang	320 orang								

PROGRAM / KEGIATAN	SARANAN DAN INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALAKUTKAN / TIDAK DIKALAKUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Pengembangan polikultur perikanan modal di Wilayah IV	Meningkatkan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	5. Pengembangan usaha/ship LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Jumlah peserta workshop LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Baca	600 orang	600 orang	600 orang	600 orang	600 orang								
		6. Pengembangan perikanan terdistribusi perikanan fasilitas penanaman modal dan terdistribusi dalam pelaksanaan ketertarikan perikanan penanaman modal di Wilayah II	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan terhadap perikanan fasilitas penanaman modal dan terdistribusi dalam pelaksanaan ketertarikan perikanan penanaman modal di Wilayah II	Dilaksanakan	120 perusahaan	48 perusahaan	56 perusahaan	64 perusahaan	72 perusahaan								
		1. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Rilis realisasi penanaman modal yang terdistribusi di Wilayah IV	Dilaksanakan	Rp 303,98 triliun	Rp 118,96 triliun	Rp 155,76 triliun	Rp 128,20 triliun	Rp 156,20 triliun	30,39	31,96	34,16	39,60	41,20	181,19	Direktorat Wilayah IV (Induk)	
		2. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan								
Pengembangan polikultur perikanan modal di Wilayah IV	Meningkatkan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	3. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	460 orang	450 orang	600 orang	550 orang	600 orang								
		4. Pengembangan usaha/ship LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Jumlah peserta workshop LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Baca	150 orang	200 orang	240 orang	260 orang	320 orang								
		5. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	1428 proyek di 32 Provinsi	1428 proyek di 32 Provinsi	1904 proyek di 32 Provinsi	1904 proyek di 32 Provinsi	1904 proyek di 32 Provinsi								
		6. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah proyek yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	361 FISP	361 FISP	361 FISP	361 FISP	361 FISP	0,00	15,00	0,00	18,00	0,00	33,00	Direktorat Wilayah IV (Induk)	
Pengembangan polikultur perikanan modal di Wilayah IV	Meningkatkan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	1. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Rilis realisasi penanaman modal yang terdistribusi di Wilayah IV	Dilaksanakan	Rp 303,98 triliun	Rp 118,96 triliun	Rp 155,76 triliun	Rp 128,20 triliun	Rp 156,20 triliun	30,39	31,96	34,16	39,60	41,20	181,19	Direktorat Wilayah IV (Induk)	
		2. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan								
		3. Pengembangan fasilitas perikanan modal di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang dilakukan perikanan fasilitas penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan	460 orang	450 orang	600 orang	550 orang	600 orang								
		4. Pengembangan usaha/ship LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Jumlah peserta workshop LRTM secara online bagi aparat di daerah dan penanam modal di Wilayah IV	Baca	150 orang	200 orang	240 orang	260 orang	320 orang								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALUJUTKAN / TIDAK DIKALUJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	INDIKATOR: Survei kepuasan stakeholder mengenai hasil kajian	2. Penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan Rencana Usaha Pemenuhan Modal (RUPM)	Terwujudnya dokumen evaluasi pelaksanaan Rencana Usaha Pemenuhan Modal (RUPM)	Tidak Dilaksanakan	1 dokumen	-	-	-	-								
		3. Penuntaihan peta peluang investasi (termasuk investasi mandiri dan penyusunan profil proyek strategis sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya)	Jumlah kajian peta peluang investasi sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Baru	-	3 laporan kajian	3 laporan kajian	3 laporan kajian	3 laporan kajian								
		4. Pelaksanaan fasilitasi penanaman modal pada sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Jumlah fasilitasi penanaman modal pada sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Dilaksanakan	10 penanaman modal	10 penanaman modal	10 penanaman modal	10 penanaman modal	10 penanaman modal								
		5. Pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan terkait sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya bidang penanaman modal	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan terkait sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya bidang penanaman modal	Baru	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		6. Penyelenggaraan policy dialogue untuk sektor agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Terwujudnya policy dialogue untuk sektor agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Baru	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DIKALUJUTKAN / TIDAK DIKALUJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Peningkatan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur	INDIKATOR: Survei kepuasan stakeholder mengenai hasil kajian	7. Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaksanaan Rencana Strategis RUPM 2015-2019 dan penyusunan rencana aksi/tema Rencana IKTM Tahun 2020-2024	Terwujudnya dokumen evaluasi dan rencana aksi/tema Rencana	Dilaksanakan	-	-	-	1 laporan evaluasi Rencana Strategis 2015-2019	1 laporan evaluasi Rencana Strategis 2020-2024								
		1. Pelaksanaan kajian pemetaan dan penyusunan pengembangan penanaman modal pada sektor industri manufaktur (pemerintah)	Jumlah kajian pemetaan pengembangan penanaman modal pada sektor industri manufaktur	Tidak Dilaksanakan	3 kajian	-	-	-	-	7,00	7,40	7,70	8,10	8,15	36,35	Direktorat Peningkatan Industri Manufaktur (Peningkatan)	
		2. Penuntaihan peta peluang investasi (termasuk investasi mandiri dan penyusunan profil proyek strategis sektor manufaktur)	Jumlah kajian peta peluang investasi sektor manufaktur	Baru	-	3 laporan kajian	3 laporan kajian	3 laporan kajian	3 laporan kajian								
		3. Pelaksanaan fasilitasi penanaman modal pada sektor industri manufaktur	Jumlah fasilitasi penanaman modal pada sektor industri manufaktur	Dilaksanakan	1 laporan (10 penanaman modal)	10 penanaman modal	10 penanaman modal	10 penanaman modal	10 penanaman modal								
		4. Pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan terkait sektor industri manufaktur	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan terkait sektor industri manufaktur	Baru	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		5. Penyelenggaraan policy dialogue untuk sektor manufaktur	Terwujudnya policy dialogue untuk sektor manufaktur	Baru	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
Peningkatan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur	INDIKATOR: Survei kepuasan stakeholder mengenai hasil kajian	6. Penyelenggaraan sosialisasi RUPM	Jumlah penyerta sosialisasi yang memahami RUPM	Dilaksanakan	5 kali kegiatan di daerah (250 orang)	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang								

PROGRAM / KEGIATAN	SARASAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KEY.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan INDIKATOR: Survei kepuasan stakeholder mengenai hasil kajian	1. Pelaksanaan kajian perencanaan pengembangan penanaman modal pada sektor jasa dan kawasan (penetapan potensi)	Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal pada sektor jasa dan kawasan	Tidak Dilaksanakan	6 kajian	-	-	-	-	5.00	5.30	5.50	5.30	6.00	27.60	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (Perencanaan)	
		2. Penastakhiran peta peluang investasi (termasuk identifikasi dan pengumpulan profil proyek, strategi sektor jasa dan kawasan)	Jumlah kajian peta peluang investasi sektor jasa dan kawasan	Baru	-	3 laporan kajian	3 laporan kajian	3 laporan kajian	3 laporan kajian								
		3. Pelaksanaan fasilitasi penanaman modal pada sektor jasa dan kawasan	Jumlah fasilitasi penanaman modal pada sektor jasa dan kawasan	Dibanjutkan	1 laporan (10 program modal)	10 program modal	10 program modal	10 program modal	10 program modal								
		4. Pelaksanaan kajian, koordinasi, pendampingan, teknis sektor jasa dan kawasan	Jumlah kajian, koordinasi, pendampingan, teknis sektor jasa dan kawasan	Baru	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		5. Penyelenggaraan policy dialog untuk sektor jasa dan kawasan	Penyelenggaraan policy dialog untuk sektor jasa dan kawasan	Baru	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
Pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Meningkatnya pelayanan modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) INDIKATOR: Jumlah asistansi investasi di KEK	1. Penyelenggaraan fasilitasi penanaman modal di KEK	Jumlah investasi yang berhasil masuk KEK	Tidak Dilaksanakan	5 investasi	-	-	-	-	1.50	1.60	1.70	1.70	1.80	8.30	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (Perencanaan)	
		2. Penyelenggaraan koordinasi/fasilitasi penyelesaian masalah strategis di KEK	Jumlah laporan penyelesaian masalah strategis di KEK	Dibanjutkan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		3. Penyelenggaraan sosialisasi tata cara pembentukan dan pelaksanaan investasi di KEK	Jumlah peserta sosialisasi yang menghadiri, tata cara pelaksanaan, dan melakukan investasi di KEK	Dibandingkan	5 kegiatan (diikuti 4 kegiatan)	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan								

PROGRAM / KEGIATAN	SARASAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KEY.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Fasilitasi percepatan investasi KIRJAMINA Pemerintah Swasta	Informasi potensi investasi dan fasilitas proyek strategis nasional di bidang infrastruktur INDIKATOR: - Percepatan proses pengajuan proyek yang akan diberikan - Jumlah minat investasi yang tercatat	1. Pengawasan proyek KPS infrastruktur yang akan diberikan	Jumlah proyek KPS infrastruktur yang akan diberikan	Tidak Dilaksanakan	3 proyek	-	-	-	-	12.02	12.60	13.20	13.30	14.58	66.20	Direktorat Perencanaan Infrastruktur (Perencanaan)	
		2. Penastakhiran peta peluang investasi proyek-proyek infrastruktur EPS	Terdapatnya peta peluang investasi proyek-proyek infrastruktur EPS	Dibandingkan dengan pengembangan	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		3. Penyediaan proyek-proyek infrastruktur yang akan diberikan kepada investor	Jumlah "menu ind" proyek infrastruktur yang akan diberikan kepada investor	Pengembangan kegiatan sebelumnya	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek								
		4. Penyelenggaraan penanaman modal infrastruktur terintegrasi	Jumlah kegiatan penanaman modal infrastruktur terintegrasi	Pengembangan kegiatan sebelumnya	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan								
		5. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPS melalui fungsi clearing house	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPS	Pengembangan kegiatan sebelumnya	10 proyek	10 proyek	10 proyek	10 proyek	10 proyek								
Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di BKPM	Meningkatnya pelayanan penanaman modal di BKPM INDIKATOR: Survei Indeks Kepuasan Regulasi / Masyarakat (IKRM) / TSP Nasional (IKRM)	1. Penyusunan timas proses penanaman modal di BKPM	Terdapatnya penyelenggaraan timas proses penanaman modal di BKPM	Dibandingkan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	5.50	Direktorat Pengawasan Penanaman Modal (PSPM)	Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal (PSPM)
		2. Identifikasi regulasi / peraturan yang membebani harmonisasi	Terdapatnya identifikasi regulasi / peraturan yang membebani harmonisasi	Pengembangan kegiatan sebelumnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket								
Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur	1. Pelaksanaan kajian perencanaan pengembangan penanaman modal pada sektor infrastruktur (penetapan potensi)	Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal pada sektor infrastruktur	Tidak Dilaksanakan	3 kajian	-	-	-	-	2.35	2.30	2.60	2.70	2.84	13.00	Direktorat Perencanaan Infrastruktur (Perencanaan)	

PROGRAM / KEGIATAN	SARANAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	INDIKATOR: Sesi-sesi pertemuan stakeholder mengenai hasil kajian	2. Pelaksanaan analisis/pengembangan proposal-proyek investasi strategis	Terwujudnya analisis/pengembangan proyek-proyek investasi strategis	Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan								
		3. Pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan terkait sektor infrastruktur	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan terkait sektor infrastruktur	Baru	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan							
		4. Penyelenggaraan policy dialogue untuk sektor infrastruktur	Terwujudnya policy dialogue untuk sektor infrastruktur	Baru	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan							
		TOTAL ANGGARAN										689.99	637.99	661.21	682.82	688.30	3,350.00

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN
2015-2019

MATRIK PROYEKSI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

Sektor	Realisasi Penanaman Modal					Total Realisasi 2010-2014	Rata-Rata Realisasi 2010-2014	Proyeksi Penanaman Modal					Total Proyeksi 2015-2019	Rata-Rata Proyeksi 2015-2019
	2010	2011	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019		
Tanaman Pangan dan Perkebunan	15.753	20.370	24.048	21.794	36.520	118.487	23.697	35.466	39.187	42.926	46.208	48.203	211.990	42.398
Pertambangan	1.456	437	276	466	982	3.617	723	1.411	2.334	3.871	6.381	10.306	24.303	4.861
Kelistrikan	531	106	387	270	583	1.877	375	368	629	691	746	780	3.413	683
Perikanan	163	90	276	100	400	1.030	206	707	1.437	2.925	3.910	11.687	22.668	4.533
Pertambangan	23.146	39.472	48.780	64.314	53.084	228.696	45.739	50.210	53.980	57.481	60.092	60.822	282.584	56.517
Total Primer	41.063	60.478	73.767	86.843	91.569	383.706	70.741	88.362	97.566	107.894	119.337	131.798	544.956	108.991
Industri Makanan	24.081	17.883	27.213	35.127	53.214	158.017	31.603	73.914	86.923	102.308	119.905	142.207	525.257	105.051
Industri Tekstil	1.808	5.475	8.709	9.534	5.057	31.483	6.297	7.691	8.732	9.925	11.424	12.066	50.759	10.152
Industri Kulit, Barang dan Kulit dan Sepatu	1.202	2.309	1.507	995	2.352	8.364	1.673	3.069	3.514	3.915	4.580	4.038	20.016	4.003
Industri Kayu	844	975	744	766	1.262	4.591	918	1.330	1.388	1.481	1.558	1.624	7.380	1.476
Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Berwujud	1.326	11.614	19.321	17.843	11.533	61.836	12.371	15.597	17.219	19.405	22.006	24.294	98.320	19.704
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	10.449	15.918	29.998	38.521	38.089	132.974	26.595	50.658	59.370	67.743	77.975	90.139	345.786	69.157
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.263	5.625	8.798	7.380	8.020	31.385	6.277	9.222	10.301	12.022	14.210	14.522	60.278	12.056
Industri Mineral Non Logam	2.523	8.675	12.043	12.941	21.720	57.901	11.580	29.408	10.301	41.469	49.514	56.990	212.493	42.499
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	6.167	22.742	29.299	38.990	32.270	129.469	25.894	44.856	35.980	65.944	84.079	102.408	353.267	70.653
Industri Instrumen Elektronik, Presisi, Optik dan Jam	-	377	31	260	182	830	170	211	237	270	342	384	1.445	289

Sektor	Realisasi Penanaman Modal					Total Realisasi 2010-2014	Rata-Rata Realisasi 2010-2014	Proyeksi Penanaman Modal					Total Proyek 2015-2019	Rata-Rata Proyek 2015-2019
	2010	2011	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019		
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	3.954	7.460	17.225	37.450	22.533	88.622	17.724	29.518	32.388	36.173	43.333	64.006	205.621	41.124
Industri Lainnya	253	587	933	1.206	1.742	4.723	945	2.003	2.328	2.502	2.980	3.273	12.985	2.597
Total Sekunder	54.872	99.641	155.819	201.012	198.893	710.236	142.047	267.478	313.513	363.160	421.907	517.752	1.893.810	378.762
Listrik, Gas dan Air	18.130	25.919	17.428	46.954	50.030	158.460	31.692	47.411	53.242	60.342	70.333	83.022	314.350	62.870
Konstruksi	5.687	3.783	6.743	10.981	27.468	54.660	10.932	26.020	29.126	32.782	37.782	43.907	169.617	33.923
Perdagangan dan Reparasi	8.676	7.763	5.383	7.924	9.863	39.608	7.922	9.097	10.036	11.132	12.631	14.454	57.350	11.470
Hotel dan Restoran	3.552	3.573	7.028	5.813	7.368	27.326	5.447	7.265	8.499	10.067	12.277	15.206	53.114	10.663
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	51.713	42.320	33.886	26.854	47.441	202.214	40.443	45.956	52.705	60.845	72.055	86.267	317.829	63.566
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	9.842	2.531	3.674	8.548	25.779	50.364	10.073	23.715	25.777	28.133	31.485	35.356	144.646	28.929
Jasa Lainnya	14.998	6.278	8.637	3.685	4.738	38.336	7.667	4.156	4.294	4.445	4.706	5.012	22.613	4.523
Total Tersier	112.897	91.166	83.679	110.788	172.688	570.878	114.176	163.620	183.680	207.746	241.268	283.404	1.079.720	215.944
Total Sektor	208.521	251.271	313.264	398.613	468.151	1.634.820	326.964	519.600	594.900	678.800	792.500	933.000	3.518.800	703.760

V.2 Proyeksi Penanaman Modal Berdasarkan Wilayah (Miliar Rupiah)

Wilayah	Realisasi Penanaman Modal					Total Realisasi 2010-2014	Rata-Rata Realisasi 2010-2014	Proyeksi Penanaman Modal					Total Proyek 2015-2019	Rata-Rata Proyek 2015-2019
	2010	2011	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019		
Aceh	83	465	1.611	4.519	5.451	12.125	2.425	3.379	6.433	7.338	9.108	10.806	39.284	7.857
Sumatera Utara	2.913	8.436	8.358	13.467	10.087	42.682	8.536	14.275	18.951	23.524	32.052	49.491	109.898	21.979
Sumatera Barat	146	1.233	1.560	1.545	1.665	6.149	1.230	1.949	2.559	3.282	4.074	5.426	17.290	3.458
Riau	1.827	9.374	15.826	17.185	22.382	66.593	13.319	22.146	24.673	26.899	33.393	37.776	144.886	28.977
Jambi	563	2.310	2.853	3.122	1.466	10.313	2.063	2.727	3.779	5.062	6.284	8.671	26.524	5.305
Sumatera Selatan	3.438	6.085	10.009	8.002	18.548	46.081	9.216	18.495	20.789	22.898	28.424	32.545	121.151	24.630
Bengkulu	237	388	527	519	325	1.496	299	2.141	3.548	6.292	7.810	12.152	32.323	6.465
Langrang	552	1.540	1.333	1.769	5.125	10.349	2.070	5.154	5.810	6.421	7.970	9.160	34.514	6.903
Kepulauan Bangka Belitung	201	1.829	1.066	1.670	1.739	6.505	1.301	1.946	2.456	3.045	3.779	4.884	16.110	3.222
Kepulauan Riau	1.678	3.348	4.877	3.388	4.232	17.524	3.505	4.476	5.357	6.312	7.835	9.646	33.627	6.725
Total Sumatera	11.039	35.023	47.820	54.986	70.951	219.819	43.964	75.200	90.200	105.500	132.200	163.100	567.200	113.440
DKI Jakarta	63.240	32.673	45.510	20.198	66.175	257.795	51.559	57.211	39.292	60.304	64.142	65.198	206.206	61.241
Jawa Barat	31.233	45.748	49.250	76.507	89.713	292.482	58.496	91.969	97.080	100.362	106.749	110.453	306.616	101.323
Jawa Tengah	1.335	4.313	7.971	16.551	18.598	49.167	9.833	27.337	29.142	30.431	32.368	33.836	153.114	30.623
Daerah Istimewa Yogyakarta	55	83	1.098	564	1.425	3.166	633	2.349	2.590	2.795	2.973	3.209	13.916	2.783
Jawa Timur	24.221	21.496	42.209	67.028	57.421	212.375	42.475	61.967	69.133	75.430	80.231	87.504	374.265	74.853
Banten	19.937	23.844	29.564	39.011	30.009	142.364	28.473	41.738	45.264	48.078	51.137	54.367	240.584	48.117
Total Jawa	140.021	148.097	175.632	230.259	263.341	957.350	191.470	282.600	302.600	317.400	337.600	354.500	1.594.700	318.940
Bali	3.852	4.652	7.446	6.718	4.835	36.494	5.299	7.061	9.675	12.934	17.516	24.539	71.726	14.345
Nusa Tenggara Barat	3.817	4.228	5.768	6.004	6.131	25.947	5.189	8.379	10.207	12.086	16.367	20.208	67.247	13.449

Wilayah	Realisasi Penanaman Modal					Total Realisasi 2010-2014	Rata-Rata Realisasi 2010-2014	Proyeksi Penanaman Modal					Total Proyek 2015-2019	Rata-Rata Proyek 2015-2019
	2010	2011	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019		
Nusa Tenggara Timur	33	50	93	111	170	460	92	3.560	5.018	6.880	9.317	13.353	38.128	7.626
Total Bali-Nusa Tenggara	6.704	8.931	13.307	12.833	11.126	52.901	10.580	19.000	24.900	31.900	43.200	58.100	177.100	35.420
Kalimantan Barat	2.736	3.910	6.389	8.686	14.809	38.521	7.704	12.849	16.120	20.775	24.416	31.327	105.487	21.097
Kalimantan Tengah	8.493	8.269	9.252	6.406	11.253	43.674	8.735	14.107	17.195	21.572	25.353	31.728	109.950	21.990
Kalimantan Selatan	3.859	4.567	5.960	10.772	8.009	33.168	6.634	13.988	17.280	21.954	25.801	32.674	111.697	22.339
Kalimantan Timur	17.843	10.808	23.088	28.316	35.674	115.729	23.146	28.762	32.923	38.743	45.532	53.366	199.325	39.865
Kalimantan Utara	-	1.183	928	814	1.845	4.770	954	4.794	5.283	5.955	6.990	7.810	30.841	6.168
Total Kalimantan	32.922	30.737	45.618	54.995	71.591	235.862	47.172	74.506	88.800	109.000	128.100	156.500	567.300	111.460
Sulawesi Utara	2.164	2.513	1.098	687	1.121	7.384	1.477	2.510	4.807	5.618	7.062	12.222	32.119	6.421
Sulawesi Tengah	1.416	5.953	7.862	8.659	16.201	40.091	8.018	9.875	13.374	15.101	21.400	27.080	85.829	17.166
Sulawesi Selatan	7.242	4.792	7.562	5.268	7.952	32.816	6.563	10.557	15.244	21.569	30.567	45.827	133.164	24.633
Sulawesi Tenggara	147	212	1.329	2.080	2.993	6.661	1.332	2.307	3.541	5.277	7.478	11.574	30.177	6.035
Gorontalo	24	125	483	350	90	1.051	210	1.599	1.887	2.131	3.020	3.442	12.078	2.416
Sulawesi Barat	1.181	269	231	709	876	3.366	653	853	1.240	1.604	3.273	3.954	9.132	1.826
Total Sulawesi	12.173	13.665	18.464	17.734	29.233	91.269	18.254	27.800	38.100	51.300	72.700	102.600	292.500	58.500
Maluku	36	105	80	594	138	854	171	2.081	2.673	3.720	4.469	5.122	18.065	3.613
Maluku Utara	2.244	1.182	1.133	3.651	1.209	9.418	1.884	5.219	6.827	9.680	11.631	13.578	46.935	9.387
Total Maluku	2.270	1.287	1.213	4.155	1.347	10.272	2.054	7.300	9.500	13.400	16.100	18.700	65.000	13.000
Papua Barat	208	345	334	815	1.748	3.450	690	10.153	13.648	17.996	22.736	30.968	95.441	19.086
Papua	3.184	13.186	10.877	32.836	15.814	65.897	12.779	23.047	27.152	31.394	39.864	48.102	169.559	33.912
Total Papua	3.392	13.531	11.211	23.651	15.562	67.347	13.469	33.200	40.800	49.300	62.600	79.100	265.000	53.000
Total Wilayah	208.521	251.271	313.264	398.613	468.151	1.634.820	326.964	519.600	594.900	678.800	792.500	933.000	3.518.800	703.760

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

THOMAS TRIKASIH LEMBONG